



KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN:

PERSPEKTIF, TREND DAN KEBIJAKAN

Doni Sahat Tua Manalu | Tazkiyah Ainul Qolbi | Tatang Rois | Syarah Siti Supriyanti
Binti Nur Asiyah | Arif Rahman Hakim | Sri Subanti | Etty Puji Lestari
Inaki Maulida Hakim | Junaidi | E. Ahmad Soleh | Elva Dona
Retno Febriyastuti Widyawati | Made Ika Prastyadewi | Putu Yusi Paramandari
Prasetio Ariwibowo | Ifah Masrifah | Fauzie Senoaji | Udin Saripudin
Heffi Christya Rahayu | Tri Kurniawati Retnaningsih
Ahmad Albar Tanjung | Dewi Aprida | Ida Ariyani | Susianti | Dudi Septiadi
Moh. Zaki Kurniawan | Miftahul Jannah

Editor: Etty Puji Lestari



**KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN:
Perspektif, Trend dan Kebijakan**

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN: Perspektif, Trend dan Kebijakan

Doni Sahat Tua Manalu
Tazkiyah Ainul Qolbi
Tatang Rois
Syarah Siti Supriyanti
Binti Nur Asiyah
Arif Rahman Hakim
Sri Subanti
Etty Puji Lestari
Inaki Maulida Hakim
Junaidi
E. Ahmad Soleh
Elva Dona
Retno Febriyastuti Widyawati
Made Ika Prastyadewi
Putu Yusi Paramandari
Prasetio Ariwibowo
Ifah Masrifah
Fauzie Senoaji
Udin Saripudin
Heffi Christya Rahayu
Tri Kurniawati Retnaningsih
Ahmad Albar Tanjung
Dewi Aprida
Ida Ariyani
Susianti
Dudi Septiadi
Moh. Zaki Kurniawan
Miftahul Jannah

Editor :
Etty Puji Lestari



**KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN:
PERSPEKTIF, TREND DAN KEBIJAKAN**

Penulis : Doni Sahat Tua Manalu, Tazkiyah Ainul Qolbi, Tatang Rois,
Syarah Siti Supriyanti, Binti Nur Asiyah, [dan 23 lainnya]
Editor : Etty Puji Lestari
Desain Cover : Ali Hasan Zein
Sumber : Me dia & Bagus upc (www.shutterstock.com)
Tata Letak : G.D. Ayu
Proofreader : Mira Muarifah

Ukuran:
x, 356 hlm., Uk.: 15.5x23 cm

ISBN:
978-623-02-9236-1

Cetakan Pertama:
September 2024

Hak Cipta 2024 pada Penulis
Copyright © 2024 by Deepublish
All Right Reserved

DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
Jl. Rajawali, Gg. Elang 6, No. 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl. Kaliurang Km. 9,3 – Yogyakarta 55581
Telp./Faks : (0274) 4533427
Website : www.penerbitdeepublish.com
www.deepublishstore.com
E-mail : cs@deepublish.co.id

Hak cipta dilindungi undang-undang.

*Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.*

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

KATA PENGANTAR PENERBIT

Segala puji kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan segala anugerah dan karunia-Nya. Dalam rangka mencerdaskan dan memuliakan umat manusia dengan penyediaan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan industri *processing* berbasis sumber daya alam (SDA) Indonesia, Penerbit Deepublish dengan bangga menerbitkan buku dengan judul ***Kemiskinan dan Pemberdayaan: Perspektif, Trend dan Kebijakan.***

Buku ini tersusun atas tiga tema utama, dengan pokok pembahasan pada Tema 1 meliputi pemberdayaan masyarakat agribisnis dalam rangka pengentasan kemiskinan, ekonomi sirkular sebagai solusi pemberdayaan dan peningkatan perekonomian masyarakat, pemberdayaan masyarakat melalui potensi desa, perencanaan kolaboratif antarsektor melalui pemberdayaan masyarakat desa, serta BUMDesa dan pengentasan kemiskinan desa. Tema 2 meliputi *amenities* dan aspek ekonomi (pengaruhnya pada migrasi), kontribusi pertumbuhan bank dan jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi serta tingkat kemiskinan di Indonesia, *inclusive growth* (diagnosis penurunan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi), individualitas perempuan terhadap akses keuangan, serta remitansi dan efeknya terhadap pengurangan kemiskinan. Terakhir, Tema 3 meliputi potret ketimpangan rumah tangga, tata kelola pertumbuhan ekonomi (otonomi) daerah melalui sektor UMKM, manajemen keuangan UMKM dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, fenomena *ghost kitchen* di era pandemi sebagai upaya pemberdayaan UMKM kuliner, peran BUMDes dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, implementasi kebijakan kemiskinan struktural dan ketidakadilan gender dalam feminisasi kemiskinan, kebijakan moneter dan fiskal untuk mengurangi kemiskinan, strategi implementasi kebijakan pembangunan kawasan kaki gunung berbasis pemberdayaan masyarakat, peran sektor pertanian sebagai lokomotif pemulihan ekonomi nasional

pascapandemi Covid-19, serta strategi desa wisata eduwisata garam dalam perkembangan ekonomi masyarakat.

Terima kasih dan penghargaan terbesar kami sampaikan kepada tim penulis yang telah memberikan kepercayaan, perhatian, dan kontribusi penuh demi kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca, mampu berkontribusi dalam mencerdaskan dan memuliakan umat manusia, serta mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah air.

Hormat Kami,

Penerbit Deepublish

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENERBIT	v
DAFTAR ISI	vii

TEMA I

PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan.....	3
<i>Doni Sahat Tua Manalu</i>	
Ekonomi Sirkular sebagai Solusi Pemberdayaan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat	23
<i>Tazkiyah Ainul Qolbi</i>	
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Potensi Desa	38
<i>Tatang Rois</i>	
Perencanaan Kolaboratif Antarsektor Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa	55
<i>Syarah Siti Supriyanti</i>	
Bumdesa dan Pengentasan Kemiskinan Desa	72
<i>Binti Nur Asiyah</i>	

TEMA II

PEMBANGUNAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA

<i>Amenities dan Aspek Ekonomi: Pengaruhnya pada Migrasi</i>	91
<i>Arif Rahman Hakim, Sri Subanti, Ety Puji Lestari, & Inaki Maulida Hakim</i>	

Kontribusi Pertumbuhan Bank dan Jasa Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Tingkat Kemiskinan di Indonesia.....	117
<i>Junaidi</i>	
<i>Inclusive Growth</i> : Diagnosis Penurunan Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi	139
<i>E. Ahmad Soleh</i>	
Individualitas Perempuan terhadap Akses Keuangan.....	161
<i>Elva Dona</i>	
Remitansi dan Efeknya terhadap Pengurangan Kemiskinan	168
<i>Retno Febriyastuti Widyawati</i>	

TEMA III PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Potret Ketimpangan Rumah Tangga.....	182
<i>Made Ika Prastyadewi, Putu Yusi Paramandari</i>	
Tata Kelola Pertumbuhan Ekonomi (Otonomi) Daerah Melalui Sektor Umkm.....	204
<i>Prasetio Ariwibowo</i>	
Manajemen Keuangan UMKM dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	222
<i>Ifah Masrifah</i>	
Fenomena <i>Ghost Kitchen</i> di Era Pandemi sebagai Upaya Pemberdayaan UMKM Kuliner.....	233
<i>Fauzie Senoaji</i>	
Peran BUMDES dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	243
<i>Udin Saripudin</i>	
Implementasi Kebijakan Kemiskinan Struktural dan Ketidakadilan Gender dalam Feminisasi Kemiskinan.....	258
<i>Heffi Christya Rahayu, Etty Puji Lestari, Tri Kurniawati Retnaningsih</i>	

kebijakan Moneter dan Fiskal untuk Mengurangi Kemiskinan.....	276
<i>Ahmad Albar Tanjung</i>	
Strategi Implementasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Kaki Gunung Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	292
<i>Dewi Aprida, Ida Ariyani, Susianti, Retno Febriyastuti Widyawati</i>	
Peran Sektor Pertanian sebagai Lokomotif Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19.....	306
<i>Dudi Septiadi</i>	
Strategi Desa Wisata Eduwisata Garam dalam Perkembangan Ekonomi Masyarakat.....	327
<i>Moh. Zaki Kurniawan, Miftahul Jannah</i>	

TEMA I
PEMBANGUNAN EKONOMI
BERBASIS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT





Pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan yang semakin diperbincangkan dalam konteks pembangunan global. Konsep ini menekankan pentingnya melibatkan serta memberdayakan masyarakat lokal dalam proses pembangunan ekonomi mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan memberikan akses atau sumber daya, tetapi juga menyangkut peningkatan kapasitas, pengambilan keputusan yang berkelanjutan, dan partisipasi aktif dalam perencanaan serta implementasi kebijakan ekonomi.

Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas tantangan ekonomi saat ini, pendekatan ini menjadi semakin penting. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya menjadi tujuan akhir, tetapi juga merupakan strategi yang efektif untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan, potensi ekonomi lokal dapat dimaksimalkan, kesenjangan sosial dapat dikurangi, dan ketahanan ekonomi dapat ditingkatkan.

Dalam pendahuluan ini, akan dibahas secara lebih mendalam konsep pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat, signifikansinya dalam konteks pembangunan global, serta tantangan dan peluang yang terkait dengannya. Langkah-langkah praktis dan strategis juga akan diperkenalkan untuk mengimplementasikan pendekatan ini secara efektif dalam konteks pembangunan ekonomi lokal dan nasional. Dengan demikian, pendahuluan ini akan memberikan landasan yang kokoh untuk memahami dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan

Doni Sahat Tua Manalu

1. Pertanian dan Agribisnis

Menurut Saragih (2005) Pertanian dalam arti luas dapat didefinisikan dengan pendekatan sub sistem, di mana agribisnis akan lebih mudah jika dipahami sebagai suatu sistem. Sistem agribisnis bukan hanya kegiatan menghasilkan produk pertanian primer, tetapi menyangkut keseluruhan aktivitas yang terkait mulai dari penyediaan input pertanian sampai dengan pemasaran hasil dan termasuk sub sistem penunjang. Pengertian tersebut berasal dari pencetus pertama dari definisi agribisnis yaitu Davis dan Goldberg (1957) di mana agribisnis dipandang bukan hanya sebagai aktivitas usaha tani/budidaya (*on farm*), tetapi termasuk kegiatan yang di luar usaha tani (*off farm*) yang terkait. Hal yang sama ternyata diungkapkan juga oleh Downey dan Erickson (1989) bahwa agribisnis meliputi kegiatan di luar usaha tani yang berkaitan dengan pengadaan input pertanian, pengolahan hasil dan pemasaran hasil.

Uraian dari definisi di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan agribisnis mencakup keseluruhan kegiatan mulai dari memproduksi dan distribusi input sampai dengan distribusi hasil pertanian. Dalam hal ini istilah *on farm* (usaha tani) sebagai kegiatan yang sering disebut secara umum sebagai pertanian hanya merupakan salah satu bagian dari agribisnis yang seutuhnya. Oleh karena itu, agribisnis sebenarnya mencakup pertanian secara menyeluruh bukan hanya melihat kegiatan menghasilkan produk-produk pertanian di tingkat usaha tani.

2. Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Perkotaan dengan *Urban Farming*

Melihat kondisi masyarakat Indonesia yang pada umumnya masih menggantungkan hidupnya di sektor agribisnis, maka perlu upaya yang serius harus dilakukan revolusi di bidang agribisnis. Termasuk dalam hal pemberdayaan masyarakat agribisnis untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Upaya yang perlu dilakukan salah satunya adalah bagaimana cara menyinergikan antar pihak yang dapat mengembangkan masyarakat agribisnis di Indonesia.

Masyarakat Indonesia pada umumnya tinggal di daerah perkotaan, jika melihat definisi agribisnis maka masyarakat yang tinggal di perkotaan juga dapat diedukasi agar produktif dan berkesinambungan. Fenomena yang saat ini terjadi adalah tersebut dapat dilihat dari semakin lemahnya perekonomian masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), banyak masyarakat yang di PHK dan usaha yang tutup. Pada kondisi ini diharapkan masyarakat dapat beresiliensi agar tetap bertahan dalam menjalankan kehidupannya. Selama masa pandemi Covid-19 terjadi peningkatan pembelian tanaman hias, di sisi lain lahan semakin sempit sehingga masyarakat perlu disadarkan untuk lebih peduli lingkungan melalui pemanfaatan lahan sempit untuk bercocok tanam dengan metode *Urban Farming*, Ahmed (2014) dan Hardilawati (2020).

Selanjutnya, produksi sampah rumah tangga setiap tahun senantiasa mengalami peningkatan. Pengelolaan sampah rumah tangga belum dikelola dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat desa. Pemanfaatan sampah rumah tangga dapat dijadikan produk yang bermanfaat dan mendapatkan nilai ekonomi bagi masyarakat yang mengolahnya. Salah satu pemanfaatan sampah rumah tangga yaitu pupuk. Pembuatan pupuk dengan cara sederhana dapat dilakukan oleh ibu rumah tangga. Bahan yang digunakan cukup berasal dari sampah rumah tangga dan termasuk dalam sampah organik seperti sisa nasi, sayuran, buah dan tulang ikan.

Sampah tersebut biasanya mudah busuk dan menimbulkan aroma yang tidak sedap, sehingga perlu diolah menjadi produk yang bermanfaat agar tidak mencemari lingkungan. Pupuk berbahan baku sampah rumah tangga dapat dijadikan sebagai media tanam dalam membudidayakan

tanaman. Apabila diperhatikan lebih lanjut pengolahan sampah menjadi pupuk organik sebenarnya dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan, pupuk tersebut akan digunakan untuk tanaman yang dapat ditanam pada lahan sempit di sekitar perumahan. Berbagai jenis tanaman yang dapat ditanam pada lahan sempit dengan menggunakan metode *urban farming* seperti cabai, tomat, sayur-sayuran dan berbagai macam tanaman lainnya yang dapat dikonsumsi oleh rumah tangga.

Melalui metode *urban farming* masyarakat yang tinggal di lahan sempit tetap dapat memproduksi tanaman khususnya untuk dikonsumsi sendiri, tidak hanya tanaman, tetapi juga ikan dengan konsep akuakultur yang dapat dilakukan di lahan sempit. Akuakultur adalah metode untuk melakukan pemeliharaan serta penangkaran berbagai jenis makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan yang hidup di perairan dan dapat dilakukan di wilayah perkotaan.

Pertanian perkotaan sering disebut sebagai *urban farming* merupakan secara umum dapat didefinisikan sebagai aktivitas budidaya untuk pemanfaatan ruang atau lahan yang ada di perkotaan. Lahan tersebut termasuk pekarangan, pagar bahkan dinding, lahan tidur, atap suatu bangunan guna menghasilkan produk-produk pertanian. Kata kunci dari pertanian perkotaan menyangkut masalah budidaya tanaman, pengolahan tanaman, pemanfaatan ruang terbuka hijau, mendistribusikan produk dari pertanian perkotaan yang terjadi di dalam perkotaan atau di sekitar wilayah perkotaan (Hampwaye *et al.* 2009). Selanjutnya, di Indonesia belum terlihat seberapa besar kontribusi pertanian perkotaan terhadap produksi pertanian partisipasi masyarakat di dalam *urban farming* namun metode ini semakin berkembang karena mengikuti *trend* yang terjadi di masyarakat.

Konsep *urban farming* ini juga dapat diwujudkan dengan adanya kebijakan dari pemerintah setempat seperti RT, RW, Kepala Desa, Lurah dan sebagainya. Dalam hal ini pemerintah setempat dapat membuat kebijakan agar masing-masing keluarga dapat memilah sampah organik dan non-organik, lalu dibuat tempat pengolahan sampah terpadu. Bagi sampah organik yang dapat olah menjadi pupuk (seperti terdapat pada Gambar 1) dapat digabung dan diproses, bagi sampah anorganik yang dapat di daur ulang dapat dibuat berbagai macam produk daur ulang.



Gambar 1. Pengolahan Pupuk Organik

Selain itu pemerintah setempat juga dapat menghimbau warga untuk menanam jenis tanaman tertentu yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Jika konsep seperti ini dapat dijalankan dengan baik, maka agribisnis di perkotaan juga akan maju. Lahan sempit tidak akan menjadi masalah karena dapat menggunakan pekarangan dengan media tanah dan juga dapat menggunakan media yang berteknologi tinggi seperti *hydroponic* seperti terdapat pada Gambar 2.



Gambar 2. *Urban farming* menggunakan lahan sempit dengan media tanah (a) dan sistem hidroponik

Berdasarkan Gambar 2 dapat kita lihat bahwa pertanian perkotaan sebenarnya dapat dilakukan oleh siapa pun dimulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Hasil panen dari produk agribisnis yang dihasilkan dapat di konsumsi sendiri maupun dijual dalam bentuk komersial baik dipasarkan dengan sistem *online* maupun *offline*. Menurut Sebangyang *et al.* (2022) persepsi masyarakat perkotaan terhadap *urban farming* dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini dikarenakan semakin

sadarnya masyarakat akan pentingnya kesediaan pangan dan ketahanan pangan yang dimulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat sehingga dapat menjadi salah satu alternatif ketahanan pangan.

Berdasarkan data responden di kota Bogor diperoleh bahwa jenis metode *urban farming* yang umum digunakan oleh masyarakat perkotaan adalah *aquaponic*, hidroponik, tabulampot, vertikultur dan *wall gardening*. Sementara responden yang tidak paham terhadap konsep pertanian perkotaan seluruhnya menggunakan lahan pekarangan sebagai media tanam (Tabel 1).

Tabel 1. Pertanian Perkotaan
Berdasarkan Pemahaman terhadap *Urban Farming*

No	Metode	Pemahaman terhadap <i>Urban Farming</i>			
		Ya		Tidak	
		N	%	N	%
1.	Aquaponik	4	4.88	0	0
2.	Hidroponik	5	6.10	0	0
3.	Tabulampot	42	51.22	0	0
4.	Vertikultur	2	2.44	0	0
5.	<i>Wall Gardening</i>	3	3.66	0	0
6.	Di luar Metode Tersebut (di pekarangan)	26	31.71	12	100
	Total	82	100.00	12	100

Pada umumnya pertanian perkotaan bagi responden memiliki motivasi yang berbeda, mulai dari menyalurkan hobi, pemanfaatan waktu luang, memanfaatkan lahan kosong dan ruang terbuka hijau, juga termasuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mengurangi biaya konsumsi harian rumah tangga seperti yang terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Berdasarkan Motivasi
dalam Melaksanakan *Urban Farming*

No.	Motivasi	N	Persen
1.	Hobi Bercocok Tanam	18	19.15
2.	Pemanfaatan waktu Luang	16	17.02
3.	Memanfaatkan Lahan Kosong Pekarangan Rumah	17	18.09
4.	Memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	13	13.83
5.	Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga	10	10.64
6.	Mengurangi Biaya Konsumsi Harian Rumah Tangga	20	21.28
	Total	94	100.00

Berdasarkan Tabel 2 mengindikasikan bahwa pertanian perkotaan juga mengandung aspek ekonomi di mana terdapat sebesar 10 responden (10.64%), melaksanakan pertanian perkotaan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan sebesar 20 responden (21.28%) yang termotivasi untuk mengurangi biaya konsumsi rumah tangga harian.

3. Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis dengan Pendekatan Sistem Agribisnis

Selain tinggal di perkotaan, masyarakat di Indonesia juga sebagian besar tinggal di pedesaan, pada umumnya masyarakat yang tinggal di pedesaan bekerja sebagai petani. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa ekspor Indonesia ditopang oleh dua sektor utama yaitu migas dan non-migas. Pada sektor migas, Indonesia unggul dalam mengekspor gas alam karena secara alami memang memiliki kekayaan alam yang baik. Pada sektor non-migas, Indonesia memiliki berbagai macam komoditas yang menjadi andalan di pasar internasional, khususnya komoditas perkebunan. Komoditas unggulan pada sub sektor perkebunan meliputi kelapa sawit, karet, kakao dan kopi (BPS 2017).

Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai peran penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, karena sebagai salah satu komoditas ekspor andalan penghasil devisa negara. Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) menyatakan bahwa kopi Indonesia telah terkenal di dunia dan dapat diterima di manca negara. Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan dampak positif dari kegiatan perdagangan (AEKI 2017).

Produksi kopi dunia sebagian besar dihasilkan oleh negara Brazil dengan rata-rata produksi selama periode 2011-2015 mencapai 3 212 400 ton atau berkontribusi sebesar 35,51 persen terhadap rata-rata produksi kopi dunia pada periode yang sama. Selanjutnya adalah Vietnam dengan rata-rata produksi 1 758 000 ton atau berkontribusi sebesar 18,44 persen, kemudian Colombia dengan rata-rata produksi sebesar 676.284 ton atau berkontribusi sebesar 7,47 persen dan Indonesia dengan rata-rata produksi mencapai 572 460 ton atau berkontribusi sebesar 6,33 persen, sisanya adalah akumulasi dari negara lainnya dengan total rata-rata produksi

mencapai 3 120 786 ton (32,25 persen). Dari ke empat negara eksportir utama tersebut kontribusi Indonesia adalah yang paling rendah.

Produksi kopi Indonesia sebagian besar di ekspor dari pada dikonsumsi dalam negeri. Pada tahun 1980 volume ekspor kopi Indonesia sebesar 238 677 ton kemudian tahun 2016 volume ekspor meningkat menjadi 412 370 ton. Kopi yang diekspor dalam bentuk biji (*green bean*) sebesar 97,1 persen dan sisanya dalam bentuk olahan (*roasted* dan bubuk) sebanyak 2,9 persen (BPS 2017). Sebagian besar kopi yang diekspor yaitu jenis kopi robusta sebesar 76,7 persen sedangkan jenis kopi arabika sebesar 23,3 persen (Kemenperin 2015).

Data Kementan (2018) menunjukkan bahwa volume ekspor kopi Indonesia pada tahun 1980–2017 berfluktuasi namun cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,39 persen per tahun. Adapun negara tujuan ekspor kopi Indonesia tersebar ke berbagai benua di dunia seperti Eropa, Asia dan Amerika Serikat. Pada tahun 2013 Indonesia mengekspor ke Eropa sebesar 33,9 persen dari total jumlah ekspor Indonesia. Kemudian, 24,3 persen di ekspor ke Asia dan 17,6 persen di ekspor ke Amerika Serikat. Melalui hal ini dapat dilihat bahwa jumlah ekspor kopi Indonesia sangat besar untuk ketiga benua tersebut dengan total sebesar 75,8 persen dari seluruh ekspor kopi Indonesia. Meskipun demikian, pangsa pasar kopi Indonesia belum sebanding dengan besarnya jumlah ekspor kopi Indonesia tersebut. Pada tahun 2003 pangsa pasar kopi Indonesia di Amerika Serikat hanya sebesar 3,8 persen, bahkan di Eropa hanya 1 persen. Jika dibandingkan dengan total ekspor kopi dunia, Indonesia hanya mampu berperan kurang lebih sebesar 6 persen, di mana jumlah tersebut masih sangat rendah (*Trade Map* 2018). Hal ini dikarenakan banyak faktor yang memengaruhinya baik internal maupun eksternal antara lain rendahnya kontribusi Indonesia dibandingkan negara produsen sekaligus eksportir utama dunia lainnya diakibatkan adanya permasalahan yang dihadapi, di antaranya semakin berkurangnya luas areal lahan perkebunan kopi di Indonesia, hal ini dikarenakan luas areal kopi menurut status pengusaannya pada tahun 1980-2018 terdiri dari perkebunan rakyat (95,37 persen) perkebunan besar negara (2,25 persen) perkebunan besar swasta (2,48 persen) dengan luas tanaman menghasilkan

kopi di Indonesia yang semakin menurun dalam kurun waktu 2009-2018 rata-rata sebesar -0,06 persen per tahun.

Permasalahan lain adalah ditemukannya lebih dari 65 persen ekspor kopi Indonesia tergolong pada *Grade IV* ke atas dan termasuk pada kopi mutu rendah (Ibnu 2017). Rendahnya mutu kopi terutama disebabkan oleh pengelolaan kebun, panen dan penanganan pascapanen yang kurang memadai karena hampir seluruhnya perkebunan kopi diproduksi oleh perkebunan rakyat. Meskipun budidaya kopi sudah dilakukan oleh petani sejak jaman penjajahan, tetapi pengelolaannya masih tetap tradisional. Kesalahan paling fatal yang umum dilakukan petani adalah pada fase pemetikan dan penanganan pascapanen, sehingga menghasilkan kopi yang tergolong dalam mutu rendah. Pada hampir semua sentra produksi kopi, petani memetik buah kopi sebelum usia panen (petik hijau) dengan berbagai alasan seperti desakan kebutuhan hidup dan rawan pencurian (Muzendi 2014).

Permasalahan yang terjadi dalam pengembangan komoditas kopi pada umumnya adalah terkait dengan isu produktivitas, kualitas, kontinuitas dan legalitas administrasi. Demikian juga halnya yang terjadi pada kopi petani rakyat di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah penghasil kopi di Provinsi Jawa Barat. Luas areal tanaman kopi mencapai 6.407,70 ha pada tahun 2019. Potensi produksi kopi robusta per hektarenya dapat mencapai 3 ton/ha dan kopi arabika dapat mencapai 2 ton/ha, sedangkan perkebunan kopi di Kabupaten Bogor hanya mampu menghasilkan 1 ton kopi per hektare.

Kriteria kopi yang berasal dari petani kopi di Kabupaten Bogor ini diharapkan sesuai dengan kebutuhan pasar yang dilihat dari sisi kuantitas, kualitas dan kontinuitas kopi. Dalam rangka memenuhi kriteria tersebut maka diperlukan pihak penyuluh yang dapat melakukan kegiatan pendampingan terhadap petani kopi melalui kelompok tani di Kabupaten Bogor sehingga dapat terwujud produksi kopi yang sesuai dengan kriteria kuantitas, kualitas dan kontinuitas yang baik dari petani kopi di Kabupaten Bogor maka Upaya ini tentu diperlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak.

Permasalahan yang pada umumnya dihadapi oleh petani kopi di Kabupaten Bogor adalah belum memiliki kemampuan teknis produksi dalam mendukung peningkatan produktivitas kopi. Hal yang mempengaruhi rendahnya produktivitas kopi di antaranya 1) belum adanya penerapan GAP di lahan petani kopi seperti pemilihan bibit, pemeliharaan tanaman kopi dan naungan, pemupukan dan panen. 2) belum adanya pengolahan limbah kopi (60% dari hasil panen) 3) belum diketahuinya luasan aktual perkebunan kopi. 4) lemahnya sistem kelembagaan dan kemitraan.

Berdasarkan uraian tersebut maka beberapa hal yang harus diperhatikan untuk dapat mengembangkan masyarakat agribisnis di Kabupaten Bogor adalah adanya keterkaitan setiap sector melalui pendekatan subsistem agribisnis yaitu subsistem agribisnis hulu yaitu ketersediaan sarana produksi pertanian dalam hal ini dapat dilakukan stek berakar untuk memproduksi bibit kopi, kemudian di sisi *on farm* dapat menerapkan *Good Agricultural Practises* (GAP) Bibit tanaman kopi yang bermutu jika tidak ditunjang oleh teknik budidaya tanaman yang baik maka belum bisa menghasilkan biji kopi yang berkualitas dan kontinu. Teknik budidaya tanaman yang diusulkan yaitu teknik budidaya tanaman kopi yang sesuai dengan GAP (*Good Agricultural Practises*). Teknik budidaya ini meliputi teknik penanaman, pemupukan, pengendalian gulma, pengendalian hama dan penyakit, dan pemangkasan. Teknik budidaya tanaman kopi sesuai GAP telah tercantum di dalam Kepmentan No. 88/KPTS/KB.020/11/2017. Di sisi pascapanen dan pemasaran perlu adanya sistem panen yang baik dan juga *grading* yang jelas sesuai dengan permintaan pasar

Berdasarkan data Ditjenbun (2015) menyatakan bahwa kopi Indonesia yang diekspor sebagian besar dalam bentuk biji dengan grade IV sementara sisanya dalam bentuk olahan (*roasted* dan bubuk). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kopi Indonesia yang diekspor tergolong kopi mutu rendah dan juga masih ada kondisi tertentu yang menyebabkan kopi Indonesia terkena larangan ekspor (Ibnu 2017).

Selanjutnya, kendala produksi yang menyebabkan rendahnya mutu kopi akan berpengaruh terhadap harga kopi di pasar domestik maupun pasar internasional. Fleming dan Tsiang (1956); Ismail *et al.* (2017)

menyatakan bahwa suatu negara dapat mengalami perubahan daya saing karena dipengaruhi oleh faktor harga dan non-harga. Maka fluktuasi daya saing yang terjadi di pasar internasional tidak terlepas dari sisi harga yang disebabkan oleh rendahnya mutu kopi yang dihasilkan.

Dari sisi subsistem penunjang (*supporting system*) pembuat kebijakan seperti lembaga penelitian dan juga pendidikan tinggi (universitas) yang dapat menciptakan adanya teknologi inovasi yang dapat diterapkan, pemerintah sebagai pengambil kebijakan termasuk perbankan, penyuluhan dan infrastruktur di lahan kopi.

Meiri *et al.* (2013) mengemukakan bahwa untuk menangani masalah dalam bidang produksi kopi di Indonesia, pemerintah harus terus-menerus melakukan upaya seperti memberikan penyuluhan dan bantuan kepada masyarakat. Hal ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ndayitwayeko (2014); Nhien (2016) menyatakan bahwa pemerintah perlu memberikan pelatihan budidaya yang baik bagi para petani serta menggunakan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas kopi. Hal ini perlu diperhatikan agar peran pemerintah dapat dioptimalkan untuk memperbaiki daya saing kopi Indonesia. Pengentasan kemiskinan di Kota dan Kabupaten Bogor dapat dilakukan melalui pendekatan subsistem agribisnis yang berdaya saing.

4. Berbagai Subsistem dan Keterkaitannya dalam Sistem Agribisnis

4.1 Subsistem Agribisnis Hulu (*Up Stream Agribusiness/Off Farm*)

Subsistem hulu adalah industri-industri yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian seperti industri pembibitan atau perbenihan, agrokimia (industri pupuk, industri pestisida, industri obat-obatan), industri agrootomotif (industri mesin pertanian, industri peralatan pertanian, industri peralatan pengolahan hasil pertanian), tenaga kerja yang terlibat dan luasan lahan. Selain bibit, ketersediaan pupuk, pestisida dan obat-obatan sangat penting dan merupakan ujung tombak kegiatan agribisnis. Ketiga hal ini sangat berhubungan erat dengan kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan subsistem usaha tani (*on farm*), jika tidak terpenuhi dengan baik maka subsistem usaha tani akan terhambat.

Agribisnis memerlukan banyak jenis dan ragam produk industri agrootomotif baik untuk kebutuhan subsistem *on farm* agribisnis maupun pada subsistem *off farm* agribisnis. Industri agromekanik berperan sebagai pemasok alat-alat pertanian yang digunakan saat memproduksi hingga pengolahan. Industri yang menyediakan sarana produksi pertanian disebut sebagai agroindustri hulu. Sarana produksi yang baik biasanya digunakan dalam proses awal pembukaan lahan, budidaya pertanian seperti pemupukan, pemeliharaan tanaman dan lain-lain sampai dengan proses pemanenan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari sarana produksi dalam bidang pertanian adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja petani dan mengubah hasil yang sederhana menjadi lebih baik. Sarana produksi pertanian terdiri dari bahan yang meliputi, benih, pupuk, pestisida, zat pengatur tumbuh, obat-obatan, dan peralatan lain yang digunakan untuk melaksanakan produksi pertanian. Sarana-sarana tersebut harus sudah dipersiapkan sebelum memulai kegiatan sarana budidaya tanaman.

Subsistem agribisnis hulu akan menentukan keberhasilan proses produksi pada subsistem usaha tani. Hal yang paling penting dalam subsistem agribisnis hulu adalah ketersediaan sarana produksi pada waktu, jumlah, mutu dan harga yang tepat karena proses produksi usaha tani pada umumnya sangat tergantung kepada musim dan proses biologis tanaman. Sarana produksi pertanian merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung perkembangan atau kemajuan pertanian terutama untuk mencapai tujuan terciptanya ketahanan pangan. Banyak sekali fungsi dari alat dan mesin pertanian misalnya saja untuk pengolahan tanah, menaikkan kadar air serta dapat mengolah hasil pertanian. Banyak cara yang bisa digunakan oleh petani untuk mempermudah pekerjaan mereka salah satunya yaitu dengan cara menggunakan alat yang modern selain dapat memudahkan pekerjaan juga dapat mempersingkat waktu dan menaikkan hasil produksi dalam bidang pertanian.

Sarana-sarana tersebut harus sudah dipersiapkan sebelum memulai kegiatan budidaya tanaman. Penerapan sarana produksi yang baik dapat memberikan hasil yang baik bagi pertanian Indonesia. Sarana produksi dapat dikembangkan dengan pengetahuan yang ada, seperti benih unggul, benih unggul didapat dari sortasi benih yang merupakan pilihan dari

banyak benih. Induk yang baik memberikan benih yang baik pula, pembudidayaan tanaman induk yang baik akan sangat berperan dalam penentuan hasil yang baik.

Pada umumnya kegiatan yang berkaitan pada subsistem agribisnis hulu adalah penyediaan input yang akan diproses pada tahapan selanjutnya. Termasuk peralatan dan bahan yang dapat mendukung produksi di bidang agribisnis.

4.2 Subsistem Agribisnis Budidaya/Usaha Tani (*On Farm*)

Subsistem ini mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi primer pertanian. Termasuk ke dalam kegiatan ini adalah perencanaan pemilihan lokasi, komoditas, teknologi, dan pola usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi primer. Di sini ditekankan pada usaha tani yang intensif dan lestari (*sustainable*), artinya meningkatkan produktivitas lahan semaksimal mungkin dengan cara intensifikasi tanpa meninggalkan kaidah-kaidah pelestarian sumber daya alam yaitu tanah dan air. Di samping itu juga ditekankan usaha tani yang berbentuk komersial bukan usaha tani yang subsistem, artinya produksi primer yang akan dihasilkan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam artian ekonomi terbuka.

Ilmu usaha tani biasanya diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Dikatakan efektif bila petani atau produsen dapat mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki (yang dikuasai) sebaik-baiknya dan dikatakan efisien bila pemanfaatan sumber daya tersebut menghasilkan keluaran (*output*) yang melebihi masukan (*input*). Subsistem usaha tani/budidaya (*on farm agribusiness*) adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan pertanian primer untuk barang konsumsi, input untuk industri pengolahan (*off farm*) dan perdagangan di pasar domestik atau internasional.

Usaha tani pada skala usaha yang luas umumnya bermodal besar, berteknologi tinggi, manajemennya modern, lebih bersifat komersial dan sebaliknya usaha skala kecil umumnya bermodal pas-pasan, teknologinya tradisional, lebih bersifat usaha tani sederhana dan sifat usahanya subsisten

serta lebih bersifat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sendiri dalam kehidupan sehari-hari.

Pada umumnya kegiatan yang berkaitan pada subsistem agribisnis *on farm* adalah teknis usaha tani/budidaya pertanian yang terdiri dari persiapan lahan, penyemaian/pembibitan, penanaman, pemeliharaan hingga panen. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah pada masa pemeliharaan yaitu tersedianya volume air yang cukup, pemupukan dan pengendalian hama serta penyakit.

4.3 Subsistem Agribisnis Hilir (*Down Stream Agribusiness/Off Farm*)

Subsistem agribisnis hilir atau sering dikenal dengan *down stream agribisnis* merupakan subsistem pengolahan hasil produksi pertanian yang menjadikan produk tersebut bernilai tambah sehingga dapat meningkatkan daya saing produk tersebut di pasar. Subsistem agribisnis hilir berupa kegiatan ekonomi yang mengolah produk pertanian primer menjadi produk olahan, baik produk antara maupun produk akhir, beserta kegiatan perdagangan di pasar domestik maupun di pasar internasional. Subsistem agribisnis hilir tidak terlepas dari kegiatan ekonomi yang dilakukan, adapun kegiatan ekonomi yang termasuk dalam subsistem agribisnis hilir menurut Saragih (2000) antara lain adalah industri pengolahan makanan, industri pengolahan minuman, industri pengolahan serat (kayu, kulit, karet, sutera, jerami), industri jasa boga, industri farmasi dan bahan kecantikan, dan lain-lain beserta kegiatan perdagangannya (Saragih, 2000).

Subsistem agribisnis hilir terdiri atas dua macam kegiatan, yaitu pengolahan komoditas primer dan pemasaran komoditas primer atau produk olahan. Kegiatan pengolahan komoditas primer adalah memproduksi produk olahan baik produk setengah jadi maupun barang jadi yang siap dikonsumsi konsumen dengan menggunakan bahan baku komoditas primer. Kegiatan ini sering juga disebut agroindustri. Kegiatan pemasaran berlangsung mulai dari pengumpulan komoditas primer sampai pengeceran kepada konsumen. Subsistem usaha agribisnis hilir berfungsi melakukan pengolahan lanjut (baik tingkat primer, sekunder maupun tersier) untuk mengurangi susut nilai atau meningkatkan mutu produk agar dapat memenuhi kebutuhan dan selera konsumen, serta berfungsi

memperlancar pemasaran hasil melalui perencanaan sistem pemasaran yang baik.

Pascapanen (Pengolahan)

Subsistem agribisnis hilir atau industri hilir meliputi kegiatan pascapanen yang mempunyai *multiplier income* yang sangat tinggi. Bahkan apabila industri hilir ini dibandingkan dengan industri lainnya maka industri hilir memiliki *multiplier income* terbesar. Artinya, apabila industri hilir berkembang dengan baik, maka semua sektor yang berkaitan akan berkembang. Pascapanen atau *down stream* merupakan suatu sistem di dalam sistem yang lebih besar yaitu sistem agribisnis. Pascapanen merupakan hilirnya *on farm*, maka dari itu apabila sektor hilir akan dikembangkan maka harus juga mengembangkan sektor *on farm*. Sehingga adanya kerja sama antar subsistem di dalam sistem agribisnis yang dapat berkembang secara bersama (Saragih, 2010).

Subsektor agribisnis hilir dikenal juga dengan agroindustri yang mengolah produk pertanian di tingkat primer maupun sekunder. Agroindustri dalam struktur perekonomian merupakan perekat antara sektor pertanian dan sektor lainnya, sehingga dimungkinkan untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Suatu komoditas dapat dikelola secara efisien dengan kualitas (segar maupun olahan) dengan meningkatkan nilai tambah komoditas yang dihasilkan, sehingga merupakan peluang bagi petani untuk meraih pendapatan yang lebih tinggi. Agroindustri menyangkut berbagai aspek yang dapat menumbuhkan kegiatan yang saling terkait, sehingga dengan rekayasa pengembangan yang tepat kegiatan agroindustri berpotensi besar untuk menampung tenaga kerja yang lebih banyak atau mendorong terciptanya kesempatan kerja baru (Syahza, 2011).

Agroindustri sebagai subsistem agribisnis mempunyai potensi sebagai pendorong pertumbuhan kawasan ekonomi, karena memiliki peluang pasar yang lebih luas dan nilai tambah (*value added*) yang besar. Di samping itu pengembangan agroindustri dapat menjadi “pintu masuk” (*entry point*) proses transformasi struktur ekonomi dari pertanian ke industri. Kegiatan pertanian menghasilkan produk-produk yang sangat strategis bagi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, pakaian

dan perumahan. Pemenuhan kebutuhan seperti pangan apabila mengandalkan dari negara lain atau impor tentu akan sangat riskan, karena dapat menimbulkan masalah yang rumit dan biaya mahal di kemudian hari (Mukhyi, 2007).

Subsistem ini mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi primer pertanian. Termasuk ke dalam kegiatan ini adalah perencanaan pemilihan lokasi, komoditas, teknologi, dan pola usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi primer. Di sini ditekankan pada usaha tani yang intensif dan lestari (*sustainable*), artinya meningkatkan produktivitas lahan semaksimal mungkin dengan cara intensifikasi tanpa meninggalkan kaidah-kaidah pelestarian sumber daya alam yaitu tanah dan air. Di samping itu juga ditekankan usaha tani yang berbentuk komersial bukan usaha tani yang subsistem, artinya produksi primer yang akan dihasilkan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Kebutuhan pasar akan berpengaruh pada bagaimana produk di ciptakan, komoditas agribisnis yang sudah dipanen akan di proses pada bagian pascapanen dengan beberapa proses dan perlakuan (*treatment*) yang dibutuhkan oleh setiap komoditasnya. Adapun aktivitas yang dilakukan pada proses pascapanen adalah mulai dari pembersihan, sortasi, *grading*, pengolahan, pengemasan dan penyimpanan produk. Hal ini akan disesuaikan dengan masing-masing produk agribisnis tersebut.

Pada umumnya kegiatan yang berkaitan pada subsistem agribisnis hilir terdiri dari kegiatan pascapanen/pengolahan dan pemasaran. Kegiatan pascapanen dan pengolahan adalah hal yang perlu dikembangkan dalam bidang agribisnis karena pada proses ini material (bahan baku) akan diproses sehingga memiliki nilai tambah (*value added*) yang dapat memberikan pendapatan bagi pelaku usaha agribisnis.

Distribusi (Pemasaran)

Kegiatan pemasaran di bidang agribisnis adalah tahapan yang perlu diperhatikan, mengingat hasil utama yang diperoleh pada umumnya adalah bahan baku maka perlu disiapkan pasarnya dengan lebih baik dan tersistem. Untuk mengalirkan produk sampai ke tangan konsumen, banyak kegiatan produktif yang terjadi dalam upaya menciptakan dan atau

menambah nilai guna, produk dapat diciptakan dengan baik dengan memperhatikan bentuk dari produk pertanian yang pada umumnya mudah rusak.

4.4 Subsistem Agribisnis Penunjang (*Supporting System*)

Komponen-komponen dari subsistem ini meliputi antara lain jasa-jasa: penelitian dan pengembangan (litbang) pendidikan dan pelatihan (diklat), jasa penyuluhan, keuangan dan transportasi. Penyediaan berbagai jasa ini diperlukan untuk membuat sistem agribisnis tersebut lengkap dan bekerja baik. Di Indonesia pemerintah memiliki jasa-jasa yang disebutkan tersebut sehingga pemerintah dapat berfungsi dan bertindak sebagai koordinator sistem. Kegiatan litbang menghasilkan *output* berupa rakitan teknologi pertanian benih/bibit unggul, masukan kebijakan dan sebagainya yang diperlukan oleh para pelaku agribisnis.

Di Indonesia selama ini fungsi tersebut dikerjakan oleh lembaga-lembaga litbang milik departemen. Pendidikan dan pelatihan menawarkan berbagai jasa untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang pertanian dari para pelaku agribisnis. Berbagai bentuk pendidikan non-formal, diperlukan untuk mengubah perilaku dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pelaku agribisnis khususnya di subsistem usaha tani (penyuluhan pertanian) dan agroindustri: penyuluhan perindustrian).

Tidak kalah pentingnya adalah jasa-jasa yang diberikan oleh sektor transportasi dan keuangan yang berfungsi untuk memperlancar arus input dari pemasok input ke usaha tani dan arus komoditas dari usaha tani ke subsistem agroindustri atau langsung ke konsumen akhir. Selanjutnya lembaga penyedia jasa keuangan berperan dalam membantu tersedianya dana tambahan untuk melakukan perluasan usaha, memanfaatkan peluang usaha baru dan untuk investasi baru.

Subsistem sarana penunjang (*off farm*) merupakan kegiatan yang memberikan pelayanan jasa berupa kelembagaan untuk mendukung kegiatan agribisnis. Kelembagaan berperan penting untuk menciptakan agribisnis yang tangguh dan kompetitif. Lembaga-lembaga pendukung tersebut sangat menentukan dalam upaya menjamin terciptanya integrasi

agribisnis dalam mewujudkan tujuan pengembangan agribisnis. Beberapa lembaga pendukung pengembangan agribisnis, yaitu adalah:

1. Lembaga pemerintah
2. Lembaga pembiayaan
3. Lembaga pemasaran dan distribusi
4. Koperasi
5. Lembaga pendidikan formal dan informal
6. Lembaga penyuluhan
7. Lembaga penelitian dan pengembangan
8. Lembaga penjamin dan penanggung risiko

1. Pemerintah

Lembaga pemerintah mulai tingkat pusat hingga tingkat daerah, memiliki wewenang, regulasi dalam menciptakan lingkungan agribisnis yang kompetitif dan adil. Contoh: Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam berbagai hal, Dibentuknya BULOG yang berperan dalam menjaga stabilitas harga beras.

2. Lembaga Pembiayaan

Adapun peranan Lembaga pembiayaan dalam upaya peningkatan produk agribisnis adalah sebagai berikut:

- a. Berperan sebagai penyedia modal investasi dan modal kerja, mulai dari sektor hulu sampai hilir.
- b. Membuka akses yang seluas-luasnya bagi pelaku agribisnis kecil dan menengah.
- c. Pembiayaan usaha dapat diperoleh dari lembaga keuangan Bank dan Non-Bank.
- d. Lembaga keuangan Bank merupakan lembaga keuangan yang dianggap memiliki produk-produk penghimpunan dan penyaluran dana yang paling lengkap.
- e. Lembaga keuangan Non-Bank umumnya memiliki salah satu produk berupa penghimpunan dana saja atau penyaluran dana saja.

3. Lembaga pemasaran dan distribusi

Sebagai ujung tombak keberhasilan pengembangan agribisnis, karena fungsinya sebagai fasilitator yang menghubungkan antara *deficit unit* (konsumen pengguna yang membutuhkan produk) dan *surplus unit* (produsen yang menghasilkan produk).

4. Koperasi

Adapun peranan koperasi dalam upaya peningkatan produk agribisnis adalah sebagai berikut:

- a. Pengalaman di banyak negara menunjukkan, koperasi telah terbukti memiliki kemampuan dan kinerja usaha yang baik.
- b. Peranan lembaga ini dapat dilihat dari fungsinya sebagai penyalur input-input dan hasil pertanian.
- c. Di Indonesia, perkembangan KUD terhambat karena KUD dibentuk hanya untuk memenuhi keinginan pemerintah, modal terbatas, pengurus dan pegawai KUD kurang profesional.

5. Lembaga pendidikan formal dan informal

Lembaga pendidikan formal berperan sangat besar dalam pengembangan agribisnis. Pendidikan formal akan mengajarkan pemahaman yang baik mengenai pengelolaan komoditas sejak diproduksi hingga menjadi suatu produk yang diterima di pasar. Lembaga Pendidikan non-formal menunjukkan peranan yang juga tidak kalah penting dengan Pendidikan formal, arah dari kegiatan Pendidikan informal akan membantu petani yang akan meningkatkan pemahaman mereka dalam mengelola usaha pertanian yang dapat meningkatkan nilai tambah komoditas.

6. Lembaga penyuluhan

Adapun peranan Lembaga penyuluhan dalam upaya peningkatan produk agribisnis adalah sebagai berikut:

- a) Keberhasilan Indonesia berswasembada beras (1983-1992) dengan program Bimas, Inmas, Insus, dan Supra Insus.
- b) Peranan lembaga penyuluhan akhir-akhir ini menurun sehingga perlu penataan dan upaya pemberdayaan kembali.

- c) Peranannya bukan lagi sebagai penyuluh penuh, melainkan lebih kepada fasilitator dan konsultan pertanian rakyat.

7. Lembaga riset agribisnis

Adapun peranan lembaga riset agribisnis dalam upaya peningkatan produk agribisnis adalah sebagai berikut:

- a) Lembaga ini sedikit tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain yang dahulunya berkiblat ke Indonesia.
- b) Semua lembaga riset yang terkait dengan agribisnis harus diperdayakan dan menjadikan ujung tombak untuk menghasilkan komoditas yang unggul dan daya saing tinggi.
- c) Misalnya, Meksiko dapat memproduksi buah avokad yang warna daging buahnya kuning kehijau-hijauan, kulit buah bersih dan halus, dan bentuk buah yang besar dengan biji yang kecil.

8. Lembaga penjamin dan penanggung risiko

Adapun peranan lembaga penjamin dan penanggung risiko dalam upaya peningkatan produk agribisnis adalah sebagai berikut:

- a) Risiko dalam agribisnis tergolong besar, namun hampir semuanya dapat diatasi dengan teknologi dan manajemen yang andal.
- b) Instrumen *hedging* dalam bursa komoditas juga perlu dikembangkan guna memberikan sarana penjaminan berbagai risiko dalam agribisnis dan industri pengolahannya.

Pada umumnya lembaga-lembaga pendukung pengembangan agribisnis di atas memiliki karakteristik fungsi yang berbeda, namun bertujuan yang sama yaitu memberikan layanan bagi para pelaku agribisnis sehingga mampu mengurangi beban dan meningkatkan kelancaran kegiatan agribisnis tersebut.

Daftar Pustaka

- Fahrudin, Riskikananti AW. 2021. Pemanfaatan pekarangan rumah untuk budidaya sayur sebagai tambahan sumber pangan keluarga dengan teknik tabulampot dan verikultur. *Unram Journal of Community Service*. 2(2): 49-52.
- Herwibowo, Kunto., & N.S. Budiana. 2014. *Hidroponik Sayuran*. Jakarta Timur: Penebar Swadaya.
- Hardilawati, W. L. (2020). Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 10(1), 89–98.
- Megasari D, Khoiri S, Zamroni A. 2021 Strategi Pemasaran Tanaman Hias pada Masa Pandemi Covid-19 di Mekar Jaya Nursery. *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021*.
- Junainah, W., Sanggar Kanto, S., & Soenyono. (2016). Program Urban Farming Sebagai Model Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan (Studi Kasus di Kelompok Tani Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya). *Wacana*. 3(19): 148-156.
- Koscica, M. 2014. The Role of Urban Agriculture in Addressing Food Insecurity in Developing Cities. *Journal of International Affairs*. Vol. 67 No. 2. P 177-186.
- Mukhyi, M.A. 2007. *Analisis Peranan Subsektor Pertanian dan Sektor Unggulan*.
- Saragih, bungaran. 2000. Agribisnis Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Dalam Era Millenium Baru. *Jurnal Studi Pembangunan, Kemasyarakatan & Lingkungan*, Vol 2, No.1/Feb. 2000, 1-9.
- Saragih, Bungaran. 2010. *Suara Agribisnis: Kumpulan Pemikiran Bungaran Saragih*.
- Syahza, Almasdi. 2001. Pembangunan Pedesaan Dengan Pendekatan Agribisnis. *Jurnal Pembangunan Pedesaan*.

Ekonomi Sirkular sebagai Solusi Pemberdayaan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Tazkiyah Ainul Qolbi

A. Pemberdayaan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Sampah menjadi salah satu sumber masalah terbesar bagi lingkungan hidup yang ditempati oleh masyarakat di suatu daerah. Sampah dan manusia adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Semakin tinggi jumlah penduduk di suatu daerah maka jumlah sampah akan semakin meningkat. Menurut Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dapat diartikan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat (Siagian,2023).

Salah satu penyumbang jumlah sampah yaitu dengan adanya kegiatan Rumah Tangga yang menghasilkan beberapa jenis sampah baik organik maupun non-organik. Selama ini, pengelolaan sampah masih dilakukan secara konvensional yakni sampah dibuang ke tempat yang sudah disediakan di rumah masing-masing, kemudian sampah akan dibawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). TPS dapat diartikan sebagai tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang dan pengolahan sampah terpadu. Dari TPS sampah akan diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup menggunakan truk sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang dapat diartikan sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Pengelolaan sampah ini belum merata hingga ke desa-desa, pengelolaan sampah rumah tangga di desa kebanyakan masih dilakukan secara mandiri dengan membakar sampah non-organik. Pembakaran sampah akan menimbulkan pencemaran udara yang tidak baik untuk manusia dan lingkungan. Sehingga perlu adanya pengelolaan sampah yang

lebih efektif dan efisien untuk meminimalisir permasalahan yang disebabkan oleh sampah.

Pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan yang bersifat sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif serta terpadu mulai dari hulu hingga ke hilir supaya memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Pengelolaan sampah yang komprehensif memerlukan sebuah konsep yang berkelanjutan serta memberikan dampak positif bagi masyarakat serta lingkungan baik segi ekonomi maupun non-ekonomi. Salah satu konsep ekonomi yang mulai ditawarkan untuk pengelolaan sampah yaitu konsep ekonomi sirkular.

Ekonomi sirkular dapat diartikan sebagai sistem penggunaan sumber daya, emisi, energi dan sampah terbuang yang diminimalisir dengan menutup siklus produksi-konsumsi dengan memperpanjang umur produk, inovasi desain, pemeliharaan, penggunaan kembali, remanufaktur, daur ulang (*recycling*) dan daur ulang menjadi produk lain (*upcycling*) (Ariani, Zaenafi, dkk., 2022).

Pelaksanaan ekonomi sirkular dapat terwujud jika lapisan masyarakat ikut serta dalam pengelolaan sampah rumah tangga maupun sampah industri. Pengelolaan sampah dengan konsep ekonomi Sirkular membutuhkan kerja sama seluruh lapisan masyarakat. Sehingga pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan dalam menjalankan konsep ekonomi sirkular.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memotivasi, melatih, mendidik masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menciptakan kemandirian. Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup yang layak bagi dirinya dan keluarga. Kesuksesan pemberdayaan masyarakat dilihat dari partisipasi aktif masyarakat tersebut dalam mengelola suatu sumber daya.

Salah satu implementasi ekonomi sirkular dengan pemberdayaan masyarakat adalah program bank sampah. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah sehingga memberikan kesempatan masyarakat

untuk meningkatkan taraf hidupnya masing-masing. Sehingga tingkat perekonomian yang dapat dilihat dari pendapatan dan pengeluaran masyarakat akan meningkat.

Salah satu Lembaga yang berperan aktif dalam mengimplementasikan konsep ekonomi sirkulasi adalah Galuh Peduli Rasa (GAPURA) bertempat di Desa Dewasari, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis. GAPURA merupakan kelompok pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada ide serta gagasan kreatif dalam peningkatan ekonomi sosial. Pemberdayaan yang dilaksanakan adalah pemanfaatan pekarangan, mengolah sampah kertas, limbah plastik bekas yang dikelola menjadi berbagai kerajinan ramah lingkungan. GAPURA disebut juga sebagai Kampung Kertas yang merupakan pelopor destinasi tematik di Priangan Timur Jawa Barat yang mengangkat konsep ekonomi sirkular yang mengolah sampah kertas menjadi berbagai kerajinan tepat guna, *home décor* dan karya seni rupa.

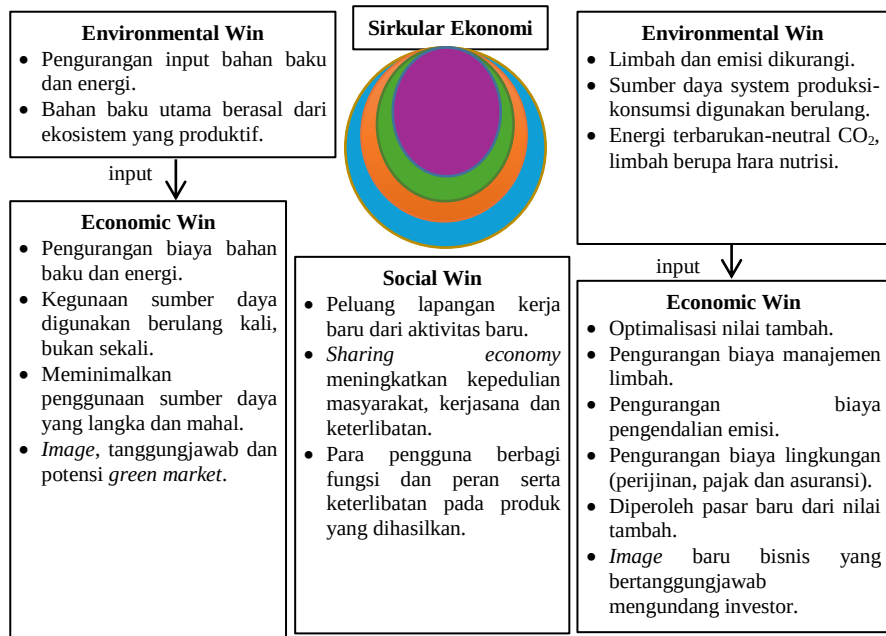
Paper ini bertujuan untuk mendiskusikan konsep Ekonomi Sirkular sebagai Solusi Pemberdayaan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat. Metode yang digunakan yaitu studi kasus yang bertujuan untuk menelusuri pemberdayaan dan peningkatan perekonomian masyarakat Desa Dewasari, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis yang mengimplementasikan konsep ekonomi sirkular.

B. Ekonomi Sirkular

Ekonomi sirkular dapat diartikan sebagai sistem industri yang bersifat restoratif dan regeneratif dengan desain yang menggantikan konsep akhir hidup produk ke arah penggunaan energi yang terbarukan, menghilangkan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya serta bertujuan untuk penghapusan limbah melalui desain unggul bahan, produk, sistem dan model bisnis (Zaenafi, 20220).

Konsep ekonomi sirkular merupakan sebuah siklus aliran bahan, memanfaatkan sumber energi terbarukan dan aliran energi secara bertingkat, baik pada input maupun *output*. Konsep ekonomi sirkular akan menghasilkan berbagai produk yang bersumber dari sistem produksi yang menguntungkan baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan melalui

prinsip restoratif dan regeneratif. Terdapat satu prinsip tambahan yakni aktivasi yang berarti aktivitas baru.



Gambar 1 Konsep Ekonomi Sirkular

Menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin), terdapat lima prinsip utama ekonomi sirkular yaitu pengurangan pemakaian material mentah dari alam (*Reduce*), optimasi penggunaan material yang dapat digunakan kembali (*Reuse*), penggunaan material yang dapat digunakan kembali (*Recycle*), proses perolehan kembali (*Recovery*) dan melakukan perbaikan (*Repair*) yang disingkat menjadi 5R (Zaenafi,2022).

C. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dalam membuat pilihan rasional berdasarkan kebutuhan dan permasalahan masing-masing (Handono, dkk., 2020). Sehingga muncul solusi untuk mengatasi masalah dan memenuhi

kebutuhannya. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat dapat memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Pemberdayaan masyarakat menjadi suatu hal yang sangat penting untuk mewujudkan kemandirian masyarakat yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang tergolong menengah ke bawah memerlukan bantuan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bantuan pihak lain sudah selayaknya berupa program jangka panjang yang meningkatkan keterampilan pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk menjadi individu yang mandiri. Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan pada masa kini hingga masa yang akan datang secara mandiri.

Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan berhasil jika mampu memenuhi tujuan yang diharapkan. Menurut Mardikanto, terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut (Nainggolan dan Maryani,2019):

1. Perbaikan kelembagaan “*Better Institution*”

Partisipasi masyarakat bergantung pada kualitas lembaga itu sendiri. Lembaga yang baik adalah Lembaga yang memiliki visi, misi, tujuan, sasaran yang dapat diukur serta program kerja yang terarah. Setiap anggota Lembaga memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing secara jelas setiap periode tertentu sesuai dengan kompetensinya. Hal ini dapat meningkatkan loyalitas anggota karena merasa berdaya dan mempunyai peran untuk memajukan Lembaga yang bersangkutan. Para anggota saling memberikan motivasi untuk meningkatkan kemampuan melalui pengetahuan, pengalaman dan keterampilannya dalam jangka panjang.

2. Perbaikan usaha “*Better Business*”

Perbaikan kelembagaan diharapkan berpengaruh terhadap perbaikan bisnis dari Lembaga tersebut. Perbaikan usaha bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada seluruh anggota Lembaga, memberikan manfaat secara luas serta memenuhi semua kebutuhan seluruh anggota yang bersangkutan.

3. Perbaikan pendapatan “*Better Income*”
Semakin baik keadaan bisnis suatu Lembaga diharapkan berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan atau *income* dari seluruh anggota Lembaga termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan “*Better Environment*”
Lingkungan dan manusia akan selalu hidup berdampingan serta saling membutuhkan. Oleh sebab itu manusia memiliki kewajiban untuk memelihara lingkungan dengan cara mengelola limbah yang ramah lingkungan. Sebagai contoh setiap kepala keluarga memiliki tempat sampah yang berbeda-beda sesuai dengan jenis sampahnya.
5. Perbaikan kehidupan “*Better Living*”
Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator yaitu tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan daya beli masing-masing keluarga.
6. Perbaikan masyarakat “*Better Community*”
Kehidupan yang lebih baik berarti didukung oleh lingkungan fisik dan sosial yang lebih baik, sehingga diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik.

D. Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara bahasa peningkatan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan meningkatkan usaha, kegiatan dan sebagainya. Perekonomian secara bahasa adalah Tindakan, aturan dan cara berekonomi. Sedangkan masyarakat yaitu sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang dianggap sama.

Peningkatan perekonomian masyarakat merupakan sebuah proses meningkatkan usaha melalui kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi dan konsumsi melalui usaha mandiri yang lebih produktif dengan memperhatikan manajemen serta keberpihakan terhadap masyarakat melalui konsep pemberdayaan.

Peningkatan perekonomian masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan supaya masyarakat semakin produktif. Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru sehingga

mampu menyerap tenaga kerja dan berimplikasi pada jumlah pengangguran di suatu daerah. Semakin rendah tingkat pengangguran berarti masyarakat memiliki pendapatan secara mandiri. Tingkat perekonomian dapat dilihat dari aspek pendapatan riil. Pendapatan riil merupakan *income* yang didapatkan oleh individu dapat mencukupi kebutuhan pada saat ini sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Dengan kata lain pendapatan riil akan berimplikasi pada daya beli masyarakat pada saat ini.

E. Ekonomi Sirkular sebagai Solusi Pemberdayaan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat

1. Ekonomi Sirkular Kampung Kertas

Galuh Peduli Rasa (GAPURA) berdiri pada tanggal 12 Juni 2017 merupakan kelompok pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan gagasan kreatif serta berfokus pada peningkatan perekonomian sosial. Sejak awal mula berdiri GAPURA terus mewujudkan kepeduliannya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat yang meliputi penciptaan kerja, membangun ekosistem ekonomi masyarakat sehat, peningkatan kreativitas masyarakat. Selain itu, GAPURA juga peduli pada kelestarian lingkungan hidup, tanggap isu lingkungan dan kelestarian alam. Sehingga fokus kegiatan pemberdayaan yaitu pemanfaatan pekarangan, mengolah sampah kertas, limbah plastik bekas menjadi berbagai kerajinan yang ramah lingkungan.

GAPURA terletak di Jalan KH. Ahmad Fadlil No. 275 RT.OO2/RW.014 Cidewa, Dewasari, Cijeungjing, Ciamis 46271. Anggota kelompok yang mayoritas perempuan menjadi salah satu tujuan untuk memberdayakan perempuan khususnya para lansia yang tidak memiliki kegiatan lainnya. Selain itu, para perempuan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungannya.

Implementasi *reduce* sebagai upaya untuk mengurangi material yang tidak mudah diurai oleh alam yaitu dengan cara diet sampah. Pengurangan penggunaan plastik untuk membungkus makanan, sayuran, dan lainnya memang masih sangat sulit bagi masyarakat khususnya masyarakat pedesaan seperti yang disampaikan oleh Ibu Mulyati “Kalau

untuk pemakaian pribadi masih cukup sulit apalagi kalau belanjanya dari warung, pasti pakai kresek.”

Salah satu upaya yang dilakukan oleh GAPURA dalam mengurangi sampah plastik adalah dengan menggunakan *goodie bag* khusus untuk konsumen yang membeli berbagai produk kerajinan yang dihasilkan oleh kelompoknya. Penggunaan *goodie bag* sebagai implementasi diet sampah yang dilakukan oleh kelompok pemberdayaan yang diharapkan dapat diikuti oleh seluruh anggota kelompoknya.

Pemilahan sampah juga menjadi suatu hal yang sangat penting dalam meminimalisir polusi yang diakibatkan oleh sampah. GAPURA sebagai penyedia Bank Sampah sudah memberikan himbauan bagi masyarakat untuk melakukan pemilahan sendiri sampah rumah tangga yang kemudian dapat ditabungkan ke Bank Sampah GAPURA. Namun pada praktiknya hal ini masih sangat sulit, terkhusus pemilahan sampah plastik, sehingga ibu-ibu lebih memilih untuk membakar sampahnya dibandingkan dengan mengumpulkan pada bank sampah. Ibu Dede menyampaikan bahwa “biasanya membakar sedikit-sedikit sampah plastiknya, itu pun kalau sampah plastik yang sangat kotor.”

Selain *reduce*, implementasi *reuse* sebagai optimasi penggunaan material yang dapat digunakan kembali yaitu dengan menggunakan barang-barang seperti botol minum atau galon, ember, karung semen, kompor minyak, plastik kemasan minyak digunakan untuk pot tanaman dalam pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT).

Selain *reduce* dan *reuse*, implementasi *recycle* yang dilakukan oleh GAPURA yaitu penggunaan pupuk organik Eco-Enzim yang diproduksi sendiri. Selain Eco-Enzim ada juga produk berupa kerajinan tangan yang berbahan dasar kertas khususnya koran bekas. Aneka sayuran juga sebagai produk dari KWT.

Limbah yang digunakan antara lain sampah organik sebagai bahan dasar pupuk organik, kertas koran dan HVS untuk kerajinan tangan. Keunggulan dari produk GAPURA salah satunya adalah sebagai pelopor pertama dalam memproduksi kerajinan tangan berbahan kertas, unik, serta berkualitas. Produk tersebut sudah terjual ke beberapa daerah di Indonesia hingga mancanegara salah satunya ke negara Malaysia dan Nepal.

Pengumpulan sampah yang memiliki nilai ekonomi juga disesuaikan dengan jenis sampahnya. Berbeda jenis sampah maka nilai ekonominya juga berbeda. Sampah yang sudah dipilah dan dibersihkan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan sampah yang belum dipilah dan dibersihkan. Istilahnya ada ember kotor dan ember bersih untuk membedakan kualitas sampah sehingga lebih mudah menilainya.

Selain pemanfaatan sampah, ada juga pemanfaatan pekarangan rumah yang digunakan oleh masyarakat untuk menanam tanaman baik sayuran maupun tanaman hias. GAPURA juga memanfaatkan lahan yang tadinya tidak produktif menjadi lahan yang ditanam dengan berbagai jenis sayuran yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hasil dari tanaman tersebut digunakan lagi oleh para anggota dengan prinsip dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota.

2. Ekonomi Sirkular sebagai Solusi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri serta berdaya untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat menengah ke bawah memerlukan peran pihak lain untuk membantu kemandiriannya dimulai dari memberikan pendampingan, pengetahuan serta keterampilannya. Salah satu konsep yang dapat mewujudkan pemberdayaan masyarakat adalah konsep ekonomi sirkular, karena praktik ekonomi sirkular membutuhkan banyak masyarakat untuk mewujudkannya. Tanpa peran masyarakat sekitar ekonomi sirkular tidak dapat terwujud sesuai dengan konsepnya.

GAPURA sebagai salah satu lembaga yang kegiatannya menggunakan konsep ekonomi sirkular berfokus untuk memberdayakan masyarakat khususnya perempuan yang tidak memiliki pekerjaan dan kegiatan lainnya. Para ibu-ibu yang tidak memiliki aktivitas dan keterampilan, kini mereka memiliki keterampilan untuk membuat kerajinan tangan yang bersumber dari limbah kertas dianyam menjadi berbagai produk seperti keranjang air minum, tas, vas bunga dan lain sebagainya yang tentu memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.

Keterampilan yang dimiliki oleh para ibu-ibu tidak terlepas dari pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan setiap individunya. Kesesuaian pembagian tugas memberikan dampak yang sangat positif

terhadap pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat, karena keberhasilan pemberdayaan masyarakat dilihat dari tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan kemampuan. Hal tersebut dapat berimplikasi pada tingkat keberdayaan masyarakat itu sendiri. Individu yang berdaya adalah individu yang dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya, kesesuaian dengan potensi juga meminimalisir tingkat stress dan rasa putus asa.

Pendampingan secara berkala dan rutin dilakukan juga menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Pertemuan rutin biasanya dilakukan satu minggu sekali di luar jadwal penyuluhan dari lembaga-lembaga eksternal. Ketelatenan dan kesabaran para pendamping GAPURA telah mampu membentuk rasa percaya diri dari setiap anggota sehingga keterampilan mereka dari waktu ke waktu juga semakin berkembang. Seperti halnya yang dirasakan oleh Ibu Ihat yang awalnya hanya bisa melinting kertas saja menjadi bisa menyelesaikan kerajinan dari mulai melinting hingga selesai menjadi produk siap *finishing*.

Selain meningkatnya keterampilan, para anggota memiliki pengalaman bersosialisasi dengan masyarakat di luar daerahnya melalui kegiatan pameran. Selain pameran, mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan ilmu-ilmu lain seperti dari Bank Indonesia, Pemerintahan Kabupaten Ciamis dan para pejabat lainnya. Hal tersebut menjadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi mereka dan tak pernah terpikirkan sebelumnya memiliki kesempatan yang demikian.

Selain itu, lingkungan tempat mereka tinggal pun kini sudah mulai tertata. Kesadaran menjaga kebersihan meningkat sangat pesat, hal ini disampaikan oleh Ibu Dede “sekarang kalau lihat ada sampah bekas minuman kemasan atau sampah lainnya langsung diambil, dikumpulkan biar nanti bisa dijual dan dapat uang dari ngumpulin sampah”.

Maka dari itu, konsep ekonomi sirkular dapat dijadikan sebagai alternatif pemberdayaan masyarakat yang efektif karena memberikan pengetahuan, keterampilan, pengalaman yang sangat berharga dan mampu meningkatkan rasa percaya diri sehingga masyarakat semakin berdaya dan mandiri.

3. Ekonomi Sirkular sebagai Solusi Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Salah satu tujuan dari konsep ekonomi sirkular adalah mengoptimalkan barang-barang bekas tidak layak pakai diproduksi kembali menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi dan nilai guna baru. Fungsi dari ekonomi sirkular adalah untuk mempertahankan daur hidup suatu produk sehingga rantainya tidak berhenti di fase penurunan.

Proses daur hidup produk dapat menciptakan nilai guna baru suatu barang sehingga memiliki nilai ekonomis. Seperti halnya yang dilakukan oleh kelompok pemberdayaan masyarakat GAPURA yang mengubah limbah kertas menjadi berbagai bentuk kerajinan tangan serta sampah organik menjadi pupuk kompos memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat salah satunya di bidang ekonomi.

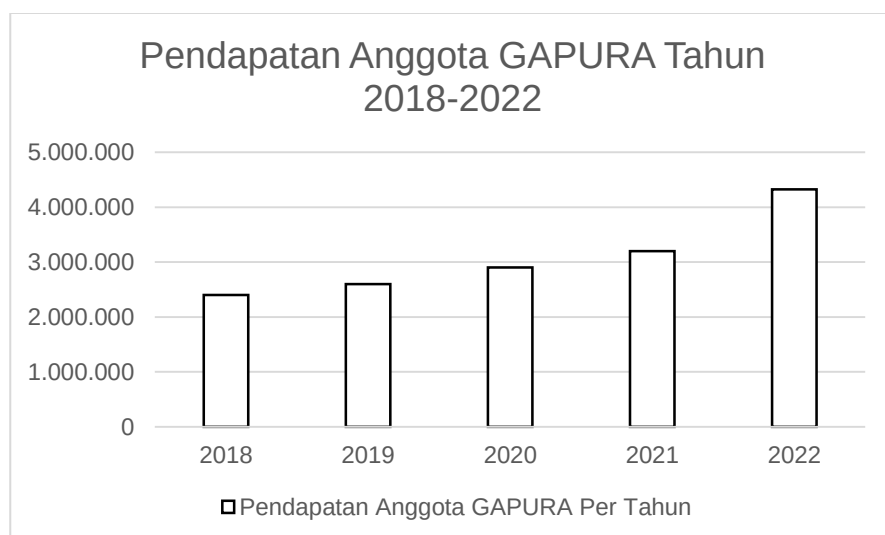
Konsep ekonomi sirkular memberikan kesempatan bagi masyarakat yang kurang produktif dari segi finansial mampu menghasilkan dan meningkatkan perekonomiannya secara mandiri melalui berbagai kegiatan di GAPURA. Seperti hal yang dirasakan oleh Ibu Ihat “setelah adanya program Kelompok Wanita Tani kebutuhan sayur mayur cukup terbantu dengan harga yang lebih murah dibandingkan di pasar, terus kita juga tidak perlu ke pasar karena cukup jauh mahal di ongkosnya.”

Selain kebutuhan sayur mayur, Ibu Rumah Tangga yang tadinya tidak memiliki penghasilan secara mandiri dan belum bisa membantu suami dalam segi finansial, kini mereka memiliki penghasilan sendiri yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, keluarga, dan anak-anaknya. “Sekarang semenjak ikut bergabung di GAPURA jadi punya penghasilan sendiri, kalau anak minta jajan atau butuh apa bisa langsung ngasih” kata Ibu Santi.

Anggota GAPURA mendapatkan penghasilan dari pengumpulan sampah yang dikelola dalam program nabung sampah. Hasil dari menabung sampah tersebut dibagikan setiap menjelang Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri. Semakin rajin menabung sampah maka semakin besar hasil yang akan didapatkan. Setiap jenis sampah memiliki harga yang berbeda, semakin bersih sampah maka semakin tinggi harganya. Harga tertinggi yaitu sampah koran bekas karena semakin langka dan merupakan bahan baku utama kerajinan tangan produk GAPURA.

Selain dari pengumpulan sampah, anggota GAPURA juga mendapatkan penghasilan dari produksi kerajinan yang diberikan upah sesuai dengan kinerjanya masing-masing. Setiap bagian atau tahapan produksi memiliki nilai upah yang berbeda, paling kecil yaitu upah khusus untuk melinting kertas dan yang paling besar adalah pengrajin dari mulai melinting kertas hingga selesai.

Sebelum bergabung dengan GAPURA rata-rata mereka adalah ibu rumah tangga yang tidak memiliki pendapatan yang dihasilkan oleh dirinya sendiri, namun setelah bergabung sejak awal berdirinya mereka mulai memiliki pendapatan sendiri dan dapat menggunakan uangnya untuk membantu kebutuhan rumah tangga maupun digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Berikut merupakan grafik tingkat pendapatan anggota GAPURA dari tahun 2018 sampai tahun 2022.



Grafik 1. Pendapatan Anggota Tahun 2018-2022

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pendapatan anggota GAPURA dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pendapatan tahun 2018 sampai 2019 berkisar antara Rp2.500.000 sampai Rp2.700.000 per tahun, sedangkan tahun 2020 berkisar Rp2.900.000 per tahun. Tahun 2021 sampai 2022 GAPURA mulai dikenal oleh masyarakat yang lebih luas,

mulai mendapatkan pesanan kerajinan dari berbagai pihak mulai dari pemerintahan, lembaga pendidikan dan masyarakat di luar daerah sehingga pendapatan anggota pun cukup meningkat yakni berkisar Rp3.000.000 sampai lebih dari Rp4.000.000 dalam setahun.

Peningkatan pendapatan anggota GAPURA dapat terus bertambah setiap waktunya seiring dengan berkembangnya lembaga pemberdayaan kampung kertas GAPURA dengan konsep ekonomi sirkular. Perkembangan kampung kertas GAPURA tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak demi peningkatan perekonomian masyarakat secara mandiri dan lingkungannya.

F. Ekonomi Sirkular: Solusi Pemberdayaan Masyarakat

Ekonomi sirkular merupakan konsep ekonomi yang mempertahankan daur hidup suatu produk, memanfaatkan sumber daya yang tak memiliki nilai guna menjadi produk yang bernilai ekonomi. Ekonomi sirkular menjadi solusi pemberdayaan masyarakat karena dalam implementasinya konsep ekonomi sirkular dapat terwujud jika seluruh lapisan masyarakat mampu berdaya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dengan demikian ekonomi sirkular secara langsung dapat membantu tingkat perekonomian setiap individu yang terlibat di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Ariani, Zaenafi, dkk. 2022. *Ekonomi Sirkular Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Dukungan Terhadap Pariwisata Berkelanjutan (Konsep, Paradigma, dan Implementasi)*. Deepublish: Yogyakarta.
- Dede. Anggota GAPURA. Wawancara pada tanggal 13 Juni 2023.
- Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish: Yogyakarta.
- Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Peningkatan>. Pada hari Senin, 12 Juni 2023. Pukul 9:17 WIB.
- Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perekonomian>. Pada hari Senin, 12 Juni 2023. Pukul 9:20 WIB.
- Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Masyarakat>. Pada hari Senin, 12 Juni 2023. Pukul 9:23 WIB.
- Erna, Ketua GAPURA. Wawancara pada tanggal 13 Juni 2023.
- Hendra Pridolin Ananda Sudater Siagian., Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dikutip dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lahat/baca-artikel/14891/Pengelolaan-Sampah-di-Indonesia.html>, pada Minggu, 11 Juni 2023, pukul 14.45 WIB.
- Idawati Nita Sulistiorini, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, dikutip dari <https://dlhk.jogjapro.go.id/pengelolaan-sampah-rumah-tangga>, pada minggu, 11 Juni 2023, pukul 15.05 WIB.
- Ihat, Anggota GAPURA, Wawancara pada tanggal 13 Juni 2023.
- Korhonen et al. 2018, dalam Edi Santosa, 2022, Kumpulan Naskah Orasi Ilmiah Guru Besar Institut Pertanian Bogor: Pangan Lokal Sebagai Penghela Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan Era Milenium, IPB Press, Bogor: 22.
- Mulyati, Anggota GAPURA. Wawancara pada tanggal 13 Juni 2023.
- Santi. Anggota GAPURA. Wawancara pada tanggal 13 Juni 2023.
- Setiyo Yuli Handono, dkk. 2020. *Pemberdayaan Masyarakat Pertanian*. UB Press. Malang.
- Tanpa Nama. Tanpa Tahun. Selayang Pandang GAPURA. Diakses melalui <https://sites.google.com/view/gapuraciamis/tentang-kami?authuser=0>. Pada tanggal 28 Juni 2023. Pukul 19.20 WIB.

Zaenafi Ariani, et al. 2022. *Ekonomi Sirkular dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Dukungan Terhadap Pariwisata Berkelanjutan (Konsep, Paradigma dan Implementasi)*. Deepublish, Yogyakarta: 24.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Potensi Desa

Tatang Rois

Potensi Pembangunan Desa

Istilah “desa” di Indonesia sudah ada sejak abad ke-11 pada saat Nusantara masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Secara etimologi, kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “*dhesi*” yang berarti tanah kelahiran. Dalam kamus Bahasa Indonesia, desa diartikan sebagai kelompok rumah di luar kota yang merupakan satu kesatuan, kampung, atau dusun. Kata desa di Indonesia sering kita dengar jika dikaitkan sebagai suatu wilayah administratif di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa (Bawono & Setyadi, 2019).

Terdapat beberapa definisi tentang desa. Matheus (2022) mendefinisikan desa sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga dalam suatu sistem pemerintahan sendiri. Sunarso (2023) mendefinisikan desa sebagai suatu tempat yang di dalamnya terdapat satuan organisasi kehidupan sosial dalam suatu daerah atau wilayah dengan cakupan terbatas. Handayani & Karel (2021) mendefinisikan desa sebagai satu unit kelembagaan pemerintahan yang mempunyai kewenangan pengelolaan wilayah pedesaan.

Menurut UU Nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sering disandingkan dengan kata pedesaan (*rural*). Pedesaan adalah suatu wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk

pengelolaan sumber daya alam pada suatu kawasan sebagai tempat tinggal, pelayanan jasa, pemerintahan, kegiatan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Hardiningtyas dkk. (2019) berpendapat bahwa kemiskinan di desa menjadi salah satu penyebab urbanisasi masyarakat dari desa ke kota, dengan tujuan mencari lapangan pekerjaan. Meskipun di desa memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, tetapi pengelolaannya belum dikelola secara optimal oleh masyarakat desa itu sendiri. Sehingga potensi sumber daya alam yang besar tersebut tidak mampu menyediakan banyak lapangan pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat. Belum lagi dengan ketersediaan infrastruktur di desa yang terbatas dibandingkan dengan daerah perkotaan, ketimpangan tersebut itulah yang turut memperlambat kemajuan desa.

Kristiawan (2021) mengatakan bahwa masalah pokok dalam pembangunan desa adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, dan sumber daya kelembagaan. Orientasi ini mengarahkan kita pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Potensi-potensi ekonomi yang dimiliki setiap wilayah pedesaan saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga masalah yang sering dihadapi adalah adanya ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah, terutama antar wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal tersebut itulah yang menjadikan fokus perhatian pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan wilayah pedesaan.

Matheus (2022) mengatakan bahwa pembangunan suatu desa dapat dilaksanakan dengan baik jika potensi wilayahnya sudah teridentifikasi dengan baik sebagai modal pembangunan. Potensi tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya lainnya. Potensi setiap wilayah tentunya tidak sama, tergantung dari kondisi fisik wilayah, kondisi sosial, kondisi budaya, dan lainnya. Menyikapi hal tersebut, pemetaan potensi dan analisis potensi setiap wilayah sangat diperlukan. Potensi-potensi tersebut dapat dijadikan kekuatan modal pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat. Secara sederhana, pemetaan potensi

desa bertujuan untuk mengidentifikasi sumber daya dan fasilitas desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Ekonomi Desa

Sudah lebih lima belas tahun Indonesia merintis dan menjalankan berbagai proyek dan program pembangunan berbasis masyarakat (*community-driven development*, CDD). Ditandatanganinya UU Desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau UU Desa) pada awal tahun 2014, Indonesia telah membawa prinsip-prinsip pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat dari PNPM Mandiri (program) menjadi kebijakan.

Sunarso (2023) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan untuk menciptakan kemakmuran, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, keuangan, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lainnya.

Iskandar (2020) mendefinisikan sebagai upaya melakukan perubahan dari yang tidak baik (*underdeveloped*) menjadi lebih baik (*developed*) dalam meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, serta infrastruktur di masyarakat.

Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terencana dari situasional yang satu ke situasional yang lain yang dinilai lebih baik. Pembangunan masyarakat adalah kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Teori Pembangunan tidak hanya berlaku untuk daerah perkotaan, tetapi dianggap penting pula bagi desa. Adanya teori pembangunan diharapkan dapat menyelesaikan masalah pada bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, kekuatan militer, dan bidang penting lainnya. Konsep pembangunan di desa pun menjadi prioritas dalam pembangunan agar desa dan masyarakatnya bisa membangun dan mandiri serta bisa menyelesaikan problem-problem pembangunan.

Salah satu fokus pembangunan desa di antaranya adalah bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi perkotaan sangat pesat dibanding dengan desa. Hal itulah yang menjadikan adanya ketimpangan sosial antara

masyarakat kota dengan masyarakat desa. Pembangunan ekonomi pedesaan merupakan suatu proses di mana pemerintah desa dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah desa dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di wilayah tersebut. Membangun ekonomi desa adalah memandirikan ekonomi desa, sehingga masyarakat desa bisa sejahtera dan pemerintahan desa bisa menjadi pelayanan dan penggerak ekonomi desa.

Program pembangunan desa masih menjadi program prioritas pemerintah karena memiliki prospek besar untuk kedaulatan nasional di masa depan. Kedaulatan pangan dan energi di masa depan akan tercapai melalui pemberdayaan potensi desa. Selain itu, potensi pengembangan lahan pertanian dan sumber daya manusia mayoritas berada di desa.

Hardiningtyas dkk. (2019) mengatakan bahwa menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia ada tiga tantangan yang harus dihadapi dalam proses pembangunan desa di Indonesia. Tiga tantangan itu adalah karena belum menjadi daya tarik bagi penduduk untuk mengembangkan diri di desa, tingginya urbanisasi karena terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan di desa, dan tingginya jumlah keluarga petani miskin di desa.

Pemberdayaan Masyarakat

Persoalan kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama pembangunan desa. terdapat beberapa aspek yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia, di antaranya adalah adanya rendahnya kualitas pendidikan, kurang tersedianya lapangan pekerjaan, kurangnya fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, dan lainnya. Persoalan tersebut tentunya tidak boleh dibiarkan begitu saja. Salah satu strategi untuk menghadapi persoalan kemiskinan tersebut melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat (*community development*).

Melalui strategi pemberdayaan masyarakat, masyarakat akan menjadi subjek bukan sebagai objek. Pemberdayaan masyarakat bertujuan mendorong masyarakat terlibat aktif dalam mengatasi permasalahan

mereka sendiri. Sehingga strategi pemberdayaan masyarakat ini akan menjadi relevan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Maryani & Nainggolan (2019) mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan atau tenaga. Sedangkan masyarakat itu sendiri didefinisikan sekelompok individu yang memiliki kepentingan, budaya, dan lembaga bersama yang terorganisir untuk mencapai tujuan bersama.

Bahri (2013) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai proses aktif antara motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Bhinadi (2017) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang dilakukan dalam memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui kegiatan kolektif yang pada akhirnya akan menciptakan kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan melalui proses yang panjang.

Maryani & Nainggolan (2019) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat akan terjadi jika masyarakat ikut berpartisipasi. Sehingga pemberdayaan masyarakat memiliki kata kunci: proses pembangunan, adanya inisiatif masyarakat, dan ada upaya perbaikan pada kondisi masyarakat itu sendiri.

Bahri (2013) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dikaitkan dengan konsep pembangunan masyarakat (*community development*), pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*) dan pembangunan yang digerakkan masyarakat (*community-driven development*)

Terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mendorong suksesnya pemberdayaan masyarakat, antara lain (Maryani & Nainggolan, 2019):

a. Prinsip Kesenjangan

Prinsip kesetaraan yang dimaksud adalah bahwa terdapat kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, tanpa memandang gender, tingkat pendidikan, tingkat sosial, dan lainnya. Adanya prinsip kesetaraan ini akan terbangun hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagi pengetahuan, pengalaman, serta keahlian antar anggota masyarakat. Sehingga pada akhirnya semua anggota masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan akan mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan anggota keluarga lainnya.

b. Prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi kegiatan ini mengarah pada keterlibatan individu masyarakat pada kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat. Kegiatan partisipasi ini awalnya diperlukan keterlibatan pendamping yang memiliki komitmen tinggi pada pemberdayaan masyarakat.

c. Prinsip Kemandirian

Prinsip kemandirian ini mengedepankan kemampuan masyarakat dibandingkan daripada bantuan orang lain. Prinsip ini memandang masyarakat miskin bukan sebagai individu yang tidak berkemampuan, melainkan individu yang memiliki kemampuan sedikit.

Sehingga setiap individu masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat harus didorong untuk mengembangkan kemampuannya atau potensi yang ada pada dirinya dan mampu memecahkan masalah hidup secara mandiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tidak bergantung kepada pihak lain.

d. Prinsip Keberlanjutan

Program pemberdayaan masyarakat harus dirancang mengenai keberlanjutannya, meskipun pada awalnya ada peran dominan dari pendamping. Peran pendamping secara perlahan akan berkurang bahkan bisa dihilangkan seiring dengan kemandirian individu masyarakat. Oleh karena itu program pemberdayaan masyarakat harus mampu memberikan pemahaman, pengetahuan, pengalaman,

dan keterampilan kepada setiap individu masyarakat yang terlibat pada program tersebut. Sehingga pada akhirnya, setiap individu yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat mampu mengembangkan kemampuan atau potensi mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Pemberdayaan masyarakat ini memiliki kaitan dengan pembangunan, salah satunya adalah pembangunan ekonomi. Baik pembangunan ekonomi secara fisik maupun pembangunan ekonomi non-fisik. Umumnya, suatu desa yang masyarakatnya kurang berdaya, perkembangan pembangunan ekonominya akan lambat dan tingkat kesejahteraan individu masyarakatnya rendah. Sebaliknya, desa yang masyarakatnya berdaya akan mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga jelaslah bahwa pemberdayaan masyarakat harus dioptimalkan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi.

Potensi Desa

Secara harfiah potensi adalah kekuatan, kekayaan, kemampuan, kesanggupan, atau daya. KBBI mendefinisikan potensi sebagai suatu kemampuan yang mempunyai berbagai kemungkinan atau harapan untuk dikembangkan lebih lanjut, baik itu berupa kekuatan, daya, ataupun kesanggupan yang diperoleh masyarakat secara langsung ataupun melalui proses yang panjang.

Matheus (2022) mendefinisikan potensi desa adalah semua kekayaan atau sumber daya, baik fisik maupun non-fisik pada wilayah desa. Metanfanuan dkk. (2021) mendefinisikan potensi desa adalah semua sumber daya alam dan sumber daya yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan pembangunan desa.

Pembahasan potensi desa tidak lepas dari pembahasan wilayah atau dikenal dengan istilah *region*. Wilayah itu merupakan bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu. Setiap wilayah memiliki ciri-ciri tertentu dan tentunya memiliki perbedaan. Wilayah desa memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda dengan wilayah kota.

Setiap wilayah atau desa memiliki potensi yang berbeda-beda. Pertanyaannya adalah apakah potensi wilayah tersebut sudah teridentifikasi atau tidak? Sehingga upaya penggalian dalam menemukan potensi suatu wilayah menjadi penting untuk dilakukan. Penemuan potensi wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengetahui potensi wilayah di desa menjadi penting, karena hal tersebut memiliki manfaat sebagai berikut (Matheus, 2022):

- a. Sebagai dasar perencanaan kegiatan pembangunan desa.
- b. Mengenali kekuatan dan kelemahan wilayah suatu desa dalam upaya pembangunan desa.
- c. Mengidentifikasi modal dasar wilayah suatu desa dalam melakukan perencanaan pembangunan.

Terdapat beberapa potensi desa yang bisa dikembangkan dalam memberdayakan masyarakat (Harahap dkk., 2020):

- a. Sumber daya pertanian
Pertanian memiliki peran yang penting dan sangat fundamental dalam mendukung keberlanjutan kehidupan makhluk hidup di bumi. Hal ini karena seluruh konsumsi manusia dan hewan bersumber dari pertanian. Pertanian merupakan salah satu kegiatan paling mendasar bagi manusia, karena semua orang perlu makan setiap hari. Kegiatan pertanian menjadi kegiatan yang tidak asing di temukan di pedesaan. Hal tersebut dapat diketahui dari pemanfaatan lahan yang terdapat di desa.
- b. Sumber daya alam
Sumber daya alam ini merupakan sumber daya yang sudah tersedia di alam yang diciptakan oleh Allah Swt. Sumber daya alam ini merupakan modal besar dalam mendukung pembangunan. Sumber daya alam tiap desa akan berbeda, dan bahkan tidak bisa ditiru karena merupakan anugerah dari Sang Pencipta. Sumber daya alam itu terdiri atas sawah, ladang, perkebunan, gunung, sungai, sumber mata air, dan lain sebagainya.
- c. Sumber daya manusia
Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang sangat penting dalam menggerakkan pembangunan desa, sehingga manusia sebagai

potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Tingkat pendidikan, keterampilan dan semangat hidup masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan desa.

d. Sumber daya buatan

Sumber daya buatan yang terdapat di desa dapat dijadikan salah satu indikator untuk memperhatikan kondisi perkembangan desa. Sumber daya buatan bukanlah sumber daya yang sudah tersedia di alam dan sudah ada diciptakan oleh Allah Swt. Tetapi sumber daya yang dihasilkan oleh usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan dalam mendukung aktivitas manusia.

Sumber daya buatan dapat dikelompokkan pada dua jenis yaitu sumber daya buatan yang di bangun secara swadaya oleh masyarakat dan yang dibangun oleh pemerintah. Terdapat juga sumber daya yang bangun oleh pihak swasta sebagai program tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

e. Sumber daya sosial dan kelembagaan

Sumber daya Sosial dan kelembagaan yang terdapat di masyarakat menunjukkan bagaimana interaksi dan hubungan sosial yang terdapat di masyarakat. Sumber daya sosial tidak terpisahkan dengan nilai, norma dan kebiasaan hidup masyarakat. Nilai, norma, sikap dan keyakinan serta kebiasaan hidup serta lembaga sosial merupakan fasilitas pendukung untuk mendorong berlangsungnya kerja sama yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas masyarakat.

Masyarakat desa cirinya memiliki semangat kegotong-royongan tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat (*gemeinschaft*) dan merupakan landasan yang kokoh bagi kelangsungan program pembangunan. Dengan demikian sumber daya sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan desa.

Menurut Metanfanuan dkk. (2021) potensi desa terdiri atas potensi secara fisik dan potensi secara non-fisik, dengan penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Potensi fisik desa

Potensi fisik desa ini meliputi semua hal yang berhubungan dengan sumber daya alam atau fisik, di antaranya adalah:

- 1) Penduduk sebagai faktor sumber daya manusia.
- 2) Lahan atau tanah yang bisa dikelola sebagai lahan pertanian, pemukiman, dan lainnya.
- 3) Air yang merupakan salah satu unsur kehidupan makhluk hidup.
- 4) Cuaca dan iklim yang mempengaruhi adaptasi manusia dan makhluk hidup lainnya.
- 5) Ternak sebagai sumber daya hewani yang bisa dikonsumsi atau dimanfaatkan tenaganya oleh manusia.

b. Potensi non-fisik desa

Potensi non-fisik desa ini merupakan potensi wilayah yang berhubungan dengan aspek sosial masyarakat desa, di antaranya adalah:

- 1) Gotong royong, merupakan sebagai kekuatan produksi dalam menggerakkan pembangunan. Semangat gotong royong inilah yang menjadikan dorongan setiap warga desa turut memberdayakan diri.
- 2) Lembaga dan organisasi sosial, merupakan faktor pendorong keterlibatan warga desa secara aktif dalam menunjang pembangunan desa. Lembaga inilah yang menggerakkan diberdayakannya semua warga desa dari berbagai lapisan masyarakat.
- 3) Aparatur dan perangkat desa, merupakan perangkat resmi pemerintahan. Lembaga tersebut merupakan lembaga resmi yang dilindungi oleh undang-undang dalam mewujudkan pembangunan desa dengan menggerakkan seluruh lapisan masyarakat agar berdaya.

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Desa

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembangunan ekonomi di desa sangat tertinggal dibandingkan dengan daerah perkotaan. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan rendahnya pembangunan ekonomi di desa, di antaranya adalah keterbatasan sarana pendidikan,

pasar, transportasi, komunikasi, telekomunikasi, pasokan listrik, lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Meskipun lambat laun saat ini sarana-sarana tersebut perlahan ada perbaikan. Termasuk jaringan internet, saat ini sudah masuk ke desa-desa terpencil. Dampak dari rendahnya pembangunan ekonomi tersebut melahirkan masalah-masalah besar di desa, di antaranya kemiskinan, buta aksara, kurangnya informasi, urbanisasi, pengangguran, dan lain sebagainya.

Desa dengan segala potensi yang dimiliki, semestinya harus mampu membangun ekonomi dengan lebih baik. Karena potensi desa tersebut merupakan modal besar dalam menggerakkan pembangunan ekonomi desa. Hanya saja kemampuan menganalisis potensi desa itu masih terbatas. Desa juga memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam mengelola potensi desa. Ditambah lagi dengan terbatasnya kemampuan finansial atau akses pada sumber permodalan dalam mengembangkan potensi desa menjadi terhambat. Masih banyak lagi penghambat dalam mengoptimalkan potensi yang ada.

Salah satu cara yang bisa dilakukan dalam mengatasi kendala pemanfaatan potensi desa, yaitu melalui pemberdayaan masyarakat. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan tersebut harus mengedepankan prinsip-prinsip partisipasi, kesetaraan, kemandirian, dan keberlanjutan.

Desa memiliki warga dengan latar belakang kemampuan yang berbeda. Ada warga yang memiliki kemampuan bidang pendidikan, kemampuan finansial, kemampuan keterampilan teknis, kemampuan komunikasi, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Jika semua warga dengan latar belakang kemampuan tersebut berkumpul, bekerja bersama, serta semua kemampuannya digabungkan akan menciptakan suatu kekuatan besar dalam mengelola potensi desa. hal itulah yang menjadi wujud peran partisipasi seluruh warga pada pemberdayaan masyarakat. Artinya, semua warga terlibat berperan aktif secara bersama-sama memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi desa.

Partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi tentunya harus mengedepankan prinsip kesetaraan dengan tidak membedakan tentang status sosial, gender, dan lainnya. Hal itu akan menciptakan iklim kehidupan bermasyarakat yang harmonis antar warga desa.

Prinsip lainnya dalam memanfaatkan potensi desa adalah dengan mengedepankan prinsip kemandirian. Berikan kesempatan kepada warga yang terlibat dalam pengelolaan potensi desa untuk berinovasi, kreatif, serta memaksimalkan sumber daya yang ada dengan tidak bergantung pada bantuan pihak lain.

Pemanfaatan potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat harus mengedepankan juga prinsip keberlanjutan. Program pemanfaatan potensi itu harus direncanakan dengan baik, memiliki visi dan misi yang jelas, dilakukan pengendalian kualitas, serta perlu dilakukan upaya perbaikan secara terus-menerus.

Jika semua prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dapat diterapkan dengan baik dalam mengoptimalkan potensi desa, maka akan tercipta suatu perubahan baru pada pembangunan ekonomi desa yang lebih baik. Sehingga pada akhirnya kemanfaatan potensi desa dapat dirasakan atau dinikmati secara langsung oleh masyarakat desa. Tidak menutup kemungkinan akan menjadi daya tarik bagi masyarakat desa yang telah melakukan urbanisasi akan kembali ke desa untuk membangun desanya sendiri.

Terdapat beberapa gagasan yang bisa dilakukan dalam mengoptimalkan potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat, antara lain:

- a. Mengoptimalkan peran sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan.

Ketersediaan lahan pertanian, perkebunan, atau kehutanan, baik yang dimiliki oleh perorangan atau milik pemerintah harus dikelola dengan baik menggunakan manajemen rantai pasokan. Penerapan manajemen rantai pasokan itu dapat dikelola mulai dari penyediaan bibit, proses penanaman, pemanenan/pengolahan, hingga proses distribusi dapat melibatkan warga desa setempat. Sehingga akan menciptakan rantai nilai antar warga yang terlibat. Tentunya pada proses pelaksanaannya dilakukan secara terorganisir dengan baik dan dapat melibatkan peran pendampingan.

- b. Menciptakan/mengoptimalkan kawasan wisata desa

Keindahan alam desa yang merupakan anugerah dari Allah Swt. harus disyukuri dan dimanfaatkan dengan baik. Cara pemanfaatannya

adalah dapat dilakukan dengan merawat, memperbaiki, dan menjadikannya sebagai objek tujuan wisata alam. Dengan memberdayakan masyarakat desa, maka akan tercipta rantai nilai mulai dari jasa pengelola, penyedia jasa parkir, penyedia jasa transportasi, penyedia jasa makan minum, penyedia jasa perdagangan untuk oleh-oleh, penyedia jasa penginapan berupa rumah singgah dan lain sebagainya.

c. Menciptakan/memperbaiki produk unggulan desa

Setiap wisatawan, tamu atau warga dari luar wilayah yang berkunjung pada suatu tempat, biasanya tertarik untuk membeli suatu produk yang dijadikan oleh-oleh untuk diberikan kepada keluarga, kerabat, atau teman. Produk pertama yang dicari biasanya berupa produk khas/ikonik suatu tempat. Oleh karena itu warga desa melalui peran pemberdayaan masyarakat harus mampu menciptakan/memperbaiki kualitas suatu produk unggulan yang menjadi ikonik/khas desa.

Menciptakan produk dilakukan jika desa belum memiliki produk unggulan, sedangkan memperbaiki kualitas jika sebelumnya sudah tercipta produk unggulan desa. Hanya saja produk unggulan yang menjadi produk ikonik tersebut harus didasarkan pada potensi sumber daya alam desa setempat. Artinya bahan baku yang digunakan dalam penciptaan produk tersebut sebagian besar didapatkan dari potensi desa tersebut.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana produk unggulan desa tersebut dapat dikenal, diingat, dan memiliki posisi yang baik di benak konsumen. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menciptakan produk yang unik, berbeda, dan sulit ditiru.

d. Menciptakan/mengoptimalkan layanan perpustakaan desa

Lambatnya pembangunan di desa salah satunya disebabkan karena terbatasnya pengetahuan dan informasi, oleh karenanya peran perpustakaan desa sangat membantu dalam menambah pengetahuan dan informasi. Melalui buku, diharapkan warga masyarakat dapat memperoleh tambahan ilmu dan juga bisa meningkatkan angka melek huruf/angka. Keberadaan perpustakaan tersebut memerlukan partisipasi aktif dari semua warga masyarakat, mulai dari penyediaan buku, penyediaan tempat, pengelolaan sirkulasi buku, dan lainnya. Sehingga masyarakat perlu

diberdayakan secara optimal demi menciptakan/mengoptimalkan peran perpustakaan desa. Harapannya adalah, dengan program perpustakaan ini secara tidak langsung memiliki dampak pada peningkatan pembangunan ekonomi.

- e. Menciptakan/mengoptimalkan lembaga pendidikan non-formal desa.

Pendidikan merupakan hal penting bagi pembangunan ekonomi, baik di desa maupun di kota. Keberadaan lembaga pendidikan formal di desa biasanya terbatas hingga pada jenjang Sekolah Dasar. Oleh karena itu untuk menunjang pendidikan formal dapat diselenggarakan pendidikan non-formal.

Terdapat beberapa jenis pendidikan non-formal yang bisa diselenggarakan, di antaranya adalah pendidikan keagamaan non-formal, pelatihan keterampilan, kegiatan olah raga, pelatihan bela diri, pelatihan seni budaya, dan lainnya.

Penyelenggaraan pendidikan non-formal dalam pengelolaannya itu di luar tanggung jawab pemerintah, sehingga penyediaan sarana, dana, dan lainnya menjadi tanggung jawab bersama masyarakat. Sehingga peran pemberdayaan masyarakat menjadi penting untuk menunjang kelancaran kegiatan pendidikan non-formal desa. Harapannya adalah bahwa dengan adanya pendidikan non-formal tersebut dapat menambah pengetahuan, keterampilan, kebugaran dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai seni budaya luhur desa setempat.

- f. Menciptakan/mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa

Hakim dkk. (2022) mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu usaha yang dilaksanakan oleh sistem pemerintah yang merupakan badan usaha sesuai dengan badan usaha yang dibuatnya, dapat dibuat berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. BUMDes juga merupakan lembaga usaha yang dikelola langsung oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan meningkatkan kehidupan perekonomian desa atas dasar kebutuhan dan potensi desa. Secara legal, BUMDes keberadaan kelembagaan dan tata kelolanya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan pada tujuan pendirian BUMDes dalam meningkatkan kehidupan perekonomian desa, sudah seharusnya mendapat dukungan optimal dari seluruh lapisan masyarakat. Sehingga peran pemberdayaan masyarakat menjadi penting agar BUMDes yang ada di desa mampu berkontribusi positif pada pembangunan ekonomi desa. Melalui pemberdayaan masyarakat, maka masyarakat bisa berperan aktif dalam mengelola, memanfaatkan, dan mendorong kemajuan BUMDes.

g. Mengoptimalkan peran Posdaya

Posdaya merupakan model pemberdayaan keluarga yang telah digagas oleh Prof. Dr. Haryono Suyono. Pos pemberdayaan keluarga (Posdaya) merupakan program yang berbasis keluarga yang bertujuan untuk memberikan penguatan fungsi keluarga secara terarah.

Suyono (2020) menjelaskan bahwa Posdaya merupakan forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan sekaligus bisa dikembangkan menjadi wadah koordinasi kegiatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu. Dalam hal-hal tertentu bisa juga menjadi wadah pelayanan keluarga terpadu, yaitu pelayanan pengembangan keluarga secara berkelanjutan, dalam berbagai bidang, utamanya adalah agama, pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, dan lingkungan hidup.

Penguatan fungsi-fungsi utama Posdaya diharapkan memungkinkan setiap keluarga makin mampu membangun dirinya menjadi keluarga sejahtera, keluarga mandiri, dan keluarga yang sanggup menghadapi tantangan masa depan lebih baik.

Posdaya merupakan suatu terobosan bagaimana menghidupkan kembali lembaga-lembaga non-formal yang ada di masyarakat, seperti posyandu, kegiatan keagamaan, pendidikan anak usia dini, siskamling, dan lainnya dipadukan dengan lembaga formal di pemerintahan desa. Diharapkan dengan adanya kolaborasi tersebut, semua warga desa dapat diberdayakan dengan terlibat secara aktif sehingga terwujud keluarga bahagia dan sejahtera.

Daftar Pustaka

- Bahri, E. S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat, Konsep dan Aplikasi*. Kediri, Jawa Timur: Penerbit FAM Publishing.
- Bawono, I. R., & Setyadi, E. (2019). *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Sleman: Penerbit Deepublish.
- Hakim, L., Irene, S., & dkk. (2022). *BUM Desa Sebagai Kekuatan Ekonomi Baru (Sebuah Gagasan untuk Desa di Indonesia)*. Klaten, Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha.
- Handayani, T., & Karel, D. (2021). *Identifikasi Potensi Wilayah Berbasis Agroekosistem*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Harahap, M., Siregar, G., & Venny Riza, F. (2020). Pertanian Desa Lubuk Kertang Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat. *Journal of Agribusiness Sciences*, 4(1), 8–14. Retrieved from <http://journal.umsu.ac.id/index.php/JASc/article/view/6267>
- Hardiningtyas, D., Tama, I. P., Setyanto, N. W., & Lukodono, R. P. (2019). Potential Mapping Of Beton Village, Ponorogo Based On Social, Economic, And Environmental Aspects. *Journal of Innovation and Applied Technology*, 855–864.
- Iskandar, H. A. (2020). *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kristiawan. (2021). *Pengembangan Potensi Produk Unggulan Buah-Buahan Ramah Lingkungan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Sleman: Penerbit Deepublish.
- Matheus, R. (2022). *Analisis Potensi Wilayah Pedesaan-Pendekatan Efektif dalam Perencanaan Pembangunan Pertanian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Metanfanuan, T., Herlambang, M. A., Krishernawan, I., Lestari, N. P., & Ginting, S. (2021). *Pengantar Manajemen Potensi Desa Aku Yakin desaku Punya Sejuta Potensi.pdf*. Bojonegro, Jawa Timur: Aग्रapana Media.

- Sunarso, B. (2023). *Sosiologi Pembangunan Desa*. Ponorogo, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Suyono, H. (2020). *Membangun Budaya Baru*. Surabaya: Airlangga University Press.

Perencanaan Kolaboratif Antarsektor Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa

Syarah Siti Supriyanti

A. Perencanaan Kolaboratif Antarsektor melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menuju Peta Jalan SDG'S

Pelaksanaan perencanaan pada awalnya dilakukan berdasarkan atas rasional instrumental, lalu bergeser ke arah perencanaan berbasis rasionalitas tindakan komunikatif. Perencanaan bertujuan untuk menjadi panduan dalam melakukan tindakan di masa yang akan datang, oleh sebab itu perencanaan berbasis rasionalitas tindakan komunikatif lebih dianggap sesuai dengan kondisi masyarakat masa kini yang lebih partisipatif, kompleks, dan terfragmentasi. Pendekatan perencanaan tersebut secara umum dikenal sebagai perencanaan kolaboratif.

Perencanaan kolaboratif tidak hanya menekankan antar individu, namun juga melibatkan antar lembaga maupun antar sektor. Lebih jelasnya, perencanaan kolaboratif merupakan perencanaan yang berorientasi pada para pemangku kepentingan, melibatkan *stakeholder* (Healey, 2006; Allmendinger dan Tewdwr-Jones, 2002) tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (Graham and Healey, 1999), didasari oleh konsep struktural (Habermas, 1984), sehingga dalam prosesnya melibatkan proses komunikasi, dialog, dan transaktif (Graham dan Healey, 1999; Healey, 2006). Proses ini merupakan proses saling belajar antar pelaku, sehingga masing-masing mendapatkan pengetahuan akan permasalahan yang dihadapi melalui dialog yang terstruktur, yang pada akhirnya akan saling menguntungkan (Sufianti, 2014). Pelaku juga akan memahami masing-masing peran, tugas, tanggung jawab, dan hak nya dalam melakukan perencanaan antar *stakeholder*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa inti dari sebuah perencanaan kolaboratif adalah menetapkan tujuan dan

merumuskan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan sesuai dengan kepentingan masing-masing *stakeholders*.

Dalam konteks perencanaan kolaboratif pada masyarakat, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa adalah kegiatan yang sesuai dalam mengimplementasikan perencanaan kolaboratif tersebut khususnya antar sektor. Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial atau masyarakat sekaligus mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat *people centred, participatory, empowering, dan sustainable* (Chamber, 1995). Pemberdayaan masyarakat sering dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial secara berkelanjutan (Noor, 2011).

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Mandat pemberdayaan masyarakat Desa tertuang dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, yaitu Pasal 2, Pasal 67, dan Pasal 68, sedangkan yang terkait perencanaan pemberdayaan masyarakat desa tertuang pada Pasal 78 yang dijelaskan melalui PP 43 Tahun 2014 Pasal 131 Ayat 1.

Kaitannya dengan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme serta membangun jejaring kerja bagi warga lokal agar mampu berkontribusi optimal terhadap pembangunan desa. Hubungan timbal balik ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Hubungan Timbal Balik antara Pembangunan Desa dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Sumber: Kemendespdtt, 2022

Berdasarkan Gambar 1 di atas, perencanaan pembangunan desa dengan pemberdayaan masyarakat desa tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Konsep perencanaan pembangunan desa yang diatur dalam UU Desa mengalami kemajuan dan perubahan dibandingkan dengan substansi yang diatur dalam PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Sebelumnya, perencanaan desa merupakan bagian dari perencanaan kabupaten/kota. Sekarang, perencanaan pembangunan desa adalah *village self planning* yang berdiri sendiri dan diputuskan sendiri oleh desa (Febrian, 2016). Perubahan ini juga jelas terlihat dari pendekatan yang digunakan oleh UU Desa, yaitu pendekatan “Desa Membangun” dan pendekatan “Membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sehingga, pembangunan desa dilakukan dalam upaya mempercepat proses pemberdayaan masyarakat melalui metode dan pendekatan pembangunan partisipatif dengan memaksimalkan potensi di desa.

Pentingnya perencanaan pemberdayaan masyarakat desa berbasis potensi desa bertujuan agar program/kegiatan pemberdayaan tersebut

berguna dan berkelanjutan bagi masyarakat desa. Menurut Kuncoro (2012), pada kondisi riil di lapangan, program/kegiatan pemberdayaan masyarakat desa kerap kali mengalami kegagalan akibat dari perencanaan yang salah dan tidak tepat, baik pada proses perencanaannya maupun pada proses pelaksanaannya. Penyebab kegagalan perencanaan tersebut dikarenakan apa yang direncanakan tidak mempunyai pijakan yang relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan potensi desa nya. Seringkali, program yang dilaksanakan tidak dapat memberdayakan masyarakat, tetapi justru menciptakan ketergantungan masyarakat pada pihak terkait.

Identifikasi dan pemetaan potensi, masalah, dan sumber sosial menjadi poin inti dalam melaksanakan perencanaan pemberdayaan masyarakat desa agar program/kegiatan dapat berguna dan berkelanjutan bagi masyarakat desa. Kegiatan identifikasi ini memiliki prinsip dasar dan paling utama, yaitu harus bersifat partisipatif (*bottom up*). Menurut Venugopal (dalam Mardikanto dan Soebianto, 2012), perencanaan program akan lebih efektif jika melalui prosedur kerja bersama-sama masyarakat dalam upaya untuk merumuskan masalah (kondisi yang belum ideal atau memuaskan), dan upaya pemecahan yang mungkin dapat dilakukan demi tercapainya tujuan dan penerima manfaat yang ingin dicapai. Sehingga, pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan kolektif yang bersifat terpadu sejak awal, karena melibatkan beberapa pihak terkait, yang harus saling bekerja sama mulai dari perancangan, pelaksanaan, sampai pada tahap evaluasi terhadap program yang dilaksanakan. *Goals* nya adalah hingga masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami permasalahan yang dihadapi, menemukan potensi desa nya, serta mampu merencanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Terkait dengan konteks pemberdayaan masyarakat desa, desa sudah memiliki arah kebijakan tertentu yang wajib mengarah pada pembangunan desa berkelanjutan, yaitu SDG's Desa. SDG's Desa merupakan bentuk pelokalan dari SDG's Global yang dituangkan dalam Perpres 59/ 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pelokalan SDG's sebenarnya telah dianjurkan dari awal publikasi nya. Kesempatan ini dibuka untuk menggalang partisipasi dan kontribusi dari

banyak pihak, sehingga mempercepat pencapaian target tahun 2030. Bahkan, ada tanda bahwa pelokalan ini menjadi syarat kesuksesan implementasi SDG's (Servaes, 2017). Seperti yang dicatat oleh Kementerian Keuangan tahun 2021, SDG's Desa berkontribusi sebesar 74% terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.



Gambar 2. SDG's Desa
Sumber: Kemendesdptt, 2023

Penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui penyusunan Peta Jalan SDG's Desa oleh Kepala Desa yang memuat sasaran SDG's Desa; kondisi objektif pencapaian SDG's Desa; permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDG's Desa; potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDG's Desa; dan rancangan program dan/atau kegiatan pembangunan desa. Peta Jalan SDG's tersebut dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa (SID). Berdasarkan Peta Jalan SDG's Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, Kementerian/Lembaga, dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, serta swasta menyusun program dan/atau kegiatan pembangunan masuk desa untuk percepatan pencapaian SDG's Desa. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan Peta Jalan SDG's Desa tersebut, dibutuhkan perencanaan kolaboratif antar sektor melalui pemberdayaan masyarakat desa.

B. Potensi Perencanaan Kolaboratif dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut SDG'S Desa

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa tidak terlepas dari regulasi yang ada. Perencanaan kolaboratif dalam pemberdayaan masyarakat desa juga terdapat dalam mandat UU Desa pada pasal 112 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Desa:

- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota memberdayakan masyarakat desa dengan:
 - a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
 - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
- 4) Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Diperjelas pada Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Desa yang menyatakan bahwa

- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
 - c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
 - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;

- f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
- i. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
- j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Berdasarkan penjelasan di atas terkait dengan regulasi yang ada dan peta jalan desa berbasis SDG's Desa, maka perencanaan pemberdayaan masyarakat desa harus dilakukan secara kolaboratif partisipatif. Kebutuhan setiap desa tentu berbeda-beda, disesuaikan dengan potensi dan masalah yang ada, sehingga kebutuhan akan program/ kegiatan pemberdayaan masyarakat desa juga bisa berbeda antara desa yang satu dengan desa yang lain. Untuk mempermudah pelaksanaan identifikasi kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan potensi yang ada, maka desa dapat digolongkan menjadi beberapa tipe sesuai dengan SDG's Desa, yaitu:

1. Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan.

Mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan sesuai dengan SDG's Desa 1 dan 2. Penguatan ketahanan pangan desa dengan mengoptimalkan potensi lokal dari sektor usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan atau perikanan. Sebagai pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, desa juga harus melakukan peningkatan akses layanan dasar misalnya jalan usaha tani, jembatan, atau peningkatan kapasitas petani sesuai dengan kebutuhan. Salah satu strategi penurunan kemiskinan yang penting selain mengurangi beban pengeluaran adalah dengan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan di antaranya sebagai berikut:

- a. Peningkatan program-program literasi digital untuk meningkatkan keterampilan masyarakat desa;
- b. Peningkatan kualitas produk desa;
- c. Perluasan akses pemasaran;
- d. Pengembangan keterampilan dan layanan usaha masyarakat desa;
- e. Pengembangan kewirausahaan, kemitraan, keperantaraan;
- f. Pencegahan *stunting* dan gizi buruk; dan
- g. Mendorong SDM terkait untuk dapat memanfaatkan teknologi digital dan mampu menggunakan teknologi IoT.

2. Desa Peduli Kesehatan.

Desa peduli Kesehatan sesuai dengan SDG's Desa 3, 6, dan 11. Kesehatan menjadi aspek penting dalam pembangunan desa, karena masyarakat yang sehat dapat mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Desa peduli kesehatan dapat diwujudkan dengan optimalisasi kegiatan Posyandu dan Poskesdes. Prioritas tujuan desa peduli Kesehatan adalah pencegahan *stunting* bagi balita di desa

Pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan di antara nya sebagai berikut:

- a. Peningkatan sarana/ prasarana kesehatan desa;
- b. Pelatihan dan pendampingan tenaga kesehatan desa;
- c. Promosi dan penyuluhan program kesehatan;
- d. Membangun desa siaga;
- e. Menyosialisasikan pengobatan jarak jauh (*telemedicine*) dan meningkatkan upaya pelacakan kesehatan preventif; dan
- f. Mendorong SDM terkait untuk dapat memanfaatkan teknologi digital dan mampu menggunakan teknologi IoT.

3. Desa Peduli Pendidikan.

Desa peduli pendidikan sesuai dengan SDG's Desa 4. Peningkatan akses terhadap pendidikan bagi anak dan pemuda desa dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga tingkat perguruan tinggi. Selain pendidikan formal, desa juga harus peduli dengan pendidikan informal seperti pelatihan peningkatan kapasitas warga dalam bidang tertentu. Sehingga, sasaran dari pemberdayaan ini tidak hanya ditujukan

kepada para pelajar saja, namun juga kepada para pengajar maupun lembaga pendidikan lainnya, bahkan kepada masyarakat desa secara umum. Pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan di antara sebagai berikut:

- a. Pelatihan kepada tenaga pengajar;
- b. Peningkatan sarana/ prasarana fasilitas pendidikan desa;
- c. Bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu;
- d. Pemberian beasiswa untuk siswa yang berprestasi;
- e. Platform pendidikan dan pembelajaran *online*; dan
- f. Mendorong SDM terkait untuk dapat memanfaatkan teknologi digital dan mampu menggunakan teknologi IoT.

4. Desa Ramah Perempuan.

Desa ramah perempuan sesuai dengan SDG's Desa 5. Pengembangan desa inklusif melalui pemenuhan kebutuhan dasar untuk kelompok marginal dan rentan (perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya) serta pelibatan dalam kegiatan pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan di antaranya sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan kemampuan keterampilan masyarakat desa untuk meningkatkan kreativitas *online* dan *offline*;
- b. Mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan, pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkesinambungan;
- c. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender;
- d. Melakukan pelatihan dalam meningkatkan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/ pengasuhan anak;
- e. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. Penurunan pekerja anak;
- g. Pencegahan perkawinan anak; dan
- h. Mendorong SDM terkait untuk dapat memanfaatkan teknologi digital dan mampu menggunakan teknologi IoT.

5. Desa Ekonomi Tumbuh Merata.

Ekonomi desa tumbuh merata sesuai dengan SDG's Desa 8, 9, 10, dan 12. Optimalisasi dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDesa serta BUMDesma untuk mewujudkan ekonomi desa tumbuh merata. Pengembangan usaha dapat difokuskan untuk pengembangan produk unggulan perdesaan yang inovatif dan berdaya saing. Tujuannya adalah memberdayakan UMKM Desa, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan. Pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan di antaranya sebagai berikut:

- a. Pelatihan peningkatan kapasitas pelaku UMKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar, serta unit usaha ekonomi desa lainnya;
- b. Pendampingan dalam proses produksi hingga ke *end user*;
- c. Melaksanakan *workshop* berjenjang sesuai dengan level kemajuan usaha masing-masing unit usaha;
- d. Penguatan permodalan;
- e. Peningkatan sarana/ prasarana dan alat produksi terutama melalui teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
- f. Pemanfaatan platform *e-commerce*;
- g. Pendampingan dan penciptaan startups dan inovasi desa; dan
- h. Mendorong pelaku ekonomi untuk dapat memanfaatkan teknologi digital dan mampu menggunakan teknologi IoT.

6. Desa Peduli Lingkungan.

Desa peduli lingkungan sesuai dengan SDG's Desa 7, 13, 14, dan 15. Pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dapat dimanfaatkan masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan, misalnya: usaha ekonomi produktif ramah lingkungan atau pengelolaan sampah.

Pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan dapat berupa:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan efisiensi konservasi lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan efisiensi penggunaan tanah dan air;
- c. Pengadaan, pelatihan dan pendampingan rumah TP3R/ pengelolaan sampah; dan

- d. Mendorong SDM terkait untuk dapat memanfaatkan teknologi digital dan mampu menggunakan teknologi IoT.

7. Desa Berjejaring.

Desa berjejaring sesuai dengan SDG's Desa 17. Desa harus mampu mewujudkan kemitraan untuk pembangunan desa. Pembangunan konektivitas juga harus ideal dan merata di masing-masing desa.

Pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan dapat berupa pemberdayaan pada bidang pemerintahan dan bidang kelembagaan, yaitu di antaranya sebagai berikut:

- a. Pelatihan kepada perangkat desa dalam penyusunan program-program desa;
- b. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan program-program desa;
- c. Mendorong peningkatan kualitas kinerja pemerintahan desa;
- d. Peningkatan sarana prasarana pendukung berupa infrastruktur digital;
- e. Meningkatkan akses internet yang lebih inklusif;
- f. Pengumpulan dan penggunaan data yang mudah diakses oleh warga masyarakat;
- g. Investasi dalam digitalisasi kantor dan fasilitas pemerintahan;
- h. Meningkatkan efisiensi pelayanan warga negara dan administrasi publik;
- i. Meningkatkan akses terhadap pelayanan publik melalui teknologi digital;
- j. Pelayanan yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah; dan
- k. Mendorong SDM terkait untuk dapat memanfaatkan teknologi digital dan mampu menggunakan teknologi IoT.

8. Desa Tanggap Budaya.

Desa tanggap budaya sesuai dengan SDG's Desa 16 dan 18. Pengembangan Desa Wisata dengan pembangunan sarana prasarana, promosi, pelatihan, dan kerja sama. Desa wisata dapat dipadukan dengan aktivitas lokal desa, jadi wisatawan dapat berinteraksi dengan masyarakat desa dan akan berkunjung kembali ke desa di suatu saat.

Pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan di antaranya sebagai berikut:

- a. Memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pariwisata, seperti pendidikan SMK, advokasi, maupun S-1 di bidang pariwisata;
- b. Memberikan pelatihan dan meningkatkan jumlah SDM yang memiliki sertifikasi sesuai dengan standar MICE internasional;
- c. Mendorong terbentuknya kelompok sadar wisata (pokdarwis) untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;
- d. Meningkatkan pengetahuan budaya dan jaringan sosial; dan
- e. Mendorong SDM pariwisata untuk dapat memanfaatkan teknologi digital dan mampu menggunakan teknologi IoT.

Perwujudan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat desa seperti yang disampaikan di atas tentunya harus melalui perencanaan yang matang. Perencanaan tersebut seharusnya berdasar pada konsep kolaboratif, partisipatif, dan komunitas. Perencanaan kolaboratif dapat terjadi Ketika berbagai lembaga yang memiliki kepentingan yang berbeda berusaha untuk memenuhi kepentingannya dengan cara bekerja sama dalam perumusan yang memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga menghasilkan suatu keputusan bersama dengan kepemilikan hasil akhir bersama baik berbentuk produk maupun jasa yang dihasilkan. Secara umum, perencanaan tersebut dapat melibatkan, namun tidak terbatas pada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Pemerintahan yang lebih kecil (desa, dusun, RW, maupun RT);
- d. Kementerian/ Lembaga;
- e. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
- f. Lembaga yang menaungi beberapa program pemberdayaan.

Sedangkan secara khusus, Pesson (Sanders, 1966) mengemukakan detail dalam penyusunan perencanaan program yang harus dilakukan para *stakeholder*, yaitu:

1. Identifikasi sistem sosial yang bersangkutan: Adanya identifikasi sistem sosial sebelum perencanaan program sangat diperlukan, karena penerima manfaat pembangunan adalah masyarakat itu

sendiri. Melalui identifikasi sistem sosial, akan dapat diketahui beberapa hal yang menyangkut:

- a. Nilai-nilai sosial budaya masyarakat
 - b. Struktur kekuasaan
 - c. Kebiasaan masyarakat/perilaku, dll.
2. Identifikasi mengenai “*key individual*” dalam struktur masyarakat penerima manfaat: Setiap sistem sosial, biasanya memiliki struktur tertentu dengan “*key individual*” yang khusus juga. Individu kunci tersebut, pada umumnya dapat dipegang oleh pemimpin formal, tetapi dalam banyak kasus bisa juga dipegang oleh tokoh-tokoh informal seperti:
- a. Pemuka agama
 - b. Tokoh politik
 - c. Pedagang
 - d. Petani kaya
 - e. Pelepas uang, dll.

Oleh karena itu, penelusuran terhadap individu-individu sangat diperlukan dalam perencanaan program, sebab mereka dapat mengembangkan opini-publik yang sangat menentukan tingkat partisipasi masyarakat demi keberhasilan program yang akan dilaksanakan.

3. Penerimaan tujuan program oleh “*key-individual*”: Karena pentingnya peran *key-individual* dalam kehidupan masyarakat, keberhasilan program akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh program yang dirancang benar-benar telah diterima oleh *key-individual*.
4. Peran serta secara aktif *key-individual* dan individu dalam masyarakat: Keberhasilan pembangunan, pada dasarnya sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat, baik dalam pemberian input, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Karena itu, peran serta aktif setiap individu dalam masyarakat penerima manfaat sangat berpengaruh.
5. Dorongan aktif dari setiap individu dalam masyarakat: Dalam setiap perencanaan program perlu selalu ditumbuhkan semangat membangun di kalangan setiap warga masyarakat desa, sehingga

mereka tidak hanya berpartisipasi karena diminta, tetapi secara aktif mendorong keberhasilan program-program yang telah direncanakan.

Sehingga, strategi yang paling utama dalam pelaksanaan perencanaan oleh para *stakeholder* tersebut adalah sebagai berikut (Hamid, 2018):

1. Perencanaan program, merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Perencanaan program merupakan suatu rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang tidak pernah berhenti sampai tercapainya tujuan yang dikehendaki.
2. Perencanaan program harus bersifat kolaboratif partisipatif. Perencanaan program harus dirumuskan dengan banyak pihak dan melibatkan masyarakat desa itu sendiri yang didukung oleh para ahli, praktisi, dan penentu kebijakan yang berkaitan dengan upaya-upaya pembangunan masyarakat setempat.
3. Perencanaan program, dirumuskan berdasarkan fakta lapangan dan kondisi desa (bukan dugaan) dan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia yang mungkin dapat digunakan.
4. Perencanaan program, meliputi perumusan tentang keadaan, masalah, tujuan, dan cara (kegiatan) untuk mencapai tujuan.
5. Perencanaan program, merupakan pernyataan tertulis tentang keadaan, masalah, tujuan, cara mencapai tujuan, dan rencana evaluasi atas hasil pelaksanaan program yang telah dirumuskan.

C. Pendalaman Kasus: Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar IKN di Sektor Logistik

Dalam rangka pembangunan IKN menjadi *superhub* ekonomi nasional maka diperlukan dukungan dari sektor logistik dan transportasi. Pengembangan sektor logistik ini tidak hanya terbatas pada kawasan IKN namun juga pada wilayah mitra seperti Samarinda. Saat ini sektor logistik juga berkembang dengan memanfaatkan digitalisasi sehingga pelayanan lebih cepat, efektif dan efisien. Salah satu peluang pengembangan sektor logistik adalah kebutuhan tenaga kerja baik di IKN dan daerah sekitarnya yang akan membuka lapangan kerja baru. Tantangannya adalah penyediaan SDM yang melek digital khususnya terkait sektor logistik serta potensi adanya SDM berkualitas dari luar Kaltim yang akan turut

berkompetisi dalam aktivitas logistik. Strategi penguatan untuk menjawab peluang dan tantangan dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, seperti:

1. Pengembangan SDM logistik melalui pendidikan formal dan jalur profesi;
2. Memanfaatkan potensi jumlah penduduk usia muda dengan meningkatkan kompetensi pekerja di sektor logistik, mulai dari pelayanan hingga penguasaan teknologi digital;
3. Mendorong SDM logistik agar mampu menggunakan teknologi *artificial intelligence* (AI) dan *internet of things* (IoT) dalam bidang pergudangan, pelayaran, dan transportasi; dan
4. Perlunya mengembangkan skema pelatihan dan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di bidang logistik.

Daftar Pustaka

- Allmendinger, P. 2002. *Planning Theory*. New York: Palgrave.
- Chambers, R. 1995. Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? *Environment and Urbanization*, Vol. 7 (1): 173-204.
- Febrian, R.A. 2016. Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi). *Jurnal Pemerintahan, Politik, dan Birokrasi*. Vol. II No. 1, hal. 200-208.
- Graham, S. and Healey, P. 1999. Relational Concepts of Space and Place: Issues for Planning Theory and Practice. *European Planning Studies* 7 (5), 623-646.
- Habermas, J. 1984. *Theory of Communicative Action*. Vol 1: Reason and the Rationalization of Society. Boston, MA: Beacon Press.
- Hamid, H. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca: Makassar.
- Healey, Patsy. 2006. *Collaborative Planning, Shaping Places in Fragmented Societies*. 2ed. New York: Palgrave Macmillan.
- <https://www.kemendesa.go.id/>
- Kuncoro, M. 2012. *Perencanaan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Mardikanto T, Poerwoko S. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Noor, Munawar. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 2 (2).
- Sanders, H.C. (ed). 1966. *The Cooperation Extension Service*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Servaes, J. 2017. *Introduction: From MDGs to SDGs. In Sustainable Development Goals in the Asian Context*, pp. 1-21. Springer: Singapore.
- Sufianti, E. 2014. Kepemimpinan dan Perencanaan Kolaboratif pada Masyarakat Non-Kolaboratif. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Vol. 25, no. 1, hlm 77-95.
- Supriyanti, S.S., Kusmayanti, J.D., AP, A.R., Oktarina, A. 2022. *Pemantauan Ekonomi dan Pembangunan Terkini*, Volume 1 No. 3 Desember 2022: Pemberdayaan Masyarakat Sekitar di Wilayah Ibu Kota Nusantara.

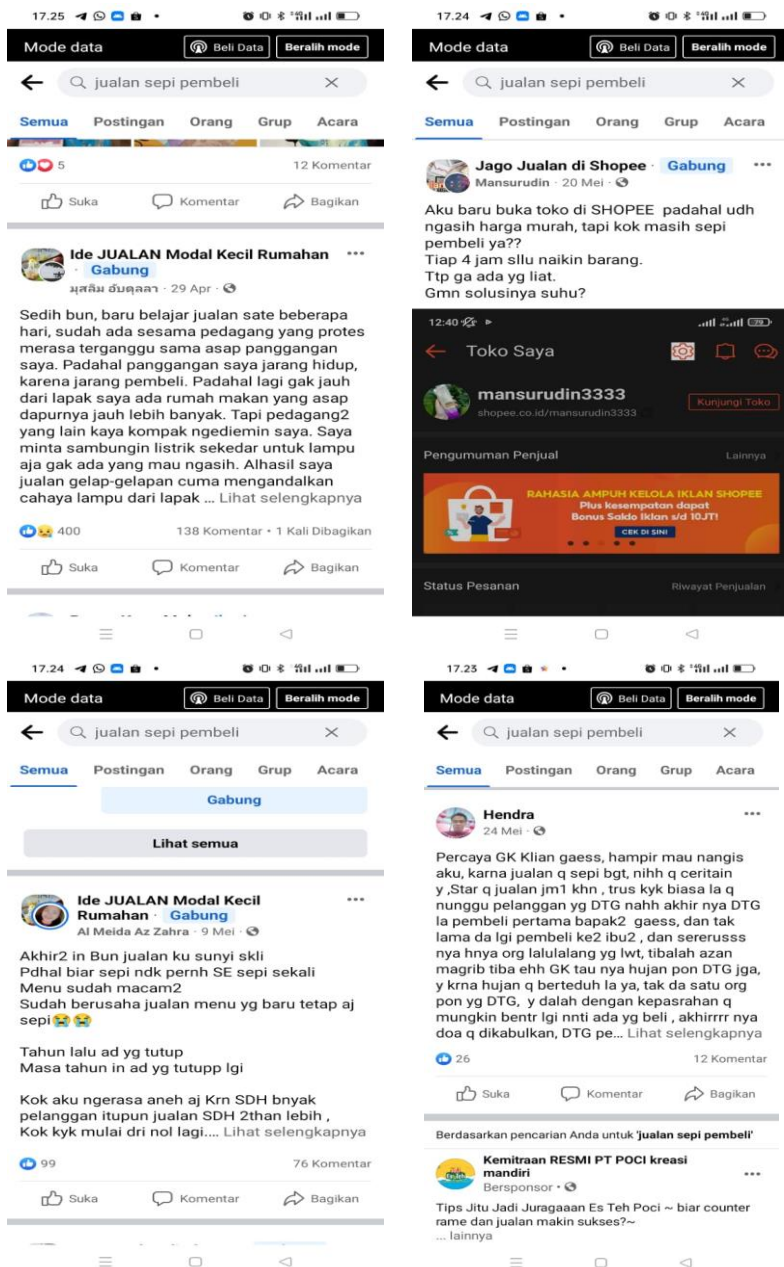
Wikantosa, B. 2022.
[https://pusdik.mkri.id/materi/materi_279_PEMBERDAYAAN%20
MASYARAKAT%20DESA%20-%20KEMENDES.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_279_PEMBERDAYAAN%20MASYARAKAT%20DESA%20-%20KEMENDES.pdf)
Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004.
Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bumdesa dan Pengentasan Kemiskinan Desa

Binti Nur Asiyah

Lembaga Pendorong Perputaran Ekonomi di Masyarakat Desa

Masyarakat di desa memiliki keragaman kondisi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada di antaranya yang memiliki kemudahan ekonomi, bisnis apapun yang dijalankan selalu mendapatkan keberuntungan. Dibalik sebagian masyarakat yang memiliki kemudahan ekonomi, ada pula masyarakat yang memiliki tingkat kesulitan hidup yang tinggi. Apapun yang diusahakan tidak menjadi pilihan bagi masyarakat lainnya. Apalagi jika itu adalah usaha di bidang kuliner. Kuliner memerlukan modal di awal, kemudian harus diolah untuk menjadi makanan siap disajikan. Tatkala kondisi pembeli ramai, dengan senang hati penjual dan mendapatkan laba yang cukup. Namun saat tiada pembeli atau jumlah pembeli tidak sesuai harapan penjual, dagangan yang sudah masak tidak ada yang membeli maka barang dagangan kuliner tidak laku. Makanan yang tidak laku tidak layak untuk dijual esok harinya. Hal ini berdampak pada kerugian. Bagi masyarakat yang modalnya pas pasan maka tidak memiliki kemampuan belanja untuk dijual keesokan harinya. Jika dikonfirmasi ke penjual, sedemikian rupa usaha sudah dilakukan namun sebagian di antaranya belum mendapatkan keberuntungan. Seperti gambaran berikut:



Gambar 1. Fenomena Kesulitan Usaha di Masyarakat
Sumber: Media sosial Facebook, diakses pada 08 Juni 2023

Persoalan tersebut berdampak pada munculnya kemiskinan di masyarakat. Oleh karenanya perlu untuk ditindaklanjuti peran segenap pihak untuk saling menguatkan. Bentuk penguatan sebagaimana dilakukan Asiyah dan Sari dengan melakukan pendampingan terhadap wirausaha muda agar mampu mengidentifikasi segmentasi pasar sehingga pasar yang awalnya sepi, mampu memilih segmen pasar yang saat ini sedang diminati oleh konsumen.(Asiyah & Sari, 2022) Problem ekonomi di masyarakat dapat diidentifikasi dari potensi yang ada di masyarakat, ada di antaranya yang ahli membuat Tape berbahan singkong, ahli membuat lauk-pauk seperti tempe dan tahu, aneka kripik, namun keahlian ini hanya dimiliki oleh salah seorang diri keluarga, sehingga belum memberikan dampak ekonomi pada masyarakat di sekitarnya. Pada hal ada di antara sisi masyarakat yang lain yang terhimpit perputaran ekonomi. Maka jika satu di antara yang lainnya potensi ekonomi di masyarakat dapat di *link and match*, maka satu sama lain dapat saling membesarkan usaha dan menikmati keberuntungan. Semisal dengan adanya ahli membuat lauk tempe, maka dapat bersinergi dengan masyarakat yang kurang beruntung dalam berjualan, maka bisa memanfaatkan pasar lauk-pauk tempe dari hasil ahli pembuat tempe. Nah dalam hal ini produsen tempe yang sudah ahli membuat tempe dapat memperbanyak produksi, sementara masyarakat lain dapat berfungsi sebagai penjual. Maka dalam hal ini akan muncul keuntungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam usaha tempe tersebut.

Kesulitan berusaha sebagaimana uraian di atas menjadi persoalan di masyarakat. Program Pemerintah berbasis bantuan tunai cukuplah banyak, seperti Bantuan Lansia, Bantuan Janda, Bantuan Sembako, Bantuan atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan lain sebagainya. Bantuan ini juga memiliki persyaratan tertentu, yang tidak semua warga memiliki hak untuk mendapatkannya. Bagi masyarakat yang tidak berhak mendapatkan bantuan dengan berbagai alasan misalnya rumahnya bagus. Kenapa bagus, karena pada umumnya, saat masyarakat memiliki uang, yang diprioritaskan adalah tempat tinggal, bagus, megah. Menjadi fenomena, masyarakat yang bekerja di Luar Negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia, saat mendapatkan uang dikirimkan ke Indonesia, dan digunakan untuk membangun rumah yang megah dan bagus. Walhasil, tidak ada usaha lain yang memberikan pendapatan saat kondisi balik ke tanah air, karena uang

yang dikirimkan sudah menjadi bangunan. Sekalipun saat tidak memiliki penghasilan, adanya bantuan-bantuan yang tidak bisa diaksesnya karena kondisi rumah bagus, porselin, listrik di atas 2 paket, maka tidak mendapatkan bantuan-bantuan yang dimaksud. Belum lagi akibat kondisi ekonomi global yang tidak menentu, perusahaan-perusahaan terkena dampak yang akhirnya mengurangi karyawan, atau istilahnya terjadinya Pemutusan Kontrak Kerja Karyawan. Hal ini menimbulkan kemiskinan baru di saat para karyawan tidak memiliki pekerjaan lain selain pekerjaan sebagai karyawan yang telah diberhentikan. Hendak berdagang, tidak memiliki *passion* terkait hal tersebut, maka yang terjadi seperti fenomena yang tergambar sebelumnya. Sebagaimana dirilis CNBC Indonesia bahwa salah satu dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, mendorong peningkatan kemiskinan sebesar 0,20 juta orang mencapai 26,36 juta orang. Hal itu berada pada angka Garis Kemiskinan (GK) meningkat sebesar 5,95% menjadi Rp535.547,00 per kapita per bulan.(Redaksi, 2023). Hal itu ditegaskan dalam publikasi Badan Pusat Statistik bahwa jika dibandingkan antara Maret 2022, jumlah penduduk miskin pada September 2022 perkotaan meningkat sebanyak 0,16 juta orang (dari 11,82 juta orang pada Maret 2022 menjadi 11,98 juta orang pada September 2022). Begitu juga yang terjadi pada kemiskinan di pedesaan periode yang sama jumlah penduduk miskin pedesaan meningkat sebanyak 0,04 juta orang (dari 14,34 juta orang pada Maret 2022 menjadi 14,38 juta orang pada September 2022). Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547,00/kapita/ bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp397.125,00 (74,15 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp138.422,00 (25,85 persen).(BPS, 2022)

Kondisi demi kondisi sebagaimana dalam potret di atas relevan dengan keberadaan organisasi baru di tingkat desa yang disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengelola potensi ekonomi di desa untuk kesejahteraan masyarakat desa, lebih spesifik mampu menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD). BUMDesa selaku badan yang berada di tingkat desa, di mana pengelolaannya diperlukan pemenuhan prinsip agar tujuan mampu memberi manfaat kepada masyarakat desa lebih luas di antaranya terpenuhinya prinsip Kooperatif. Antar sesama pengelola, pemerintah desa

dan masyarakat sebagai bagian dari bentuk aspirasinya maka BUMDesa bisa sejalan seiring dan bahu membahu. Prinsip berikutnya Partisipatif. BUMDesa sebagai organisasi baru memiliki banyak keterbatasan, sehingga partisipasi aktif antar kekuatan di desa menjadi penting dilakukan. Prinsip ketiga Emansipatif, dukungan penuh terhadap BUMDesa dan pencapaian visi misi BUMDesa adalah yang utama. Prinsip keempat, Transparan. Mengingat yang dikelola itu modal penyertaan dari desa, masyarakat maka BUMDesa baik proses dan hasilnya bisa diketahui oleh masyarakat, baik dalam wadah Rapat Tahunan, publikasi media sosial agar menumbuhkan kepercayaan dari segenap pihak. Prinsip kelima Akuntabel, Semua transaksi tercatat, terekam sehingga dapat menjadi barang bukti atas setiap progres BUMDesa. Prinsip keenam, *Sustainable*, BUMDesa itu bersifat jangka panjang, meskipun dalam kepengurusannya ada masa waktu, namun demikian bahwa manfaat dan keberlangsungan BUMDesa dapat dilakukan secara berkelanjutan.(Salihin, 2021)

Fenomena lain adanya usaha masyarakat yang turun temurun, secara kualitas memiliki rasa yang enak, misalnya saja tape singkong, tahu, tempe yang murni olahan masyarakat, bukan pabrik. Keahlian yang turun temurun ini sering kali tidak didukung dengan manajemen pemasaran yang cukup, walhasil keahlian yang turun temurun tidak mampu menyerap tenaga kerja yang cukup bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut juga tidak berdampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat karena saat yang diproduksi terbatas, keuntungan pas pasan, sehingga tidak bisa mendapatkan keuntungan maksimal.

Kondisi-kondisi di atas terdapat irisan dengan lembaga di Desa, di mana masyarakat yang terdapat kesulitan hidup juga berada di desa. Lembaga Desa tersebut disebutlah Badan Usaha Milik Desa. Lembaga ini sejatinya memiliki peran dalam mendorong perputaran ekonomi di masyarakat sehingga berdampak pada masyarakat dan lebih jauh lagi dapat mendorong pendapatan bagi Desa atau disebut dengan Pendapatan Asli Desa. Tahun 2021 BUMDes di Tulungagung telah mampu memberikan PAD pada desa terkait yaitu Desa Kendal Bulur Kabupaten Tulungagung.(Asiyah *et al.*, 2021) Bum Desa menjadi lokomotor perekonomian dan bisnis di tingkat desa, mendorong kemudahan sirkulasi ekonomi. BUMDesa yang memiliki jejaring antar BUMDesa menjadi

pasar tersendiri untuk saling menghubungkan potensi dan usaha masyarakat desa satu dengan yang lainnya. Hal ini meminimalisir usaha masyarakat yang tidak laku, dan bahkan semakin menguatkan produk lokal desa untuk menjadi identitas desa.

BUMDesa dalam hal bisnis, mulai diperhatikan karena mendapatkan penyertaan modal dari anggaran desa. Untuk menjadi BUMDesa yang bisa menggerakkan ekonomi masyarakat membutuhkan partisipasi dari permodalan yang cukup, baik dari desa maupun dari masyarakat. Konsep bagi hasil tentunya akan mendorong ketenangan dalam berbisnis, agar keuntungan menjadi daya tarik kedua belah pihak. Lahan-lahan yang tidak produktif dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sarana untuk menjadi tempat berkumpul warga, *jogging track*, sehingga mempertemukan warga satu dengan yang lainnya, menjajakan usaha masyarakat, sehingga ekonomi dapat berputar.

BUMDesa dalam Pesan Undang-Undang dan Aturan Terkait

BUMDes merupakan amanah dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Undang-undang tersebut mengamanahkan dalam pasal 213 bahwa Desa dapat mendirikan Badan usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa dengan senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (Indonesia, 2004) BUMDesa secara legal didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pasal 1 menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa / dan atau bersama-sama desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau menyediakan jasa usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. (Pemerintah Republik Indonesia, 2021) Hal tersebut memberi makna bahwa kesejahteraan masyarakat akan terbentuk tatkala desa berperan penuh dalam mendorong perekonomian di desa baik dalam hal pemanfaatan aset yang tidak produktif, investasi yang tidak berkembang untuk kemudian dikembangkan, jasa pelayanan kegiatan yang memudahkan masyarakat dalam berekonomi dan kegiatan lain yang mendorong perputaran ekonomi di masyarakat. Oleh karenanya BUMDesa yang dibentuk oleh desa didorong untuk mampu untuk mengelola usaha

desa sesuai kebutuhan dan potensi desa. Pada pasal 3 disebutkan bahwa tujuan berdirinya BUMDesa antara lain BUMDesa dapat mengelola suatu kegiatan usaha, mengembangkan investasi, mendorong ekonomi di masyarakat tumbuh produktif, menjalankan layanan masyarakat yakni melayani berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh warga di sekitarnya, sehingga konsumennya sudah jelas yaitu warga, mengelola lumbung pangan desa (dalam hal ini mendorong tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat misalnya beras, singkong (gaplek), jagung, gandum sebagai substitusi kebutuhan pokok di masyarakat). Misalnya di Daerah pegunungan yang tumbuh bagus singkong, maka didorong untuk memproduksi tiwul instan, jagung instan. Tiwul instan, jagung instan ini merupakan pengganti beras, dan dapat bertahan dalam waktu cukup lama). Pembiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan substitusi terutama untuk generasi muda menjadi warisan untuk mempertahankan budaya masyarakat, khas masyarakat. Selain itu BUMDesa bertujuan untuk memperoleh keuntungan / laba bersih agar dapat menyuplai pendapatan asli desa. Pendapatan asli Desa ini kembali digunakan oleh Pemerintahan Desa untuk mendorong terwujudnya APBDes yang berkelanjutan, tatkala Bantuan-Bantuan keuangan Pusat dan Daerah mulai dibatasi, agar desa terus dapat berdaya guna, membangun masyarakat. Hadirnya BUMDesa bertujuan untuk dapat memanfaatkan aset desa yang terbengkalai, agar mampu meningkatkan nilai manfaat atas aset desa yang dimiliki. Terkadang, ada banyak bengkok desa, lahan desa yang belum termanfaatkan dengan baik, maka bisa diberdayagunakan untuk usaha, bisnis agar mendapatkan penghasilan. BUMDesa dalam hal ini juga bertujuan mengembangkan ekosistem digital di desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2021) dengan berbagai cara dilakukan, edukasi masyarakat, masuknya internet/wifi ke desa dan tercukupinya untuk kemajuan masyarakat desa.

Pembentukan dan Capaian BUMDesa

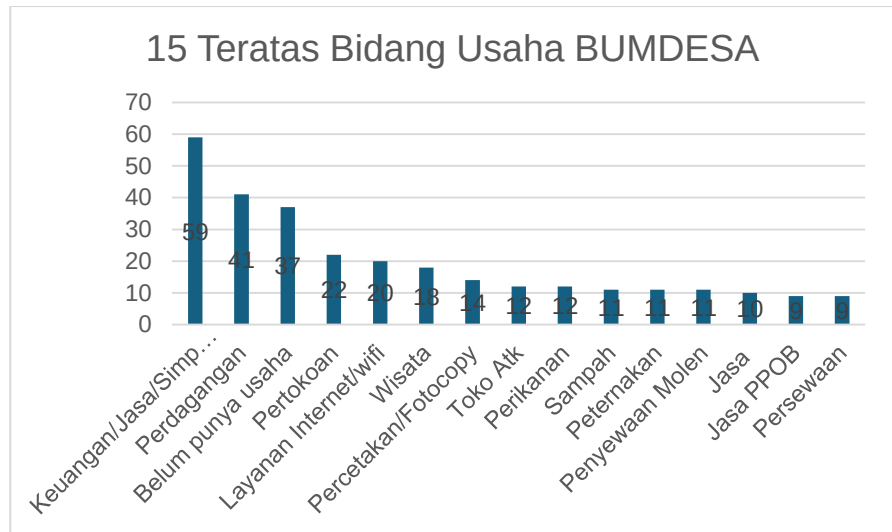
BUM Desa di Tulungagung hampir terbentuk di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Dorongan yang kuat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Tulungagung semakin mempercepat terbentuknya BUMDesa di Kabupaten Tulungagung. Capaian yang besar dibandingkan oleh Kabupaten-kabupaten Lainnya di Jawa Timur.

No	Kecamatan	Jumlah Desa Terbentuk	Jumlah Desa Belum terbentuk
1	Gondang	20	0
2	Boyolangu	17	0
3	Ngantru	13	0
4	Kedungwaru	18	0
5	Campurdarat	8	1
6	Bandung	18	0
7	Pakel	19	0
8	Karangrejo	13	0
9	Kalidawir	16	0
10	Besuki	10	0
11	Kauman	13	1
12	Tanggunggunung	7	0
13	Sendang	8	2
14	Pagerwojo	10	1
15	Pucanglaban	10	0
16	Ngunut	18	0
17	Rejotangan	16	0
18	Sumbergempol	18	0

Sumber: Dinas PMD, hasil tabulasi Kerja PPL UINSATU 2021

Pengentasan Kemiskinan atas Peran BUMDES

Bidang usaha yang mampu dihasilkan oleh BUMDesa di Kabupaten Tulungagung di antaranya sebagai berikut:



Sumber: Dinas PMD, hasil tabulasi Kerja PPL UINSATU 2021

Sejumlah kegiatan yang mampu dihasilkan oleh BUMDesa telah membuka lapangan kerja pada masing-masing usaha, entah sebagai karyawan penuh waktu, Sebagian waktu maupun incidental sesuai pesanan jasa. Dari akumulasi bidang usaha jika masing-masing usaha membutuhkan satu pekerja, maka kegiatan usaha tersebut mampu menyerap 477 sumber daya manusia.

BUMDesa Kabupaten Tapin menunjukkan bahwa usaha BUMDesa Tapin pada tahun 2018 di antaranya berupa penggemukan sapi (3 BUMDesa), Pengelolaan air bersih (4 BUMDesa), Sewa ternak kandang unggas (1 BUMDesa), Sewa alat pengaduk semen (2 BUMDesa), Jual bahan bangunan (2 BUMDesa), Sewa alat pertanian (2 BUMDesa), Jual pupuk dan alat pertanian (1 BUMDesa), simpan pinjam (3 BUMDesa), Penyewaan Tenda (4 BUMDesa), Pangkalan LPG (3 BUMDesa), Jasa angkuta (1 BUMDesa), Pengolahan emping jagung (1 BUMDesa), Peternakan lebah madu (1 BUMDesa), 4 BUMDesa lainnya tidak aktif.

(Pradana & Fitriyanti, 2019) Hadirnya BUMDesa tersebut dapat menumbuhkan 28 usaha. Hal ini mampu mempertemukan antara usaha BUMDesa di Kabupaten Tapin, pengelolanya dan juga masyarakat terkait, sehingga mampu menambah lapangan kerja baru bagi masyarakat.

BUMDesa Labuhan Haji Lombok Timur memiliki usaha di antaranya unit usaha simpan pinjam, produksi batako serta unit penyediaan barang kebutuhan masyarakat. Dalam usaha ini belum banyak memberikan kontribusi pada masyarakat karena kurangnya partisipasi masyarakat setempat, dan manajemen pengelolaan yang belum sepenuhnya maksimal.(R & Hailudin, 2021) Hal ini seperti yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, pengelolaan dana Desa banyak digelontorkan di desa secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan(Kawulur *et al.*, 2019), artinya pengelolaannya perlu ditingkatkan agar mampu mendorong pengurangan kemiskinan. Penelitian lain juga menunjukkan adanya program Dana Desa yang dikeluarkan pemerintah memang mampu mendorong pengurangan kemiskinan, namun keberadaannya masih lambat dalam mengurangi kemiskinan. (Saragi *et al.*, 2021) Kaitan dengan BUMDesa, dengan sama-sama pengelolaan keuangan tingkat desa, maka diharapkan bisa mengambil sisi agar BUMDesa mampu mengurangi kemiskinan di desa secara lebih besar, menciptakan lapangan kerja. Pada umumnya program Dana Desa keperuntukannya adalah untuk membangun fisik di desa, yang tidak secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Program BUMDesa yang mampu memberikan keterlibatan ekonomi masyarakat lebih banyak sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran BUMDesa dari sisi pemenuhan ekonomi. Penelitian tentang Dana Desa Dan BUMDesa menunjukkan bahwa keduanya sama-sama berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan, namun pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDesa masih lebih kecil dibandingkan pengelolaan keuangan yang dilakukan dari Dana Desa dalam mengurangi kemiskinan.(Azhari *et al.*, 2022) Hal ini perlu diketahui bahwa dana Desa yang dikelola dari sisi jumlah besar, sedangkan BUMDes hanya mengelola dari penyertaan dana desa, yang umumnya disertakan dari sebagian dana Desa yang dimiliki oleh Desa.

BUMDesa Gentha Persada dalam memiliki upaya dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan berbagai program

sehingga mengurangi pengangguran. Di antara programnya yaitu unit usaha simpan pinjam, jasa sampah, *money charger*, dan perdagangan.(Pradnyani, 2019) Permasalahan mendasar dalam upaya mengembangkan BUMDesa di wilayah ini di antaranya perlu dukungan semua pihak untuk memperluas jaringan usaha sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat desa secara luas, mengingat wilayah ini merupakan wilayah wisata, maka daya tarik masyarakat perlu saling ditautkan. Termasuk dalam hal ini fungsi *channeling* dari program *Corporate Social Responsibility* dalam membangun daerah di sekitar wisata, pesisir pantai. BUMDesa dalam Upaya mendorong keterlibatan dalam mengurangi kemiskinan dan terwujudnya kesejahteraan pada umumnya bisa dilaksanakan dengan mendorong iklim agar masyarakat sekitar bisa menjalankan usahanya, BUMDesa selaku badan dapat memfungsikan diri untuk memperkuat potensi yang ada di desa dikembangkan lebih besar lagi, dan BUMDesa dapat berfungsi dalam Upaya memberdayakan dan melindungi usaha masyarakat dari persaingan bisnis baik bisnis berjejaring, ataupun bersaing secara digital melalui pasar digital.(Arindhawati & Utami, 2020) Dinas Kabupaten Tulungagung dalam hal ini memiliki pasardeso *online* sebagaimana dalam *website* <https://pasardeso.dpmd.tulungagung.go.id/> Melalui *website* itu usaha yang dimiliki masyarakat melalui BUMDesa dapat dipublikasi melalui *link* tersebut.

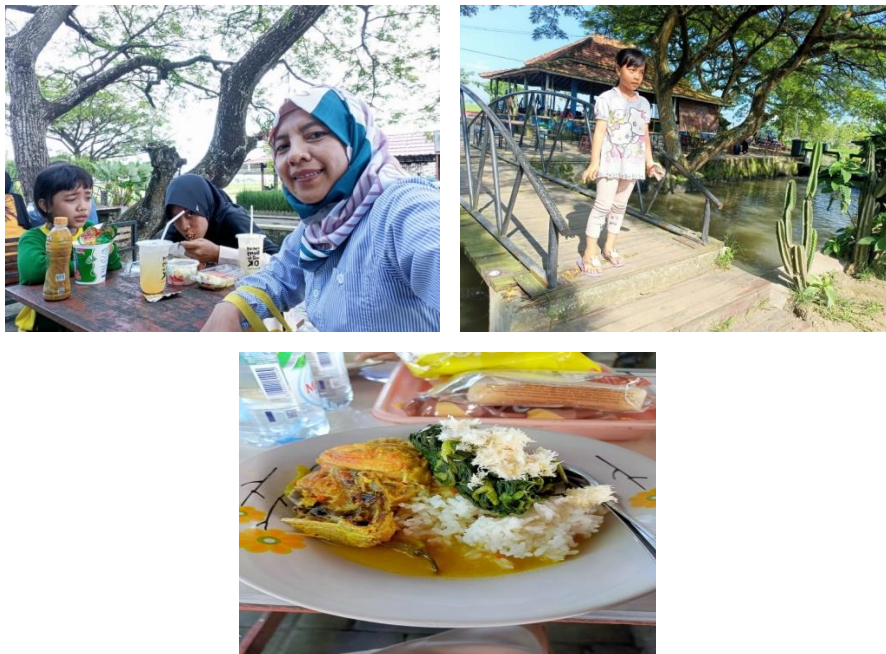
BUMDesa Tanggung misalnya, memiliki usaha warung yang berada di Wisata Gunung Budeg Tulungagung. Berikut gambar usaha Warung BUMDesa Tanggung:



Sumber: Observasi langsung pada 4 Mei 2023

Gambar tersebut menunjukkan bahwa usaha warung ini mempertemukan berbagai pihak yang akhirnya mendorong perputaran ekonomi di masyarakat. Ibu-ibu yang ahli memasak Botok menitipkan botoknya untuk dijual di warung BUMDesa Tanggung. Yang menjaga warung juga melibatkan masyarakat untuk mengelolanya, sehingga mendatangkan upah atas pekerjaannya dalam menjaga warung BUMDesa Tanggung. Lokasi yang berada di pinggir sawah merupakan suasana yang asri dan nyaman bagi konsumen. Konsumen pada umumnya karena sudah berwisata di Gunung Budeg, lelah, dan lapar sehingga mencari makanan yang enak dan nyaman. Perlu diketahui bahwa Wisata Gunung Budeg ini terletak di seberang jalan warung BUMDesa Tanggung. Hal ini mendorong wisatawan untuk dengan mudah akses warung ini.

Kuliner lain yang juga dikelola BUMDesa yaitu kuliner wisata desa Balong Kawuk Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Berikut bentuk kuliner yang ada di wisata desa Balong Kawuk Tulungagung:



Sumber: Observasi langsung pada 2 April dan 12 April 2023

Kuliner pada wisata Desa Balong Kawuk ini dikelola oleh BUMDesa. Terdapat banyak kuliner, pendopo Balong Kawuk, angkringan dan wahana bermain anak-anak, tempat pemancingan yang alami. Kuliner ini mampu mempertemukan masyarakat yang memiliki keahlian menyuplai bahan makanan yang kemudian dijual di Pendopo Kuliner Balong Kawuk, angkringan Balong Kawuk. Menu yang disajikan di antaranya terdapat Salad buah, jus aneka buah, kopi, aneka minuman segar lainnya, gorengan, sempol hasil buatan masyarakat, Nasi Pecel, Nasi Campur, Nasi ayam lodho khas Tulungagung, Urap-urap, Gado-Gado, Rujak ulek, rujak buah dan juga berbagai varian menu lainnya. Dari aktivitas ini usaha masyarakat laku dibeli oleh pengunjung yang hendak bersantai di Wisata Desa Balong Kawuk.

Kuliner wisata Watujoli yang terletak di Desa Pucungkidul juga mempertemukan warga masyarakat andil dalam perputaran ekonomi di masyarakat.



Sumber: Observasi langsung pada 17 Januari 2023

Wisata Watujoli memiliki banyak kuliner yang dikelola warga masyarakat. Hal ini mempertemukan masyarakat yang bekerja di warung, menyuplai bahan makanan ke warung, dan juga pengelolaan wisata Watujoli oleh BUMDesa Pucungkidul ini memberikan efek positif bagi perputaran ekonomi di masyarakat Pucungkidul. Berbagai program BUMDesa yang berhasil mempertemukan warganya baik dalam hal

penyedia makanan, pengelola warung, pengelola wisata maka dapat mendorong pengurangan kemiskinan di desa.(Mulianingsih, 2022).

Peran Besar BUMDesa dalam Mendorong Perekonomian Desa

BUMDesa menjadi wadah usaha pada struktur organisasi di Desa memiliki kewenangan besar untuk menciptakan usaha, mendorong perputaran ekonomi di masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Desa. Tujuan dari BUMDesa menjadi pundi-pundi kekayaan desa pada masa yang akan datang melalui Pendapatan Asli Desa (PAD). BUMDesa memiliki unit-unit usaha, mempertemukan berbagai usaha di masyarakat, menciptakan iklim usaha yang kondusif di masyarakat maka pada akhirnya kemiskinan yang terjadi di Desa dapat ditekan. Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, karena hadirnya BUMDesa mempertemukan aset di masyarakat yang memiliki nilai ekonomi yang mendorong kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (studi pada badan usaha milik desa (BUMDes) di desa Ponggok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis ...*, 4(1), 43–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/rab.040152>
- Asiyah, B. N., Fahriani, F. Z., & Habib, M. A. F. (2021). *Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Tulungagung dalam Meningkatkan Perekonomian Desa*. Akademia Pustaka.
- Asiyah, B. N., & Sari, C. M. (2022). Pemberdayaan Aksesibilitas Segment pasar : Pengembangan Usaha Mikro Generasi Z di Tulungagung. *The 4th International Conference on University-Community Engagement (ICON-UCE)*. <https://conference.metaskrip.com/index.php/icon-uce/article/view/103>
- Azhari, A., Yusuf, M., Kamaruddin, K., & Fadly, F. (2022). Are Village Fund and Village-Owned Enterprises Crucial in Eradicating Poverty in Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA*, 9(2), 132–138. <https://doi.org/10.22225/jj.9.2.2022.132-138>
- BPS. (2022). *Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen*. BPS. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>
- Indonesia, P. R. (2004). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. In *Sekretaris Negara*. <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- Kawulur, S., Koleangan, R. A. M., & Wauran, P. C. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Desa Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan Di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(03). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/25268>
- Mulianingsih, S. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam mendukung Pengentasan Kemiskinan Desa. *Jurnal*

- Registratie*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i1.2405>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. In *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia* (Issue Badan Usaha Milik Desa). https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176380/PP_Nomor_11_Tahun_2021.pdf
- Pradana, H., & Fitriyanti, S. (2019). Pemberdayaan Dan Percepatan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(2). <http://jkpjjournal.com/index.php/menu/article/view/21>
- Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019). Peranan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Tibubeneng Kuta Utara. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/juara.v9i2.602>
- R, N., & Hailudin, H. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i1.32>
- Redaksi, T. C. I. (2023). *Katanya Ekonomi RI Bagus: Ramai PHK & Orang Miskin Bertambah*. Cnbc Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230118071720-4-406302/katanya-ekonomi-ri-bagus-ramai-phk-orang-miskin-bertambah>
- Salihin, A. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/aij.v7i1.3937>
- Saragi, N. B., Muluk, M. R. K., & Sentanu, I. G. E. P. S. (2021). Indonesia's Village Fund Program: Does It Contribute to Poverty Reduction? *Jurnal Bina Praja*, 13(1), 65–80. <https://doi.org/10.21787/jpb.13.2021.65-80>

TEMA II
PEMBANGUNAN, PERTUMBUHAN
EKONOMI, DAN PENYERAPAN
TENAGA KERJA





Pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja adalah tiga pilar utama yang saling terkait dan memainkan peran penting dalam menciptakan kesejahteraan suatu negara. Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan dasar, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan harus mampu menciptakan peluang kerja yang luas dan berkualitas untuk masyarakat. Dalam Tema II ini, kami berusaha untuk menjelajahi hubungan antara pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja dari berbagai sudut pandang. Kami akan mengupas bagaimana kebijakan pembangunan yang efektif dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta bagaimana pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

Pada Tema II ini akan membahas Pertama, konsep dasar pembangunan dan bagaimana pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dapat menjadi landasan bagi kemajuan ekonomi dan sosial. Kami akan menggali berbagai teori pembangunan dan studi kasus dari berbagai negara untuk memahami bagaimana pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Kedua, akan berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Kami akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, termasuk investasi, inovasi, dan kebijakan ekonomi makro. Kemudian, akan mengkaji peran sektor-sektor ekonomi utama dalam mendorong pertumbuhan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan ketiga akan mengupas isu penyerapan tenaga kerja. Di sini akan mengeksplorasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan

penciptaan lapangan kerja, serta membahas kebijakan dan strategi yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan juga akan mencakup analisis tentang ketenagakerjaan di sektor formal dan informal, serta peran pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Melalui buku ini, kami berharap dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana pembangunan yang efektif dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Kami juga berharap bahwa buku ini dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi yang bekerja di bidang pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan.

***Amenities* dan Aspek Ekonomi: Pengaruhnya pada Migrasi**

Arif Rahman Hakim, Sri Subanti, Etty Puji Lestari, & Inaki Maulida Hakim

1. Pendahuluan

Salah satu fokus pembangunan ekonomi di suatu negara seringkali, dihadapkan pada kondisi di mana beberapa daerah tumbuh lebih baik dibandingkan daerah lainnya. Daerah yang perekonomiannya tumbuh berkaitan erat dengan kemampuannya untuk menarik dan mempertahankan orang (Su dkk., 2019). Literatur arus utama yang membahas masalah migrasi dan pertumbuhan kota telah terakumulasi menjadi dua segmen. Pertama, literatur yang menunjukkan bahwa aspek ekonomi adalah faktor dominan yang menarik migran. Perspektif ini dianut oleh akademisi seperti Greenwood dan Hunt (1989), Clark dan Hunter (1992) dan Hansen dan Niodomysl (2009). Kedua, penulis seperti Knapp dan Graves (1989), Mueser dan Graves (1995) dan Rappaport (2007) meyakini bahwa ada faktor lain yaitu *amenities*. Dengan kata lain, kemampuan daerah untuk menarik migran seringkali bergantung dari *amenities* tidak hanya aspek ekonomi (Yu dkk., 2019; Buch dkk., 2014).

Dalam perkembangan eksplorasi empiris terkait peran *amenities* dan aspek ekonomi terhadap migrasi, awalnya lebih banyak dilakukan di negara maju - khususnya di Amerika Utara (Partridge, 2010; Scott, 2010). Lalu, penelitian tersebut bergeser ke Eropa (Cheshire & Magrini, 2006; Royuela dkk., 2010; Biagi dkk., 2011; Rodriguez-Pose & Ketterer, 2012; Buch dkk., 2014). Namun, perkembangan ekonomi yang cepat dan pertumbuhan kota di negara-negara berkembang mendorong perlunya eksplorasi empiris peran *amenities* (Duranton, 2016). Hal ini sejalan dengan yang sudah disampaikan Rappaport (2007), studi empiris perlu dilakukan dengan melihat peran *amenities* terhadap migrasi yang telah terjadi di kawasan lain. Dengan perluasan wilayah studi, secara umum, kita

akan dapat mengetahui apakah kemampuan kota untuk menarik migran tergantung dari *amenities* lokal atau aspek ekonomi atautkah keduanya (Buch dkk., 2014).

Berangkat dari literatur yang ada, para akademisi masih melihat bahwa peran *amenities* dan aspek ekonomi dalam studi migrasi masih ambigu (Faggian & McCann, 2009; Scott, 2010; Biaggi 2011). Bermigrasi bagi mereka merupakan reaksi terhadap ketidakseimbangan awal dalam upah dan pengangguran sehingga mereka berpindah ke area yang menawarkan tingkat upah lebih tinggi, serta tingkat pengangguran lebih rendah, yang pada akhirnya hal ini akan mengembalikan keseimbangan ruang. Atautkah dalam bermigrasi, orang membandingkan perbedaan utilitas di berbagai lokasi alternatif dan perbedaan utilitas ini adalah fungsi dari faktor ekonomi dan non-ekonomi (kualitas hidup). Poin utama adalah ‘bobot’ relatif dari faktor-faktor ini. Faktor ekonomi dan non-ekonomi mungkin diberikan bobot yang berbeda oleh masyarakat di berbagai negara, bahkan di dalam negara tertentu, atau oleh orang-orang dalam keadaan yang berbeda (mis. dengan tingkat pendapatan yang berbeda).

Perbedaan dalam pemberian bobot antara faktor ekonomi dan non-ekonomi bisa dimungkinkan karena adanya perbedaan wilayah (terutama level benua), ketika para akademisi membahas peran keduanya dalam konteks migrasi antar daerah. Salah satunya bisa karena variasi kelembagaan, budaya, sejarah dan linguistik cenderung lebih besar di Eropa daripada di Amerika Utara. Heterogenitas yang lebih besar antara negara-negara Eropa juga dapat mempengaruhi bobot yang berbeda dalam memberikan penilaian terhadap faktor ekonomi dan non-ekonomi dalam keputusan untuk bermigrasi (Biagi dkk., 2011). Orang-orang di Eropa tidak melakukan migrasi dengan frekuensi yang sama seperti di Amerika Serikat, tetapi ketika mereka melakukan migrasi lebih dikarenakan sebagai respons terhadap kebutuhan ekonomi dibandingkan kualitas hidup (*amenities*). Selain itu, kondisi menjadi lebih jelas ketika potensi kesenjangan ekonomi dan pasar tenaga kerja antara daerah asal dan tujuan semakin besar (Cheshire & Magrini, 2006; Faggian & McCann, 2009; Faggian dkk., 2011). Di sini, pernyataan Rappaport (2007) menjadi relevan, para peneliti sebaiknya perlu melihat kembali peran aspek

amenities dan juga ekonomi terhadap migrasi di wilayah lain (di level region atau negara tapi beda benua).

Berkaitan dengan yang disampaikan Rappaport (2007), perlunya melihat peran *amenities* terhadap migrasi di kawasan lain. Sepengetahuan penulis menelusuri beberapa literatur empiris di Indonesia, lebih memberikan perhatian kepada faktor ekonomi, seperti kesempatan kerja, upah minimum, kebutuhan hidup layak, indeks gini, produk domestik bruto per kapita, tingkat pengangguran, dan komposisi sektor industri terhadap *output* perekonomian (Winarno, 2006; Allo, 2016; Saputra & Budiarti, 2017; Nugroho & Pitoyo, 2017). Selain itu, studi empiris para peneliti tersebut, sebagian besar menggunakan unit analisis di tingkat provinsi atau migrasi antar daerah dalam satu provinsi.

Di negara lain, seperti Cina, studi empirisnya sudah mulai menyertakan peran atribut *amenities* terhadap migrasi (Liu & Shen 2014a, 2014b; Su dkk., 2019). Selain ada juga yang menekankan masih pentingnya peran faktor ekonomi terhadap migrasi, faktor ekonomi tersebut bisa berupa produk domestik bruto per kapita, produk domestik bruto, upah, peluang pekerjaan di luar sektor pertanian, investasi asing langsung, pengangguran, investasi (Fan, 2005; Zhao, 2005; Shen, 2012), dan struktur & ukuran absolut ekonomi lokal (Gries dkk., 2016).

Maka, menjadi menarik bila eksplorasi empiris tidak mengesampingkan adanya daya tarik wilayah, baik itu faktor ekonomi maupun non-ekonomi, keduanya bisa memiliki arti penting bagi migran, karena bisa menjadi aspek penting penyebab terjadinya migrasi. Oleh karena itu, hal tersebut perlu menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah atau pengembangan suatu wilayah atau region. Mengingat perubahan lingkungan demografi juga sosial ekonomi merupakan hal yang pasti terjadi, mengakibatkan kemampuan suatu wilayah (region) menjadi semakin ketat untuk menarik dan bersaing dalam mendapatkan di penduduk masa depan, di mana hal ini telah terbukti memegang peran mendasar dalam menentukan prospek masa depan suatu wilayah (region). Oleh karena itu, tempat-tempat, yang lebih menarik bagi para migran, mungkin memiliki peluang lebih besar untuk menghadapi tantangan di masa depan selain juga harus mampu menempatkan diri untuk menjadi pusat aktivitas ekonomi yang kompetitif.

2. Migrasi Penduduk

2.1 Potensi Penyebab dan Faktor Migrasi Penduduk

Migrasi merupakan respons dari sebuah sikap dan cara pandang penduduk suatu wilayah terhadap struktur kondisi sosial, perkembangan ekonomi, dan kualitas hidup yang terjadi pada masyarakat di suatu wilayah. Dibalik keputusan bermigrasi akan terdapat pertimbangan faktor ekonomi dan non-ekonomi sebagai penyebabnya. Migran dapat didorong keluar dari negara asalnya karena kondisi ekonomi yang memburuk atau kerusuhan politik. Sebaliknya, mereka seringkali tertarik ke tempat tujuan yang menawarkan upah yang lebih tinggi, sarana perawatan kesehatan yang lebih baik, dan sistem pendidikan yang andal. Dalam membuat keputusannya, calon migran akan membandingkan keuntungan bersih dari migrasi dengan biayanya. Banyak faktor yang mempengaruhi keuntungan bersih dan biaya migrasi sehingga berdampak pada keputusan untuk bermigrasi. Studi juga menunjukkan bahwa keputusan bermigrasi juga dapat disebabkan karena adanya ketersediaan jaringan migran, perbedaan pendapatan lintas negara, dan faktor demografis. Selain itu, kendala yang diciptakan dari kebijakan migrasi yang semakin ketat menjadi rintangan paling signifikan untuk bermigrasi (Simpson, 2017).

Salah satu faktor yang berpotensi dapat meningkatkan migrasi adalah perbedaan pendapatan dan ketimpangan pendapatan. Manfaat bersih migrasi dapat diperoleh dari adanya peningkatan pendapatan (atau “utilitas”) yang diperoleh dengan bermigrasi, atau perbedaan antara negara asal (tempat asal migran) dan pendapatan negara tuan rumah (tempat para migran pindah). Secara historis, pola migrasi dunia biasanya mengalir dari selatan ke utara, di mana selatan sering dipertimbangkan lebih miskin sedangkan utara lebih kaya (ini adalah generalisasi tetapi berlaku dalam banyak pola migran historis). Pekerja di negara-negara miskin mencari upah yang lebih tinggi dan lebih baik kesempatan kerja, yang biasanya dapat ditemukan di negara-negara kaya. Akibatnya, hampir setiap model ekonomi migrasi memasukkan perbedaan pendapatan dan temuan mereka menjadi faktor penting ketika mencoba menjelaskan arus migran dalam periode tertentu. Pendapatan dapat berperan sebagai faktor “pendorong”, dengan tingkat pendapatan yang rendah dapat mendorong migran keluar dari negara asalnya, dan sebaliknya tingkat pendapatan yang tinggi dapat

berfungsi untuk “menarik” migran ke negara atau wilayah tertentu (Rotte & Vogler, 1998). Dalam banyak kasus migrasi selatan-utara, baik kekuatan pendorong dan penarik memiliki peran yang sama. Seiring waktu, perbedaan pendapatan antar negara dapat berubah dan dapat memengaruhi arus migran; karena perbedaan pendapatan meningkat (baik dengan penurunan pendapatan negara asal dan/atau peningkatan pendapatan negara tuan rumah), terdapat insentif yang lebih besar untuk bermigrasi. Hal sebaliknya berlaku ketika perbedaan pendapatan menurun. Dalam hal ini, keuntungan bersih dari migrasi menurun, sehingga lebih sedikit pekerja yang tertarik untuk bermigrasi ke luar negeri. Dengan demikian, tingkat pendapatan dan perbedaan pendapatan dapat mempengaruhi keuntungan bersih dari migrasi, yang biasanya dianggap sebagai penentu terpenting dalam keputusan untuk bermigrasi. Faktor makroekonomi selain pendapatan yang dapat diukur dengan PDB per kapita, ada beberapa faktor lainnya yang memengaruhi keputusan migrasi. Nilai tukar misalnya, secara langsung dapat mempengaruhi harga relatif di luar negeri dan daya beli. Mata uang asing yang kuat (relatif terhadap mata uang di negara asal) akan memungkinkan uang yang diperoleh di luar negeri untuk membeli lebih banyak di negara asal, meningkatkan keuntungan bersih untuk migrasi. Sebaliknya, mata uang dalam negeri yang kuat akan menurunkan nilai pendapatan yang diperoleh selama di luar negeri. Nilai tukar beroperasi melalui upah dan pengiriman uang yang dapat mempengaruhi keputusan bermigrasi. Adanya volatilitas pendapatan yang didorong oleh siklus bisnis (misalnya fluktuasi ekonomi makro) atau perubahan status pekerjaan dapat mendorong migran keluar dari negara asal atau menarik mereka ke negara tujuan. Pengangguran yang tinggi di negara asal dapat menjadi faktor pendorong. Selain itu, para migran biasanya pindah ke daerah dengan tingkat pengangguran rendah (Hunt, 2006).

Banyak faktor non-ekonomi lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan untuk bermigrasi. Beberapa literatur menggunakan ukuran kenyamanan yang dimiliki pada daerah tujuan, yang dalam literatur dikenal dengan *amenities*. Hal menjadi pertimbangan karena sebagian besar individu yang pindah seringkali akan membawa keluarganya yang berakibat pada peningkatan migrasi keluarga. Kondisi ini meningkatkan populasi anak migran di daerah tujuan sehingga permintaan layanan publik

seperti pendidikan dan kesehatan menjadi semakin tinggi (Li dkk., 2018). Di beberapa negara, pemerintahnya telah menyediakan kedua jenis fasilitas layanan publik tersebut, dan warga dapat mengaksesnya secara gratis. Namun, perkembangan dan kondisi ekonomi di setiap wilayah negara yang menjadi tujuan migrasi berpotensi menimbulkan ketimpangan di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi umum, dan pelayanan publik lainnya (Kawamura, 2018). Pentingnya pemerataan akses fasilitas publik dasar harus diprioritaskan karena aksesibilitas penduduk terhadap *amenities* tersebut seperti sekolah dan fasilitas kesehatan berpotensi mengurangi ketimpangan, memberikan dampak ekonomi yang lebih baik, meningkatkan kualitas hidup warga, dan mewujudkan pemerataan pembangunan antar kota (Fasihi & Parizadi, 2020).

Pelayanan transportasi publik sebagai salah satunya, juga perlu mendapat perhatian pemerintah karena berkaitan dengan mobilitas masyarakat dan kegiatan komuter sehari-hari. Minimnya kesempatan memperoleh sarana transportasi dapat menghambat aksesibilitas dan mengurangi inklusi sosial bagi masyarakat. Transportasi publik merupakan salah satu tujuan pembangunan karena mempromosikan pembangunan masyarakat dan penciptaan masyarakat yang layak di mana orang dapat bekerja dan hidup lebih baik. Karena digunakan oleh warga dan disubsidi oleh pemerintah, transportasi publik harus menjadi faktor penting dalam menjamin peningkatan kesejahteraan (Stjernborg & Mattisson, 2016). Bentuk transportasi publik yang paling penting digunakan untuk migrasi tidak tetap biasanya terkait pekerjaan. Bagi mereka yang tinggal di kota pinggiran, transportasi publik dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengatasi imobilitas (Alpek dkk., 2016).

2.2 Peran *Amenities* dan Aspek Ekonomi dalam Perkembangan Teori Migrasi

Para akademisi akan menyinggung kontribusi Ravenstein sebagai pelopor literatur teori migrasi yang dikenal dengan tujuh hukum migrasi, yaitu migrasi meliputi dua tempat yang berjarak pendek; biasanya terjadi secara bertahap diawali dari daerah terpencil menuju ke kota-kota; penyebaran migran berkorelasi negatif dengan daya serap suatu daerah yang menjadi tujuan migran; setiap migrasi dapat menyebabkan migrasi

dengan arah yang berkebalikan; migrasi jarak jauh biasanya menuju ke daerah tujuan yang menjadi pusat kota atau industri; mereka yang berasal dari daerah pedesaan cenderung melakukan migrasi dibandingkan mereka yang dari daerah perkotaan; dan jumlah perempuan yang melakukan migrasi cenderung lebih banyak dibandingkan mereka yang pria (Haas, 2010).

Semenjak itu, teori migrasi bermunculan dan salah satunya adalah teori dualisme ekonomi dari Lewis (1954). Di negara berkembang terdapat dua kegiatan perekonomian yaitu pertanian (tradisional) dan industri (modern), di mana saat masuk periode transisi dijumpai produktivitas sektor pertanian lebih kecil dibandingkan sektor industri sehingga sektor tersebut mengalami kelebihan tenaga kerja. Hal ini diikuti dengan penambahan penduduk desa yang semakin besar, sehingga lahan pertanian menjadi semakin terbatas. Akibatnya, sektor industri menjadi sektor potensial dan berpeluang untuk meningkatkan keuntungan di luar sektor pertanian, karena sektor pertanian cenderung mengupah rendah pada mereka yang bekerja di sektor tersebut. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan upah antara di desa dan di kota sehingga terjadi migrasi dari pedesaan ke perkotaan, atau mereka semula bekerja pada sektor pertanian di pedesaan pindah ke sektor industri di perkotaan (Ray, 1998; Ananta, 2020).

Penelusuran berlanjut pada penjelasan Sjaastad (1962) yang menitikberatkan pada pendekatan modal manusia (*human capital*). Teori ini memperlakukan migrasi sebagai bentuk investasi modal manusia karena tidak selalu dilihat dengan perbedaan upah dan tingkat pengangguran. Bagi, individu atau mereka memutuskan bermigrasi akan mempersiapkan diri dengan pendidikan maupun pelatihan pengembangan personal yang baik sebelum melakukan migrasi. Selain itu, mereka akan membandingkan penghitungan biaya dan keuntungan baik yang bernilai moneter maupun non-moneter ketika berpindah dari daerah asal ke daerah tujuan (Liebig, 2003; Ananta & Arifin, 2014).

Gagasan pengembangan teori berikutnya dengan melihat migrasi sebagai akibat dari ketidakseimbangan spasial. Literatur menyebutnya dengan pendekatan model migrasi ketidakseimbangan yang menyatakan bahwa migrasi disebabkan oleh disparitas spasial dalam potensi ekonomi

(Greenwood & Hunt, 1989). Migrasi dipandang sebagai komoditas bagi pencari kerja. Upah dan tingkat pengangguran berbeda antar daerah, dan orang-orang menanggapi perbedaan regional ini dengan pindah ke daerah dengan upah yang lebih tinggi dan tingkat pengangguran yang lebih rendah. Proses migrasi merupakan salah satu cara untuk mengembalikan keseimbangan spasial. Sebaliknya, migrasi penduduk dari daerah berupah rendah ke daerah berupah tinggi disertai dengan arus modal, memulihkan keseimbangan pasar antar daerah. Pergerakan migrasi antar wilayah diperkirakan akan melambat saat mendekati keseimbangan.

Pendekatan kedua, diusulkan oleh beberapa akademisi (Graves 1980; Knapp & Graves 1989; Ferguson dkk., 2007), dikenal sebagai model keseimbangan migrasi. Konsep dasar di balik pendekatan ini adalah bahwa disparitas lokasi tidak hanya disebabkan oleh kondisi pasar tenaga kerja tetapi juga oleh komoditas (atau '*amenities*') khusus tempat yang tidak dapat diperdagangkan. Dengan demikian, disparitas upah sebagian "dikompensasikan" oleh *amenities*, dalam konteks bahwa orang dibayar lebih karena pekerjaan mereka berada di daerah dengan tingkat *amenities* yang lebih rendah.

Kedua pendekatan tersebut memiliki pendukungnya masing-masing dalam pengembangan literatur ilmiah, baik pendekatan migrasi ketidakseimbangan maupun pendekatan migrasi keseimbangan. Kajian empiris berdasarkan pendekatan keseimbangan melihat peran *amenities* berupa *amenities* lingkungan alam, sosial dan publik. Iklim pada awalnya dianggap sebagai bentuk *amenities* (Graves, 1980; Greenwood & Hunt, 1989). Iklim yang nyaman dan menyenangkan ternyata memiliki efek positif pada migrasi, dengan faktor-faktor seperti musim panas yang sejuk, kecepatan angin, musim dingin yang hangat, kelembapan yang menyenangkan, dan sinar matahari yang cukup (Clark dkk., 2003; Rappaport, 2007; Liu & Shen 2014a, 2014b). Selain itu, ruang terbuka (taman kota) dan pemandangan spektakuler seperti pantai, lokasi pesisir, hutan kota, dan danau; dapat juga diperhitungkan sebagai jenis *amenities* alam (Rodriguez-Pose & Ketterer 2012; Buch dkk., 2014).

Tingkat kejahatan yang rendah, keterbukaan sosial, dan inklusivitas adalah contoh *amenities* sosial. Elemen-elemen ini dapat berdampak pada keputusan bermigrasi. Semakin rendah tingkat kejahatan dapat

menyiratkan keamanan yang menarik penduduk (Clark dkk., 2003; Sousa, 2014). Keterbukaan dan inklusivitas sosial dapat menarik penduduk, terutama mereka yang berpendidikan dan terampil, seperti yang ditunjukkan oleh keragaman, toleransi, dan indeks bohemian (Florida, 2002; Sanchez-Serra, 2014). Pendidikan, layanan medis, rekreasi, transportasi, dan layanan budaya-seni adalah contoh *amenities* kategori layanan publik dengan pengaruhnya yang positif pada migrasi (Kemeny & Storper, 2012; Rodriguez-Pose & Ketterer, 2012; Su dkk., 2019; Yu dkk., 2019). Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bahwa *amenities* memainkan peran penting dalam migrasi masuk. Migrasi, menurut kelompok ini, merupakan sikap dan cara pandang penduduk suatu wilayah terhadap kondisi sosial, perkembangan ekonomi, dan kualitas hidup wilayah tersebut. Migrasi adalah retensi sikap dan aklimatisasi migran terhadap fungsi ruang ekonomi dan pengaruh *amenities* (Parvenova & Gurova, 2020).

3. Menenal Lebih Jauh tentang Amenities

3.1 Konsep dan Definisi Amenities

Amenities memiliki konsep beragam dan belum memiliki definisi formal. Beberapa literatur mendefinisikannya secara berbeda. *Pertama*, *amenities* secara luas didefinisikan sebagai barang dan jasa khusus lokasi termasuk aset yang dapat dipasarkan (*marketed*) dan tidak dapat dipasarkan (*non-marketed*). Diamond & Tolley (1982) mengemukakan bahwa konsumsi barang seperti kualitas udara atau layanan publik dapat berubah ketika individu berpindah ke daerah lain. Menurut mereka, barang yang dikonsumsi dapat berupa komponen dari lingkungan fisik, sosial, dan hukum. Berdasarkan definisi ini, *amenities* dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu fasilitas publik dan layanan rekreasi.

Kedua, *amenities* yang mengacu pada literatur migrasi. Graves & Linneman (1979) mengklasifikasikan faktor yang menyebabkan migrasi sebagai barang yang dapat diperdagangkan (*traded goods*) terutama mengacu pada faktor ekonomi dan barang tidak dapat diperdagangkan (*non-traded goods*) yang mengacu pada *amenities*. Mereka menempatkan barang yang tidak dapat diperdagangkan sebagai bentuk kompensasi bagi migran ketika faktor ekonomi belum bisa mengakomodasi. Orang

cenderung bergerak untuk memenuhi kebutuhan mereka terhadap *amenities*. Oleh karena itu, *amenities* yang berbeda dapat menjadi determinan dalam bermigrasi (Chi & Marcouiller, 2013). Pandangan ini semakin populer dengan dukungan sejumlah studi yang mengungkapkan peran *amenities* yang berdampak signifikan pada migrasi (Scott, 2010; Pose & Ketterer, 2012; Zheng, 2016; Rickman & Wang, 2017).

Amenities secara sederhana dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang membuat rumah tangga bersedia untuk berpindah, atau sekelompok barang dan jasa yang membuat rumah tangga bersedia untuk bergerak ke tempat baru atau mereka mau untuk mencari lokasi tertentu (Partridge, 2010). *Amenities* merupakan sesuatu yang berkaitan dengan keindahan, kesenangan, dan pengalaman. *Amenities* memiliki beragam dimensi, seperti skala geografis, sejauh mana mereka berwujud atau tidak berwujud, dan sebagainya (Yu dkk., 2019). Berdasarkan definisi *amenities* dan acuan pada literatur migrasi, penelitian kami mengelompokkannya menjadi tiga kategori yaitu *amenities* lingkungan alam, *amenities* sosial, dan *amenities* fasilitas publik.

3.2 Penghitungan Indeks Harga Implisit *Amenities*

Pendekatan umum untuk menghitung *amenities* biasanya ke dalam bentuk indeks. Hakim dkk. (2023) menghitung indeks *amenities* yang didefinisikan sebagai harga implisit, sehingga mereka menamakannya dengan indeks harga implisit *amenities*. Pendekatan ini dipilih karena *amenities* adalah barang yang tidak memiliki nilai pasar, sehingga kita tidak dapat mengetahui harga *amenities* secara eksplisit. Model hedonis dapat digunakan untuk memperkirakan harga barang yang tidak memiliki pasar seperti *amenities* (Rosen, 1974). Kami menggunakan model standar keseimbangan lokasi antar kota karena *amenities* yang menjadi dasar pemilihan kota perlu mempertimbangkan kota sebagai tempat tinggal dan kota sebagai tempat bekerja. Maka, pilihan *amenities* harus mempertimbangkan dua pasar hedonik yaitu pasar perumahan (direfleksikan dengan persamaan sewa) dan pasar tenaga kerja (direfleksikan dengan persamaan upah).

Penghitungan indeks menggunakan dua jenis data yaitu data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan data Potensi Desa (PODES).

Pemanfaatan Data PODES khusus untuk membangun *amenities*. Data PODES menjadi sumber informasi untuk *amenities* seperti kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, komunikasi, ekonomi, keamanan, transportasi, kriminalitas, dan alam. Sedangkan data SUSENAS memberikan informasi tentang karakteristik individu, karakteristik rumah tangga, dan karakteristik perumahan.

Langkah untuk mendapatkan indeks harga implisit *amenities* kota sebagai berikut. **Pertama**, studi ini menggunakan data berpasangan yaitu SUSENAS dan PODES yang diterbitkan bersamaan, maka akan diperoleh set data Susenas-Podes. Kedua set data tersebut dikonstruksi untuk setiap kota secara administratif menurut Badan Pusat Statistik. Dua set data ini digabungkan dengan menggunakan id spesifik, yang disusun berdasarkan provinsi, kota, kecamatan, dan desa. **Kedua**, data set yang telah disiapkan pada langkah pertama kemudian digunakan untuk mengestimasi persamaan hedonik upah dan sewa. Di persamaan upah dan sewa, simbol i merepresentasikan individu; h merepresentasikan rumah tangga; j merepresentasikan desa; dan k merepresentasikan kota. Variabel upah dan sewa sudah dikonversi nilainya untuk setahun. Model empiris untuk persamaan upah dan sewa, masing-masing, dinyatakan dalam Persamaan (1) dan (2) sebagai berikut:

$$w_{ij}^k = \beta_0 + \beta_{1e} X_{ij}^k + \beta_{2l} a_{ij}^k + \varepsilon_{ij}^k \quad (1)$$

$$r_{hj}^k = \Upsilon_0 + \Upsilon_{1f} Y_{hj}^k + \Upsilon_{2l} a_{hj}^k + \mu_{hj}^k \quad (2)$$

Persamaan upah yang direpresentasikan dengan w merupakan upah yang diterima dalam setahun, sedangkan X menyatakan karakteristik individu yaitu usia, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, status pekerjaan, jumlah jam kerja, dan lapangan usaha tempat bekerja. Persamaan sewa yang direpresentasikan dengan r merupakan sewa yang dibayarkan dalam setahun, sedangkan Y menyatakan karakteristik perumahan yaitu status penguasaan tempat tinggal, jenis atap terluas, jenis dinding terluas, jenis lantai terluas, dan luas lantai. Data untuk variabel upah, sewa, karakteristik individu, dan karakteristik perumahan diperoleh dari data SUSENAS. Sementara Variabel a merepresentasikan *amenities*

yang terdiri dari sepuluh komponen yaitu kesehatan, pendidikan, rekreasi, olah raga, ekonomi, komunikasi, kejahatan, keamanan, transportasi, dan alam. Kesepuluh komponen tersebut direpresentasikan ke dalam 29 variabel independen yang informasinya diperoleh dari data PODES. Kedua persamaan tersebut kemudian diestimasi menggunakan OLS (*Ordinary Least Squares*). Rincian informasi mengenai deskripsi variabel dan nilai reratanya dapat dilihat pada buku *Daya Tarik Amenities terhadap Migrasi* (Hakim dkk., 2023).

Ketiga, menghitung nilai kompensasi rumah tangga setahun untuk setiap *amenities* di kota k . Dari persamaan upah, nilai kompensasi rumah tangga setahun untuk setiap *amenities* di kota k dihitung dengan mengalikan nilai koefisien regresi *amenities* dengan rerata jumlah anggota rumah tangga di kota k dan rerata upah di kota k . Dari persamaan sewa, nilai kompensasi rumah tangga setahun untuk setiap *amenities* di kota k dihitung dengan mengalikan nilai koefisien regresi *amenities* dengan rerata sewa di kota k . **Keempat**, menghitung indeks harga implisit. Sebelum nilai indeks ini diperoleh, terlebih dahulu dihitung harga implisit setiap komponen *amenities*. Harga implisit merupakan nilai kompensasi yang dibayarkan rumah tangga setahun untuk setiap *amenities* di kota k dari pasar perumahan dikurangi dengan nilai kompensasi yang dibayarkan rumah tangga setahun untuk setiap *amenities* di kota k dari pasar kerja. Nilai indeks harga implisit *amenities* diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian antara harga implisit setiap *amenities* dan nilai rata-ratanya. Indeks ini merepresentasikan harga yang harus dibayar secara implisit oleh rumah tangga atau individu supaya dapat menikmati *amenities* kota. Dalam konteks migrasi, bagi rumah tangga atau individu yang pindah ke suatu kota, seolah-olah mereka akan melepaskan pendapatan mereka pada tahap awal migrasi untuk membayar *amenities* melalui pasar perumahan dan pasar tenaga kerja agar utilitasnya meningkat karena akan mengkonsumsi *amenities* kota yang lebih baik di tempat tinggal mereka yang baru.

4. Model Empiris

Berdasarkan *amenities* yang telah dihitung dalam bentuk indeks harga implisit pada bagian sebelumnya, penelitian ini menggunakan model

empiris yang dibangun dengan asumsi bahwa migrasi adalah preferensi individu. Ini mencirikan keputusan individu untuk tinggal di lokasi di antara berbagai komunitas, dengan maksimalisasi utilitas sebagai kriteria utama. Model tersebut berhipotesis bahwa ketika memilih untuk bermigrasi, orang dapat menempatkan manfaat moneter dan non-moneter terhadap kemungkinan biaya tinggal di lokasi tempat tinggal mereka saat ini (Ferguson *et al.* 2007, Partridge 2010). Model mengikuti asumsi berikut: *Pertama*, Individu memaksimalkan utilitas (U). Nilai utilitas yang diharapkan ditentukan untuk setiap lokasi i yang merupakan kemungkinan representasi individu dapat bergerak (atau tetap), sehingga $i = 1, 2, 3, \dots n$; *Kedua*, Individu dapat menilai dua lokasi mana pun berdasarkan nilai utilitas yang diharapkan yang diperoleh dari lokasi tersebut, dan preferensi peringkat bersifat transitif; *Ketiga*, Individu memperoleh utilitas dari dua atribut spesifik lokasi, yang meliputi *amenities* (amein), kondisi ekonomi lokal (econ), dan variabel kontrol (z). Model empiris dalam penelitian ini dituliskan sebagai berikut:

$$\text{inmig} = \delta_1 + \delta_2 \text{amein} + \delta_3 \text{econ} + \delta_4 G + e \quad (3)$$

Di mana *inmig* adalah migrasi masuk terakhir ke kota per seribu (*inmig*); *amein* adalah *amenities* yang dimiliki kota (*amenities*); *econ* adalah kelompok variabel ekonomi di kota, variabel tersebut terdiri dari upah minimum kota dalam seratus ribu rupiah (*minwage*), tingkat pengangguran kota dalam persen (*unemployment*), produk domestik bruto kota dalam miliar rupiah (*gdrp*), *share* sektor tersier dalam persen (*share_tertiary*), dan pertumbuhan kota dalam persen (*growth*); *G* adalah variabel kontrol yang terdiri dari kepadatan penduduk per kilometer persegi (*density*) dan jarak bandara dalam kilometer (*airportdistance*).

5. Perhitungan Indeks Harga Implisit *Amenities*

Bagian ini akan menyajikan hasil perhitungan indeks harga implisit *amenities*. Tabel 1 menampilkan hasil perhitungan indeks *amenities* kota-kota di Indonesia. Kami menyajikan untuk 20 kota tertinggi dan 20 kota terendah, sedangkan hasil perhitungan lengkap dapat dilihat pada lampiran. Kota-kota di Pulau Jawa menyumbang terbanyak untuk kota

yang masuk kategori 20 kota tertinggi yaitu 14 kota. Kota-kota di Pulau Sumatera ada 5 yaitu Medan, Palembang, Padang, dan Bengkulu. Kota di Pulau Sulawesi dan Bali diwakili oleh Makassar dan Denpasar. Dari tabel, kota-kota di luar pulau Jawa menjadi ibukota provinsi sedangkan di Pulau Jawa tidak semua kota menjadi ibukota. Kota-kota itu biasanya menjadi kota penyangga ibukota suatu negara atau provinsi. Misal kota Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan menjadi kota penyangga bagi ibukota negara Indonesia. Terdapat kota yang termasuk kategori *amenities* rendah seperti kota-kota di Sulawesi termasuk kategori ini adalah Tomohon, Bitung, dan Kotamobagu, serta kota yang berada di wilayah Maluku & Papua adalah Tidore Kepulauan dan Tual.

Tabel 1. Nilai Indeks Harga Implisit *Amenities* Menurut 20 Kota Tertinggi dan 20 Kota Terendah di Indonesia

20 Kota Tertinggi			20 Kota Terendah		
Kode	Kota	Nilai	Kode	Kota	Nilai
3171	Jakarta Selatan	72.3	1971	Pangkal Pinang	-9.2
5171	Denpasar	61.4	1674	Lubuklinggau	-9.7
3173	Jakarta Pusat	57.2	1372	Solok	-9.9
3578	Surabaya	45.5	1274	Tebing Tinggi	-10.4
3471	Yogyakarta	43.8	1276	Binjai	-13.3
3273	Bandung	41.9	1672	Prabumulih	-13.5
1275	Medan	41.8	1272	Tanjung Balai	-14.1
3374	Semarang	41.2	2172	Tanjung Pinang	-15.1
3276	Depok	41.1	1172	Sabang	-15.6
3573	Malang	39.3	7173	Tomohon	-16.3
3671	Tangerang	39.1	7172	Bitung	-16.4
1671	Palembang	38.9	1872	Metro	-17.6
3174	Jakarta Barat	38.7	1277	Padang Sidempuan	-18.9
3372	Surakarta	38.6	1572	Sungai Penuh	-19.4
1371	Padang	38.1	8272	Tidore Kepulauan	-19.9
3271	Bogor	37.9	1673	Pagar Alam	-20.6
7371	Makassar	37.4	1175	Subulussalam	-20.6
3275	Bekasi	37.4	7174	Kotamobagu	-20.9
3674	Tangerang Selatan	37.1	1278	Gunung Sitoli	-21.8
1771	Bengkulu	37.0	8172	Tual	-26.2

Nilai indeks harga implisit *amenities* dapat juga merepresentasikan utilitas berdasarkan nilai kenyamanan yang spesifik antar kota, sehingga dapat merepresentasikan apakah suatu kota lebih nyaman atau lebih disukai dibandingkan kota lainnya. Nilai indeks *amenities* tertinggi diraih

Jakarta Selatan, sedangkan terendah adalah Tual. Tual memiliki nilai indeks sebesar nol karena menjadi kota basis sebagai acuan perbandingan indeks harga implisit *amenities* antar kota, di mana kota yang menjadi basis adalah kota dengan nilai indeks terendah. Karena Jakarta Selatan memiliki indeks *amenities* yang paling tinggi, maka kota tersebut memiliki potensi daya tarik yang besar dibandingkan kota-kota lainnya di Indonesia. Kota-kota yang termasuk kategori sepuluh tertinggi berikutnya adalah Denpasar, Jakarta Pusat, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Medan, Semarang, Depok, dan Malang. Bila dikaitkan dengan in-migrasi risen, kota dengan *amenities* yang tinggi mampu menarik migran masuk yang tinggi seperti Jakarta Selatan, Bandung, Medan, dan Depok. Kota-kota di Jawa dan Denpasar memiliki *amenities* yang tinggi akibatnya kota tersebut lebih dipilih migran.

Dalam perspektif migran, kota tersebut dianggap lebih nyaman karena memiliki *amenities* yang lebih baik dibandingkan kota lainnya. Hal ini didukung dengan jumlah migrasi masuk risen pada kota-kota di Jawa dan Bali berkontribusi lebih dari separuh jumlah migrasi masuk di Indonesia. Migran sudah mempertimbangkan aspek *amenities* ketika memutuskan pindah karena berhubungan dengan aspek kenyamanan untuk tinggal di suatu kota. Penjelasan lainnya, migrasi dapat terjadi karena adanya asumsi bahwa individu lebih suka tinggal di tempat dengan stok *amenities* yang berlimpah, sehingga, mereka harus mendapat kompensasi secara ekonomi ketika tinggal di tempat-tempat yang dicirikan memiliki tingkat *amenities* yang rendah (Hakim dkk., 2023).

Berdasarkan tabel 1, Kota Jakarta Selatan mencatat nilai indeks *amenities* paling tinggi, nilai indeks ini merefleksikan harga yang harus dibayar secara implisit oleh rumah tangga atau individu melalui pasar perumahan dan pasar tenaga kerja supaya dapat menikmati kesepuluh komponen *amenities* kota Jakarta Selatan sebesar 72.3 juta rupiah. Jika rumah tangga atau individu memutuskan pindah ke Jakarta Selatan, mereka harus melepaskan pendapatan mereka pada tahap awal migrasi sebesar jumlah tersebut untuk membayar *amenities* melalui pasar perumahan dan pasar tenaga kerja agar utilitasnya meningkat karena mereka mengkonsumsi *amenities* kota Jakarta Selatan. Kota Tual memiliki indeks *amenities* terendah, nilai ini dapat dimaknai sebagai harga yang

tidak harus dibayar secara implisit oleh rumah tangga atau individu melalui pasar perumahan atau pasar tenaga kerja karena mereka tidak dapat menikmati *amenities* seperti yang terdapat di Jakarta Selatan. Jika rumah tangga atau individu memutuskan pindah ke Tual, mereka tidak harus melepaskan pendapatan mereka sebesar 26.2 juta rupiah pada tahap awal migrasi untuk membayar *amenities* yang tidak dapat migran konsumsi ketika mereka bermigrasi ke Tual.

Berdasarkan temuan tersebut, kita dapat juga menjelaskan bahwa kota-kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta seperti Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat cenderung masuk kategori kelompok dengan indeks harga implisit *amenities* yang tinggi. Kota-kota tersebut tidak hanya menjadi kota metropolitan dan ibu kota negara tetapi juga pusat perdagangan, pusat industri, pusat pendidikan, pusat kesehatan, pusat rekreasi, *role model* layanan komunikasi, dan pusat layanan sosial (Mulyana, 2014). Akumulasi fungsi ini menciptakan daya tarik besar bagi penduduk dari daerah lain untuk datang, karena kota-kota ini memiliki *amenities* lebih lengkap dan lingkungan perkotaan yang mendukung (Zimmerman, 2010). Studi Hakim dkk. (2023) menemukan bahwa beberapa kota di Sumatera dan Kalimantan mengalami perkembangan yang lebih pesat, terutama di daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Riau. Kota-kota di provinsi ini dapat menarik migran dalam menanggapi peluang yang diberikan oleh kota-kota yang menjadi pusat eksploitasi sumber daya alam (Firman, 2015). Akibatnya, hal ini akan diikuti dengan penyediaan *amenities* untuk mendukung aktivitas penghuninya (Steinberg, 1991).

Tabel 2: *Output Regresi*

DEP: inmig	Model 1		Model 2	
INDEP	Coef.	Sign.	Coef.	Sign.
amenities	321,654	***	226,509	***
minwage	2177,343	***	2042,149	**
unemployment	-406,349		-1154,173	*
gdrp	0,315	***	0,623	***
share_tertiary	129,633	*	198,851	*
growth	976,071	**	1717,836	**
<i>control</i>	Yes		Yes	
density	1,100	***	1,575	*
airportdistance	-7,468		-46,205	*
constant	-29434,270	***	-28947,900	**
N	98		85	
F	110,530		106,090	
Prob F	0,000		0,000	
R-Sq	0,358		0,365	
*** = sign. $\alpha=1\%$; ** = sign. $\alpha=5\%$; * = sign. $\alpha=10\%$				

Bagian berikutnya akan menyajikan hasil empiris dari peran faktor ekonomi dan *amenities* pada migrasi. Studi Hakim dkk. (2022, 2023) menunjukkan bahwa migrasi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh pertimbangan *amenities* dan faktor ekonomi (Tabel 2). Tren ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa Indonesia mampu masuk ke dalam kategori negara-negara berpenghasilan menengah sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan. Oleh karena itu, hal ini dapat mendorong para pendatang untuk lebih memperhatikan aspek kenyamanan dan membuat permintaan akan *amenities* cenderung meningkat. Selain itu, perubahan komposisi migran telah meningkatkan permintaan akan *amenities*. Selanjutnya, beberapa indikator faktor ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan dan tanda koefisiennya sesuai dengan ekspektasi teoretis. Berdasarkan hasil penelitian, kota-kota yang bercirikan tingkat pengangguran yang rendah, pertumbuhan lapangan kerja yang relatif tinggi, dan upah minimum yang tinggi mendorong migran ke kota.

Hasil empiris menunjukkan *amenities* dan faktor ekonomi berpengaruh pada migrasi dengan arah sesuai diprediksikan oleh teori. *Amenities* berpengaruh positif dan signifikan terhadap migrasi. Faktor ekonomi yang berpengaruh signifikan pada migrasi adalah upah minimum, produk domestik regional bruto, share sektor tersier, dan pertumbuhan. Temuan ini mengonfirmasi perdebatan literatur bahwa *amenities* dan faktor ekonomi berperan penting kepada migrasi pada konteks Indonesia.

Aspek *amenities* menjadi pertimbangan migran selain faktor ekonomi ketika mereka ingin melakukan migrasi. Tanda positif pada variabel *amenities* dapat diartikan sebagai peningkatan indeks harga implisit *amenities* akan meningkatkan migran masuk sebesar 322 orang seperti terlihat pada Model 1. Karena migran diasumsikan sebagai pemaksimal utilitas yang memilih antara lokasi yang berbeda sesuai dengan jenis *amenities* yang disediakan, harga barang tersebut, dan kesempatan di pasar tenaga kerja (Knapp & Graves 1989). Seseorang dapat mempertimbangkan konsumsi suatu barang yang terbagi menjadi dua kategori yaitu; *traded goods* dan barang khusus lokasi (*non-traded goods*). Kategori terakhir ini menjadi perhatian khusus dalam makalah ini. Barang-barang yang tidak diperdagangkan termasuk barang-barang yang disediakan oleh pemerintah daerah atau negara bagian yang dikenakan pajak, dan *amenities* lokal yang dinilai secara implisit. Mengikuti Tiebout, “konsumen” diasumsikan mengekspresikan preferensi mereka untuk *amenities* spesifik lokasi dan barang publik saat mereka berpindah antar yurisdiksi dalam upaya memaksimalkan utilitas (Ferguson dkk., 2007).

Di sini, para migran cenderung memilih tempat yang menawarkan *amenities* lebih tinggi, dengan memprioritaskan faktor-faktor ini daripada aspek ekonomi seperti pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Dengan demikian, kota yang menawarkan lebih banyak *amenities* akan menarik lebih banyak migran (Li dkk., 2018; Su dkk., 2019). Karena konteks perkotaan, perlu dipertimbangkan *amenities* kesehatan dan pendidikan, layanan transportasi, komunikasi yang memainkan peran penting dalam migrasi. Akses terhadap *amenities* tersebut penting untuk kenyamanan warga perkotaan. Selain itu, pentingnya layanan rekreasi (seperti tempat olahraga dan ruang publik) dapat memberikan keseimbangan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dengan lebih memperhatikan waktu luang dan menikmati kehidupan kota mereka (Yu dkk., 2019).

Pertumbuhan ekonomi berdampak positif kepada migrasi. Model 1 menunjukkan setiap peningkatan pertumbuhan sebesar satu persen akan meningkatkan migran masuk sebesar 976 orang. Migran melihat pertumbuhan ekonomi kota yang meningkat sebagai indikasi perekonomian sedang berjalan baik sehingga memberikan banyak peluang ekonomi bagi migran untuk meningkatkan taraf hidup mereka (Rodriguez-

Pose & Keterer 2012, Simpson 2017, Su *et al.* 2019). Variabel ini juga memiliki kaitan dengan serapan tenaga kerja, sehingga migran akan mempertimbangkan ketika memilih lokasi untuk bermigrasi. Karena migran ingin memperoleh pekerjaan yang lebih baik, daerah yang tumbuhnya negatif tidak menjadi pertimbangan sebagai lokasi tujuan. Variabel pengangguran bertanda negatif yang dari model 1 dapat diartikan jika pengangguran suatu kota meningkat satu persen akan menurunkan migran masuk sebesar 406 orang. Variabel pengangguran merefleksikan situasi perekonomian yang tidak stabil pada suatu daerah dan indikator seberapa besar jumlah angkatan kerja yang tidak dapat diserap oleh perekonomian dalam aktivitasnya untuk memproduksi barang dan jasa (Fan 2005, Zhao 2005, Biagi *et al.* 2011, Shen 2012). Daerah yang mencatatkan tingkat pengangguran tinggi akan mengurangi minat migran untuk masuk karena mereka berpotensi untuk tidak dapat memperoleh pekerjaan (Simpson 2017, Yu *et al.* 2019). Di Indonesia, kondisi ini seringkali dialami ketika mereka pindah ke kota yang biasanya lebih memerlukan tenaga kerja terampil dan terdidik. Daerah dengan tingkat pengangguran tinggi masih dapat menarik migran masuk meskipun migran tidak memiliki kualifikasi tertentu, karena mereka dapat bekerja di sektor informal (Syafa'at *et al.* 1998).

Sektor tersier berpengaruh positif kepada migrasi masuk kota seperti terlihat pada hasil empiris studi ini. Peningkatan sektor tersier sebesar satu persen akan meningkatkan migran masuk 130 orang *ceteris paribus*. Hasil estimasi ini mendukung pernyataan bahwa terjadinya migrasi dari sektor tradisional di pedesaan ke sektor modern di perkotaan ditentukan oleh dua faktor, yaitu tingkat perbedaan upah riil antara sektor primer dan sektor tersier, kemudian kesempatan untuk memperoleh pekerjaan di kota-kota. Jika tingkat perbedaan upah antara kedua sektor semakin tinggi, maka akan memicu seseorang untuk pindah ke daerah dengan sektor tersier yang dominan. Beberapa peneliti telah meneliti migrasi masuk ke wilayah metropolitan dan pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor tersier. Studi tersebut menunjukkan kesimpulan yang sama dengan penelitian ini, jika pangsa sektor tersier suatu daerah tujuan lebih tinggi maka daerah tersebut akan menerima lebih banyak migran yang masuk. Para migran berpendapat bahwa bekerja di sektor tersier akan memberi

mereka upah yang lebih tinggi daripada bekerja di sektor primer (Gries *et al.* 2016). Selain itu, sektor tersier berperan sebagai *leading sector* yang menunjukkan bahwa perkembangan sektor tersier akan memacu dan dapat mendorong perkembangan sektor ekonomi lainnya (Ferguson *et al.* 2007).

6. Faktor Pertimbangan Migrasi

Migrasi merupakan fenomena yang dapat terjadi antardaerah di suatu negara atau antar negara salah satunya di kawasan perbatasan. Literatur penyebab migrasi telah ditelaah oleh para akademisi baik dengan pendekatan empiris maupun teoretis di mana diperoleh temuan adanya faktor ekonomi maupun non-ekonomi yang dapat menjadi pertimbangan orang untuk bermigrasi. Aspek ekonomi dapat berupa pendapatan regional, kesempatan ekonomi, hingga kondisi perekonomian daerah; sedangkan faktor non-ekonomi salah satunya bisa dalam bentuk *amenities*.

Para pembuat kebijakan sebaiknya perlu mempertimbangkan secara cermat ketika ingin menentukan faktor penentu untuk aliran migran yang akan memasuki wilayah mereka. Kami menyarankan pentingnya mempertimbangkan *amenities* yang dapat mencukupi kebutuhan masyarakat yang berdomisili di wilayah tertentu serta penciptaan kesempatan ekonomi yang lebih baik. Misalnya, jika mereka ingin mengurangi intensitas migrasi penduduk untuk mengenyam pendidikan dan mendapatkan layanan kesehatan dari wilayah tetangga, maka pemerintah dapat menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang mencukupi kebutuhan warga yang berdomisili di wilayah tersebut.

Bagi pemerintah kota yang ingin menarik dan mempertahankan migran terutama jika mereka memiliki potensi untuk membuat kota berkembang. Kota sebaiknya dapat memberikan pengalaman yang nyaman, menyenangkan, dan menjanjikan apalagi jika kota-kota tersebut populer di kalangan pendatang. Kami menyarankan bahwa kebijakan pembangunan kota harus mengutamakan penyediaan *amenities* lengkap dan berkualitas tinggi serta penciptaan peluang ekonomi yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Allo, A.A. (2016). Pola migrasi antar provinsi di Indonesia: Pendekatan demografi–ekonomi. *Kawistara*, 6(1), 1–14.
- Alpek, B.L., Tesits, R., & Hovanyi, G. (2018). Spatial inequalities of disadvantage accumulation and their impact on employability in Hungary. *Regional Statistics*, 8(1), 96–119.
- Ananta, A. (2020). The outlook of mega demography toward Indonesian golden era 2045. *Indonesian Population Journal*, 15(2), 119–132.
- Ananta, A., & Arifin, E.N. (2014). Emerging patterns of Indonesia's international population mobility. *Malaysian Journal of Economic Studies*, 51 (1), 29–41.
- Biagi, B., Faggian, A., & McCann, P. (2011). Long and short distance migration in Italy: The role of economic, social, and environmental characteristics. *Spatial Economic Analysis*, 6(1), 111–131.
- Buch, T., Hamann, S., Niebuhr, A., & Rossen, A. (2014). What makes cities attractive? The determinants of urban labour migration in Germany. *Urban Studies*, 51(9), 1960–1978.
- BPS. (2010). *Tren/Pola Migrasi dari Berbagai Sensus dan Survei*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2012). *Buku Statistik Indonesia Tahun 2012*. Jakarta: BPS.
- Callies, D.L., & Suarez, A.I. (2005). Privatization and the providing of public facilities through private means. *Journal of Law & Politics*, 21, 477–504.
- Cheshire, P.C., & Magrini, S. (2006). Population growth in European cities: Weather matters–But only nationally. *Regional Studies*, 40(1), 23–37.
- Chi, G., & Marcouiller, D.W. (2013). Natural amenities and their effects on migration along the urban–rural continuum. *The Annals of Regional Science*, 50, 861–883.
- Clark, D.E., Herrin, W.E., Knapp, T.A., & White, N.E. (2003). Migration and implicit amenity markets: Does incomplete compensation matter. *Journal of Economic Geography*, 64(3), 289–307.
- Diamond, D.B., & Tolley, G.S. (1982). *The Economics of Urban Amenities*. Academics, New York.

- Duranton, G. (2016). Determinants of city growth in Colombia. *Papers in Regional Science*, 95(1), 101–131.
- Faggian, A., & McCann, P. (2009). Human capital, graduate migration and innovation in British regions. *Cambridge Journal of Economics*, 33(2), 317–333.
- Faggian, A., Olfert, M.R., & Partridge, M.D. (2011). Inferring regional well being from individual revealed preferences: The ‘voting with your feet’ approach. *Cambridge Journal of Regions, Economy, and Society*, 5(1), 163–180.
- Fan, C.C. (2005). Modelling interprovincial migration in China 1985–2000. *Eurasian Geography and Economics*, 46(3), 165–184.
- Fasihi, H., & Parizadi, T. (2020). Analysis of spatial equity and access to urban parks in Ilam Iran. *Journal of Environmental Management*, 260(1), 110–122.
- Ferguson, M., Ali, K., Olfert, M. R., & Partridge, M. D. (2007). Voting with their feet: Jobs versus amenities. *Growth and Change*, 38(1), 77–110.
- Florida, R. (2004). *The rise of creative class*. Basic Books, New York.
- Geis, W., S. Uebelmesser, S., & Werding, M. (2013). How do migrants choose their destination country? An analysis of institutional determinants. *Review of International Economics*, 21, 825–840.
- Greenwood, M.J., & Hunt, G.L. (1989). Jobs versus Amenities in The Analysis of Metropolitan Migration. *Journal of Urban Economics*, 25(1), 1–16.
- Graves, P., & Linneman, P.D. (1979). Household migration: Theoretical and empirical results. *Journal of Urban Economics*, 6(3), 383–404.
- Graves, P. E. (1980). Migration and Climate. *Journal of Regional Science*, 20 (2), 227–237.
- Gries, T., Kraft, M., & Simon, M. (2016). Explaining inter-provincial migration in China. *Papers in Regional Science*, 95(4), 709–732.
- Haas, H.D. (2010). Migration Transitions: A Theoretical and Empirical Inquiry into the Developmental Drivers of International Migration. *IMI Working Paper*, No. 24.
- Hakim, A.R., Nachrowi, N.D., Handayani, D., & Wisana, I.D.G.K. (2022). Do Amenities and Economic Factors Affect Migration? Empirical

- Evidence from Indonesian Cities. *Environment and Urbanization ASIA*, 13(1), 1-16.
- Hakim, A.R., Nachrowi, N.D., Handayani, D., & Wisana, I.D.G.K. (2023). The Measuring of Urban Amenities Index and Its Effect on Migration: Evidence from Indonesian Cities. *Regional Statistics*, 13(2), 1-29.
- Hakim, A.R., Nachrowi, N.D., Handayani, D., & Wisana, I.D.G.K. (2023). *Daya Tarik Amenities Kota terhadap Migrasi: Pendekatan Harga Implisit Amenities*. Jakarta: UI Publishing.
- Hunt, J. (2006). Staunching emigration from East Germany: Age and the determinants of migration. *Journal of the European Economic Association*, 4 (5), 1014–1037.
- Kawamura, K. (2018). Politics of inequality in Indonesia: Does democracy matter. In: *Emerging States at Crossroads* pp. 231–253., EESIPS Springer
- Kemeny, T., & Storper, M. (2012). The sources of urban development: Wages, housing, and amenity gaps across American cities. *Journal of Regional Science*, 52(1), 85–108.
- Knapp, T.A., & Graves, P.E. (1989). On the role of amenities in models of migration & regional development. *Journal of Regional Science*, 29(1), 71-87.
- Lee, E.S. (1966). A Theory of Migration Demography. *Demography*, Vol 3 No. 1, 47-57.
- Liebig, T. (2003). Migration Theory from a Supply Side Perspective. *USG Discussion Paper*, No. 92.
- Li, C., Wan, H.Y., & Tian, Z.L. (2018). Migrate for education? The impact on the flow of migrant workers by migrant children education policies reform. *Finance & Trade Economics*, 39(1), 132–146.
- Liu, Y., & Shen, J.F. (2014a). Jobs or amenities? Location choices of interprovincial skilled migrants in China 2000–2005. *Population, Space and Place*, 20(7), 592–605.
- Liu, Y., & Shen, J.F. (2014b). Spatial patterns & determinants of skilled internal migration in China 2000–2005. *Papers in Regional Science*, 93(4), 749–772.
- Mantra, I.B. (1985). *Pengantar Studi Demografi*. Yogyakarta: Nur Cahaya.

- Michalos, A.C., & Zumbo, B.D. (1999). Public services and the quality of life. *Social Indicators Research*, 48(2), 125–156.
- Nugroho, S., & Pitoyo, A.J. (2017). Arus migrasi risen di Indonesia 1980–2010. *Jurnal Bumi Indonesia*, 6(4), 1–9.
- Partridge, M.D. (2010). The duelling models: NEG vs amenity migration in explaining US engines of growth. *Papers in Regional Science*, 89(3), 513–536.
- Parvenoka, K., & Gurova, O. (2020). *Migration and Investment Activity in The Regions of The Siberian Federal District of The Russian Federation*, *Journal of Urban & Regional Analysis*, 12(1), 75–90.
- Pose, A.R., & Ketterer, T.D. (2012). Do local amenities affect the appeal of regions in Europe for migrants. *Journal of Regional Science*, 52(4), 535–561.
- Rappaport, J. (2007). Moving to nice weather. *Regional Science and Urban Economics*, 37(3), 375–398.
- Rappaport, J. (2008). Consumption amenities and city population density. *Regional Science and Urban Economics*, 38(6), 533–552.
- Ray, D. (1998). *Development Economics*. Oxford: Oxford University Press.
- Rickman, D.S., & Wang, H.B. (2017). US regional population growth 2000–2010: Natural amenities or urban agglomeration. *Paper in Regional Science*, 96, S69–S90.
- Rosen, S. (1974). Hedonic prices and implicit markets: Product differentiation in pure competition. *Journal of Political Economy*, 82(1), 34–55.
- Rotte, R., and Vogler, M. (1998). *Determinants of International Migration: Empirical Evidence for Migration from Developing Countries to Germany*. IZA Discussion Paper No. 12.
- Royuela, V., Moreno, R., & Yaya, E. (2010). Influence of quality of life on urban growth: A case study of Barcelona Spain. *Regional Studies*, 44(5), 551–567.
- Sanchez-Serra, D. (2014). Talent and creative economy in French local labour systems. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 32(3), 405–425.

- Saputra, D.D., & Budiarti, W. (2017). Analisis data panel pada migrasi masuk risen di Jawa dan Sumatera periode 1995 - 2015. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12(2), 79–92.
- Shen, J.F. (2012). Changing patterns and determinants of interprovincial migration in China 1985–2000. *Population, Space, and Place*, 18(3), 384–402.
- Scott, A.J. (2010). Job or Amenities? Destination Choices of Migrant Engineers in the USA. *Papers in Regional Science*, 89(1), 44–64.
- Simpson, N.B. (2017). Demographic and economic determinants of migration: push & pull factors drive the decision to stay or move. *IZA World of Labor*, 373, 1–11.
- Sousa, F.L. (2014). Does crime affect migration flows. *Papers in Regional Science*, 93(1), s99–s112.
- Steinberg, F. (1991). Urban infrastructure development in Indonesia. *Habitat International*, 15(4), 3–26.
- Stjernborg, J., & Mattison, O. (2016). The role of public transport in Society—A case study of general policy documents in Sweden. *Sustainability*, 8, 1-16.
- Sujarto, D. (2003). The development of metropolitan new towns in Indonesia: With special reference to the city of Jakarta and Jabotabek. In: *The Indonesian town revisited* pp. 76–88., Munster.
- Su, Y., Hua, Y., & Liang, X. (2019). Toward job or amenity? Evaluating the locational choice of internal migrants in China. *International Regional Science Review*, 42 (5–6), 400–430.
- Syafa'at, N., Susilowati, S.H., & Deri, H. (1998). Analisis faktor pendorong migrasi tenaga kerja pedesaan di Indonesia. *Agro-Economy Journal*, 17(2), 80–97.
- Winarno, W. (2006). Pola interaksi antar regional di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 1(2), 117–134.
- Yu, Z., Zhang, H., Tao, Z., & Liang, J. (2019). Amenities, economic opportunities, and patterns of migration at the city level in China. *Asian and Pacific Migration Journal*, 28 (1), 3–27.
- Zhao, Z. (2005). Migration, labor market flexibility, and wage determination in China: A review. *The Developing Economies*, 43 (2), 285–312.

Zheng, L. (2016). What city amenities matter in attracting smart people?.
Papers in Regional Science, 95(2), 309–327.

Kontribusi Pertumbuhan Bank dan Jasa Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Junaidi

Jasa Keuangan dan Kestabilan Perekonomian

Perkembangan dan pembangunan sektor keuangan termasuk perbankan merujuk pada sejauh mana sektor keuangan memberikan produk dan jasa keuangan terutama kepada masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Ini membuktikan bahwa perkembangan jasa keuangan telah menjadi alat penggerak yang dinamis baik berskala makro maupun mikro di bidang ekonomi untuk mencapai stabilitas keuangan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan antara si kaya dan miskin di negara maju dan berkembang. Beberapa jasa di bidang keuangan yang melibatkan peran sosial seperti memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu yang umumnya tinggal di daerah terpencil dan pedesaan dan juga sangat rentan terhadap fluktuasi perekonomian umumnya sangat bergantung kepada jasa keuangan yang disediakan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya dalam bentuk tabungan, fasilitas kredit dan pembiayaan dan pembayaran (Bank Dunia, 2020). Namun, rendahnya pendapatan masyarakat di beberapa wilayah dan pasar yang tidak seimbang menyebabkan jutaan masyarakat tidak dapat mengakses jasa keuangan seperti kredit dan pembiayaan. Ini menyebabkan potensi kehilangan kesempatan untuk peningkatan pendapatan dan menabung serta menginvestasikan modal yang dimiliki.

Lembaga Keuangan Bank adalah lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan atau memberi pembiayaan serta

menyediakan jasa keuangan lainnya seperti tabungan umum dan deposito berjangka. Lembaga keuangan bank dan non-bank juga berperan dalam menjaga kestabilan perekonomian yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 792 tahun 1990 yang menyatakan bahwa lembaga keuangan adalah badan atau lembaga yang kegiatan utamanya di bidang keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 *juncto* Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999, *juncto* Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 ada 4 (empat) jenis bank dan lembaga keuangan di Indonesia yaitu:

1. Bank sentral yang bertugas dan mengatur peredaran uang, penyaluran dana, mengatur sistem operasional perbankan dan perkreditan, menjaga nilai mata uang rupiah, mencetak uang, dan sebagainya.
2. Bank umum yang berfungsi menawarkan layanan dan produk jasa keuangan termasuk jual beli mata uang asing (valas), menawarkan produk asuransi, giro, cek serta menerima jasa penitipan barang berharga baik secara konvensional maupun Syariah.
3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penunjang, namun mempunyai keterbatasan wilayah operasional, kepemilikan dana serta layanan kepada masyarakat baik secara konvensional maupun Syariah.
4. Lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai kegiatan di bidang keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan baik di bidang produktif maupun konsumsi baik secara konvensional maupun Syariah seperti pegadaian, koperasi, dan asuransi.

Peran Bank dan Lembaga Keuangan dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Pembangunan sektor keuangan termasuk perbankan di Indonesia sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Selama pandemi COVID-19 hampir semua negara menghadapi rendahnya pertumbuhan ekonomi yang berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Salah satu solusi agar proses

pemulihan ekonomi berlangsung optimal adalah mendorong terlaksananya fungsi intermediasi baik secara nasional maupun internasional yaitu menghimpun dana pihak ketiga dan mendistribusikannya dalam bentuk pemberian kredit dan pembiayaan serta investasi pada sektor yang produktif dan padat karya. Peranan intermediasi lembaga keuangan dan perbankan sangat berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik lokal maupun nasional. Ketika terjadi penurunan jumlah kredit dan tingginya kredit macet/*Non-Performing Loan* (NPL) yang diakibatkan oleh sikap konservatif dan sikap kehati-hatian dari pihak kreditor, secara langsung akan mengakibatkan perlambatan penyaluran dana produktif yang dimiliki bank dan rendahnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dan wilayah (Anwar dkk., 2020).

Ada beberapa tugas utama bank dan lembaga keuangan. *Pertama*, bank dan lembaga keuangan bertugas menghimpun dan menyalurkan kredit dan atau pembiayaan baik kepada perorangan maupun lembaga usaha. Tujuan utama penyaluran kredit dan pembiayaan adalah untuk merangsang kegiatan usaha baik yang bersifat konsumtif dan produktif yang berjangka panjang, jangka menengah, dan kredit jangka pendek. *Kedua*, lembaga keuangan dan perbankan bertugas menghimpun dana dari pihak ketiga. *Ketiga*, menyalurkan jasa keuangan baik berupa lalu lintas peredaran dana masyarakat dan pembayaran uang termasuk jasa pengeluaran cek, wesel, jual beli valuta asing, dan lainnya. *Keempat*, bank juga berfungsi memberikan jaminan-jaminan bank dan juga menyewakan tempat untuk penyimpanan barang-barang berharga. Selanjutnya, terdapat dua jenis peranan perbankan dalam memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi dalam negeri seperti kegiatan jasa keuangan, penghimpunan serta penggunaan dana masyarakat, perkreditan/pembiayaan, dan pengiriman uang, sedang peranan perbankan di bidang luar negeri berkaitan dengan lalu lintas devisa dan moneter serta hubungan perdagangan internasional.

Peran Bank dan Lembaga Keuangan dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Bank dan lembaga keuangan, baik yang berskala makro dan mikro bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama memberikan pembiayaan dan kredit. Jasa pemberian kredit maupun

pembiayaan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok. Sistem jasa keuangan berpengaruh langsung terhadap perekonomian secara nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, perkembangan bank dan lembaga keuangan telah menjadi isu yang menarik dan memerlukan kajian yang menyeluruh tentang hubungan antara pembangunan sektor jasa keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Pada bagian ini, peran intermediasi bank menjadi dasar yang kuat dalam menyalurkan modal dan pendanaan ke sektor yang produktif, yang secara langsung diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Tahun 2017, 9,2% penduduk secara global mempunyai pendapatan di bawah US\$ 1,9 per/hari yang secara langsung dapat dikategorikan dunia hidup di bawah garis ketidacukupan. Angka tersebut setara dengan 689 juta penduduk dunia. Jumlah ini akan meningkat secara signifikan jika mengacu pada standar bank dunia yaitu \$3,20 dan \$5,50 per/hari. Jika mengacu pada angka tersebut, 24,1% dan 43,6% dari populasi di seluruh dunia masuk dalam kategori kemiskinan. Selama pandemi COVID-19, tingkat kemiskinan global naik 88 hingga 115 juta yang kebanyakan terjadi di negara berkembang (United Nation, 2022; World Bank, 2020). Memobilisasi dan menyalurkan modal dari debitor ke kreditor merupakan salah satu solusi untuk menekan laju tingkat kemiskinan (Abdelkafi dkk., 2022; Rahman, 2020).

Peran intermediari bank dan lembaga keuangan dalam bentuk mengumpulkan dana dari nasabah dan menyalurkannya ke kreditor dalam bentuk transfer modal dan sumber daya keuangan juga dapat berperan mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Selain itu, peran perbankan dalam pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, lembaga keuangan dan pemerintah membutuhkan kolaborasi untuk memecahkan masalah ekonomi dan sosial, terutama selama pandemi COVID-19 yang menyebabkan krisis ekonomi dan peningkatan angka kemiskinan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (2022), sektor keuangan memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pengentasan tingkat kemiskinan dalam bentuk memfasilitasi pembiayaan produktif dan investasi. Sektor ini memiliki efek langsung ke masyarakat yang

berpenghasilan rendah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan menyediakan lapangan kerja lebih banyak. Umumnya ada 5 (lima) pendekatan yang digunakan untuk menguji hubungan kausalitas antara pertumbuhan lembaga keuangan dengan pertumbuhan ekonomi termasuk tingkat kemiskinan di suatu wilayah:

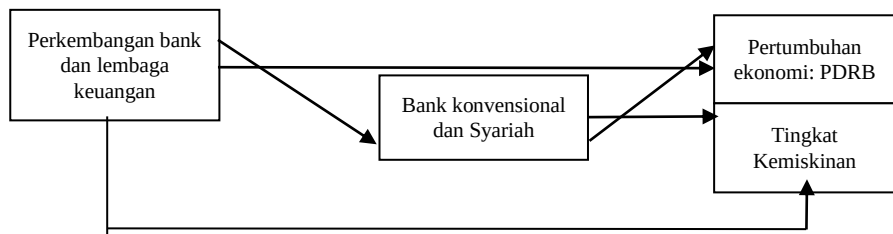
1. *Supply-leading* merupakan lembaga keuangan termasuk bank, koperasi, lembaga pembiayaan dan asuransi secara nyata berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan (Abdul-Majeed Alaro dan Alalubosa, 2019; Adeniyi dkk., 2015; Anwar dkk., 2020; Beck dkk., 2007; Coccoresse dan Shaffer, 2021; Hachica dan Amar, 2015; Ho dan Iyke, 2018; Kirkpatrick dkk., 2001; Samargandi dkk., 2014).
2. *Demand-following* merupakan pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan dipengaruhi oleh seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah baik dalam jangka waktu pendek, menengah dan jangka panjang (Abdelkafi dkk., 2022; Bolarinwa dkk., 2021; Cavusoglu dkk., 2019; Chowdhury dkk., 2018; Taivan dan Nene, 2016).
3. *Bidirectional relationship causality* merupakan hubungan saling mempengaruhi antara pertumbuhan lembaga keuangan dan pertumbuhan ekonomi termasuk angka kemiskinan (Anwar dkk., 2020; Gani dan Bahari, 2021; Haini, 2020; Kassim, 2016; Khan dkk., 2021; Olayungbo dan Quadri, 2019).
4. *No causal relationship* merupakan hubungan yang sama sekali tidak memiliki kaitan antara perkembangan lembaga keuangan dan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan (Gupta dan Rao, 2018; Opuku dkk., 2019).
5. *Negative relationship* merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah yang berpengaruh negatif dan cenderung menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan angka kemiskinan di suatu wilayah. Beberapa penelitian menemukan kecenderungan ini di Banglades (Hye dan Islam, 2012), Nigeria (Adeniyi dkk., 2015), Timur-Tengah (Narayan dan Narayan, 2013) dan Arab Saudi (Samargandi dkk., 2014).

Ada 3 (tiga) kategori umum yang digunakan dalam pengelompokan masyarakat kategori miskin di dunia (Levine, 2008). Pertama, pendapatan masyarakat di bawah satu dolar Amerika Serikat per/hari. Namun, di beberapa wilayah, semakin banyak yang menggunakan standar 2 (dua) dolar per/hari. Bagi negara-negara Eropa dan Amerika sangat jarang ada masyarakat yang berpenghasilan 2 (dua) dolar Amerika per/hari. Maka, standar ini tidak data digunakan dalam mengidentifikasi masyarakat miskin. Kedua, distribusi pendapatan menjadi salah satu alternatif untuk mengukur perbandingan masyarakat di suatu wilayah. Ini merupakan salah satu tolok ukur yang paling relevan dalam mengukur tingkat pendapat seseorang. Ketiga, peluang ekonomi adalah konsep yang paling sulit untuk diterapkan dalam mengukur tingkat kemiskinan secara empiris. Namun, konsep ini adalah kunci dalam mendiskusikan sebuah teori ekonomi dan proses pengambilan kebijakan pemerintah.

Teori ekonomi secara umum mengungkapkan bahwa bank dan lembaga keuangan dapat berfungsi mengurangi kesenjangan pendapatan melalui fasilitas layanan keuangan. Itu bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dengan berinvestasi di sektor-sektor produktif dan bunga yang diperoleh dari tabungan, dan secara tidak langsung dengan efek stimulasi pertumbuhannya. Beberapa bukti dan penelitian empiris membuktikan bahwa tingkat intermediasi keuangan berdampak positif terhadap pendapatan masyarakat yang tergolong rendah di negara-negara Afrika (Bolarinwa dkk., 2021; Khan dkk., 2021). Ada dua cara pembangunan sektor keuangan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan yaitu seseorang yang bekerja dan atau mendapatkan pekerjaan yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, melalui akses layanan jasa keuangan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sehingga, pembangunan sektor jasa keuangan memiliki dua peran penting dalam meningkatkan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Terciptanya lapangan pekerjaan secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, peran langsung lainnya adalah melalui pemberian modal kerja kepada masyarakat baik menambahkan kebutuhan modal maupun memberikan fasilitas layanan jasa keuangan kepada masyarakat kurang mampu untuk mengakses melalui peran intermediasi bank dan

lembaga keuangan (Beck dkk., 2007; Ho dan Iyke, 2018; Kheir, 2018; Levine, 2008).

Beberapa penelitian menguji hubungan antara pertumbuhan lembaga keuangan dan pertumbuhan ekonomi serta tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Coccorese and Shaffer (2021) menyimpulkan bahwa perkembangan lembaga keuangan di Italia, baik berskala provinsi maupun kabupaten mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan. Hal yang sama terjadi di negara-negara Sub-Sahara Afrika bahwa lembaga keuangan berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat (Olayungbo dan Quadri, 2019), Cyprus Utara (Cavusoglu dkk., 2019) dan 115 wilayah di Eropa Timur (Belitski dkk., 2021). Selanjutnya, Kheir (2018) menggunakan *autoregressive distributed lag* (ARDL) menyimpulkan bahwa pengembangan keuangan dan pembiayaan memiliki korelasi yang kuat dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Mesir selama periode 1980 - 2015. Dalam pola yang sama, bank Syariah memiliki peran penting dalam menurunkan kemiskinan di Bangladesh (Abdul-Majeed Alaro dan Alalubosa, 2019). Namun, 544 kecamatan di simpanan bank Bangladesh berkorelasi signifikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan pada 2010-2015 (Iqbal dkk., 2020). Sebaliknya, dengan menggunakan metode *two-stage least square* (2SLS) pembangunan lembaga keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan tingkat kemiskinan di 71 negara berkembang selama tahun 2002 - 2011 (Donou-Adonsou dan Sylwester, 2016) dan Cina selama tahun 1985 - 2014 (Ho dan Iyke, 2018). Selanjutnya, Belitski *et al.* (2021) menggunakan 115-panel data di Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Georgia, Moldova, Rusia, dan Ukraina selama periode (1995 - 2002) dan (2003 - 2008). Penulis menemukan pembangunan bank dan lembaga keuangan memiliki pengaruh yang positif terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Selain itu, jumlah kantor cabang bank dan lembaga keuangan juga berperan dalam memfasilitasi pertumbuhan bisnis dan mengurangi angka kemiskinan.



Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Menurunkan Tingkat Kemiskinan

Pada umumnya pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan disebabkan oleh kondisi alamiah dan ekonomi serta kondisi sosial dan budaya masyarakat. Kondisi alamiah dan ekonomi disebabkan oleh ketersediaan sumber daya alam dan manusia yang berpengaruh langsung terhadap proses produksi dan pembangunan ekonomi selanjutnya hasil pembangunan yang belum merata juga mempengaruhi struktur pembangunan ekonomi dan angka kemiskinan. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan kultural disebabkan sikap atau kebiasaan hidup masyarakat setempat. Sehingga pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan berasal dari dalam dan dari luar. Penyebab dari dalam di antaranya rendahnya kualitas sumber daya manusia serta sikap individu masyarakat. Sedangkan, penyebab dari luar adalah keterbatasan sumber daya alam, tatanan sosial, dan kelembagaan dalam masyarakat, kebijakan pembangunan, kesempatan kerja yang terbatas dan persaingan yang menyebabkan terpinggirnnya penduduk miskin yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Secara garis besarnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi (1) *persistent poverty* yaitu kemiskinan yang telah terjadi secara terus-menerus yang disebabkan oleh terbatasnya sumber daya alam atau wilayah yang sulit diakses; (2) *cyclical poverty* yang disebabkan oleh siklus ekonomi secara keseluruhan; (3) *seasonal poverty* yaitu kemiskinan musiman yang sering dialami oleh nelayan dan petani yang disebabkan oleh perubahan cuaca; selanjutnya (4) *accidental poverty* yang disebabkan oleh bencana alam atau akibat dari suatu kebijakan pemerintah. Menurut Bank Dunia strategi pengentasan kemiskinan berkembang mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan

kesehatan dan pendidikan, perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin. Pemerintah menerapkan 2 (dua) strategi umum dalam menurunkan tingkat kemiskinan, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Selain itu, masyarakat yang masuk dalam kategori miskin juga dapat mengakses fasilitas keuangan yang disediakan bank untuk menambah jam kerja serta modal.

Menurut John Friedmann ada empat tipe perencanaan yang menurunkan tingkat kemiskinan yaitu (1) perencanaan sebagai reformasi sosial (*social reform*) sebagai arahan dan pedoman dalam membangun masyarakat; (2) perencanaan sebagai analisis kebijakan (*policy analysis*) yang berdasarkan analisis data ilmiah yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat; (3) perencanaan sebagai pembelajaran sosial (*social learning*) lewat pengalaman dan disempurnakan lewat praktik (*learning by doing*) yang dijalankan bersama-sama dengan masyarakat; dan (4) perencanaan sebagai mobilisasi sosial (*social mobilization*) dalam dengan berbagai konsep/ideologi serta budaya masyarakat.

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang buruk terhadap perekonomian dan tingkat kemiskinan di banyak negara. Untuk mencegah dampak yang lebih buruk lagi, pemerintah pusat dan daerah serta lembaga keuangan perlu bersinergi dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi. Pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi karena lebih memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya melalui kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Selain itu, peran masyarakat, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta lembaga keuangan seperti bank juga tidak dapat dipisahkan. Sehingga diperlukan gerakan yang bersinergi dalam menjaga stabilitas moneter baik berskala makro dan mikro ekonomi, pemerintah dan Bank Indonesia umumnya melakukan 2 (dua) kebijakan penting yaitu:

1. Membangun faktor pendukung pertumbuhan ekonomi seperti menyediakan lapangan pekerjaan dalam bentuk percepatan pembangunan fisik dan nonfisik.
2. Mengembangkan sektor bisnis dan ekonomi yang lagi *booming* dan berdaya saing tinggi seperti pemanfaatan teknologi, bisnis digital dan *e-business/e-commerce*.

Selanjutnya, untuk menopang kebijakan utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan, pemerintah Indonesia telah membuat beberapa kebijakan penting seperti:

1. Percepatan infrastruktur dengan tujuan percepatan akses ekonomi dan mobilitas masyarakat secara langsung berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan:
 - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan penghubung antarprovinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia
 - b. Meningkatkan alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan prasarana desa.
 - c. Pembangunan, pengembangan, dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
2. Pengembangan sektor ekonomi potensial yang disesuaikan dengan karakter dan potensi daerah.
3. Pengembangan sektor pertanian yang difokuskan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian dalam bentuk membuka akses pembiayaan bagi petani berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta perbaikan jalur distribusi dan tata niaga hasil pertanian.
4. Pengembangan sektor pariwisata dan pemberdayaan masyarakat sekitar sehingga program ini berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat sekitar.

Beberapa teori yang menjelaskan proses pertumbuhan ekonomi yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik (*classical growth theory*), teori pertumbuhan ekonomi neoklasik (*neoclassical growth theory*), dan teori pertumbuhan ekonomi baru (*new growth theory*). Namun, beberapa ahli ekonomi melakukan penelitian secara komprehensif untuk mencari

jawaban yang mendasar faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan. Apakah peran intermediasi perbankan memiliki hubungan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan? Namun, beberapa ahli ekonomi di dunia masih memperdebatkan apakah bank dan lembaga keuangan mempunyai pengaruh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan terutama di negara-negara berkembang seperti (McKinnon, 1973), Thornton dan Poudyal (1990), Beck dkk., (2007), Haini (2020) dan Coccoresse dan Shaffer (2021). Namun, umumnya penelitian yang mengupas tentang pertumbuhan ekonomi menggunakan pendekatan data time series dan data panel.

Metode Johansen dan Juselius (JJ) dan *Vector Error Correction Model* (VECM) menyimpulkan bahwa untuk jangka panjang pertumbuhan ekonomi di Malaysia (GDP) tidak berhubungan secara langsung dengan pembiayaan (kredit) yang disalurkan oleh Bank Syariah (Hachicha dan Ben Amar, 2015). Namun, untuk jangka pendek, pembiayaan oleh bank Syariah di Malaysia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi periode 2000-2011. Selanjutnya, Kassim (2016) menggunakan pendekatan *autoregressive distribution lag* (ARDL) menyatakan bahwa pembiayaan oleh Bank Syariah di Malaysia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal yang sama terjadi di Pakistan, bank Syariah mempunyai kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Ullah dkk., 2020). Begitu juga dengan jumlah tabungan (deposit) bank Syariah di Malaysia juga mempunyai hubungan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi (Gani dan Bahari, 2021). Hal yang sama terjadi di Indonesia, Anwar dkk., (2020) menggunakan metode yang lebih lengkap seperti *co-integration analysis*, *autoregressive distributed lag* (ARDL), *Vector Error Correction Model* (VECM), *Variance Decompositions* (VDCs), dan *Impulse Response Functions* (IRFs) menyatakan bahwa tabungan, pembiayaan dan jumlah kantor cabang bank Syariah mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 2009-2019. Zarrouk dkk., (2017) juga menyatakan bahwa adanya hubungan *bi-directional* yang menandakan bahwa antara pertumbuhan bank dan lembaga keuangan dan pertumbuhan ekonomi saling mempengaruhi di Uni Emirat Arab (UAE),

Timur Tengah (Boukhatem dan Ben Moussa, 2018), negara-negara produsen minyak di Timur-Tengah (Gazdar dkk., 2019; Ledhem and Mekidiche, 2020) dan Bangladesh (Chowdhury dkk., 2018). Pemerintah Indonesia mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan pertumbuhan bank dan lembaga keuangan dan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dengan menurunkan tingkat kemiskinan, mengurangi kesenjangan pendapatan dan pembangunan dan stabilitas keuangan (Mohamed, 2020).

Sistem Perbankan di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, urutan ke empat penduduk terpadat di dunia dan merupakan pangsa pasar potensial termasuk sektor jasa keuangan, dan anggota G-20. Selain itu, Indonesia memiliki lebih dari 120 bank umum dan 12 bank Syariah yang memiliki lebih dari 10 ribu kantor cabang di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang telah melakukan upaya reformasi sistem keuangannya dengan mengintegrasikan ke dalam satu peraturan untuk mengelola bank umum baik bank konvensional maupun bank Syariah. Secara umum, terdapat perbedaan yang signifikan antara sistem operasional perbankan konvensional dan Syariah (Junaidi, 2021; Junaidi dkk., 2022). Sistem operasional bank Syariah mengacu pada empat prinsip utama, yaitu, prinsip Mudharabah (pembiayaan berdasarkan kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola usaha); Musyarakah (kemitraan antara dua belah pihak dengan menerapkan sistem bagi hasil dan kerugian); Murabahah (pembiayaan dalam transaksi jual beli), dan Ijara (*leasing*), keuntungan dan risiko dibagi rata kepada seluruh mitra yang terlibat sesuai dengan kesepakatan dan persentase modal usaha yang di miliki. Beberapa kegiatan yang dilarang termasuk sistem Riba (bunga), perjudian, Gharar (perdagangan spekulatif) dilarang dalam sistem bank Syariah karena tidak sesuai ajaran Islam. Namun, kegiatan tersebut merupakan bukanlah hal yang mustahil dilakukan oleh bank konvensional selama pelaksanaannya sesuai dengan prosedur bank tersebut dan tidak dilarang oleh pemerintah. Dalam bank Syariah, Mudarabah (sistem bagi hasil) adalah hubungan kontraktual antara bank (Shahibul Maal) dan Mudarib (pengelola usaha)

berdasarkan prinsip bagi hasil. Musyarakah (sistem bagi hasil dan kerugian) adalah kemitraan usaha patungan, bank dan mitra lain menyediakan modal dan berbagi untung dan rugi dengan rasio yang disepakati. Sebagian besar bank Islam berpendapat Musyarakah adalah alternatif keuangan Islam yang paling dekat dengan pembiayaan berbasis bunga. Murabahah (penjualan barang dengan penambahan keuntungan) adalah akad berbasis penjualan seperti pembeli (peminjam) memberikan informasi yang diperlukan kepada bank mengenai persyaratan pembelannya (Amin, 2022). Hal ini secara langsung berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, sektor perbankan memiliki peran penting dalam mentransfer sumber daya ke sektor produktif dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Perkembangan Bank Serta Lembaga Keuangan

Bab ini mengungkap faktor-faktor khusus yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di beberapa negara berkembang. Sehingga sangat penting dan relevan untuk membuktikan hubungan antara perkembangan bank dan lembaga keuangan, PDRB, dan pendapatan. Produk dan jasa keuangan berupa simpanan pihak ketiga dan jumlah kantor cabang memiliki peran penting dalam mempengaruhi tingkat pembiayaan. Menariknya, di beberapa negara, jumlah kredit dan pembiayaan berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Ini membuktikan bahwa bank dan lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting sebagai penghubung antara pemilik modal dan pengelola usaha yang membutuhkan tambahan modal. Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian seperti Awad dan Al Karaki (2019), Boukhatem dan Ben Moussa (2018), Coccorese dan Shaffer (2021), Anwar dkk., (2020), Tabash (2019), dan Zarrouk dkk., (2017) dan penurunan tingkat kemiskinan oleh Abdul-Majeed Alaro dan Alalubosa, (2019), Iqbal dkk., (2020) dan Kheir (2018). Selain itu, temuan ini kontras dengan hasil Iqbal dkk., (2020), Donou-Adonsou dan Sylwester (2016), yang menyimpulkan bahwa jumlah kredit dan pembiayaan oleh bank kurang berpengaruh terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Hasil dari

penelitian ini menyarankan agar bank meningkatkan kualitas pendanaan ke sektor produktif, yang secara langsung berhubungan dengan pendapatan masyarakat di wilayah dengan populasi yang padat dan maupun wilayah dengan penduduk lebih sedikit. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan peran intermediasi bank dan lembaga keuangan serta peningkatan layanan akses jasa keuangan. Hal ini akan secara langsung membantu masyarakat untuk mengakses modal di sektor produktif dan meningkatkan pendapatan mereka.

Hasil studi ini memungkinkan analisis kasus-kasus tertentu seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dan gagal memerangi angka kemiskinan dalam konteks pendidikan. Temuan menunjukkan bahwa akademisi, pemerintah, dan manajer perbankan harus secara strategis menarik topik-topik penting mengenai pembangunan, pembiayaan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan terhadap penyediaan pembiayaan untuk sektor produktif di beberapa daerah. Selanjutnya, bank juga dapat berperan sebagai lembaga keuangan yang mencerahkan dan memungkinkan semua orang untuk memperoleh modal dan pendanaan. Seharusnya tidak hanya memberikan nilai sosial dan ekonomi tetapi juga mendorong mereka untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Hal ini juga berarti bahwa perkembangan keuangan bank Indonesia secara statistik dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan melalui peran intermediasi jasa keuangan dan penyediaan akses permodalan dan skema pembiayaan bagi sektor swasta. Artinya, tingkat kemiskinan yang tinggi di beberapa wilayah Indonesia berkaitan secara positif dengan kesempatan masyarakat untuk mengakses permodalan dan pembiayaan. Secara teoretis, pembangunan keuangan dan pembiayaan berkorelasi positif dengan PDRB dan tingkat kemiskinan kabupaten dan kota (Donou-Adonsou dan Sylwester, 2016; Haini, 2020; Ho dan Iyke, 2018; Kassim, 2016; Anwar dkk., 2020; Tabash, 2019). Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat merupakan salah satu variabel fiskal penting di pusat maupun daerah, yang mencerminkan kapasitas anggaran daerah. Variabel ini diharapkan dapat mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jumlah kantor cabang bank dan lembaga keuangan di Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan,

yang menunjukkan peningkatan pembangunan keuangan di beberapa wilayah Indonesia gagal meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dan masyarakat.

Temuan menunjukkan bahwa pemerintah dan manajer perbankan (contohnya konvensional dan Syariah) harus mempunyai rencana strategis mengenai perkembangan perbankan, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan tingkat kemiskinan melalui transfer simpanan pihak ketiga dalam bentuk pemberian kredit dan pembiayaan di sektor produktif. Oleh karena itu, temuan penelitian ini memberikan beberapa implikasi dalam bentuk manajerial. Bank yang beroperasi di wilayah terpencil menunjukkan dasar yang kuat dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi baik secara lokal maupun nasional di beberapa negara berkembang. Semakin banyak produk dan layanan bank sesuai dengan kebutuhan masyarakat, semakin mereka memiliki rasa memiliki dan terlibat dalam pembiayaan. Namun, simpanan pihak ketiga dan pembiayaan bukan satu-satunya variabel yang memainkan peran penting dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Peran pembiayaan sebagai mediator antara pembangunan bank dan pertumbuhan ekonomi, yang juga mengurangi tingkat kemiskinan, menunjukkan bahwa masyarakat sadar dan setuju bahwa bank harus menerapkan perilaku yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk melanjutkan dan memelihara hubungan dengan bank. Dengan kata lain, kualitas produk dan jasa akan memperkuat dan meningkatkan keyakinan yang tinggi terhadap kesadaran dan sikap hubungan yang baik antara masyarakat dan bank. Lebih khusus lagi, interaksi masyarakat dengan ahli akan mempengaruhi tingkat keyakinan dan identitas mereka, dan pendekatan ini secara signifikan mempengaruhi pilihan mereka. Oleh karena itu, pengelola bank harus meningkatkan kualitas pegawainya terutama di bidang jasa dan produk perbankan.

Sebagai regulator, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) perlu mengendalikan operasional perbankan sebagai salah satu indikator penting utama dalam memperkuat hubungan antara masyarakat dan perbankan. Dalam hal ini, regulator diharapkan memiliki peran penting dalam membangun mekanisme pengaturan dan pengawasan yang tepat dan bernilai ekonomi dan sosial. Selain itu, perangkat yang komprehensif dan koordinasi yang intensif sangat penting untuk mendukung keberlanjutan

dan keberhasilan perbankan dalam meningkatkan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Pendekatan ini dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi dan mendorong pengurangan kemiskinan di Indonesia dan benua lain di seluruh dunia.

Peran Lembaga Keuangan dalam Mengurangi Kesenjangan Pendapatan

Produk dan jasa bank serta lembaga keuangan lainnya seperti simpanan pihak ketiga, jumlah pembiayaan, dan jumlah kantor cabang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi PDRB dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menemukan dibandingkan dengan kantor bank Syariah, jumlah kantor bank konvensional memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap tingkat PDRB di Indonesia. Sementara itu, bank Syariah memiliki peran penting dalam pengentasan tingkat kemiskinan. Pembiayaan bank konvensional juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan tingkat kemiskinan. Simpanan pihak ketiga pada bank Syariah memiliki hubungan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Sementara itu, deposito bank konvensional memiliki pengaruh yang lebih besar dalam mengurangi kemiskinan daripada PDRB. Secara keseluruhan bank konvensional dan bank syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memecahkan masalah ketimpangan pendapatan dalam konteks lokal dan domestik, demi menghindari kesenjangan pendapatan dan membuat yang kaya semakin kaya. Kebijakan ini sejalan dengan anjuran Bank Dunia.

Bagian buku ini juga menjelaskan kondisi lembaga keuangan bank dan non-bank secara efektif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan termasuk mengurangi kesenjangan pendapatan antarmasyarakat di Indonesia dan negara berkembang. Selain lembaga keuangan, pemerintah sebagai pembuat kebijakan juga diharapkan mendorong terciptanya produk dan jasa keuangan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat mengingat perbedaan budaya, kondisi sosial masyarakat, Pendidikan dan pendapatan menentukan kebutuhan dan tingkat keberhasilan kredit dan pembiayaan yang diberikan. Selanjutnya, para pemangku kepentingan seperti

pemerintah, bank Indonesia dan lembaga keuangan meningkatkan kerja sama dalam membangun fasilitas jasa keuangan dan mengembangkan jasa dan produk keuangan yang sudah ada agar lebih dapat diterima masyarakat khususnya di daerah yang didukung oleh Sumber Daya Alam yang melimpah dan daerah pedesaan. Selanjutnya, pengetahuan dan keahlian masyarakat dalam mengelola keuangan juga perlu ditingkatkan.

Daftar Pustaka

- Abdelkafi, I, Loukil, S. dan Romdhane, Y. (2022). Economic Uncertainty During COVID-19 Pandemic in Latin America and Asia. *Journal of Knowledge Economy*.
- Abdul-Majeed Alaro. A. dan Alalubosa, A.H. (2019). Potential of Shari'ah-compliant microfinance in alleviating poverty in Nigeria: A lesson from Bangladesh. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 12 No. 1, pp. 15–129.
- Adeniyi, O., Oyinlola, A., Omisakin, O. dan Egwaikhide, F.O. (2015). Financial development and economic growth in Nigeria: evidence from threshold modeling. *Economic Analysis and Policy*, Vol. 47 No. September, pp. 11-21.
- Amin, H. (2022). Maqasid-based consumer preference index for Islamic home financing. *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. 38 No. 1, pp. 47-67.
- Anwar, S.M., Junaidi, J., Salju, S., Wicaksono, R. dan Mispiyanti, M. (2020). Islamic bank contribution to Indonesian economic growth. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 13 No. 3, pp. 519-532.
- Awad, I.B. dan Al Karaki, M.S. (2019). The impact of bank lending on Palestine economic growth: An economic analysis of time series data. *Financial Innovation*, Vol. 5 No. 14, pp. 1-21.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A. dan Levine, R. (2007). Finance, inequality and the poor. *Journal of Economic Growth*, Vol. 12 No. 1, pp. 27-49.
- Belitski, M., Desai, S. dan Godley, A. (2021). Small business and poverty: Evidence from post-Soviet cities. *Regional Studies*, Vol. 55 No. 1, pp. 1-15.
- Bolarinwa, S.T., Adegboye, A.A. dan Vo, X.V. (2021). Is there a *nonlinear* relationship between financial development and poverty in Africa? *Journal of Economic Studies*.

- Boukhatem, J. dan Ben Moussa, F. (2018). The effect of Islamic banks on GDP growth: Some evidence from selected MENA countries. *Borsa Istanbul Review*, Vol. 18 No. 3, pp. 231- 247.
- Cavusoglu, B, Ibrahim, S.S. dan Ozdeser, H. (2019). Testing the relationship between financial sector output, employment and economic growth in North Cyprus. *Financal Innovation*, Vol. 5 No. 36, pp. 1-11.
- Chowdhury, M.A.F., Akbar, C.S. dan Shoyeb, M. (2018). Nexus between risk sharing vs non-risk sharing financing and economic growth of Bangladesh: ARDL bound testing and continuous wavelet transform (CWT) approach. *Managerial Finance*, Vol. 44 No. 6, pp. 739-758.
- Coccorese, P. dan Shaffer, S. (2021). Cooperative banks and local economic growth. *Regional Studies*, Vol. 55 No. 2, pp. 307–321.
- Donou-Adonsou, F, dan Sylwester, K. (2016). Financial development and poverty reduction in developing countries: New evidence from banks and microfinance institutions. *Review of Development Finance*, Vol. 6 No. 1, pp. 82–90.
- Gani, I.M. dan Bahari, Z. (2021). Islamic banking’s contribution to the Malaysian real economy. *ISRA International Journal of Islamic Finance*.
- Gazdar, K., Hassan, M.K., Safa, M.F. dan Grassa, R. (2019). Oil price volatility, Islamic financial development and economic growth in Gulf cooperation council (GCC) countries. *Borsa Istanbul Review*, Vol. 19 No. 3, pp. 197-206.
- Gupta, K.S.K. dan Rao, R.P. (2018). The causal relationship between financial development and economic growth: an experience with BRICS economies. *Journal of Social and Economic Development*, Vol. 20, pp. 308-326.
- Hachica, N. dan Amar, A.B. (2015). Does Islamic bank financing contribute to economic growth? The Malaysian case. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 8 No. 3, 349-368.
- Haini, H. (2020). Examining the relationship between finance, institutions and economic growth: Evidence from the ASEAN economies. *Economic Change and Restructuring*, Vol. 53 No. 11, pp. 519–542.

- Ho, S.Y. dan Iyke, B.J. (2018). Finance-growth-poverty nexus: A re-assessment of the trickle-down hypothesis in China. *Economic Change and Restructuring*, Vol. 51 No. 3, pp. 221–247.
- Hye, Q.M.A. dan Islam, F. (2012). Does financial development hampir economic growth: empirical evidence from Bangladesh. *Journal of Business Economics and Management*, Vol. 14 No. 3, pp. 558-582.
- Iqbal, K., Roy, P.K. dan Alam, S. (2020). The impact of banking services on poverty: Evidence from sub-district level for Bangladesh. *Journal of Asian Economics*, Vol. 66 No. 2, pp. 1–16.
- Junaidi, J. (2021). The awareness and attitude of Muslim consumer preference: the role of religiosity. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 12 No. 6, pp. 919-938.
- Junaidi, J., Wicaksono, R. dan Hamka, H. (2022). The consumers' commitment and materialism on Islamic banking: the role of religiosity. *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 13 No. 8, pp. 1786-1806.
- Kassim, S. (2016). Islamic finance and economic growth: The Malaysian experience. *Global Finance Journal*, Vol. 30 (May), pp. 66-76.
- Khan, I., Khan, I., Sayal, A.U. dan Khan, M.Z. (2021). Does financial inclusion induce poverty, income inequality, and financial stability: empirical evidence from the 54 African countries? *Journal of Economic Studies*.
- Kheir, V.B. (2018). The nexus between financial development and poverty reduction in Egypt. *Review of Economics and Political Science*, Vol. 3 No. 2, pp. 40-55.
- Kirkpatrick, C., Sirageldin, I. dan Aftab, K. (2001). Financial development, economic growth, and poverty reduction. *The Pakistan Development Review*, Vol. 39 No. 4, 363-388.
- Ledhem, M.A. dan Mekidiche, M. (2020). Economic growth and financial performance of Islamic banks: a CAMELS approach. *Islamic Economic Studies*, Vol. 28 No. 1, pp. 47-62.
- Levine, R. (2008). Finance and the poor. *The Manchester School*, Vol. 76 No. 1, pp. 1-13.
- Mckinnon, R.I. dan Shaw, E. (1973). *Money, Capital and Banking on Economic Development*. Brooklyn Institution, Washington D.C.

- Mohamed H. (2020). Empowering the poor and enhancing financial inclusion from a multidimensional perspective. In. Ali AES, Ali KM, Khleequzzaman M. (Eds.) *Enhancing Financial Inclusion through Islamic Finance*, Volume I, Islamic Research and Training Institute (IRTI), Jeddah: KSA.
- Narayan, P.K. dan Narayan, S. (2013). The short-run relationship between the financial system and economic growth: new evidence from regional panels. *International Review of Financial Analysis*, Vol. 29 No. September, pp. 70-78.
- Olayungbo, D.O. dan Quadri, A. (2019). Remittances, financial development and economic growth in sub-Saharan African countries: Evidence from a PMG-ARDL approach. *Financial Innovation*, Vol. 5 No. 19, pp. 1-25.
- Opuku, E.E.O., Ibrahim, M. dan Sare, Y.A. (2019). The causal relationship between financial development dan economic growth in Africa. *International Review of Applied Economics*, Vol. 33 No. 6, pp. 789-812.
- Rahman, M.M. (2020). Financial inclusion for poverty alleviation: The role of Islamic finance in Bangladesh. In Ali AES, Ali KM, Azrag MH, *Enhancing Financial inclusion through Islamic finance Vol. II*, Islamic Research and Training Institute (IRTI), Jeddah, KSA, 17-50.
- Samargandi, N., Fidrmuc, J. dan Ghosh, S. (2014). Financial development and economic growth in an oil-rich economy: the case of Saudi Arabia. *Economic Modelling*, Vol. 43 No. December, pp. 267-278.
- Tabash, M.I. (2019). Islamic finance, investment and economic growth evidence from UAE. *International Journal of Economic and Business Research*, Vol. 16 No. 1, pp. 136- 145.
- Taivan, A. dan Nene, G. (2016). Financial development and economic growth: Evidence from Southern African development community countries. *The Journal of Developing Areas*, Vol. 50 No. 4, pp. 81-95.
- Thornton, J. dan Poudyal, S.R. (1990). Money and capital in economic development: A test of the McKinnon-hypothesis for Nepal. *Journal of Money, Credit and Banking*, Vol. 22 No. 3, pp. 395-399.

- Ullah, A., Zhao, X., Kamal, M. A., Riaz, A. dan Zheng, B. (2020). Exploring asymmetric relationship between Islamic banking development and economic growth in Pakistan: Fresh evidence from a non-linear ARDL approach. *International Journal of Finance & Economics*.
- United Nation. (2022). *World Economic Situation and Prospects*, New York, USA.
- World Bank. (2020). Available at: <https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview#1>. Accessed at 4th April 2021.
- Zarrouk, H., El Ghak, T. dan Abu Al Haija, E. (2017). Financial development, Islamic finance and economic growth: Evidence from the UAE. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 8 No. 1, pp. 2-22.

Inclusive Growth: Diagnosis Penurunan Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi

E. Ahmad Soleh

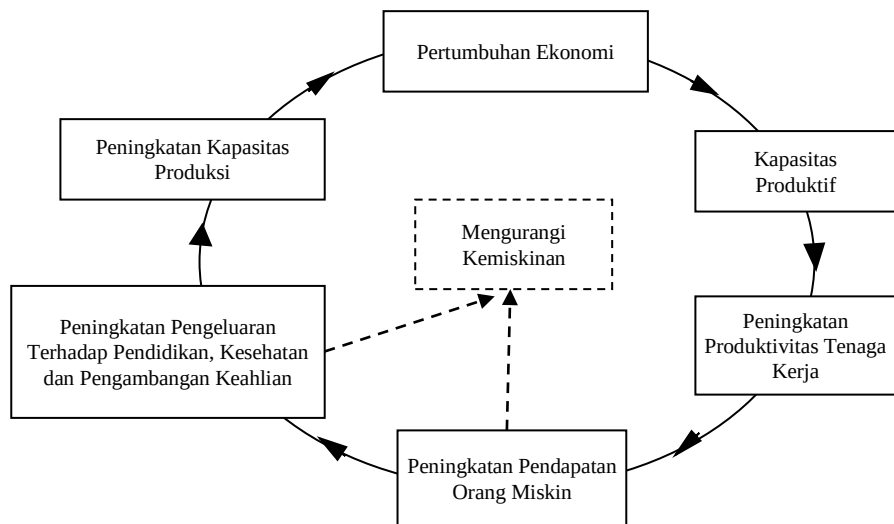
A. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi dengan laju yang tinggi dan berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memastikan kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Tambunan, 2016). Pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan awalnya didasari oleh teori *trickle down effect* yang menyebutkan adanya bagian yang menetes ke bawah dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas perekonomian, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan per kapita (berarti mengurangi kemiskinan), menaikkan permintaan dan penawaran dan seterusnya berputar mengikuti mekanisme perekonomian. Berdasarkan konsep ini, tujuan pembangunan di era tahun 1950-an dan 1960-an adalah menciptakan pertumbuhan yang tinggi. Konsep ini juga dianut oleh Indonesia di era pemerintahan Presiden Soeharto (Maipita, 2014).

Mekanisme pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan, secara sederhana ditunjukkan pada gambar 1. Gambar 1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menaikkan permintaan terhadap *output*, menaikkan kapasitas produktif para tenaga kerja dan membuka lapangan kerja baru. Semua akan bermuara pada peningkatan pendapatan para pekerja. Pendapatan yang meningkat akan berdampak pada peningkatan pengeluaran, seperti pengeluaran terhadap pendidikan, kesehatan, dan pengembangan keahlian (pengurangan kemiskinan). Kondisi ini menciptakan kemungkinan kenaikan lebih lanjut dalam produktivitas dan tingkat lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Namun, sejarah pembangunan di beberapa negara berkembang dalam dua dekade terakhir

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, masih menyimpan berbagai persoalan seperti kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan dan pengangguran (Chetia, 2015; Combes & Ouedraogo, 2016; Goyal, 2015; Martins, 2013; Ncube *et al.*, 2012; Pal, 2014; Szeles, 2014). Hal ini menimbulkan gagasan bagi tiap negara dan organisasi dunia dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

Studi literatur dari berbagai institusi, peneliti, dan organisasi, *pro-poor growth* telah diidentifikasi sebagai konsep yang paling penting untuk mencapai pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan (Klasen, 2001). Beberapa organisasi internasional (OECD, 2001; UN, 2000; Word Bank, 2001) mendefinisikan *pro-poor growth* sebagai pertumbuhan ekonomi yang secara signifikan menurunkan kemiskinan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat miskin dan memberikannya kesempatan untuk memperbaiki situasi ekonomi. Namun, definisi ini tidak memberikan jawaban seperti berapa banyak manfaat pertumbuhan bagi masyarakat miskin serta berapa banyak pengurangan kemiskinan yang diperlukan untuk pertumbuhan yang *pro-poor* (Lopez, 2004; Son, 2007).



Gambar 1. Lingkaran Hubungan Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, dan Pengurangan Kemiskinan

Sumber: Islam, 2004; dimodifikasi dalam Maipita (2014)

Beberapa tahun terakhir ditemukan sejumlah studi berusaha untuk mendefinisikan dan mengukur *pro-poor growth*. Namun, tidak ada kesepakatan tentang definisi dan alat ukur dalam konsep *pro-poor growth* dan masih selalu menjadi perdebatan akademis (Deutch & Silber, 2011; Ranieri & Ramos, 2013; Son, 2007). Secara umum, terdapat dua definisi *pro-poor growth* (pertumbuhan ekonomi untuk kesenjangan dan kemiskinan). Perbedaan utama dari keduanya adalah pertumbuhan ekonomi lebih fokus pada pengurangan kesenjangan distribusi pendapatan (Kakwani & Pernia, 2000; Kakwani & Son, 2008; Son, 2004; White & Anderson, 2000). Selanjutnya, *pro-poor growth* merupakan pertumbuhan ekonomi lebih fokus pada pengurangan kemiskinan (Grosse *et al.*, 2008; Ravallion & Chen, 2003). Meski terjadi perdebatan, konsep ini telah digunakan pada sejumlah diskusi kebijakan pembangunan (Ichoku *et al.*, 2012; Kakwani & Son, 2006; Selim & Yildiz, 2012; Son, 2007; Suhartini, 2012; Zaman, *et al.*, 2011).

Seiring dengan perbedaan konsep *pro-poor growth*, selama dekade terakhir ditemukan bahwa penggunaan konsep *inclusive growth* hadir dan secara bersamaan dengan konsep *pro-poor growth* (Alexander, 2015; Deutsch & Silber, 2011; Son, 2007; Vellala *et al.*, 2015). *Inclusive growth* memberi konsep yang lebih luas. Masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat dari pertumbuhan, tetapi turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pertumbuhan (Alexander, 2015; Chetia, 2015; Goyal, 2015; Kazi, 2015; Khokhar & Singh, 2016; Prasanna, 2016). Selain itu, pertumbuhan inklusif menciptakan peluang ekonomi untuk semua segmen dari populasi dan memastikan akses yang sama kepada mereka (Bavle & Palkar, 2015; Bakshi, 2015; Chetia, 2015; Migap *et al.*, 2015; Prasanna, 2016; Smith, 2016; Yadav, 2015).

Pendekatan pertumbuhan inklusif merupakan salah satu konsep untuk tujuan jangka panjang dan berkelanjutan (Bakshi, 2015; Balkyte & Tvaronaviciene, 2012; Ianchovichina & Lundstrom, 2009; Shyni, 2014; Singh & Chaturvedi, 2016). Meskipun belum ada konsep pemersatu, pemerintah dari berbagai negara menempatkan pertumbuhan inklusif sebagai inti dari strategi kebijakan. Hal tersebut tertuang dalam rencana lima tahunan pembangunan seperti di negara India (Vellala, 2014; Kazi,

2015), Selandia Baru (OECD., ESCAPE., and ADB, 2015), Cina (KPMG, 2011; Apco, 2016) dan Indonesia (BAPPENAS, 2014).

B. Konsep Pertumbuhan Inklusif

Seiring dengan perdebatan konsep *pro-poor growth*. Penggunaan konsep *inclusive growth* dalam dekade terakhir hadir dan secara bersamaan dengan konsep *pro-poor growth* dengan tidak ada spesifikasi yang jelas dari hubungan antar keduanya. Pernyataan tersebut di antaranya diungkapkan oleh Son (2007) yang menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan perhatian utama dari kebijakan pembangunan. Fokus pada pengurangan kemiskinan dengan konsep yang dikenal dengan istilah *pro-poor growth*. Namun, tetap tidak ada konsensus tentang bagaimana mendefinisikan atau mengukur pertumbuhan *pro-poor* dan hal ini telah dijadikan dalam sejumlah kebijakan dan menjadi perdebatan akademis. *Pro-poor growth* juga tersirat dalam istilah “*broad-based growth*”, yang digunakan dalam Laporan Bank Dunia tahun 1990. Sementara konsep itu tidak pernah pasti pada saat itu, kemudian disebut pertumbuhan *pro-poor* selama tahun 1990-an. Baru-baru ini, istilah “*inclusive growth*” telah muncul dalam Laporan *Eminent Persons Group* yang diprakarsai oleh Asian Development Bank (ADB) pada tahun 2007. Pertumbuhan inklusif menekankan pada peningkatan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Deutsch & Silber (2011) menyatakan bahwa konsep *pro-poor growth* telah menjadi sangat populer selama dekade terakhir. Hal ini mencerminkan gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi harus mempengaruhi semua segmen masyarakat dan hal ini menyebabkan mengapa istilah *inclusive growth* juga menjadi sering digunakan. Namun ada berbagai cara memahami istilah *pro-poor*. Beberapa berpendapat bahwa *pro-poor growth* ketika pertumbuhan menimbulkan pendapatan bagi masyarakat miskin. Sementara yang lain menganggap bahwa pertumbuhan dapat diberi label *pro-poor* hanya jika hal tersebut menimbulkan pendapatan bagi masyarakat miskin secara proporsional lebih dari sekadar menimbulkan pendapatan rata-rata masyarakat.

Alexander (2015) juga menyatakan bahwa kemiskinan absolut telah menurun secara substansial selama 30 tahun terakhir, dengan sebagian

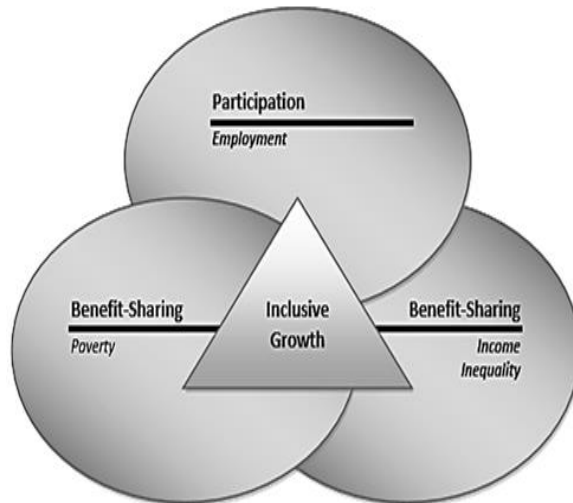
besar pengurangan ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang cepat di negara-negara berkembang. Namun, pengakuan bahwa pertumbuhan ekonomi sering tidak memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan telah mendorong perdebatan saat ini tentang perlunya pertumbuhan inklusif. Pertumbuhan ekonomi dengan tidak adanya langkah-langkah untuk menjamin pemerataan berkelanjutan serta manfaat pertumbuhan telah sering diabadikan. Akibatnya, banyak pemerintah menyadari bahwa untuk secara signifikan mengurangi kemiskinan mereka harus mempromosikan pertumbuhan yang inklusif.

Selanjutnya Vellala *et al.* (2015) menjelaskan pergeseran ekonomi pembangunan dalam dua dekade terakhir dari *Pro-Poor Growth* (PPG) ke *Inclusive Growth* (IG). Jika *Pro-Poor Growth* lebih berfokus pada hasil pertumbuhan sedangkan *inclusive growth* berfokus pada hasil dan proses pertumbuhan. Pertumbuhan inklusif tidak hanya menganjurkan efek menetes ke bawah dari pertumbuhan ekonomi tetapi juga memastikan bahwa orang miskin dan orang-orang terpinggirkan juga berpartisipasi dalam proses peluang ekonomi baru dan berbagi manfaat darinya. Pergeseran paradigma ini dalam ekonomi pembangunan untuk memberdayakan masyarakat terpinggirkan yang begitu banyak sehingga suara mereka juga dapat dimasukkan dalam arus utama pembangunan dalam kapasitas bangsa secara keseluruhan.

Jika penggunaan konsep *pro-poor growth* lebih cenderung fokus pada manfaat pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Maka *inclusive growth* memberi konsep yang lebih luas. Masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat dari pertumbuhan, tetapi turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pertumbuhan. Hal tersebut di antaranya disampaikan oleh:

- a. Haan (2013), pertumbuhan inklusif tidak hanya berfokus pada manfaat pertumbuhan yang diterima bagi masyarakat miskin, namun lebih melihat baik masyarakat miskin dan tidak miskin, sebagai peserta dalam proses pertumbuhan dan sebagai orang yang menciptakan pertumbuhan ekonomi.
- b. Ramos *et al.* (2013), mendefinisikan pertumbuhan inklusif dalam dua dimensi yang saling melengkapi. Pertama, berfokus pada dimensi pembagian manfaat melalui analisis ketimpangan

pendapatan dan indikator kemiskinan. Kedua, meliputi dimensi partisipasi dalam analisis dengan menambahkan indikator kerja.



Gambar 2. Pertumbuhan Inklusif: Dimensi dan Indikator
Sumber: Ramos *et al.* (2013)

- c. Shyni & Mavoothu (2014), pertumbuhan yang inklusif memungkinkan orang untuk berkontribusi dan menerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi.
- d. Mandloi (2014), faktor kunci pertumbuhan inklusif adalah kemampuan masyarakat miskin untuk mengintegrasikan diri ke dalam proses pertumbuhan dan mendapatkan akses terhadap kesempatan kerja yang diciptakan melalui tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja.
- e. Vellala *et al.* (2014), pertumbuhan inklusif yang berbasis luas. Pertumbuhan yang tinggi di mana orang miskin tidak hanya menerima manfaat saja dari hasil pertumbuhan tetapi juga berpartisipasi dalam proses pertumbuhan.
- f. Alexander (2015), pertumbuhan inklusif tidak hanya berfokus pada hasil bagi orang-orang miskin, tetapi juga untuk memastikan partisipasi mereka dalam proses pertumbuhan.

- g. Chetia (2015), pertumbuhan inklusif harus dilihat sebagai proses tanpa pengecualian dari populasi sebagai agen pembangunan yang partisipasinya sangat penting dalam proses pembangunan dan bukan hanya target kesejahteraan program pembangunan.
- h. Goyal (2015), pertumbuhan yang inklusif dapat dilihat sebagai proses pertumbuhan ekonomi, yang tidak hanya berfokus pada pencapaian tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari PDB. Tetapi juga upaya untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi mengarah ke peningkatan arti yang lebih luas dalam kualitas hidup orang terutama kelompok marginal seperti kasta, suku, kelas terbelakang lainnya, kelompok minoritas dan perempuan.
- i. Kazi (2015), konsep pertumbuhan yang inklusif berarti bahwa setiap orang andil dalam proses pertumbuhan termasuk masyarakat yang lebih miskin dan terpinggirkan serta wanita.
- j. Khokhar & Singh (2016), konsep pertumbuhan inklusif sebagian besar intuitif. Pertumbuhan yang inklusif adalah pertumbuhan yang berfokus hasil dan proses. Dua dimensi yang meskipun saling melengkapi.
- k. Prasanna (2016), pertumbuhan yang inklusif dapat didefinisikan sebagai proses dan hasil di mana semua kelompok masyarakat telah berpartisipasi dalam organisasi pertumbuhan dan telah mendapatkan manfaat secara adil dari pertumbuhan tersebut.

Selain itu, pertumbuhan inklusif menciptakan peluang ekonomi untuk semua segmen dari populasi atau kelompok masyarakat dan memastikan akses yang sama terhadap mereka. Hal tersebut disampaikan oleh:

- a. Narayan (2009), pertumbuhan inklusif merupakan pertumbuhan yang memberikan manfaat dari pertumbuhan dan ketersediaan terhadap perbaikan pendapatan bagi seluruh warga negara.
- b. Heintz (2012), pertumbuhan inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan yang terjadi dalam konteks di mana peluang ekonomi (termasuk peluang kerja), memperluas akses masyarakat miskin terhadap peluang tersebut yang cenderung membaik, dan penurunan ketimpangan.

- c. Bavle & Palkar (2015), pertumbuhan yang inklusif merupakan pertumbuhan dengan menciptakan peluang ekonomi untuk semua segmen dari populasi dan memastikan akses yang sama kepada mereka.
- d. Bakshi (2015), pertumbuhan inklusif mengacu pada kesempatan yang sama dalam hal akses ke pasar, sumber daya dan lingkungan serta peraturan bagi individu terlepas dari gender.
- e. Chetia (2015), pertumbuhan yang inklusif merupakan konsep yang memberikan kesempatan yang adil bagi pelaku ekonomi selama proses pertumbuhan ekonomi dengan manfaat yang dikeluarkan oleh setiap bagian dari masyarakat.
- f. Migap *et al.* (2015), pertumbuhan inklusif ketika menciptakan peluang ekonomi bersama dengan menjamin akses yang sama kepada seluruh masyarakat.
- g. Yadav (2015), pertumbuhan inklusif menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dalam perekonomian apapun.
- h. Prasanna (2016), pertumbuhan inklusif memberikan pelayanan yang dapat diakses oleh semua bagian termasuk orang-orang yang mendapat pengecualian sebelumnya yakni bagian atau kelompok yang relatif terbelakang. Pertumbuhan inklusif memperluas lingkup regional pertumbuhan ekonomi, memperluas akses terhadap aset dan berkembang pasar dan memperluas ekuitas dalam kesempatan bagi generasi berikutnya.
- i. Smith (2016), pertumbuhan inklusif pada dasarnya mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang menciptakan peluang bagi semua bagian dari populasi, dengan manfaat dari pertumbuhan didistribusikan secara adil di masyarakat.

Tidak ada kesepakatan yang universal mengenai pendekatan, definisi, serta indikator untuk pertumbuhan inklusif (Alexander, 2015; Birdsall, 2007; Huang & Quibria, 2014; Klasen, 2010; Lee Y & Lee S, 2013; McKinley, 2010; OECD., ESCAPE., & ADB, 2015; Rauniar & Kanbur, 2009; Ranieri & Ramos, 2013; Vellala *et al.*, 2014). Beberapa kerangka konseptual pertumbuhan inklusif telah diusulkan oleh para peneliti dan berbagai organisasi internasional yaitu:

- a. The World Bank (2009), mengusulkan konsep pertumbuhan inklusif:
- Pertumbuhan inklusif berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang merupakan kondisi yang diperlukan dan penting untuk mengurangi kemiskinan.
 - Pertumbuhan inklusif mengadopsi perspektif jangka panjang dan berkaitan dengan pertumbuhan yang berkelanjutan:
 - a) Pertumbuhan dapat dipertahankan dalam jangka panjang, harus berbasis luas di seluruh sektor. Isu transformasi struktural untuk diversifikasi ekonomi karena mengambil posisi terdepan.
 - b) Hal ini juga harus termasuk bagian besar dari angkatan kerja di negara tersebut. Inklusivitas mengacu kesetaraan kesempatan dalam hal akses ke pasar, sumber daya dan lingkungan, berisi peraturan untuk bisnis dan individu.
 - Pertumbuhan inklusif berfokus pada kecepatan dan pola pertumbuhan. Bagaimana pertumbuhan yang dihasilkan sangat penting untuk mempercepat pengurangan kemiskinan. Setiap strategi pertumbuhan inklusif harus disesuaikan dengan keadaan negara tertentu.
 - Pertumbuhan inklusif berfokus pada kerja produktif daripada redistribusi pendapatan. Fokus tidak hanya pada pertumbuhan lapangan kerja tetapi juga pada pertumbuhan produktivitas.
 - Pertumbuhan inklusif tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga individu sebagai subjek analisis.
 - Pertumbuhan inklusif sejalan dengan definisi mutlak *pro-poor growth*, bukan yang relatif.
 - Pertumbuhan inklusif tidak didefinisikan dalam hal target tertentu seperti penciptaan lapangan kerja atau distribusi pendapatan. Ini adalah hasil potensial, bukan tujuan tertentu.
 - Pertumbuhan inklusif biasanya didorong oleh sumber daya, didorong pasar pertumbuhan dengan pemerintah memainkan peran sebagai fasilitator.
- b. UNDP dalam OECD., ESCAPE., & ADB (2015), pertumbuhan inklusif dipandang sebagai proses maupun hasil pertumbuhan. Suatu sisi memastikan bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam

proses pertumbuhan, baik dari segi pengambilan keputusan serta dalam hal berpartisipasi dalam pertumbuhan itu sendiri. Sedangkan sisi lain, pertumbuhan yang inklusif menyiratkan pembagian keuntungan secara adil. Selanjutnya *The Europe 2020 Strategy*, mengidentifikasi dua dimensi kunci dari pertumbuhan yang inklusif: (i) mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan yang akan menciptakan dan memperluas peluang ekonomi, dan (ii) memastikan akses yang lebih luas untuk peluang ini sehingga anggota masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan. Dimensi kedua diidentifikasi dengan memperluas kapasitas manusia seperti investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial dasar. Jaring pengaman sosial juga ditekankan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan dan kekurangan (OECD., ESCAPE., & ADB, 2015).

- c. The Asian Development Bank (ADB) memberikan pendekatan pertumbuhan inklusif dalam arti yang luas, mencakup dimensi pendapatan dan non-pendapatan.

Konsep pertumbuhan inklusif dari peneliti ADB di antaranya adalah:

- 1) Habito (2009) mendefinisikan pertumbuhan inklusif sebagai pertumbuhan GDP yang dapat menurunkan kemiskinan. Habito juga menjelaskan bahwa struktur perekonomian dan komposisi sektoral dalam pertumbuhan ekonomi telah diyakini sebagai faktor penting untuk mencapai pertumbuhan inklusif. Pernyataan umum bahwa pertumbuhan yang lebih kuat pada struktur pertanian akan mempercepat penurunan kemiskinan. Penekanan pada sektor pertanian ini wajar bila mengingat bahwa peran sektor pertanian terutama dalam penyerapan tenaga kerja di negara berkembang sangat besar. Selain fokus akan kondisi sektor perekonomian, Habito memandang investasi pada fasilitas publik seperti kesehatan, pendidikan dan perumahan sangat penting untuk mencapai pertumbuhan inklusif.
- 2) McKinley (2010), memberikan pendekatan yang menekankan aspek non-pendapatan dan menghargai kemampuan manusia, seperti kesehatan yang baik dan melek huruf. Terutama sebagai

hasil pembangunan manusia, bukan sebagai instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

- 3) Klasen (2010), memberikan ukuran inklusivitas pertumbuhan harus mencakup dimensi pendapatan dan non-pendapatan seperti akses pendidikan dan kesehatan. Klasen (2010) mendefinisikan pertumbuhan yang inklusif sebagai non-diskriminatif. Lebih khusus, pertumbuhan yang inklusif jika memungkinkan semua anggota masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kurang beruntung, untuk berpartisipasi dan berkontribusi terhadap proses pertumbuhan, dan hal itu juga menurunkan ketimpangan dalam dimensi non-pendapatan, termasuk pendidikan, kesehatan, gizi dan integrasi sosial.
- 4) Ali & Son (2007), menyatakan bahwa pertumbuhan inklusif fokus pada percepatan perluasan kesempatan dan akses terhadap sumber daya ekonomi bagi seluruh pelaku ekonomi. Kelompok yang kurang diuntungkan adalah syarat penting tetapi belum cukup untuk menurunkan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan telah meningkat, tetapi hal ini bukan berarti bahwa orang kaya semakin kaya sedangkan orang miskin semakin miskin. Melainkan kekayaan orang kaya meningkat jauh lebih cepat dari pada orang miskin. Melihat pada persoalan ketimpangan yang terjadi, Ali memberi kesimpulan bahwa faktor kunci yang bertanggungjawab atas peningkatan ketimpangan terlihat beragam dalam pertumbuhan. Tiga dimensi dalam perbedaan pertumbuhan terutama berkenaan dengan perbedaan pengukuran ketimpangan di berbagai bagian daerah. Pertama, pertumbuhan telah berbeda antar daerah di suatu negara (misalnya antar provinsi). Kedua, pertumbuhan berbeda antar kota dan desa. Ketiga, pertumbuhan berbeda antar rumah tangga, sehingga pendapatan masyarakat kelas atas tumbuh lebih cepat dari pada masyarakat kelas menengah atau di bawahnya.
- 5) Rauniyar & Kanbur (2009), pembangunan ekonomi inklusif merujuk kepada sebuah pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan kesempatan ekonomi yang sama bagi semua orang. Pembangunan ekonomi inklusif fokus pada penciptaan

kesempatan ekonomi dan aksesnya bagi semua anggota masyarakat dari semua golongan, kelompok atau tingkatan, tidak hanya bagi kaum miskin. Sebuah pembangunan ekonomi dikatakan inklusif ketika semua anggota dari sebuah komunitas berpartisipasi di dalamnya dan berkontribusi yang sama terhadap proses tersebut tanpa melihat kondisi atau latarbelakang pribadi mereka.

- 6) ADB (2014) secara lebih luas mengusulkan indikator pertumbuhan yang inklusif mencakup seperangkat 35 indikator yang merupakan penjabaran dari 8 (delapan) indikator kunci. Ke delapan indikator ini adalah (i) kemiskinan dan ketimpangan (pendapatan dan non-pendapatan), (ii) pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, (iii) infrastruktur utama, (iv) akses pendidikan dan kesehatan, (v) akses layanan infrastruktur dasar dan jasa, (vi) kesetaraan gender dan kesempatan, (vii) jaring pengaman sosial, dan (viii) lembaga dan pemerintahan yang baik.
- d. Samans *et al.* (2015) dari World Economic Forum mendefinisikan pertumbuhan inklusif sebagai pertumbuhan *output* yang berkelanjutan selama beberapa dekade, seluruh sektor ekonomi, menciptakan kesempatan kerja produktif bagi sebagian besar penduduk usia kerja di negara itu, dan mengurangi kemiskinan.
- e. OECD., ESCAPE., & ADB (2015) membangun kerangka kebijakan multidimensi dalam memberikan definisi pertumbuhan inklusif. Menurut OECD, pertumbuhan inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesempatan bagi semua segmen penduduk dan mendistribusikan pembagian keuntungan atau manfaat dari pertumbuhan ekonomi ke kelompok-kelompok sosial masyarakat guna peningkatan kesejahteraan, baik dari segi moneter dan non-moneter. Sehingga, kerangka OECD melengkapi pendekatan atas definisi dan ukuran pertumbuhan inklusif yang telah digunakan oleh organisasi-organisasi internasional lainnya.

Berbagai konsep telah ditawarkan untuk merumuskan pertumbuhan inklusif dan memiliki pandangan yang berbeda. Terdapat pendekatan yang menekankan pertumbuhan inklusif dalam menurunkan kemiskinan. Pendekatan lain yang berakar bahwa pertumbuhan inklusif dalam

meningkatkan kesejahteraan melalui pemerataan distribusi pendapatan. Beberapa kasus menjelaskan bahwa penekanan ditempatkan pada pekerjaan produktif. Sehingga, pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan pekerjaan yang diperlukan untuk menyerap pertumbuhan penduduk, memenuhi tuntutan sektor swasta untuk keterampilan dan kompetensi, dan memastikan bahwa pekerja memberikan keuntungan dari peningkatan produktivitas. Masih ada pendekatan lain yang fokus pada peluang ekonomi dan non-ekonomi yang dihasilkan oleh pertumbuhan dan berbagi manfaat dari pertumbuhan dalam hal kualitas pekerjaan, kesehatan dan pendidikan status penduduk dan atau keterampilan angkatan kerja (OECD., ESCAPE., & ADB, 2015).

C. Pengukuran Pertumbuhan Inklusif

Seiring dengan ragam pendekatan yang digunakan, metode pengukuran pertumbuhan inklusif juga cukup bervariasi. Hingga saat ini, belum ada ukuran yang pasti tentang indikator pertumbuhan inklusif. Klasen (2010) menggunakan pendekatan yang sederhana untuk mengukur pertumbuhan inklusif. Klasen mengadaptasi metode dari penelitian-penelitian *pro-poor growth*. Namun secara khusus, Klasen mengadaptasi metode *Poverty Equivalent Growth Rate* (PEGR) Kakwani & Son (2008). PEGR dianggap tepat sebagai alat ukur karena memenuhi *Monotonicity Criterion*. *Monotonicity Criterion* berarti bahwa dalam memperhitungkan pengurangan kemiskinan tidak hanya pertumbuhan, tetapi bagaimana manfaat dari pertumbuhan dibagi oleh individu dalam masyarakat (Son, 2007).

Kakwani & Son (2008) memperkenalkan gagasan *Poverty Equivalent Growth Rate* (PEGR) dalam mengatasi beberapa masalah. Tingkat pertumbuhan rata-rata (γ^*) yang akan menghasilkan perubahan proporsional yang sama seiring hadirnya laju pertumbuhan rata-rata (γ) jika proses pertumbuhan itu tidak disertai oleh perubahan ketidaksetaraan relatif (yaitu ketika semua orang dalam masyarakat menerima manfaat proporsional pertumbuhan yang sama). Perubahan proporsional yang sebenarnya dalam kemiskinan disebabkan oleh $\delta\gamma$, di mana δ adalah elastisitas pertumbuhan kemiskinan. Jika pertumbuhan yang distribusi netral dalam arti relatif (yaitu ketimpangan relatif tidak berubah),

maka tingkat pertumbuhan rata-rata (γ^*) akan mencapai perubahan proporsional dalam kemiskinan sama dengan $\eta\gamma^*$ yang harus setara dengan $\delta\gamma$. Dengan demikian, PEGR dilambangkan dengan γ^* sehingga:

$$\gamma^* = \left(\frac{\delta}{\eta}\right) \gamma = \varphi\gamma \text{ ----- (1.1)}$$

Rumus tersebut juga dapat ditulis sebagai berikut:

$$\gamma^* = \frac{\int_0^{\frac{H\partial P}{\partial x}} x(p)g(p)dp}{\int_0^{\frac{H\partial P}{\partial x}} x(p)dp} \text{ ----- (1.2)}$$

Ketika η selalu negatif, persamaan (1.1) menyiratkan bahwa jika $\delta\gamma$ negatif maka γ^* akan positif dan sebaliknya. Ekuivalen, PEGR konsisten dengan arah perubahan dalam kemiskinan: nilai positif atau negatif dari PEGR menyiratkan penurunan atau kenaikan dalam kemiskinan. Ukuran yang diusulkan yang demikian memenuhi dasar persyaratan dalam pengurangan kemiskinan merupakan fungsi yang meningkat secara monoton dari PEGR; semakin besar PEGR, semakin besar penurunan kemiskinan. PEGR merupakan langkah yang efektif dalam pengurangan kemiskinan, yaitu maksimalisasi PEGR menyiratkan pengurangan maksimal dalam kemiskinan. Untuk menentukan pola pertumbuhan, yaitu apakah *pro poor growth* atau *anti poor*, dapat ditulis persamaan:

$$\gamma^* = \gamma + (\varphi - 1)\gamma \text{ ----- (1.3)}$$

Seperti definisi sebelumnya, *pro poor growth* dalam arti relatif ketika $\gamma > 0$ dan $\varphi > 1$ atau ketika $\gamma < 0$ dan $\varphi < 1$. Setiap kondisi ini menyiratkan bahwa istilah kedua di sisi kanan (1.3) positif. Dengan demikian, pertumbuhan akan *pro-miskin* dalam arti relatif jika $\gamma^* > \gamma$.

Menentukan apakah pertumbuhan *pro-poor* dalam arti absolut, maka dari persamaan (1.3) menjadi:

$$\gamma^* = \gamma[1 + (\varphi - \varphi^*) + (\varphi^* - 1)\gamma] \text{ ----- (1.4)}$$

Seperti didefinisikan sebelumnya, pertumbuhan *pro-poor* dalam arti mutlak ketika $\gamma > 0$ dan $\varphi^* > 1$ atau ketika $\gamma < 0$ dan $\varphi^* < 1$. Setiap kondisi ini menyiratkan bahwa istilah kedua di sebelah kanan (1.4) adalah positif. Sehingga, pertumbuhan akan menjadikan *pro poor* pada keadaan mutlak jika $\gamma^* > \gamma[1 + (\varphi - \varphi^*)]$ dengan $\varphi > \varphi^*$ selalu ada, *pro poor growth* secara mutlak akan selalu menyiratkan *pro poor growth* dalam arti relatif tetapi tidak sebaliknya. *Pro poor growth* mutlak merupakan syarat kuat dibandingkan daripada *pro poor growth* relatif. Hal ini menunjukkan bahwa dengan tingkat pertumbuhan yang sama pada pendapatan rata-rata, pola pertumbuhan mutlak akan menyebabkan penurunan lebih cepat dalam kemiskinan daripada pola pertumbuhan relatif.

Berdasar konsep PEGR yang dikembangkan oleh Kakwani & Son (2008). Klasen (2010) mengadopsi konsep tersebut sebagai alat dalam mengukur *Inclusive Growth* (IG) yaitu (IG_{ij}). Sehingga rumus yang digunakan menjadi:

$$IG_{ij} = \left(\frac{G_{ij}}{G_j} \right) \bar{G}_j \text{-----} (1.5)$$

i mengacu pada kelompok yang dianggap kurang beruntung, sedangkan j mengacu pada indikator yang bersangkutan.

D. Keragaman dalam Pengukuran Pertumbuhan Inklusif

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, masih menjadi perhatian para peneliti global dalam melakukan interpretasi dalam penerapan kebijakan pada agenda pembangunan. Selama dekade terakhir, penggunaan konsep *inclusive growth* hadir dan secara bersamaan dengan konsep *pro-poor growth*. Pertumbuhan inklusif merupakan kerangka multidimensi atas proses dan kinerja pertumbuhan ekonomi dalam mengatasi permasalahan pembangunan. Hingga saat ini, belum ada kesepakatan universal dari peneliti atau organisasi internasional mengenai pendekatan, definisi, serta indikator untuk pertumbuhan inklusif. Selain itu, belum terdapat kesepakatan bersama organisasi internasional dalam memulai penerapan pendekatan pertumbuhan inklusif sebagai model pertumbuhan. Namun, dengan menggunakan pendekatan, definisi, serta

indikator yang ada, beberapa studi telah mengukur dan menganalisis pertumbuhan inklusif suatu daerah atau negara. Di antara kajian pertumbuhan inklusif yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan kemiskinan. Terdapat keragaman atas metode pengukuran pertumbuhan inklusif. Sehingga, perlu dilakukan pengukuran inklusivitas pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan salah satu alat ukur yang ada seperti *Poverty Equivalent Growth Rate* (PEGR) guna menganalisis sejauh mana pertumbuhan inklusif terjadi di suatu daerah.

Daftar Pustaka

- Alexander, K. (2015). *Inclusive growth: Topic Guide*. Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham. 1-27
- Ali, Ifzal., & Son, H. H. (2007). Measuring Inclusive Growth. *Asian Development Review*, 24 (1), 11-31.
- Apco. (2016). The 13th Five-Year Plan: Xi Jinping Reiterates his Vision for China. <http://www.apcoworldwide.com/docs/default-source/default-document-library/Thought-Leadership/13-five-year-plan-think-piece.pdf?sfvrsn=2>
- Asian Development Bank. (2014). *Framework of Inclusive Growth Indicators 2014 4th Edition. Key Indicators for Asia and the Pacific Special Supplement*. Manila: Asian Development Bank.
- Bakshi, Pragati. (2015). Women Empowerment Through Employment And Inclusive Growth. *Journal of Science & Management (LJSM)*, 1st Issue Jan 2015, 86-89.
- Balkyte, Audrone., & Tvaronaviciene, Manuela. (2012). The Inclusion Of Sustainable Development Dimension Into The Competitiveness Theory. *Department of Economics and Management of Enterprises, Vilnius Gediminas Technical University, Sauletekio ave. 11, LT-10223 Vilnius, Lithuania*, 1-9.
- BAPPENAS. (2014). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bavle, Sushama., & Palkar, Apoorva. (2015). Women Entrepreneurship towards Inclusive Growth: Role of Economic Factors. *MERC Global's International Journal of Social Science & Management*, 2 (5), 323-332.
- Birdsall, Nancy. (2007). *The Macroeconomic Foundations Of Inclusive Middle-Class Growth*. 2020 FOCUS BRIEF on the World's Poor and Hungry People.
- Chetia, Padmaja. (2015). Inclusive Growth and the Tribal People. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 4 (1), 01-02.

- Combes, Jean-Louis., & Ouedraogo, Rasmane. (2016). *How Does Inclusive Growth Boost Tax Revenue Mobilization?*. Études et Documents, n°5, CERDI.
- Goyal, Seema. (2015). Inclusive Growth in India: Dream or Reality. *PARIPEX - Indian Journal Of Research*, 4 (1), 161-163.
- Grosse, M., Harttgen, Kenneth., & Klasen, Stephan. (2008). Measuring Pro-Poor Growth in Non-Income Dimension. *World Development*, 36 (6), 1021-1047.
- Deutsch, Joseph., & Silber, Jacques. (2011). On Various Ways of Measuring Pro-Poor Growth. *Economics The Open-Access, Open-Assessment E-Journal*, JEL. 132, 015, 1-54.
- Haan, Arjan De. (2013). Inclusive Growth: More than Safety Nets. International Development Research Centre, Ottawa Sukhadeo Thorat, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. *SIG Working Paper 2013/1*, 1-16.
- Habito, Cielito F. (2009). Patterns of Inclusive Growth in Developing Asia: Insights from an Enhanced Growth-Poverty Elasticity Analysis. *Asian Development Bank Institute (ADBI) working paper series No. 145*, 1-55.
- Heintz, James. (2012). Informality, Inclusiveness, and Economic Growth: An Overview of Key Issues. University of Massachusetts, Amherst, USA. Political Economy Research Institute. *SIG Working Paper 2012/2*, 1-26.
- Huang, Yongfu., & Quibria, M. G. (2014). The global partnership for inclusive growth. Department of Economics, Morgan State University. *JEL classification: O40, I00, F35, F60*, 1-25
- Ianchovichina, Elena., & Lundstrom, Susanna. (2009). Inclusive Growth Analytics Framework and Application. The World Bank. Economic Policy and Debt Department Economic Policy Division. *Policy Research Working Paper 4851*, 1-40.
- Ichoku, Hyacinth Eme., et al. (2012). What do we know about pro-poor growth and regional poverty in Nigeria?. *International Journal of Economic Sciences and Applied Research*, 5(3), 147-172.
- Kakwani, Nanak., & Pernia, Ernesto M. (2000). What is Pro-Poor Growth? *Asian Development Review*, 18(1), 1-16.

- Kakwani, Nanak., & Son, Hyun H. (2006). Pro-Poor Growth: The Asian Experience. UNU-World Institute for Development Economic Research. *Research Paper*, 56, 1-21.
- Kakwani, Nanak., & Son, Hyun H. (2008). Poverty Equivalent Growth Rate. *The Review of Income and Wealth*, 54(4), 643-655.
- Kazi, Muktaur Rahman. (2015). Status of Women in India in the Context of Inclusive Growth. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 20(4), 125-130.
- Khokhar, Amit Singh., & Singh, Bharat. (2016). Role of Women Entrepreneurship in Inclusive Growth. *WOMEN'S LINK*, 22 (2), 1-6.
- Klasen, Stephan. (2001). In Search of The Holy Grail: How to Achieve Pro-Poor Growth?. *Paper commissioned by Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ)*. 1-30.
- Klasen, Stephan. (2010). Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definition, Open Questions, and Some Constructive Proposals. Manila: Asian Development Bank. *Working Paper Series*, 12, 1-15.
- KPMG. (2011). *China's 12th Five-Year Plan: Overview*. KPMG International Cooperative ("KPMG International"). China.
- Lee, Young Youn., & Lee, Sophia Seung-yoon. (2013). Policy Implications for Inclusive Growth in the Republic of Korea. *Korea and the World Economy*. 14(3), 607-651.
- Lopez, J Humberto. (2004). *Pro-poor growth: a review of what we know (and of what we don't)*. Washington, DC, Word Bank.
- Mandloi, Aditi., & Bansal, Mohit. (2014). Inclusive Economic Growth with Employment Generation and Poverty Reduction. *International Journal of Management and International Business Studies*, 4(1), 109-116.
- Martins, Pedro., & Lucci, Paula. (2013). *Recasting MDG 8: Global Policies for Inclusive Growth*. London: Overseas Development Institute.
- Maipita, Indra. (2014). *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- McKinley, Terry. (2010). Inclusive Growth Criteria and Indicators: An Inclusive Growth Index for Diagnosis of Country Progress. *ADB Sustainable Development Working Paper Series*, 14, 1-15.
- Migap, Job Pristine., Okwanya, Innocent., & Ojeka, Godfrey. (2015). Financial Inclusion For Inclusive Growth: The Nigerian Perspective. *International Journal of Information Technology and Business Management*, 37(1),1-8.
- Narayan, S. (2009). India's Economy: Constraints To Inclusive Growth. *Asian Journal Of Public Affairs*, 2(1), 8-11.
- Ncube, Mthuli. (2013). Africa in the Next 50 Years: The Road towards inclusive growth. *Journal of African Development*, 15(2), 139-154.
- OECD. (2001). *"Rising to the Global Challenge: Partnership for Reducing World Poverty"*. Statement by the DAC High Level Meeting, 25-26 April, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris.
- OECD., ESCAPE., & ADB. (2015). *Opinion Notes Preliminary Draft*. UN Conference Centre, Bangkok, Thailand.
- Pal, Rajesh. (2014). Inclusive Growth and Equality of Opportunity. *International Journal of Economics, Finance and Management*, 3(4), 151-157.
- Prasanna, K. (2016). Inclusive Growth - Poverty Reduction Programmes in India. *Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR)*, 2(3), 17-21.
- Ramos, Raquel Almeida., Ranieri, Rafael., & Lammens, Jan-Willem. (2013). Mapping Inclusive Growth. International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG). *Working Paper*, 105, 1-51.
- Ranieri, Rafael., & Ramos, Raquel Almeida. (2013). Inclusive Growth: Building Up A Concept. International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG). *Working Paper*, 104, 1-21.
- Rauniyar, Ganesh., & Kanbur, Ravi. (2009). Inclusive Growth and Inclusive Development: A Review and Synthesis of Asian Development Bank Literature. Asian Development Bank. *Occasional Paper*, 8, 1-15.

- Revallion, Martin., & Datt, Graurav. (2003). Why Has Economic Growth Been More Pro-Poor In Some States Of India Than Others?. *Journal of Development Economics*, 68, 381–400.
- Samans, Richard., Blanke,Jennifer., Corrigan,Gemma., & Drzeniek, Margareta. (2015). *The Inclusive Growth and Development Report 2015*. Geneva: World Economic Forum.
- Selim, Raziye., & Yildiz, Fahriye. (2012). Pro-Poor Growth in Turkey, *Journal of Economic Literatur Classification: I32, O15*, 1-15.
- Singh, Manisha., & Chaturvedi, Sunil Kumar. (2016). Trade and Inclusive Growth. *The Researcher- International Journal of Management Humanities and Social Sciences*, 1(1), 58-66.
- Shyni,V. K., & Mavoothu, D. (2014). Financial Inclusion -The Way Towards Inclusive Growth. *International Journal of Advanced Research*, 2(2), 649-655.
- Smith, Eddie. (2016). *Inclusive Growth: Manchester City Council Report for Resolution*. Economy Scrutiny Committee. Manchester City Council.
- Suhartini, Atik Ma'atis. (2012). Pro Poor Growth Di Jawa. *Jurnal Aplikasi Statistika dan Komputasi Statistik*, 4(2).
- Son, Hyun Hwa. (2004). A Note on Pro-Poor Growth. *Economics Letters*, 82, 307–314.
- , (2007). *Interrelationship between Growth, Inequality, and Poverty: The Asian Experience*. Philippines: Asian Development Bank.
- (2007). *Pro-Poor Growth: Concepts and Measures*. Philippines: Asian Development Bank.
- Szeles, Monica Raileanu. (2014). A Multidimensional Approach To The Inclusiveness Of Economic Growth In The New Member States. *Romanian Journal of Economic Forecasting*, XVII(2), 5-24.
- Tambunan, Tulus. (2016). *Pembangunan Ekonomi Inklusif: Sudah Sejauh Mana Indonesia?*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- United Nations. (2000). *A Better World For All*. New York.
- Vellala, Paramasivan S. K Madala, Mani., & Chhattopadhyaya, Utpal. (2014). A Theoretical Model for Inclusive Economic Growth in

- Indian Context. *International Journal of Humanities and Social Science*, 4(13), 229-235.
- Vellala, Paramasivan S. K Madala, Mani., & Chhattopadhyay, Utpal. (2015). *Assessment of Inclusive Economic Growth in Major Indian States*. Twelfth AIMS International Conference on Management. P 926-934.
- White, Howard., & Anderson, Edward. (2000). *Growth Versus Distribution: Does The Pattern Of Growth Matter?* Institute Of Development Studies, University Of Sussex.
- World Bank. (2001). *World Development Report 2000/2001*. New York. Oxford University Press, Inc.
- World Bank. (2009). *What Is Inclusive Growth?* PREM Knowledge Brief. February 10. Washington, DC: Economic Policy and Debt Department, The World Bank.
- Yadav, Vinay Kumar. (2015). Exploration Of Inclusive Growth Indicators For Sustainable Development In Indian Perspective. *Asia Pacific Journal of Marketing & Management Review (APJMMR)*, 4(8), 23-28.
- Zaman, Khan., & Ahmad. (2011). Relationship Between Economic and Pro-Poor Growth: Evidence from Pakistan (1995-2010). *Romanian Journal of Fiscal Policy*, 2(1), 24-35.

Individualitas Perempuan terhadap Akses Keuangan

Elva Dona

Perempuan sebagai Individu

Perempuan dalam peranannya sebagai *economic agent* terikat pada dirinya sebagai pemilik dari *resource* yang dapat membuat *value* dalam perekonomian. Banyak studi tentang peran dan kontribusi perempuan dalam pembangunan maupun dalam pertumbuhan inklusi. Sehubungan dengan hal tersebut perempuan juga memiliki hal unik lainnya yang perlu menjadi perhatian seperti (SOFIA, 2018):

- a. Meskipun perempuan umumnya bergantung pada orang lain untuk mendapatkan penghasilan, sebagian besar dari mereka memiliki sumber penghasilan sekunder, terutama dari kegiatan kewirausahaan.
- b. Selain itu, meskipun perempuan bergantung pada orang lain, seperti pasangannya, untuk menyediakan uang untuk membiayai kebutuhan pribadi dan rumah tangga, perempuan tetap memegang kendali atas keuangan rumah tangga. Peran perempuan sebagai manajer rumah tangga mengharuskan mereka mengambil keputusan tentang pengeluaran (terkadang, secara independen dari orang lain), dan mereka mencatat pendapatan dan bagaimana uang dibelanjakan. Dengan demikian, perempuan secara aktif terlibat dalam transaksi keuangan - baik dalam hal menyimpan uang untuk digunakan di masa depan (menabung), melakukan pembayaran dan transfer, atau bahkan mengakses pinjaman, terutama untuk menjembatani kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran.
- c. Meskipun perempuan (secara umum) tidak mencapai tingkat pendidikan yang sama dengan laki-laki, mereka tampaknya memiliki kinerja yang lebih baik dalam beberapa dimensi dalam hal

‘kemampuan keuangan’ - misalnya dalam hal kemampuan untuk melacak pemasukan dan pengeluaran. Perempuan melakukannya karena kemampuan tersebut dibutuhkan dalam peran yang mereka mainkan sebagai manajer keuangan dalam rumah tangga.

Secara keseluruhan diperlukan pemahaman komprehensif dari suami dan perempuan sebagai istri dalam rumah tangga karena berdampak terhadap pendapat dan *behavior* perempuan pada layanan keuangan. Pada umumnya perempuan, mengurus keluarga, terutama kebutuhan anak-anak mereka, yang merupakan tujuan utama dari semua yang mereka lakukan - baik aktivitas yang menghasilkan pendapatan, menyisihkan uang untuk masa depan, atau meminjam uang (Lestari, 2011).

Bagi perempuan, terutama mereka yang berada dalam rumah tangga berpenghasilan rendah, mereka sangat terfokus pada kebutuhan saat ini dan kebutuhan jangka pendek lainnya, daripada membuat rencana jangka panjang untuk masa depan. Perempuan juga melihat risiko dari sudut pandang yang berbeda dengan pria. Sebagai contoh, pria tampaknya mengambil lebih banyak utang, dibandingkan dengan wanita. Penelitian lain menjelaskan bahwa hal ini tampaknya berasal dari kemampuan pria untuk mengambil perspektif jangka panjang tentang uang - mungkin karena mereka tidak terlalu mengkhawatirkan rumah tangga, terutama ketika pasangan wanita atau pasangannya mengurus detail makanan, kesejahteraan anak-anak, dll.

Hal spesifik lainnya yang perlu diperhatikan yaitu bagi sebagian besar perempuan, terutama mereka yang berasal dari rumah tangga berpenghasilan rendah dan yang mata pencahariannya sebagian besar adalah petani, waktu mereka sepenuhnya tersita untuk melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari, termasuk menyiapkan makanan untuk keluarga dan mengurus anak. Dalam banyak kasus, perempuan juga secara aktif terlibat dalam pekerjaan pertanian atau membantu menjalankan kegiatan yang menghasilkan pendapatan mereka sendiri atau keluarga, di samping tanggung jawab mereka dalam mengelola rumah tangga. Hal ini sering kali berarti bahwa perempuan hanya memiliki sedikit waktu yang tersisa untuk melakukan hal lain - seperti pergi ke kota untuk mengunjungi bank dan menyetor tabungan. Mereka akan memilih fasilitas yang lebih

mudah diakses - seperti menabung di arisan atau menyimpan tabungan di rumah, bukankah demikian?

Hasil survei (SOFIA, 2018) menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih jarang menggunakan layanan perbankan dibandingkan laki-laki. Ada tiga faktor utama yang membantu menjelaskan kesenjangan gender dalam akses dan penggunaan keuangan:

- Wanita lebih cenderung tidak memiliki pendidikan atau hanya mencapai tingkat pendidikan yang rendah, dibandingkan dengan pria. Hal ini menimbulkan sejumlah hambatan dari sisi permintaan dan penawaran untuk mengakses layanan keuangan formal.
- Perempuan juga cenderung memiliki tingkat aset yang lebih rendah dan tidak memiliki tanah/properti. Walaupun aset tertentu, seperti tanah, dimiliki oleh rumah tangga, sertifikat atau hak milik atas tanah tersebut cenderung atas nama kepala rumah tangga laki-laki. Tingkat kepemilikan aset yang (rendah) ini dapat menyebabkan sejumlah hambatan bagi perempuan - seperti ketidakmampuan untuk mengakses pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya yang memberlakukan persyaratan agunan tertentu.
- Sebagian besar perempuan bergantung pada anggota rumah tangga mereka yang lain untuk mendapatkan penghasilan. Hal ini terkait dengan peran yang diemban oleh sebagian besar perempuan - sebagai manajer rumah tangga. Berdasarkan sumber pendapatan utama, perempuan diasumsikan memiliki kemandirian ekonomi yang terbatas sehingga tidak terlalu menarik bagi lembaga keuangan formal.

Akses Keuangan dan Perempuan

Akses ke produk dan layanan keuangan berkualitas bagi siapa pun tanpa ada batasan telah menjadi fokus dalam kebijakan dan penelitian, hal ini mengemuka seiring dengan temuan kesenjangan mengacu pada perbedaan akses dan penggunaan produk keuangan, baik aset maupun kewajiban bank. Sebagaimana dicatat oleh (Cabeza-García, Del Brio and Oscanoa-Victorio, 2018). Sebaliknya, eksklusi keuangan mencerminkan ketidakmampuan beberapa kelompok sosial dalam mengakses sistem keuangan (Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., & Singer, 2013) yang

mengarah pada tingkat investasi yang lebih rendah karena kurangnya kredit dan kebutuhan masyarakat untuk beralih ke sektor informal untuk memperoleh pinjaman.

Kesenjangan gender dalam mengakses layanan keuangan formal, terutama di negara berkembang. Pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi inklusif dalam hal inklusi gender pada pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai tanpa pemberdayaan perempuan. Faktanya, menurut (Nugroho and Purwanti, 2018)-Global Financial Database (2014), dibandingkan dengan pria, wanita di seluruh dunia memiliki kemungkinan 20% lebih kecil untuk memiliki rekening bank dan 17% lebih kecil kemungkinannya untuk menerima pinjaman keuangan formal. Penjelasan potensial untuk kesenjangan keuangan berbasis gender ini mencakup baik wanita yang rata-rata memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih rendah daripada pria di sebagian besar negara (Ghosh and Vinod, 2017) atau perbedaan budaya (OECD, 2006). Perempuan menghadapi eksklusi yang lebih luas, sehingga cocok untuk menjawab isu kesetaraan gender dalam kegiatan ekonomi (Cabeza-García, Del Brio and Oscanova-Victorio, 2019) mengemukakan bahwa inklusi keuangan berkaitan erat dengan ketenagakerjaan. Ketidakmampuan perempuan untuk mengakses produk dan layanan keuangan menghalangi mereka untuk memanfaatkan peluang pasar (Succena, 2016). Perempuan juga menghadapi banyak hambatan ketika mencari sumber yang memadai pembiayaan untuk kegiatan bisnis mereka, yang menghambat kapasitas mereka sebagai pengusaha.

Sementara hasil yang berbeda dari penelitian (Nugroho and Purwanti, 2018) di Indonesia menyatakan akses ke produk dan layanan keuangan berdasarkan kepemilikan rekening perempuan sebesar 39,17% sedikit lebih rendah dari pria 40,09%, begitu juga menabung di lembaga keuangan formal pria 31,13% sedikit lebih tinggi dari perempuan 29,76%, dan meminjam dari lembaga keuangan formal perempuan 12,24% lebih rendah dari pria 16,84%. Akses perempuan terhadap layanan keuangan relatif tidak berbeda dengan pria.

Hal senada juga berlaku di India berdasar penelitian (Kumari, 2022) perbedaan yang tipis antara pria dan perempuan dalam hal akses ke produk dan layanan keuangan dan perempuan merupakan tipe *customer* yang akan membayar tepat waktu, kenyataan lainnya perempuan merupakan

peminjam berisiko relatif rendah adalah karena perempuan lebih peka terhadap tekanan-tekanan sosial dibandingkan laki-laki. Perempuan dapat membentuk ikatan sosial yang kuat dalam menjamin pembayaran pinjaman. Jika seorang perempuan pengusaha usaha mikro tidak memiliki apa pun untuk dijadikan jaminan atas pinjaman ke lembaga keuangan, maka individu-individu di dalam kelompok sosial tersebut akan saling menjamin satu sama lain. Perilaku ini membuat perempuan lebih mudah membayar utang tepat waktu daripada laki-laki. Perempuan tidak ingin merusak citra sosial mereka karena menunggak. Kredit macet perempuan lebih rendah daripada laki-laki karena mereka berinvestasi lebih banyak dalam bisnis atau usaha daripada jumlah pinjaman.

Seiring berjalannya waktu dan dengan semakin meluasnya akses informasi dari berbagai sumber dengan melek media sosial yang sudah hampir sampai ke pelosok termasuk informasi layanan keuangan. Perempuan terutama di Indonesia lebih aktif menggunakan layanan keuangan informal. Penggunaan layanan keuangan informal - terutama dalam hal menabung dan meminjam - didorong oleh beberapa hal berikut: Layanan keuangan ini terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek (misalnya untuk memperlancar konsumsi dan memenuhi pengeluaran rumah tangga lainnya). Jumlah yang ditabung dan dipinjam cenderung kecil, dan kemudahan akses terhadap jumlah tersebut (baik untuk ditabung maupun untuk dipinjam) merupakan hal yang penting bagi konsumen laki-laki dan perempuan.

Penyedia layanan formal dapat menyikapi fenomena di atas untuk memfasilitasi aksesibilitas produk-produk dan layanan keuangan terutama ke perempuan di mana perempuan lebih minim risiko. Layanan keuangan yang dekat dengan keseharian perempuan terutama dalam memenuhi kebutuhan saat ini dan jangka pendek nilainya akan sangat menguntungkan. Selain itu dengan memodifikasi regulasi atau persyaratan yang memungkinkan sehingga sesuai dengan karakteristik dari perempuan tersebut.

Kemudahan akses sangat berpengaruh terhadap perempuan dalam layanan keuangan seperti arisan dan lembaga formal dapat berkolaborasi sehingga memaksimalkan akses layanan keuangan terhadap perempuan.

Kesetaraan dalam Akses Layanan Keuangan

Perempuan sebagai individu merupakan bagian dari pembangunan, mereka dengan keunikan tersendiri disesuaikan dengan keberadaan mereka dalam rumah tangga. Berdasarkan dari data tingkat pendidikan perempuan di bawah pria namun dalam akses layanan keuangan angkanya tidak jauh berbeda dengan pria. Perempuan menjadi *customer* dengan risiko rendah dalam layanan keuangan dan penyedia layanan keuangan formal dapat memanfaatkan hal tersebut.

Daftar Pustaka

- Cabeza-García, L., Del Brio, E. B. and Oscanoa-Victorio, M. L. (2018) 'Gender factors and inclusive economic growth: The silent revolution', *Sustainability (Switzerland)*, 10(1), pp. 1–14. doi: 10.3390/su10010121.
- Cabeza-García, L., Del Brio, E. B. and Oscanoa-Victorio, M. L. (2019) 'Female financial inclusion and its impacts on inclusive economic development', *Women's Studies International Forum*, 77(October 2018), p. 102300. doi: 10.1016/j.wsif.2019.102300.
- Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., & Singer, D. (2013) *Financial Inclusion and Legal Discrimination against Women: Evidence from Developing Countries*. doi: <https://doi.org/10.1596/1813-9450-6416>.
- Ghosh, S. and Vinod, D. (2017) 'What Constrains Financial Inclusion for Women? Evidence from Indian Micro data', *World Development*, 92, pp. 60–81. doi: 10.1016/j.worlddev.2016.11.011.
- Kumari, S. (2022) 'Financial Inclusion and Women Empowerment: A Case Study of India', *Economics, Business, Accounting & Society Review*, 1(2), p. Press. doi: 10.55980/ebasr.v1i2.19.
- Lestari, P. (2011) 'PERANAN DAN STATUS PEREMPUAN DALAM SISTEM SOSIAL', *DIMENSIA*, 5(1), pp. 45–60.
- Nugroho, A. and Purwanti, E. Y. (2018) 'Determinan Inklusi Keuangan Di Indonesia (Global Findex 2014)', *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), p. 1. doi: 10.14710/jdep.1.1.1-13.
- OECD (2006) 'Boosting jobs and incomes OECD employment outlook: 2006.' Available at: https://read.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2006_empl_outlook-2006-en#page2.
- SOFIA (2018) 'Survey on Financial Inclusion and Access (SOFIA) Focus Note on Gender', *The Survey on Financial Inclusion and Access (SOFIA)*, pp. 1–28.
- Succena, S. A. (2016) 'Empowerment of Women in Rural India through SHGs — A Step towards Financial Inclusion', *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 7(4), pp. 153–156. doi: 10.18178/ijtef.2016.7.4.515.

Remitansi dan Efeknya terhadap Pengurangan Kemiskinan

Retno Febriyastuti Widyawati

Pengentasan Kemiskinan Melalui Sektor Ketenagakerjaan

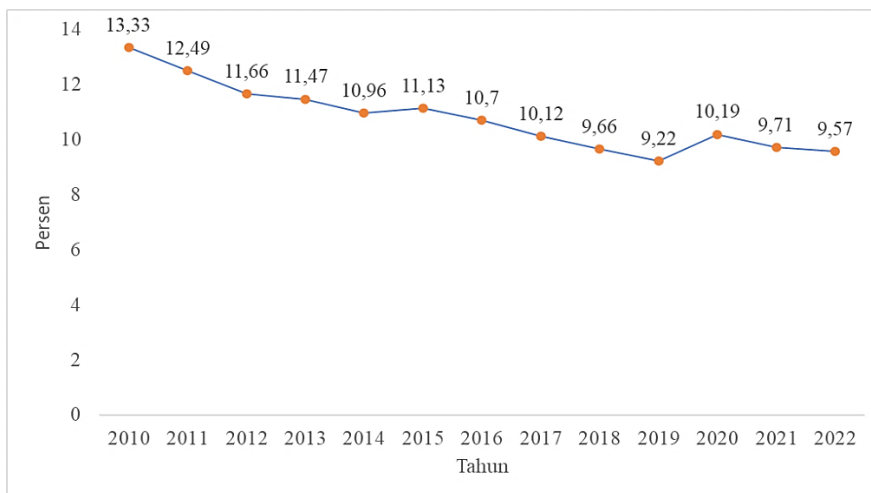
Permasalahan kemiskinan menjadi masalah yang terus menjadi perhatian utama di Indonesia (Sari, 2019). Pemerintah menyadari apabila permasalahan kemiskinan tersebut tidak dapat teratasi dengan baik maka akan mempunyai dampak serta memunculkan permasalahan baru baik itu dari segi sosial, politik, dan ekonomi di tengah masyarakat. Kemiskinan adalah suatu proses yang dinamis artinya segala sesuatu maupun kondisinya terus-menerus dapat berubah, bergerak secara aktif dan selalu mengalami perkembangan menyesuaikan dengan keadaan maupun kondisi yang dinamik (Girsang, 2011).

Hal itu disebabkan karena beberapa aspeknya dapat berubah-ubah akibat banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Maka dari itu kemiskinan perlu dikaji secara menyeluruh, komprehensif dan melihat berbagai tingkatan serta pemahaman dari sudut pandang perspektif berbagai actor yang terlibat. Kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi yaitu kemiskinan, ketidakberdayaan, kerentanan, ketergantungan dan keterasingan baik secara geografis maupun sosiologis (Girsang, 2011). Kondisi miskin juga akan menyebabkan keterbatasan dalam memperoleh fasilitas di berbagai sektor sehingga berakibat pada menurunnya produktivitas suatu individu.

Untuk itu adanya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan komitmen bersama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat serta melestarikan lingkungan. Program SDGs tersebut memiliki tujuh belas tujuan, di mana dari ke tujuh belas tujuan tersebut, tujuan pertama SDGs adalah *no poverty* atau tanpa kemiskinan. *No poverty* merupakan

capaian untuk mengakhiri kemiskinan yang ada di Indonesia dalam segala bentuk di mana pun atau *end poverty in all its forms everywhere*.

Indonesia memiliki persentase kemiskinan dari tahun 2010–2022 yang fluktuatif. Pada tahun 2010, kemiskinan Indonesia 13,33% dan pada tahun 2022 angka kemiskinan sebesar 9,57% (Badan Pusat Statistik, 2022). Hal ini menandakan ada penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 sebesar 3,76%. Meskipun Indonesia dari tahun 2010 sudah mampu menurunkan tingkat persentase kemiskinan, program penurunan kemiskinan masih menjadi program prioritas pemerintah. Hal ini terbukti dengan dukungan pemerintah mencapai SDGs dan menempatkan *no poverty* di nomor satu. Peran pemerintah, utamanya pada saat pemerintahan Jokowi Widodo saat ini, pemerintah mengupayakan dan menargetkan pada tahun depan tingkat persentase angka kemiskinan menjadi nol persen di Indonesia. Untuk itu perlu sinergisitas antara pemerintah maupun masyarakat.



Gambar 1. Persentase Kemiskinan di Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Dalam rangka pengentasan kemiskinan, sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian utama. Hal ini disebabkan pada negara kita, Indonesia, proporsi lowongan kerja yang

tersedia masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan proporsi angkatan kerja atau pencari kerja yang ada. Hal ini akan mengakibatkan adanya *gap* atau kesenjangan antara jumlah lowongan kerja dan jumlah pencari kerja. Atau bisa dikatakan jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan jumlah permintaan tenaga kerja.

Untuk mengatasi *gap* tersebut akan mendorong seseorang atau individu bertindak untuk mencari pekerjaan supaya mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila hal ini dibiarkan begitu saja, maka akan terjadi masalah pengangguran yang banyak dan belum tentu dapat diatasi oleh pemerintah. Maka dari itu, salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan, memberikan pelatihan berbasis sektor formal maupun informal, memberikan bantuan usaha mikro, dan memberikan pelatihan untuk dapat bekerja di luar negeri atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat lalu mengambil suatu keputusan dan tindakan untuk melakukan migrasi, baik itu dalam skala nasional maupun skala internasional dengan menjadi TKI.

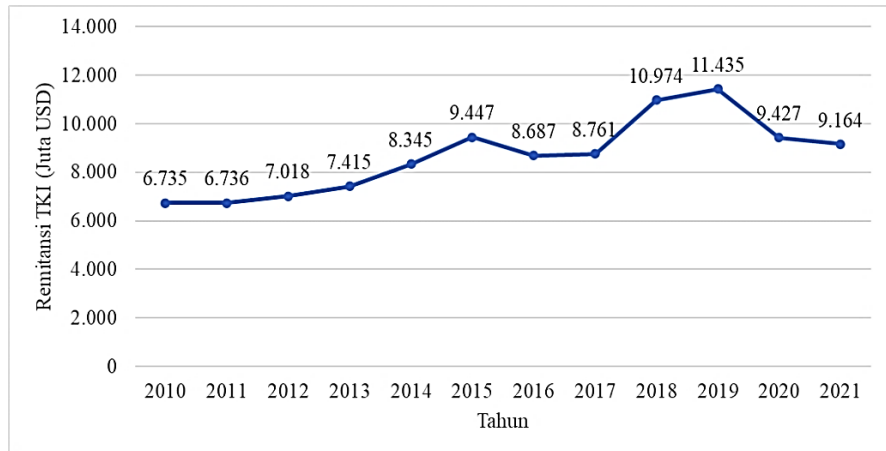
Terdapat empat faktor seseorang mengambil keputusan untuk melakukan migrasi, yaitu: *pertama* faktor di daerah asal, *kedua* faktor di daerah tujuan, *ketiga* rintangan penghambat, dan *keempat* faktor individu (Wirastyani dkk., 2016). Namun menurut teori migrasi, faktor terpenting setiap individu melakukan migrasi yaitu berasal dari faktor individu itu sendiri, artinya faktor individu tersebut yang memberikan penilaian terhadap apakah mereka dapat memenuhi dan mencukupi kebutuhannya sendiri ataukah tidak, sehingga jika penilaian tersebut menyatakan tidak, maka mereka akan memutuskan untuk melakukan migrasi (baik itu dalam skala nasional maupun migrasi dalam skala internasional) (Wirastyani dkk., 2016).

Adanya migrasi ini akan memberikan remitansi bagi seseorang individu tersebut (*monetary impact*). Remitansi yang diperoleh tersebut memiliki peran besar untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada di dalam perekonomian, hal ini karena perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, remitansi menjadi sumber yang penting dari pendanaan eksternal bagi

beberapa negara. Remitansi tidak hanya menjadi sumber pendapatan devisa yang tinggi bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, akan tetapi remitansi juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi tingkat kemiskinan (Misdawati & Siregar, 2020). Hal ini disebabkan karena remitansi bertindak sebagai katalis untuk mendorong investasi berupa modal fisik dan manusia untuk meningkatkan partisipasi tenaga kerja.

Pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, remitansi dapat menguntungkan baik di tingkat mikro maupun di tingkat makro. Pada tingkat mikro, remitansi mempunyai peran memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan pada penerimaan rumah tangga yang berkaitan dengan standar hidup mereka. Apabila dikaitkan pada sisi *consumption* atau konsumsi, remitansi digunakan dalam hal untuk meningkatkan tabungan pada seseorang atau individu sehingga remitansi tersebut dapat menjadi sumber modal. Sedangkan, apabila dilihat pada tingkat makro, remitansi mempunyai fungsi sebagai alat penyeimbang makro ekonomi yaitu dengan menyediakan valas (valuta asing) yang dapat menyebabkan pembentukan modal dan peningkatan lapangan kerja.

Gambar 2 di bawah menunjukkan remitansi TKI dari tahun 2010–2021 dalam satuan Juta USD yang secara terus-menerus mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 (Bank Indonesia & Badan Pusat Statistik, 2022). Lalu setelah itu, perkembangan remitansi TKI menunjukkan keadaan berfluktuatif sampai tahun 2019. Penurunan remitansi pada tahun 2020 sampai 2021 disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan beberapa TKI pulang ke Indonesia. Data tersebut berarti menunjukkan bahwa remitansi dari segi makro memberikan pemasukan terhadap valuta asing Indonesia dari tahun ke tahun.



Gambar 2. Remitansi TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
Sumber: Bank Indonesia dan BNP2TKI (2023)

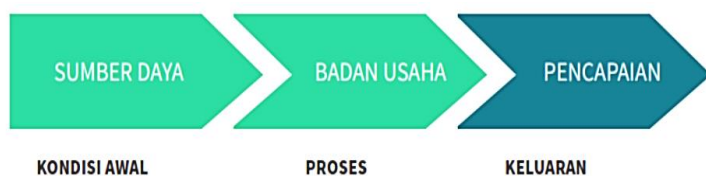
Apabila ditelaah dilihat dari sisi mikro, terdapat beberapa kajian dan penelitian yang menunjukkan bahwa dengan adanya pendapatan remitansi dapat membantu orang miskin dalam membangun beberapa kehidupan serta dapat membentuk aset. Migrasi ini merupakan solusi bagi rumah tangga di pedesaan untuk lebih sejahtera dalam jangka panjang melalui pembentukan aset (baik produktif maupun non-produktif). Keberadaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memberikan sumbangsih yang berarti pada penerimaan pendapatan berupa remitansi yang dikirimkan dari luar negeri ke daerah asal di Indonesia. Namun, pada kenyataannya sebagian besar TKI yang bekerja ke luar negeri hanya memiliki keterampilan rendah saja sehingga mereka hanya mampu mengisi lapangan pekerjaan pada sektor informal saja seperti Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). Berdasarkan data dari BPS (2023), TKI kebanyakan berada di Negara Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, China, dan Singapura. Para TKI tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Akan tetapi terdapat beberapa daerah di Indonesia menyumbang atau mengirim hasil remitansi dari para TKI terbanyak yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, Lampung, Bali, Sumatera Utara, Banten, DIY, dan DKI Jakarta (BPS, 2023).

Sektor informal sebagai PLRT banyak diminati oleh kaum perempuan, sehingga mereka biasa disebut dengan Tenaga Kerja Wanita

(TKW), karena adanya harapan mendapatkan gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan jika mereka menjadi asisten rumah tangga di dalam negeri dan daripada mereka tidak bekerja. Dengan pekerjaan sebagai PLRT tersebut sebenarnya mempunyai risiko yang cukup besar karena mereka harus menghadapi pekerjaan tersebut hingga waktu bekerja sampai dengan kontrak habis (biasanya 2 sampai 3 tahun) untuk bekerja di luar negeri. Namun sangat disayangkan, penghasilan remitansi yang mereka dapatkan dalam jumlah besar ini lebih sering hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif saja dan jarang sekali mereka memanfaatkan remitansi untuk kegiatan produktif.

Pemberdayaan TKW sebagai Penghasil Remitansi dalam Keluarga

Pemberdayaan mempunyai arti kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang belum memiliki daya kemampuan ataupun kekuatan (Putri dkk., 2012). Dalam hal ini, pemberdayaan merupakan suatu proses kepada masyarakat untuk menjadi berdaya, mendorong dan mampu memotivasi individu supaya mempunyai kemampuan dalam menentukan pilihan hidupnya baik ditujukan kepada sekelompok masyarakat yang tertinggal maupun pada individu. Menurut Palaon & Dewi (2019), pemberdayaan merupakan suatu proses dalam meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok dalam membuat suatu pilihan untuk mengubah pilihan tersebut menjadi sebuah Tindakan sehingga dapat menghasilkan hasil sesuatu yang diinginkan untuk dicapai. Pemberdayaan memerlukan suatu perubahan di mana perubahan tersebut mengacu pada kemampuan orang dalam membuat suatu pilihan yang terdiri atas:



Gambar 3. Dimensi Pemberdayaan
Sumber: Paloan dan Dewi (2019)

Akses terhadap sumber daya tidak hanya akses terhadap materi saja, akan tetapi akses terhadap sumber daya manusia dan sosial. Dalam arti yang lebih luas, sumber daya ini dapat diperoleh melalui keberagaman hubungan sosial seperti lingkungan keluarga, relasi, serta komunitas sehingga di dalamnya akan ada aturan maupun norma yang mengaturnya. Badan usaha sebagai proses mempunyai peran dalam merumuskan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat maupun individu dalam mencapai tujuan hidup. Sedangkan pencapaian atau keluaran merupakan faktor dalam memahami pemberdayaan itu sendiri (Palaon & Dewi, 2019)

Tujuan dari pemberdayaan tersebut adalah memperkuat kekuasaan para kelompok maupun individu dalam mengalami masalah, misalnya saja masalah kemiskinan yang terjadi dalam rumah tangga (Azril dkk., 2014). Apabila suatu masyarakat maupun individu memiliki pengetahuan, berdaya dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan fisik, sosial, ekonomi, maka akan menimbulkan rasa kepercayaan dirinya (Jalaludin, 2021).

Saat ini, kesadaran untuk memberdayakan dan memperoleh pengetahuan bagi kaum individu sudah mulai berkembang. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa untuk mencapai sikap mandiri, seseorang harus memberdayakan sendiri. Hal ini juga sering dilakukan oleh para pihak perempuan saat mereka sudah berkeluarga dan harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Mereka para perempuan, memutuskan untuk terjun ke dunia pekerjaan yang menjadikan lebih produktif dengan cara salah satunya adalah bekerja di luar negeri menjadi TKW. Kebanyakan kaum perempuan dari pedesaan melakukan migrasi dengan menjadi TKW untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi daripada di dalam negeri.

TKW adalah sebutan TKI yang berjenis kelamin perempuan yang sedang bekerja di luar negeri (Oktaviani, 2011). Sedangkan menurut UU No. 39 Tahun 2004, TKW adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di mancanegara dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Masyarakat yang bekerja menjadi TKW akan memperoleh pendapatan yang tinggi. Jalaludin (2021) menjelaskan bahwa pendapatan dari seseorang yang bekerja di luar negeri lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan seseorang yang

bekerja di dalam negeri atau daerah asal. Pendapatan yang tinggi tersebut dimanfaatkan untuk keperluan mereka bekerja di luar negeri dan sebagian lagi dikirimkan atau diberikan kepada keluarga di dalam negeri, yang biasa disebut dengan remitansi (Probosiwi, 2015).

Pemanfaatan Remitansi untuk Mengatasi Kemiskinan

Kiriman dari tenaga kerja yang masih berada di luar negeri untuk keluarganya yang berada di daerah asal disebut dengan remitansi (Risnawati & Tridakusumah, 2020). Bentuk remitansi yang diberikan oleh tenaga kerja tersebut dapat berupa uang, barang-barang, ide, keterampilan, saran, maupun pengalaman serta pengetahuan baru yang didapatkan oleh mereka yang bekerja di luar negeri (Maarif, 2018). Remitansi yang dikirim ke keluarga jika berupa uang makan dilakukan dengan cara transfer bank (Novitasari, 2019). Transfer bank adalah kegiatan pengiriman sejumlah dana tertentu yang dilakukan oleh pengirim kepada penerima sumber dana melalui rekening bank ataupun mengirim tanpa menggunakan rekening bank ke penerima dengan rekening (Sari, 2019)

Remitansi berupa barang merupakan pengiriman barang melalui jasa ekspedisi pengiriman barang. (Novitasari, 2019) menjelaskan jasa ekspedisi adalah perusahaan yang memberikan jasa layanan pengiriman barang baik berupa pengiriman kilat, regular ataupun standar. Remitansi berupa ide, saran maupun pengetahuan adalah alat komunikasi berupa media sosial untuk melakukan interaksi menggunakan teknologi berbasis web sehingga dapat memudahkan keduanya untuk saling berkomunikasi.

Remitansi yang berhasil dikirim tersebut akan dipakai oleh keluarga di daerah asal untuk konsumtif (penggunaan yang langsung dikonsumsi dalam waktu singkat) dan digunakan untuk produktif (menciptakan penciptaan nilai, baik berupa barang berwujud maupun tidak berwujud dalam jangka waktu yang panjang). Untuk kegiatan yang berhubungan dengan konsumtif misalnya pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga yakni sejumlah besaran yang dikirim oleh migran digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta menyokong kerabat ataupun keluarga migran yang ada di daerah asal; kedua untuk peringatan hari besar yang erat hubungannya dengan keluarga misalnya saja saat keluarga mengadakan siklus kehidupan manusia seperti melahirkan, perkawinan,

sunatan, kematian, dll. Sedangkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan produktif misalnya untuk membeli tanah, membuka kegiatan perdagangan/usaha, melakukan renovasi rumah, menyimpan dana di bank, dan untuk pendidikan jangka panjang anak. Kegiatan tersebut tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi bersifat psikologis karena digunakan sebagai sarana sosial dan budaya terhadap lingkungan di sekitarnya untuk menunjukkan *prestige* seseorang.

Pemanfaatan remitansi tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga, biaya pendidikan, melunasi hutang, untuk menambahkan modal usaha dan investasi. Pemanfaatan remitansi untuk membangun suatu usaha atau berkewirausahaan dapat membantu keluarga di daerah asal menghadapi kemiskinan. Novitasari (2019) menjelaskan bahwa seseorang yang menjalankan usaha dapat menghasilkan pendapatan dan dapat menyerap tenaga kerja. Sementara (Adams & Page, 2005) remitansi dapat mengurangi kemiskinan di negara-negara berkembang.

Remitansi dari Migrasi dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan perhatian utama di Indonesia karena apabila permasalahan ini tidak dapat teratasi dengan baik maka akan mempunyai dampak baik dari sosial, politik, dan ekonomi di tengah masyarakat. Pemerintah melalui program *Sustainable Development Goals* (SDGs) berkomitmen mencapai kesejahteraan masyarakat serta melestarikan lingkungan. Maka dari itu, dalam rangka pengentasan kemiskinan, pemerintah memfokuskan pada sektor ketenagakerjaan.

Di Indonesia, proporsi lowongan kerja yang tersedia masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan proporsi angkatan kerja atau pencari kerja yang ada. Hal ini akan mengakibatkan adanya *gap* atau kesenjangan antara jumlah lowongan kerja dan jumlah pencari kerja. Untuk mengatasi hal tersebut seseorang akan memutuskan melakukan migrasi baik di dalam maupun di luar. Adanya migrasi ini akan memberikan remitansi bagi seseorang individu sehingga pada akhirnya remitansi ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Adams Jr. Richard H., & Page, J. (2005). Do international migration and remittances reduce poverty in developing countries? *World Development*, 33(10), 1645–1669.
- Azril, M., Putra, J., Chadijah, R., & Warsito, H. (2014). Remitan Dan Pemanfaatannya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga: Studi Kasus Desa Seriguna Kecamatan Teluk Gelam Oki. *Demography Journal of Sriwijaya*, 1(2).
- Badan Pusat Statistik. (2022). Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah 2021-2022. In *Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-p0-menurut-provinsi-dan-daerah.html>
- Bank Indonesia, & Badan Pusat Statistik. (2022). Proporsi Volume Remitansi (Dalam US Dollars) Terhadap Total PDB 2018-2020. In *Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1258/1/proporsi-volume-remitansi-dalam-us-dollars-terhadap-total-pdb.html>
- Girsang, W. (2011). *Kemiskinan Multidimensional di Pulau-Pulau Kecil*. BPFP Universitas Pattimura.
- Jalaludin. (2021). Tata Kelola Remitansi Buruh Migran: Kasus Buruh Migran Di Kabupaten Lombok Timur. *Journal of Economics and Business*, 7(1), 106–124. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v7i1.71>
- Maarif, S. (2018). PEMANFAATAN DANA REMITANSI TENAGA KERJA INDONESIA DI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2012-2016 (Studi Kasus Pada Pemanfaatan Dana Remitansi TKI Di Kabupaten Indramayu). *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 3(1), 22. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i1.2654>
- Misdawati, M., & Siregar, S. (2020). Pengaruh Penerimaan Remitansi Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Ecoplan : Journal of Economics and Development Studies*, 3(1), 48–54. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v3i1.65>
- Novitasari, L. S. (2019). *Pemanfaatan remitensi oleh keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) luar negeri di Desa Ngunggahan Kecamatan*

- Bandung Kabupaten Tulungagung*. 2(8), 729–734.
<https://doi.org/10.17977/um063v2i82022p729-734>
- Palaon, H., & Dewi, L. A. (2019). Pemberdayaan Perempuan Melalui Kewirausahaan Sosial Dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi. *Australian Government*, 1–36.
- Probosiwi, R. (2015). Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Natapraja*, 3(1), 41–72.
- Putri, R. M., Samsuddin, S., & Nurani, F. (2012). Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender di Bidang Ekonomi Pada Masyarakat Jombang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(1), 145–153.
- Risnawati, R., & Tridikusumah, A. C. (2020). Kontribusi Remitansi Perempuan Terhadap Rumah Tangga Petani Di Kabupaten Indramayu. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 6(1), 422.
<https://doi.org/10.25157/ma.v6i1.3227>
- Sari, A. P. (2019). Pengaruh Remitansi Terhadap Perbedaan Kesejahteraan Rumah Tangga Di Indonesia. *Pengaruh Remitansi Terhadap Perbedaan Kesejahteraan Rumah Tangga Di Indonesia Dengan Metode Propensity Score Matching*, 8(ISSN: 2302 –9595), 171–194.
- Wirastyani, R., Kanto, S., & Siahaan, H. (2016). Migrasi Internasional dan Pemanfaatan Remitansi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan (Kasus di Desa Clumprit Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang). *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 19(3), 138–147.
<https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/418>

TEMA III
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT





Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu elemen kunci dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. Konsep ini tidak hanya menekankan pada peningkatan kapasitas individu dan kelompok masyarakat, tetapi juga pada penciptaan lingkungan yang memungkinkan partisipasi aktif dan konstruktif dalam proses pembangunan. Dengan memberdayakan masyarakat, kita tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal tetapi juga mendorong kemandirian dan keberlanjutan di tingkat lokal. Buku ini hadir untuk mengeksplorasi berbagai aspek dan strategi pemberdayaan masyarakat yang telah terbukti efektif di berbagai belahan dunia. Melalui studi kasus, analisis teoretis, dan *best practices*, kami berharap dapat memberikan gambaran komprehensif tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan.

Pada Tema III akan membahas pertama, konsep dasar pemberdayaan masyarakat. Kami akan mengupas definisi, prinsip, dan tujuan dari pemberdayaan masyarakat, serta berbagai pendekatan yang dapat diambil untuk mencapai pemberdayaan yang efektif dan ini juga akan mengeksplorasi hubungan antara pemberdayaan masyarakat dan aspek-aspek pembangunan lainnya, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kedua akan berfokus pada strategi dan metode pemberdayaan masyarakat. Kami akan meneliti berbagai teknik dan alat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat, termasuk pendidikan dan pelatihan, pembangunan kapasitas, dan penguatan kelembagaan lokal dan ini juga akan mencakup diskusi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi proyek pembangunan. Dan ketiga akan mengkaji studi kasus pemberdayaan masyarakat dari berbagai negara. Melalui analisis kasus nyata, kami akan menunjukkan bagaimana prinsip dan strategi pemberdayaan masyarakat

telah diterapkan dan dampak positif yang dihasilkan serta ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman-pengalaman tersebut.

Kami percaya bahwa pemberdayaan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kami berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi para pembuat kebijakan, praktisi, akademisi, dan siapa saja yang peduli dengan upaya pemberdayaan masyarakat.

Potret Ketimpangan Rumah Tangga

Made Ika Prastyadewi, Putu Yusi Paramandari

Fenomena Ketimpangan Perekonomian

Kemandirian daerah membuat ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang dalam menentukan kebijakan publik karena daerah sudah dapat mandiri, serta mengetahui kebutuhan daerahnya. Pembangunan yang melibatkan keikutsertaan masyarakat secara aktif baik sebagai objek maupun subjek pembangunan, termasuk dalam menentukan kebijakan publik akan memberikan rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap proses pembangunan yang berlangsung. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertumbuhan adalah ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan merata sangat diperlukan. Pertumbuhan PDRB di Provinsi Bali menunjukkan kemampuan kabupaten/kota dalam membangun daerahnya. Setiap daerah memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda di dalam mengembangkan dan 5 membangun daerahnya. Kondisi ini menciptakan perbedaan yaitu ada daerah yang maju dan ada daerah yang tertinggal. Salah satu pemicunya adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki, yang merupakan faktor alami yang dapat mempengaruhi kemampuan daerah untuk berkembang. Setelah era otonomi daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali menggarap serius potensi daerahnya untuk mengejar ketertinggalan mereka dari Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Analisis yang sering digunakan untuk melihat kemampuan wilayah dalam perekonomian adalah dengan menggunakan Tipologi Klasen. Berdasarkan Tipologi Klasen menurut BPS (2022) dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1. Analisis Tipologi Klasen Tahun 2022

Rasio PDRB per kapita kab/kota terhadap PDRB per kapita Provinsi Bali			
		≥ 1	≤ 1
Laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Bali	≥ 1	Wilayah tumbuh cepat: Kab. Badung Kab. Gianyar Kota Denpasar	Wilayah berkembang:
	≤ 1	Wilayah lamban Kab. Tabanan Kab. Buleleng	Wilayah relatif tertinggal: Kab. Jembrana Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karangasem

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2022)

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa terdapat 4 wilayah di Provinsi Bali yang masih cenderung tertinggal dalam pertumbuhan PDRB per kapita yakni Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem. Hal ini menunjukkan bahwa di antara 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali hanya Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang memiliki wilayah tumbuh cepat. Wilayah lain di Provinsi Bali masih belum mampu mengejar pertumbuhan Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan pembangunan di Provinsi Bali masih besar antar wilayah pembangunan. Kota Denpasar dan Kabupaten Badung merupakan dua daerah yang berkembang pesat karena ditopang oleh sektor non-pertanian yaitu sektor pariwisata dengan kontribusi terbesar pada lapangan usaha penyedia akomodasi dan makanan-minuman. Sektor pariwisata yang berkembang pesat di kedua wilayah ini meninggalkan pertumbuhan wilayahnya lainnya dengan jarak yang cukup jauh. Permasalahan yang muncul karena pembangunan yang tidak merata adalah kesenjangan, selama ini menjadi fokus banyak penelitian sejak lama. Heryanah (2017) mengatakan bahwa salah satu tokoh yang mengaitkan pembangunan dan ketimpangan pendapatan adalah Simon Kuznet yang mengungkapkan bahwa hubungan antara tingkat pendapatan dan tingkat pembangunan ekonomi mengambil bentuk U-terbalik (*inverted-U curve*).

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dari kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan yang tinggi menandakan bahwa kesejahteraan dari daerah tersebut juga semakin baik. Perbedaan laju pertumbuhan di Provinsi Bali menunjukkan bahwa antara satu kabupaten/kota dengan lainnya memiliki tingkat pertumbuhan perekonomian yang berbeda.

Berdasarkan analisis Tipologi Klasen terlihat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi untuk daerah yang merupakan kabupaten yang masuk ke dalam wilayah pertumbuhan lambat yakni Karangsem dan Jembrana, terlihat bahwa laju pertumbuhan kedua kabupaten tersebut berada dalam rata-rata 5,584 persen dan 5,716 persen. Kabupaten Karangasem dan Klungkung merupakan kabupaten yang memiliki destinasi pariwisata yang cukup dikenal di Provinsi Bali, namun perkembangannya cukup lambat, kedua kabupaten tersebut digerakkan oleh sektor pertanian, sehingga pertumbuhannya tidak bisa secepat Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Kabupaten Buleleng tahun 2020 memiliki pertumbuhan yang tidak begitu baik bahkan negatif yakni hanya sebesar -5,80, karena pandemi COVID 19 dan memperburuk kondisi Kabupaten Buleleng yang sebelumnya masuk ke wilayah berkembang pada tahun 2019 menjadi wilayah lamban berkembang. Sebelumnya Kabupaten Buleleng masuk wilayah berkembangnya karena adanya pengembangan sarana prasarana pariwisata yang cukup pesat di wilayah Lovina yang terkenal memiliki pantai yang tidak kalah indah dari pantai-pantai yang dimiliki Kabupaten Badung. Wilayah tertinggal seperti Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem merupakan wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan yakni Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Kabupaten Jembrana dan Karangsem merupakan kabupaten yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih rendah yakni rata-rata 5 persen.

Perbedaan potensi masing-masing daerah memunculkan ketimpangan dalam pendapatan antar individu yang memunculkan ketimpangan pendapatan di Provinsi Bali. Di lain sisi ketimpangan dapat ditunjukkan oleh indeks gini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan atau kesenjangan yang terjadi semakin meningkat. Disebutkan oleh Sen (2000), jika suksesnya suatu perekonomian hanya ditentukan oleh pendapatan dan indikator-indikator kemewahan tradisional lainnya serta kesehatan finansial, maka yang menjadi tujuan tercapainya masyarakat sejahtera akan gagal. Kondisi ini justru menciptakan jurang ketimpangan yang semakin besar dalam masyarakat. Banyak penelitian melakukan fokus penelitiannya pada pola distribusi pendapatan dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Misalnya, banyaknya pengukuran yang berbeda-beda yang digunakan untuk melihat status

kesehatan ekonomi dan sosial suatu komunitas atau negara yang pada umumnya menggunakan: tingkat pengangguran, nilai properti, pajak, kekuatan ekonomi local, pertumbuhan pendudukan, lapangan kerja. Salah satu ukuran yang jarang digunakan adalah ketimpangan pendapatan salah satunya pada ketimpangan pendapatan rumah tangga (Uluwatayo, 2009). Dyah (2020) mengatakan bahwa kesenjangan pembangunan di Indonesia menimbulkan kesenjangan pendapatan yang semakin besar di antara kelompok masyarakat, hal ini juga pemicu kesenjangan wilayah.

Potret Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang muncul karena banyak faktor penyebab salah satunya berkenaan dengan tingkat pendapatan. Selain itu juga dipengaruhi faktor lain seperti aspek sosial, lingkungan bahkan keberdayaan dan tingkat partisipasinya. Berdasarkan data BPS (2020) jumlah penduduk miskin di Bali per bulan September 2019 tercatat 156,91 ribu orang. Perkembangan kemiskinan di Provinsi Bali dari tahun 2007 sampai dengan 2020 bergerak fluktuatif, namun kondisi ini mengalami penurunan di Sembilan kabupaten/kota. Dilihat dari Kabupaten/Kota penduduk miskin terkecil tercatat di Kota Denpasar, disusul Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar, yang merupakan kabupaten/kota yang nilai PDRB-nya didominasi oleh kontribusi sektor non-pertanian (pariwisata).

Tabel 2 Garis Kemiskinan dan Presentase Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan		Jumlah Penduduk Miskin		Persentase Penduduk Miskin	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Jembrana	385.959	390.102	14,35	13,55	5,20	4,88
Tabanan	422.345	425.926	19,77	18,74	4,46	4,21
Badung	534.069	382.380	12,97	11,89	1,96	1,78
Gianyar	378.561	312.864	21,26	19,85	4,19	3,88
Klungkung	310.764	312.864	10,43	9,66	5,86	5,40
Bangli	327.668	329.014	11,05	10,08	4,89	4,44
Karangasem	311.321	315.805	26,02	25,99	6,28	6,25
Buleleng	395.678	401.377	35,20	34,26	5,36	5,19
Denpasar	545.357	571.246	20,27	19,83	2,24	2,10
BALI	382.598	400.642	171,76	163,85	4,01	3,79

Sumber: Bali Dalam Angka, 2023

Kondisi kemiskinan di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali digambarkan dari Tabel 2. Garis kemiskinan digunakan untuk membuat pengelompokan masyarakat miskin dan tidak miskin. Dilihat dari peningkatan nilai garis kemiskinan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 3,13 persen dibandingkan periode tahun 2018. Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng dan Denpasar merupakan tiga kabupaten/kota yang nilai garis kemiskinan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nilai garis kemiskinan Provinsi Bali. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018, namun Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangsem merupakan dua kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Bali. Kedua Kabupaten tersebut merupakan kabupaten yang dapat dikatakan sebagai kabupaten yang banyak menjadi tujuan migran dari luar bali, dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kondisi ini menjadikan kedua kabupaten tersebut memiliki jumlah penduduk miskin dua terbanyak di Provinsi Bali. Menurut Wijantari dan Bendesa (2016) kemampuan daya beli masyarakat di Provinsi Bali menunjukkan perbedaan antara kabupaten kota, terlihat bahwa tingginya nilai garis kemiskinan yang menunjukkan kemampuan konsumsi penduduk berkaitan dengan daya beli masyarakat, namun kondisi garis kemiskinan yang baik tidak menggambarkan bahwa daerah tersebut sudah bebas dari kemiskinan karena hanya faktor nilai inflasi yang perlu diperhatikan.

Pertumbuhan sektor pertanian yang merupakan tulang punggung perekonomian perdesaan belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Terlihat dari perkembangan kemiskinan di perdesaan sepanjang 2007–2017 yang persentase jumlah penduduk miskin masih berkisar di angka 5 persen hingga akhir tahun 2017. Kondisi kemiskinan di desa selalu lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di perkotaan, bahkan sampai dengan tahun 2017 persentase penduduk miskin lebih tinggi 1,96 persen daripada persentase kemiskinan di kota (Yoga, 2019).

Keberadaan sektor pariwisata tidak memberikan jaminan semakin baiknya kondisi kemiskinan di Provinsi Bali. Diperlukan kerja sama yang saing mengisi antara masyarakat dan pemerintah. Pentingnya intervensi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan mengurangi dampak ketimpangan pendapatan. Yoga dkk. (2019) menemukan bahwa adanya

ketimpangan kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Bali pada periode penelitian tahun 2007–2017. Di samping adanya perbedaan tingkat kemiskinan lebar antara kabupaten/kota juga terdapat perbedaan besaran kemiskinan. Kondisi ketimpangan kemiskinan menunjukkan merupakan dampak yang muncul akibat adanya perbedaan ketimpangan pendapatan rata-rata antara kelompok masyarakat

Pemerintah Provinsi Bali berusaha mengatasi masalah kemiskinan dengan program pokok yang dilaksanakan yaitu di antaranya adalah pengentasan kemiskinan melalui kebijakan yang dikenal dengan *pro poor*. Terdapat kesan bahwa kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah belum memberikan hasil yang memadai. Kemiskinan identik dengan wilayah perdesaan yang masih belum tersentuh pembangunan. Menurut Yoga dkk. (2019) menunjukkan bahwa adanya ketimpangan kemiskinan yang terjadi disebabkan adanya ketimpangan pendapatan masyarakat rata-rata antar kelompok pendapatan masyarakat, perbedaan kontribusi sektor pertanian antar kabupaten/kota yang menggambarkan peran yang ditunjukkan sektor pertanian dan non-pertanian antar daerah dan adanya perbedaan kepadatan penduduk antar daerah, perbedaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terserap di dunia kerja dan adanya perbedaan peluang kerja di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya tingkat pertumbuhan perekonomiannya masih dikatakan rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan pertumbuhan perekonomian menunjukkan masih terdapatnya ketimpangan di Provinsi Bali.

Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga

Kabupaten dan Kota memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Bali. Kondisi ketimpangan pendapatan rumah tangga kabupaten/kota dipengaruhi kemampuan kabupaten/kota dalam menggali potensi daerahnya dan mengembangkan potensi yang dimiliki daerahnya. Kondisi rumah tangga di 9 kabupaten/kota berbeda-beda, sebagian besar ekonom menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar penting dalam meningkatkan kondisi kesejahteraan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan indikator yang sering digunakan untuk melihat pembangunan ekonomi suatu daerah. Kondisi ekonomi yang baik

diharapkan mampu menciptakan peluang kerja yang dapat memberikan lapangan pekerjaan yang meyakinkan bagi para pencari kerja. Semakin baik dan banyak lapangan pekerjaan yang tersedia maka akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang akan mempengaruhi angka pengangguran. Masyarakat yang memperoleh pekerjaan yang layak akan mempengaruhi pendapatannya yang pada akhirnya diharapkan dapat menurunkan kemiskinan masyarakat dan memperkecil jurang ketimpangan pendapatan rumah tangga di Provinsi Bali.

Ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Bali telah banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya. Adipuryanti dan Sudibia (2015); Wijantari dan Bendesa (2016); Puapa, dkk. (2017); Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara masyarakat atau daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Semakin besarnya jurang pendapatan maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan akan menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan. Perkembangan sektor pariwisata yang terjadi di Provinsi Bali belum mampu menyentuh seluruh wilayah kabupaten dan kota. Hal ini yang memunculkan ketimpangan antar wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Sebagian besar wilayah di Provinsi Bali merupakan wilayah yang menjadi primadona pariwisata di Provinsi Bali. Terdapat beberapa wilayah-wilayah yang dianggap kurang menarik untuk dijadikan tujuan pariwisata, sebenarnya memiliki peran penting lainnya dalam menopang wilayah lainnya yang menjadi wilayah tujuan pariwisata. Wisatawan pergi ke luar Kota Denpasar dan Kabupaten Badung untuk mengunjungi ratusan objek wisata yang tersebar di Provinsi Bali. Permasalahannya adalah wisatawan hanya berkunjung dan tidak menginap di tempat tersebut. Sebagian wisatawan memutuskan untuk menginap dan beraktivitas di wilayah Kota Denpasar atau Kabupaten Badung. Kondisi ini yang memicu ketimpangan distribusi pendapatan karena tidak mempunyai daerah untuk mengembangkan destinasi wisata yang ada. Tabel 3 menunjukkan jumlah daya tarik wisata di Provinsi Bali Tahun 2020.

Tabel 3 Jumlah Daya Tarik Wisata Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata	Jumlah Daya Tarik Wisata
1	Denpasar	1	10
2	Badung	3	36
3	Gianyar	2	61
4	Bangli	-	42
5	Klungkung	1	17
6	Karangasem	3	15
7	Buleleng	3	25
8	Tabanan	1	24
9	Jembrana	2	15

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali (2020)

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah kawasan pariwisata tersebar hampir di semua kabupaten/kota meskipun Kabupaten Bangli tidak memiliki kawasan yang masih ke dalam kawasan pariwisata namun jumlah daya tarik pariwisata yang dimiliki kabupaten Bali cukup banyak sebesar 42 daya tarik wisata, berikut dijabarkan beberapa potensi wisata dilihat dari jumlah kawasan pariwisata di Provinsi Bali:

1. Kota Denpasar

Wilayah ibu kota Provinsi Bali memiliki 1 kawasan pariwisata yaitu Sanur, di mana wilayah ini merupakan wilayah yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan ombak yang tenang. Daya tarik pariwisata yang dimiliki oleh Kota Denpasar adalah 10 daya tarik yang mana semuanya sudah sangat terkenal seperti Lingkungan Pura Maospatih, Taman Budaya Art Center, Pasar Kreneng, Pantai Sanur, Pulau Serangan, Museum Lemayuer, Prasasti Banjong, Pasar Badung/Kumbasari, Museum Bali dan Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Potensi pariwisata di Kota Denpasar merupakan wisata sejarah yang memiliki nilai historis yang cukup unik untuk diketahui. Posisi Kota Denpasar sebagai kota besar tidak membuat Kota Denpasar memiliki pemandangan alam seperti wilayah lainnya namun memiliki sarana prasarana penunjang terlengkap untuk menopang pariwisata di Provinsi Bali.

2. Kabupaten Badung

Potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Badung sangat besar, kabupaten yang juga terkenal karena pantainya merupakan salah

satu wilayah yang paling banyak dituju oleh wisatawan karena kawasan wisata yang dimilikinya adalah Nusa Dua, Kuta dan Tuban. Wilayah dengan potensi pariwisata dan merupakan wilayah dengan PAD tertinggi karena sektor pariwisata. Dengan total 36 daya tarik pariwisata antara lain Pantai Kuta, Pantai Nusa Dua, Pantai Tanjung Benua, Pantai Legian, Kawasan Luar Uluwatu, GWK, Water Boom, Pelestarian Penyu di Delung Sari, Pantai Canggu, Pantai Petitenget, Pantai Labuan Sait, Pantai Suluban, Pantai Geger, Pantai Jimbaran, Pantai Brawa, Pantai Nyang-Nyang, Pantai Padang-Padang, Pantai Batu Pageh, Pantai Samuh, Pantai Kedonganan, Taman Rekresasi Hutan Bakau, Monumen Tragedi Kemanusiaan, Pantai Seseh, Pantai Sada Kapal, Kawasan Luar Pura Taman Ayu, Desa Wisata Baha, Bumi Perkemahan Blahkiuh, Tanah Wuk, Air Terjun Nungnung, Wisata Argo Palaga, Kawasan Luar Puncak Tedung, Kawasan Pura Keraban Langit, Bali Elephant Camp, Kawasan jembatan Tukad Bangkung, Pantai Pandawa. Kabupaten Badung juga merupakan wilayah yang menyediakan sarana dan prasarana pariwisata terlengkap seperti hotel dan restoran, letak bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai juga berada di Kabupaten Badung. Kabupaten Badung memiliki wilayah wisata alam yang cukup terkenal berbeda dengan Kota Denpasar.

3. Kabupaten Gianyar

Kabupaten Gianyar memiliki 2 kawasan pariwisata yang terkenal yaitu Ubud dengan ciri khas budayanya dan Lebih yang memiliki pantai pasir hitam dengan ombak laut lepasnya. Kabupaten Gianyar merupakan kabupaten yang cukup berkembang setelah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, dengan letak yang cukup strategis dengan jarak yang cukup dekat dengan Kota Denpasar. Dengan daya tarik wisata terbanyak yang dimiliki potensi pengembangan pariwisata sangat besar di Kabupaten Gianyar. Dengan 61 daya tarik wisata antara lain Bukit Jati, Kolam Renang Bukit Jati, Kelurahan Gianyar, Relief Bitera, Puri Agung Gianyar, Stage Sidan dan Wisata Alam Sidan, Reliefe Yeh Pulu, Goa Gajah, Mendala Wisata Samuan Tiga, Museum Purbakala, Candi Tebing, Tegalinggah, Pancuran 11 Macam, Bukit Dharma Dura Kutri, Lembah Sungai Petanu, Desa

Bona, Lingkungan Pura Gaduh, Sindu Raja, Goa Garba dan Lingkungan Pura Ukur-Ukuran, Lingkungan Pura Perantara Sasih, Tirta Empul, Gn. Kawi Tampak Siring, Gn. Kawi Sebatu, Ceking, Lembu Putih, Desa Celuk, Desa batuan, Desa Batu Bulan, Air Terjun Tegenungan, Taman Burung, Ling. Pura Puseh Canngi, Lembah Singai Wos, Rimba Reptil, Bali Zoo Park, Lembu Putih Ds. Taro, Ling. Pura Kebo Edan, Ling. Pura Mangening, Wenara Wana, Wisata Gajah, Wisata Kokokan, Lembah Sungai Ayung, Desa Ubud, Desa Mas, Desa Peliatan, Museum Puri Lukisan, Museum Neka, Museum Ratna Warta, Museum Rudana, Museum Rma, Taman Safari & Marine Park, Pantai Lebih, Pantai Saba, Pantai Masceti, Pantai Cucukan, Taman Kemuda Sari, Candi Tebing Pejeng Kangin, Tegal Jambangan Sayan, Pantai Siyut, Pantai Slukat, Pantai Air Jeruk, Lembah Sungai Sangsang, Candi Tebing Goa Garton, Kolam Renang Tenaga Madu, Museum Harapan Indonesia, PT. Taman Nusa, Waterboom Bukit Jati.

4. Kabupaten Bangli

Kabupaten Bangli merupakan kabupaten yang tidak memiliki kawasan pariwisata namun memiliki kurang lebih 42 daya tarik wisata yang terkenal namun hanya sebagai destinasi pariwisata dan masih di kelola secara sederhana oleh desa adat di wilayah tersebut. Daya tarik wisata yang dimiliki Kabupaten Bangli antara lain Batur, Pura Penulisan, Taman Sari, Bukit Serokadan, Pura Dalem Bangun Lemah, Bukit Pulasari, Lembah Pantunan, Candi Tebing, Panorama Desa Jehem, Desa Trunyan, Pura Tirta Payuk, Pusa Puser Tasik, Peninggalan Lesung, Bukit De Mulih, Objek Wisata Pengotan, Mesum Gunung Berapi, Kolam Rennag Seganing, Goa dan Mata Air Pulasari, Tracking Br. Guliang Kangin, Pura Pincak Sari, Objek Hutan Wisata Suter, Air Terjun Bunutin, Air terjun Yeh Mampeh, Tirta Sidamala, Air Terjun Desa Kuning, Desa Batukaang, Agro Wisata Jeruk dan Sirsak, Desa Songan batur, Desa Adat Penglipuran, Pura kehen, Dalam Jawa, Desa Tradisional Bayung Gede, Taman Bali Raja, Wisata Agro Kopi Arabika dan Jeruk, Eko Wisata Bukit Bangli, Desa Wisata Taman Sari, Bukit jati, Air Terjun Kutuh, Pendakian Gunung Abang, Air Terjun Kubu Salya,

DTWK Kintamani. Daya tarik wisata yang dimiliki Bangli cukup banyak namun karena wilayah ini merupakan dataran tinggi yang memiliki suhu sejuk dan dingin. Namun pengelolaan daya tariknya masih belum maksimal, dengan harga tiket masuk yang sangat murah bahkan di beberapa tempat tidak dipungut biaya dan masih dikelola desa adat seadanya. Membuat pendapatan Kabupaten Badung dari pariwisata tidak begitu besar, dan masih mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai mata pencaharian utama masyarakat di Kabupaten Bangli.

5. Kabupaten Klungkung

Kabupaten Klungkung merupakan salah satu kabupaten dengan PAD yang rendah dan tidak begitu berkembang, dengan potensi pariwisata yang mulai dikenal Kabupaten Klungkung mulai melakukan pembenahan beberapa tahun terakhir. Kabupaten Klungkung memiliki kawasan pariwisata yang sudah dikenal yaitu Nusa Penida. Daya tarik wisata yang dimiliki Kabupaten Klungkung antara lain Kerta Gosa, Taman Gili, Museum Semarajaya, Monumen Pupuran Klungkung, Puring Klungkung, Lapangan Puputan Klungkung, Pasar Seni Kota Semarapura, Pura Gowa Lawah, Desa Kamasan, Goa Jepang Klungkung, Museum Lukis Nyoman Gunarsa, Air Terjun Tukad Unda, Sungai Bakas, Pura Taman Sari Klungkung, Bukit Belong Gunaksa, Pantai Kusamba, Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Seni adalah jiwa Kabupaten Klungkung, baik seni tari, lukis dan seni tenun Klungkung memiliki potensi besar dalam pengembangan seni sebagai daya tarik pariwisata.

6. Kabupaten Karangasem

Kabupaten Karangasem memiliki 3 kawasan pariwisata dan 15 daya tarik wisatawan. Kabupaten Karangasem merupakan salah satu kabupaten dengan PAD dan tingkat pertumbuhan yang rendah di Provinsi Bali. Tiga kawasan pariwisata yang dimiliki Karangasem antara lain Candi Dasa, Ujung dan Tulamben. Daya tarik yang dimiliki Kabupaten Karangasem antara lain Bukit Jambul, Putung, Yeh Melet, Iseh, Kebun Salah Sibetan, Puri Agung Karangasem, Besakih, Tirtaganga, Tenganan, Jemeluk, Telaga Waja, Candidasa,

Padangbai, Pantai Tulamben dan Taman Ujung. Destinasi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Karangasem adalah jenis wisata alam yang memang menjadi andalan Kabupaten Karangasem. Namun kelas pengembangan destinasi Kabupaten Karangasem masih bersifat sederhana dan masih dikelola oleh desa adat dengan aturan dan pengelolaan yang masih jauh dibandingkan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Minimnya sarana prasarana pariwisata juga menjadi Kabupaten Karangasem hanya sebagai salah satu wilayah destinasi pariwisata dan bukan tempat yang dipilih untuk tinggal oleh wisatawan.

7. Kabupaten Buleleng

Kabupaten yang mulai berkembang karena berkembangnya sektor pariwisata dan mulai dikenalnya Lovina sebagai salah satu destinasi pariwisata yang cukup terkenal membuat perekonomian Kabupaten Buleleng mulai membaik. Dengan tiga kawasan pariwisata seperti Kalibubuk, Batu Ampar dan Air Sanih. Kabupaten Buleleng memiliki cukup banyak daya tarik pariwisata seperti Air Terjun Gitgit, Gedung Kertya, Museum Buleleng, Ex Pelabuhan Buleleng, Air Terjun Campuhan/ Twin Waterfall, Air Sanih, Air Panas Banjar, Air Panas Banyu Wedang, Danau Buyan, Danau Tamblingan, Air Terjun Melanting, Air Terjun Les, Air Terjun Sekumpul, Pulau Menjangan, Pemuteran, Taman Nasional Bali Barat, Pantai Lovina, Lingkungan Pura Beji Sangsit, Lingkungan Pura Dalam Sangsit, Lingkungan Pura Dalem Jagaraga, Makam Jayapran. Kabupaten Buleleng termasuk Kabupaten yang memiliki wilayah dataran tinggi dan sejuk dan wilayah pesisir yang eksotis sehingga Kabupaten Buleleng mulai mengembangkan potensi pariwisatanya dan mulai dikenal oleh wisatawan, termasuk menjadi salah satu tujuan tinggal wisatawan.

8. Kabupaten Tabanan

Memiliki sebutan sebagai lumbung beras Provinsi Bali, dengan wilayah pertanian yang cukup luas Tabanan bisa dikatakan salah satu wilayah yang memiliki wisata Subak dan persawahan terasering yang cukup terkenal di provinsi Bali, Tabanan memiliki satu kawasan wisata yaitu pantai Soka. Daya tarik wisata yang dimiliki

Tabanan sebanyak 24 daya tarik yaitu Taman Puputan Margarana, Alas Kedaton, Museum Subak, Areal Pura Batukaru, Yeh Panas Penatahan, Yeh Panas Belulang, Jatiluwih, Taman Kupu-Kupu Bali, Sanggar Tari Wiranatnala, Puri Gede Kerambitan, Puri Anyar, Sarinbuana-Pura Puncaksari, Kawasan hutan Mekori, Yeh Panes dan hutan Bambu Angseri, Bedugul, Kebun Raya Eka Karya, Pantai Soka, Pantai Suraberata, Tanah Lot, ulun Danu Beratan, Pantai Yeh Gangga, Pantai kelanting, Air Terjun dan kebu Pujungan dan Pantai Pasut.

9. Kabupaten Jembrana

Terletak di ujung Pulau Bali dengan pulau jawa, Kabupaten Jembrana memiliki 2 kawasan pariwisata yaitu Perancak dan Candi Kesuma. Dengan 15 daya tarik pariwisata yang didominasi oleh pesisir pantai dengan laut lepas yang indah. Daya tarik wisata yang dimiliki Kabupaten Jembrana antara lain Bunur Bolong, Pantai Medewi, Pantai Delodberawah, Rambut Siwi, Pantai Pakutatan, Pantai Pengeragoan, Pantai Gumbrih, Ds. Sangkar Agung, Pantai Baluk Rening, Pantai Candi Kusuma, Teluk Gilimanuk, Perancak, Museum Manusia Purba, Bendungan Palasari dan Rest. Area Rambut Siwi. Kabupaten Jembrana adalah kabupaten yang terletak di bagian bali barat yang sektor pariwisatanya kurang berkembang seperti wilayah lainnya. Lokasi Kabupaten Jembrana yang jauh dari ibu kota membuat akses dari Jembrana ke Kota Denpasar cukup jauh sekitar 4 jam menuju Denpasar. Dilihat dari potensi wisatanya Kabupaten Jembrana memiliki daya tarik yang tidak kalah menariknya dengan Kabupaten lainnya meskipun masih belum dikembangkan dengan baik.

Perbedaan potensi daya tarik wisata di masing-masing kabupaten/kota juga memberikan dampak pada ketimpangan pendapatan rumah tangga di Provinsi Bali. Wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang sudah di tata dengan baik dan dilengkapi dengan sarana prasarana yang lengkap seperti Kabupaten Badung dan Kota Denpasar tingkat pertumbuhan perekonomian tinggi dan cepat. Wilayah-wilayah yang masih lambat berkembang seperti Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli. Sebagian besar wilayah tersebut memiliki

potensi daya tarik yang sangat menarik dan unik yang berbeda dari satu sama lainnya. Kondisi ketimpangan karena perkembangan sektor pariwisata terjadi karena pembangunan pariwisata yang terlihat sangat berbeda antara Bali Utara, Barat dan Timur yang mana pembangunan pariwisatanya lebih lambat apabila dibandingkan dengan wilayah Bali Selatan. Kondisi ketimpangan antar kabupaten/kota menjadi sebuah isu penting yang selalu menarik untuk diteliti.

Akita, Yue dan Kawamura (2017), Coady, *et al.* (2017), Siburian (2020) melakukan penelitian untuk melihat ketimpangan berdasarkan wilayah. Provinsi Bali memiliki delapan kabupaten dan satu kota dengan potensi daerah yang tidak sama antara wilayah satu dengan lainnya. Setiap kabupaten dan kota memiliki ciri khas masing-masing, ketimpangan di Provinsi Bali. Ketimpangan ini muncul karena adanya percepatan pembangunan antar wilayah di Provinsi Bali. Perbedaan karakteristik baik dari segi geografis, potensi alam yang heterogen antar wilayahnya mempengaruhi pola pembangunan di Provinsi Bali, kondisi ini memunculkan tidak seragamnya dan adanya perbedaan kemampuan tumbuh dari masing-masing wilayah. Kondisi serupa diungkapkan oleh Gama (2009) yang mengatakan adanya perbedaan potensi wilayah dan berkembangnya sektor pariwisata merupakan salah satu penyebab Provinsi Bali mengalami ketimpangan distribusi pendapatan.

Alih fungsi lahan yang cukup tinggi karena dampak perkembangan pariwisata menyebabkan adanya perbedaan pendapatan pekerja yang bekerja di sektor pariwisata dan sektor pertanian. Jaya & Fitanto (2004) menyebutkan bahwa pemusatan pembangunan di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar menyebabkan makin timpangnya kondisi pembangunan wilayah di Provinsi Bali. Selama ini sebagian besar wisatawan di Bali berkunjung lebih sering di tiga destinasi yaitu di Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar. Wilayah lainnya merupakan wilayah yang dianggap kurang terkenal namun menyimpan potensi pariwisata yang sangat besar. Wisatawan yang menginap di Kabupaten Badung atau Kota Denpasar setiap harinya pergi ke berbagai objek wisata di wilayah lainnya. Salah satu mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan karena sektor pariwisata salah satunya adanya kompensasi yang bisa diberikan dari daerah yang memiliki

PAD yang tinggi kepada daerah lainnya. Pendekatan meretribusi kekayaan dari hasil pariwisata daerah destinasi yang kaya kepada wilayah Kabupaten lainnya diatur dari 2003 kemudian disempurnakan kembali pada tahun 2009. Di mana dalam peraturan Gubernur Bali No. 16 Tahun 2003 tentang Pembagian Bantuan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Badung dan Kota Denpasar kepada 6 (enam) Kabupaten lainnya.

Ketentuan tersebut menyebutkan bantuan pajak Hotel dan Restoran dari Kabupaten Badung 22 persen dan Kota Denpasar dari realisasi setelah dikurangi pungutan kepada enam Kabupaten lainnya. Hal ini dilakukan untuk dapat memberikan kesempatan kabupaten lainnya dalam membangun dan mengembangkan wilayahnya. Pembangunan dari dana bantuan tersebut dikhususkan untuk pengembangan dan pembangunan pada bidang pariwisata, membiayai kegiatan pelestarian budaya, pemeliharaan lingkungan dan pembiayaan sektor-sektor unggulan. Dekomposisi berdasarkan kabupaten dan kota di Provinsi Bali dilakukan dengan menjadikan Kota Denpasar sebagai base atau kelompok pembanding dengan 8 Kabupaten lainnya. Kota Denpasar dipilih sebagai kelompok dasar karena Kota Denpasar merupakan Ibu Kota Provinsi Bali. Kota Denpasar merupakan salah satu Kota Metropolitan di Provinsi Bali yang masuk ke dalam wilayah Sarbagita. Kota Denpasar merupakan wilayah terpadat di Provinsi Bali, kondisi ini membawa heterogennya permasalahan di Kota Denpasar dan adanya daya tarik yang tinggi dari Kota Denpasar untuk dijadikan destinasi bagi para mencari kerja. Dilihat dari segi historis Kota Denpasar memiliki kisah riwayat yang cukup panjang yang akhirnya menjadi Ibu Kota Provinsi Bali. Asal Usul kata Denpasar berasal dari dua suku kata yaitu *den* dan *pasar*. Kata *den* berarti utara dan *pasar* berarti pasar atau peken. Sesuai asal usulnya Denpasar berarti di utara pasar yang sekaligus menunjukkan lokasi puri yang saat ini menjadi pusat orientasi penduduk berada di sebelah utara pasar (Indriani, 2018).

Struktur pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali khususnya Kabupaten/Kota terdapat empat pola pertumbuhan di mana beberapa daerah seperti Kabupaten Tabanan, Jembrana, Bangli dan Karangasem merupakan Kabupaten yang masuk ke dalam daerah tertinggal (Hariyanto & Purwanti, 2020). Hasil penelitian ini juga menunjukkan hasil Indeks

Williamson yang tinggi yakni 0,8428 yang menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan di Provinsi Bali masuk ke dalam kategori tinggi. Beberapa Kabupaten merupakan kabupaten yang masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sektor utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Wilayah yang memiliki nilai ketimpangan tertinggi ke dua setelah Kabupaten Klungkung adalah Kota Denpasar. Wilayah yang paling padat di Provinsi Bali dengan kesibukan masyarakatnya yang tidak pernah berhenti. Heterogenya masyarakat Kota Denpasar adalah karena banyaknya pencari kerja yang masuk ke Kota Denpasar.

Banyaknya migran yang masuk menyebabkan adanya dampak positif dan negatif yang muncul. Dampak negatif yang muncul menyebabkan adanya kondisi yang memicu ketimpangan pendapatan rumah tangga di Kota Denpasar. Ketimpangan yang terjadi pada kelompok kabupaten kota terjadi pada *within group* baik pada analisis Gini dan Atkinson. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan terjadi di dalam grup kabupaten/kota di Provinsi Bali. Ketimpangan ini terjadinya karena adanya ketidakmerataan pendapatan masyarakat di Provinsi Bali karena adanya kelompok masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata dan sebagian bekerja di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Adanya wilayah yang memang memiliki perkembangan maju dan sangat pesat karena sektor pariwisata dan ada wilayah yang mengandalkan sektor pertanian. Ketimpangan yang tinggi di Kota Denpasar disebabkan karena berbagai faktor yang berhubungan dengan status Kota Denpasar sebagai ibu Kota Provinsi Bali. Pusat pemerintahan merupakan magnet yang sangat kuat bagi para migran untuk mencari pekerjaan dan menetap di Kota Denpasar.

Sebagai Ibu Kota kompleksnya karakteristik penduduk dan padatnya jumlah penduduk membuat Kota Denpasar harus bekerja keras guna menata Kota dan bisa mengatasi permasalahan yang timbul. Status migrasi kepala rumah tangga merupakan salah satu proporsi terbesar yang memberikan dampak pada ketimpangan pendapatan rumah tangga di Provinsi Bali. Selain itu wilayah desa dan kota juga memberikan proporsi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Bali. Perbedaan kondisi perekonomian kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Hasil dekomposisi antara kabupaten kota, dengan Kota Denpasar sebagai pembanding

menunjukkan bahwa selama proses pembangunan pendidikan merupakan konsep penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Menurut BPS Provinsi Bali (2019) perkembangan pola rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk di Provinsi Bali cenderung mengalami peningkatan. Pengeluaran per kapita pada tahun 2015 sebesar Rp1.045.145,00m dan meningkat cukup tinggi di tahun 2019 sebesar Rp1.387.154,00. Kondisi lainnya yang juga mendukung bagaimana wilayah desa kota juga menjadi proporsi yang cukup besar dalam ketimpangan pendapatan rumah tangga menurut kabupaten/kota adalah wilayah perkotaan memiliki pengeluaran per kapita yang lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan. Perbandingan pengeluaran per kapita penduduk apabila dilihat dari masing-masing kabupaten/kota terlihat sangat jelas bahwa pengeluaran penduduk di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung berada di atas rata-rata penduduk Provinsi Bali dan disusul Kabupaten Gianyar, Tabanan, Klungkung, Bangli, Jembrana dan Karangasem. Hal ini menunjukkan bahwa secara garis besar pendekatan pendapatan dilihat dari pengeluaran memberikan gambaran bagaimana pola konsumsi pengeluaran penduduk di Provinsi Bali menunjukkan bagaimana kondisi kesejahteraan masing-masing kabupaten kota secara garis besar.

Ketimpangan Jembrana disebabkan oleh Status Migran kepala rumah tangga dengan proporsi terbesar. Letak Kabupaten Jembrana yang berbatasan langsung dengan Pulau Jawa membuat penduduk di kabupaten Jembrana banyak berasal dari luar Pulau Bali. Jembrana sendiri masuk ke dalam kategori daerah tertinggal. Masih belum mampunya Kabupaten Jembrana mengejar ketertinggalan pembangunan merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk bisa menggali potensi daerahnya agar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan mulai menjadi wilayah maju. Dilihat dari PDRB per kapita kabupaten Jembrana masih mengandalkan sektor pertanian. Wilayah desa-kota juga merupakan proporsi penyebab ketimpangan pendapatan rumah tangga di Kabupaten Buleleng, dengan kondisi ini Kabupaten Jembrana masih harus membangun dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk bisa mengikuti pertumbuhan wilayah perkotaan di Kabupaten Jembrana. Pendidikan juga merupakan faktor yang memberikan proporsi terhadap ketimpangan

pendapatan di Kabupaten Jember. Kualitas manusia masih menjadi target pembangunan untuk dapat menciptakan kualitas sumber daya manusia.

Kabupaten Tabanan proporsi terbesar menyebabkan ketimpangan pendapatan rumah tangga adalah status migran kepala rumah tangga, wilayah desa-kota dan jenis kelamin kepala rumah tangga. Sebagian besar wilayah Tabanan adalah wilayah pertanian. Kabupaten Tabanan merupakan Kabupaten yang mengandalkan sektor pertanian. Status migran menjadi salah satu proporsi terbesar penyebab ketimpangan, Tabanan juga menjadi salah satu wilayah tujuan migran karena masih banyak berkembang industri pengolahan dan lahan pertanian yang luas. Putri dan Suryantini (2018) mengungkapkan bahwa Kabupaten Tabanan memiliki sektor potensial yaitu pertanian, selain itu objek wisata yang dimiliki Kabupaten Tabanan juga sangat menjanjikan seperti wisata ekowisata karena adanya Jatiluwih dengan subaknya.

Kabupaten Badung merupakan kabupaten paling kaya di Provinsi Bali, tiga faktor yang memberikan proporsi terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Badung adalah status migrasi kepala rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga dan pengeluaran total rumah tangga. Kabupaten Badung dengan perkembangan pariwisatanya yang pesat sering disebut sebagai pemicu ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Bali (Bagus, 2020). Para migran yang masuk ke Kabupaten Badung adalah migran yang siap bekerja di sektor pariwisata yang memiliki pendidikan dan *skill* dengan kualifikasi tinggi. Selain itu dengan tingginya tingkat upah pekerja di Kabupaten badung menyebabkan daya beli masyarakat di Kabupaten Badung jauh lebih baik dari kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Pengeluaran penduduk di Kabupaten Badung pada tahun 2019 mengalami peningkatan namun pada pengeluaran kelompok terbawah dan kelompok teratas tidak sejalan, hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran kelompok teratas dan kelompok terbawah masih mencolok yang menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan pendapatan rumah tangga di Kabupaten Badung (BPS Kabupaten Badung 2019). Jika dilihat dari data pengeluaran penduduk 40 persen terbawah mengalami penurunan pada tahun 2018 dan pada kelompok 20 persen teratas terjadi peningkatan. Kondisi ini menunjukkan

semakin lebarnya ketimpangan pengeluaran penduduk teratas dan terbawah.

Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar juga menunjukkan hal sama seperti beberapa kabupaten lainnya bahwa status migrasi kepala rumah tangga menjadi salah satu proporsi terbesar ketimpangan pendapatan rumah tangga di Provinsi Bali. Kabupaten Gianyar dengan potensi pariwisata yang cukup besar karena seni dan budayanya yang khas membuat kabupaten ini menjadi salah satu dari tiga besar kabupaten/kota dengan PAD yang tinggi karena sektor pariwisata. Proporsi penyebab ketimpangan terbesar di Kabupaten Klungkung adalah status migrasi kepala rumah tangga, wilayah desa-kota dan pendidikan tertinggi. Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten yang memiliki potensi cukup besar pada industri kerajinan termasuk tenun dan songket yang cukup dikenal di Indonesia. Status migran kepala rumah tangga menunjukkan bahwa ada ketimpangan yang terjadi antara rumah tangga yang kepala rumah tangganya berstatus migran dan bukan migran. Belum maksimalnya pengembangan potensi yang dimiliki Kabupaten Klungkung juga menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan pendapatan rumah tangga di Kabupaten Klungkung. Minimnya sarana prasarana di Kabupaten Klungkung menyebabkan masih menjadi salah satu alasan masih belum berkembangnya pariwisata di Kabupaten Klungkung khusus di Klungkung daratan. Dibandingkan dengan Nusa Penida dan Nusa Lembongan yang memang sudah terkenal sebagai salah satu destinasi pariwisata yang memiliki banyak keindahan alam pesisir yang masih tersembunyi.

Dekomposisi Kota Denpasar dan Kabupaten Bangli menunjukkan bahwa status migrasi kepala rumah tangga, wilayah desa-kota dan pengeluaran total masih menjadi faktor tiga terbesar dalam menyebabkan ketimpangan pendapatan rumah tangga. Kabupaten Bangli merupakan salah satu kabupaten yang tidak memiliki wilayah pesisir namun banyak memiliki yang indah karena dataran tingginya. Banyak wilayah desa yang masih tertinggal di Kabupaten Bangli karena sulitnya akses ke wilayah tersebut. Kabupaten Bangli dibangun dari tiga sektor penting yaitu sektor pertanian, perdagangan hotel dan restoran serta jasa-jasa. Menurut Bapenas Provinsi Bali (2018) tercatat terdapat tujuh desa tertinggal atau desa miskin di Provinsi Bali, enam di antaranya berada di Kabupaten Bangli yaitu Desa Binyan, Desa Mengani, Desa Ulian, Desa Langgahan,

Desa Abuan Kintamani dan Desa Tembuku. Kondisi ini menggambarkan temuan bahwa wilayah desa-kota menjadi proporsi terbesar kedua yang menyebabkan ketimpangan pendataan rumah tangga di Kabupaten Bangli. Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten yang masuk ke dalam wilayah miskin dan tertinggal, dekomposisi menunjukkan hasil bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Karangasem disebabkan oleh status migran kepala rumah tangga, pengeluaran total rumah tangga dan wilayah desa-kota. Wilayah Karangsem masih belum berkembang maksimal sama seperti Klungkung. Karangasem memiliki daya tarik wisata dataran tinggi dan pesisir yang sangat indah. Karangasem merupakan salah satu wilayah penyumbang kemiskinan di Provinsi Bali. Wilayah perdesaan yang belum diberdayakan dengan optimal menjadi salah satu penyebab kemiskinan di Kabupaten Karangasem, meskipun demikian penataan wilayah Karangasem mulai dilakukan untuk dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam memperbaiki perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu wilayah di Provinsi Bali yang mulai berkembang karena mulai membaik sarana prasarana penunjang pariwisata adalah Kabupaten Buleleng berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa faktor status migrasi kepala rumah tangga, pengeluaran total rumah tangga dan wilayah desa kota merupakan proporsi terbesar dalam menyebabkan ketimpangan pendapatan rumah tangga di Kabupaten Buleleng. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Buleleng masih harus mengembangkan wilayahnya untuk dapat meningkatkan kemampuan wilayah desa untuk berkembang dan sejajar dengan wilayah kota. Buleleng mengalami perkembangan sektor industri pengolahan yang cukup pesat (Wiwekananda, dkk., 2016). Mulai berkembangnya pendukung sektor unggulan di hampir semua kecamatan di Kabupaten Buleleng, perkembangan industri pengolahan memberikan nilai tambah bagi Kabupaten Buleleng sehingga memberikan dampak pada kemajuan pertumbuhan dan pembangunan perekonomian di Kabupaten Buleleng. Penyebaran sarana prasarana masih menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Buleleng dan pusat untuk mempermudah akses masyarakat Buleleng ke Pusat Ibu Kota Denpasar. Selain itu perkembangan sarana dan prasarana dilakukan untuk dapat memberikan pemerataan pembangunan antara kecamatan di Kabupaten Buleleng.

Daftar Pustaka

- Akita, T., Kurniawan, P. A., & Miyata, S. (2011). Structural changes and regional income inequality in Indonesia: A bidimensional decomposition analysis. *Asian Economic Journal*, 25(1), 55-77.
- Akita, Takahiro dan Miyata, Sachiko. 2017. *Spatial Dimensions Of Expenditure Inequality In A Decentralization Indonesia*. ADBI Working Paper Series No. 720.
- Adipuryanti, N. L. P. Y., & Sudibia, I. K. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Piramida*, 11(1), 20-28.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2020. Laporan Bukanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Bali April 2020. Bali: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
- Coady, David dan Dizioli, Allan. 2017. *Income Inequality and Education Revisited: Persistence, Endogeneity, and Heterogeneity*. IMF Working Papper WP/17/126
- Diah, M. P. (2020). Pembangunan Pedesaan untuk Mengurangi Kesenjangan Antara Desa dan Kota di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Public Administration Journal of Research*, 2(2), 165-173.
- Hariyanto, M. V., & Purwanti, P. A. P. (2020). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali (Metode Kointegrasi). *Media Trend*, 15(1), 52-61.
- Heryanah. 2017. Kesenjangan Pendapatan di Indonesia: Studi Empiris Berdasarkan Susenas 2008, 2011 dan 2013. *Jurnal BPK* Volume 10 Nomor 2 Tahun 2017, Hal: 43–58.
- Indriani, M. N. (2018). *Eksistensi Kearifan Lokal Hindu Bali Di Era Globalisasi (Arsitektur Bali Dan Subak Kota Denpasar)*. Unhi Press.
- Jaya, I. P. G. I. T., & Fitanto, B. (2004). Disparitas Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *TEMA*, 5(1), 36-57
- Puspa, D. M., Utama, I. S., Budhi, I. K. S., & Dewi, M. H. U. (2017). Effect Of Social Economic Factors On Quality Of Life: A Structural

- Model In Schizophrenia People In Bali Province-Indonesia. *International Journal Of Economics, Commerce and Management*, 9(9).
- Putri, I. G. A. P. T., & Suryantini, N. P. S. (2017). *Determinasi Loan To Deposit Ratio Pada Bank Campuran di Indonesia* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Sen, A. (2000). A decade of human development. *Journal of human development*, 1(1), 17-23.
- Siburian, M. E. (2020). Fiscal decentralization and regional income inequality: evidence from Indonesia. *Applied Economics Letters*, 27(17), 1383-1386.
- Uluwatayo, I.B. 2009. Explaining Inequality and Welfare Status of Households in Rural Nigeria: Evidence from Ekiti State. *Academic Journal of Plant Sciences* 2 (1): 29-38
- Wijantari, N. M. W., & Bendesa, I. K. G. (2016). Kemiskinan Di Provinsi Bali (Studi Komparatif Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali). *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 21(1), 13-25.
- Wiwekananda, I. B. P., Utama, I. M. S., & Made, I. (2016). Transformasi struktur ekonomi dan sektor unggulan di Kabupaten Buleleng periode 2008-2013. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1), 37-45.
- Yoga, I. M. S., Putra, I. K. T. E., & Utomo, R. B. (2022). Pengaruh Upah Minimum dan Angka Melek Huruf Terhadap Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Sutasoma*, 1(1), 11-21.

Tata Kelola Pertumbuhan Ekonomi (Otonomi) Daerah Melalui Sektor Umkm

Prasetio Ariwibowo

A. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan, sektor swasta, pemerintah, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan. Untuk mencapai hal ini, tata kelola perekonomian daerah yang efektif diperlukan. Di Indonesia, ada banyak studi pertumbuhan ekonomi regional dan proyek penelitian yang bertujuan untuk membandingkan kinerja pertumbuhan ekonomi regional. Studi Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) adalah salah satu dari banyak penelitian yang bertujuan untuk mengukur tata kelola ekonomi daerah. Menurut Panitia Pengawasan Pelaksanaan Otonomi Daerah (2012), ada sembilan kriteria yang digunakan untuk menilai tata kelola ekonomi daerah, di antaranya:

1. Memperoleh Properti
2. Kompetensi dan Karakter Penanggung Jawab Pemerintah Kota
3. Fasilitas Lokal dan Daerah
4. Bagaimana Bisnis dan Pemerintah Kota Bekerja Sama
5. Memperoleh Izin yang Diperlukan untuk Operasi
6. Program Pertumbuhan Usaha (UMKM)
7. peraturan setempat
8. Keselamatan dan Penyelesaian Konflik
9. Biaya Terkait dengan Melakukan Pembelian

Suatu wilayah harus memiliki otonomi agar dapat memaksimalkan potensinya (Safitri, 2016). Hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dikenal sebagai otonomi daerah (Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam Safitri, 2016). Otonomi daerah

didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 5 UU No. 32 Tahun 2004 (dalam Safitri, 2016) sebagai hak, kekuasaan, dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri. Otonomi daerah, menurut Sumarmoko (2002: 61), adalah hak suatu daerah untuk mengendalikan urusannya sendiri dan mengurus rakyatnya sendiri. berdasarkan keinginan individu, berdasarkan keinginan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 32 Tahun 2004, pelimpahan kewenangan kepada daerah dan kabupaten/kota bergantung pada desentralisasi, yaitu otonomi yang menyeluruh, nyata, dan akuntabel (Safitri, 2016).

Perspektif maksimalis tentang otonomi daerah berisiko menyebarkan gagasan yang akan merusak kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini juga bertentangan dengan tujuan GBHN, yaitu memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk membuat keputusan sendiri tentang apa yang akan dilakukan untuk kepentingan pembangunan nasional. Prinsip reformasi ditetapkan, dan UU 22 tahun 1999 dan UU 25 tahun 1999, yang masing-masing berlangsung selama 25 tahun, menggantikan undang-undang sebelumnya. Keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 erat terkait dengan situasi yang terjadi ketika rezim otoriter Orde Baru runtuh dan berbagai pihak berusaha melakukan perubahan di semua tingkat pemerintahan dan masyarakat. Sidang Istimewa MPR Tahun 1998 mengeluarkan Ketetapan Nomor XV/MPR/1998 sebagai tanggapan atas permintaan perubahan. Ketetapan ini menetapkan standar untuk otonomi daerah dan kesetaraan dalam pembagian dan pemanfaatan sumber daya Negara Kesatuan Republik Indonesia. dan menjaga keseimbangan keuangan antara ibu kota negara dan provinsinya. Aspek yang paling menonjol dari transisi dari UU 5 Tahun 1974 ke UU 22 Tahun 1999 adalah perubahan drastis dalam bentuk dan sifat otonomi daerah. Frasa-frase yang ditemukan dalam pasal-pasal undang-undang tersebut menunjukkan adanya pergeseran substansi. Sesuai dengan beberapa poin yang tercantum dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, desentralisasi dalam UU No. 5 Tahun 1974 tampaknya lebih bersifat desentralisasi. Namun, UU No. 22 Tahun 1999 biasanya memberikan desentralisasi.

Keputusan Indonesia untuk benar-benar menerapkan otonomi daerah didorong oleh ketidakpuasan mereka yang tinggal di daerah yang kaya akan sumber daya alam tetapi taraf hidup sebagian besar masyarakatnya masih di bawah garis kemiskinan. Pemerintah pusat tetap memegang kendali atas pengelolaan kekayaan alam dan sumber daya alam daerah, meskipun undang-undang sering dibuat. Karena itu, komunitas yang memiliki banyak sumber daya alam merasa kehilangan haknya. Terakhir, mereka mendukung penerapan otonomi daerah selama periode reformasi. Hasilnya adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang meletakkan dasar untuk otonomi daerah dimulai pada tahun 2000. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1999, setelah daerah diberi otonomi, mereka akan memiliki akses ke tujuh puluh persen pendapatan dari pengelolaan kekayaan alam mereka sendiri. Pendapatan ini kemudian dapat digunakan untuk kemajuan daerah tersebut. Sesuai dengan UU 32 dan 33 tahun 2004, kerangka keseimbangan anggaran dan otonomi daerah telah diperbarui. Karena perbedaan kekuasaan ini, daerah-daerah yang memiliki banyak sumber daya alam berkembang di bawah otonomi daerah, sementara daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang lebih sedikit berjuang untuk memperluas batas mereka. Setelah Indonesia memberikan otonomi daerah, beberapa masalah muncul. Untuk mencapai otonomi daerah, ada banyak tantangan, seperti:

1. Perbedaan antara daerah kaya sumber daya dan daerah miskin sumber daya dalam hal tingkat pembangunan.
2. Tumbuhnya fenomena pragmatisme politik di tingkat masyarakat; ekspansi korupsi yang cepat di banyak bagian dunia; pengaruh uang dalam politik.
3. Legitimasi politik yang lengkap maupun stabilitas politik tidak tercapai.
4. Adana konflik horizontal maupun vertikal
5. Upaya lokal untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat telah gagal.

Inisiatif desentralisasi dan otonomi daerah yang terhenti di persimpangan jalan perlu diarahkan ke jalan yang benar. Lembaga yang berfungsi sebagai mediator, seperti Partnership for Governance Reform (PGR), sangat penting untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam

pembangunan. Aliansi juga dapat memberikan tekanan untuk memastikan upaya desentralisasi dan otonomi daerah berjalan sesuai dengan rencana. Intervensi bertujuan untuk mendorong masyarakat sipil untuk menerapkan program terukur yang berkelanjutan daripada berkonsentrasi pada proyek tertentu (Kaho, 2000: 12). Safitri (2016) memberikan berbagai opsi untuk mengembalikan desentralisasi atau otonomi daerah seperti yang dimaksudkan pada awalnya. Di antara presentasi tersebut termasuk memperkuat hubungan vertikal dengan pemerintah, hal-hal yang harus dilakukan adalah:

1. Merestrukturisasi peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah.
2. Meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam mendorong kerja sama antar pemerintah daerah.
3. Menciptakan administrasi berbasis lokal yang dapat menangani tantangan dan peluang regional dengan lebih baik.
4. Meningkatkan pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan aparatur pemerintah daerah yang kompeten dan profesional melalui peningkatan kapasitas, penyediaan, dan pengembangan strategi manajemen.
5. Memperkuat dan memperluas kemampuan pemerintah daerah untuk menghimpun dan membelanjakan penerimaan pajak guna meningkatkan pelayanan publik, mewujudkan otonomi daerah, dan mewujudkan pemerintahan daerah yang sehat.
6. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah, merencanakan dan melaksanakan kebijakan yang memfasilitasi pembentukan daerah otonom tambahan tanpa membebani keuangan negara.
7. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, otonomi daerah harus didukung penuh oleh seluruh pimpinan daerah dan masyarakat. Hal ini membutuhkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pendidikan publik.

Oleh karena itu, alasan utama untuk mendirikan daerah otonom adalah untuk memberi mereka otonomi dalam pengambilan kebijakan nasional dan kemampuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Dengan pelimpahan kewenangan ke daerah diharapkan sektor publik di Indonesia menjadi lebih efisien, efektif, dan akuntabel. Dengan lebih banyak kebebasan, daerah harus menemukan cara mereka sendiri untuk mendukung pembangunan, tanpa kehilangan harapan untuk bantuan federal dan bagi hasil, dan harus membelanjakan uang publik dengan cara yang mencerminkan tujuan dan aspirasi konstituen mereka. Investasi swasta dan bisnis lokal diharapkan memainkan peran penting sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi daerah. Menarik investor merupakan faktor penting lainnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menghasilkan *multiplier effect* yang signifikan. Otonomi daerah dimaksudkan untuk memberi pemerintah daerah lebih banyak kelonggaran dalam membentuk masa depan mereka sendiri dengan memungkinkan mereka membuat keputusan tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya dan mendorong warga untuk berperan aktif dalam membentuk komunitas mereka. Hal ini karena otonomi daerah memiliki tiga tujuan utama, yaitu:

1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah dengan menjadikannya lebih efisien dan efektif.
2. Meningkatkan efektivitas program pemerintah dan dukungan masyarakat.
3. Memungkinkan warga untuk mengambil bagian dalam perencanaan dan pembangunan.

Berdasarkan prinsip otonomi dan administrasi bersama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menetapkan bagaimana otoritas ditransfer dari tingkat federal ke tingkat negara bagian dan lokal. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan, birokrasi, dan pemberdayaan masyarakat yang diinginkan. Selain itu, diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing daerah melalui pemanfaatan potensi dan keragaman daerah secara utuh untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk daerah. Pemerintah Daerah harus memperhatikan beberapa aspek, salah satunya adalah bidang ekonomi. Untuk mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan daerah, pemerintah daerah

hendaknya mengutamakan sektor ekonomi daerah dengan memperhatikan potensi dan keragaman daerah.

Tujuan PROPENAS 2005, menurut UU 25 Tahun 2000, adalah untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui perbaikan lingkungan bisnis, peningkatan akses terhadap sumber daya, dan pelatihan dan pemberdayaan untuk usaha ini. pengusaha untuk berhasil di pasar yang kompetitif dan mendorong lebih banyak kerja sama bisnis. Sebagian besar masyarakat di Indonesia hidup dari kegiatan ekonomi usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi. Mengingat posisinya yang menonjol, sektor ini merupakan jalur utama untuk memperbaiki struktur ekonomi masyarakat. Untuk mencapai pembangunan usaha nasional, usaha kecil harus dibina menjadi usaha menengah yang lebih efisien dan mampu berkembang secara mandiri, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja. MNE juga diharapkan dapat memainkan peran yang semakin penting dalam penyediaan barang, jasa, dan berbagai komponen untuk kebutuhan pasar domestik dan kebutuhan pasar internasional. Bisnis yang tepat dapat dibentuk dengan mengikuti prosedur yang benar dan bekerja sama dengan fasilitator lembaga kolaboratif. Usaha kecil dan menengah (UKM) Indonesia telah lama menjadi salah satu penggerak ekonomi dan sosial terpenting di negara ini. Salah satu cara masyarakat dapat mengatasi badai ekonomi saat ini adalah dengan bantuan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengangguran dapat dikurangi sampai batas tertentu, dan ada konsekuensi keuangan. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan beberapa peran penting dalam perekonomian Indonesia, sebagaimana dibuktikan oleh berikut ini (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2005):

1. Pentingnya bermain di banyak bidang ekonomi yang berbeda.
2. Pemberi pekerjaan.
3. Meningkatkan keagenan warga dan pertumbuhan ekonomi wilayah. *Ignitor* peluang ekonomi segar dan stimulasi intelektual.
4. UMKM membantu neraca perdagangan negara dengan terlibat dalam inisiatif ekspor.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno (1999) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai “perluasan kegiatan ekonomi yang menghasilkan perluasan *output* barang dan jasa serta standar hidup masyarakat.” Masalah ekspansi ekonomi yang stagnan mencakup beberapa periode dan mempengaruhi seluruh perekonomian. Meningkatnya pembangunan fisik produksi komoditas dan jasa yang relevan bagi suatu negara menunjukkan ekspansi ekonomi yang pesat (Sukirno, 2008: 423). Sementara itu, pertumbuhan GDP/GNP didefinisikan oleh Arsyad (1999) sebagai peningkatan dalam salah satu ukuran, terlepas dari apakah laju pertumbuhan melebihi atau kurang dari pertumbuhan penduduk atau jika terjadi pergeseran komposisi ekonomi. Sementara itu, Ali Ibrahim Hasyim berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai peningkatan status ekonomi suatu negara secara bertahap. Menurut Hasyim (2016), pembangunan ekonomi suatu bangsa membutuhkan tiga faktor utama:

1. Tingkat stok terus meningkat.
2. Tingkat perkembangan penyediaan berbagai macam barang bagi masyarakat banyak ditentukan oleh kecanggihan teknologi.
3. Kemajuan yang diciptakan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi manusia hanya dapat digunakan dengan baik jika bidang kelembagaan dan ideologis diadaptasi untuk memanfaatkan teknologi secara luas dan efisien.

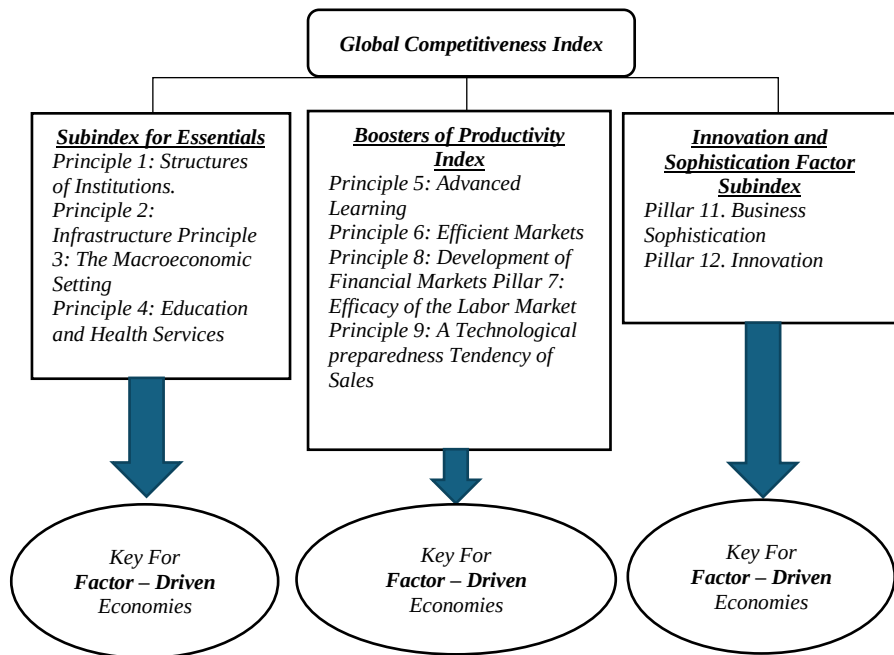
Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan produk regional bruto (PDRB) suatu daerah selama periode tertentu akibat perluasan kegiatan ekonomi yang meningkatkan produksi barang dan jasa lokal. Tingkat pertumbuhan ekonomi diukur dalam penelitian ini dengan menggunakan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Ekonom masih melihat beberapa mekanisme yang telah teruji waktu sebagai pendorong utama ekspansi ekonomi (Sukirno, 2013):

1. Jenis kekayaan alam seperti tanah dan jenis kekayaan alam lainnya.
2. Jumlah dan kualitas angkatan kerja dan usia kerja

3. Jumlah barang modal dan teknologi; struktur sosial dan pemikiran masyarakat.
4. Ekspansi pasar massa.

Perubahan ciri-ciri masyarakat yang menentukan adalah indikator pertumbuhan ekonomi. Perubahan pada sistem politik masyarakat, struktur sosial, sistem nilai, dan struktur ekonomi adalah contohnya. Suatu masyarakat yang telah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi ini, di mana pertumbuhan ekonomi sudah mulai sering terjadi, telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk tinggal landas. Fase lepas landas kritis adalah ketika suatu budaya mempersiapkan diri untuk tingkat perkembangan dan perluasan berikutnya. Daeng dkk. (2020).

Indeks daya saing global disusun dalam laporan World Economic Forum (WEF) mendefinisikan daya saing sebagai tingkat produktivitas suatu negara. Gambar 1 menunjukkan bahwa daya saing bergantung pada keselarasan tiga variabel: kerangka kelembagaan, kerangka kebijakan, dan faktor input. Lembaga dipandang sebagai struktur hukum dan administrasi oleh WEF. WEF berpendapat bahwa “lembaga” mencakup lebih dari sekadar aturan hukum. Sangatlah penting bagi pemerintah untuk memiliki pandangan yang positif terhadap pasar dan kebebasan dan agar operasi pemerintah berjalan dengan lancar. Seperti yang akan kita lihat, ruang lingkup reformasi tata kelola dan birokrasi mencakup sikap pemerintah. Akibatnya, keadaan tata kelola pemerintah terkait erat dengan daya saing ekonomi. Forum Ekonomi Dunia (WEF) menekankan tata kelola perusahaan dan sektor swasta. Untuk menjelaskan variasi daya saing industri di tingkat yang lebih lokal, Griffiths *et al.* (2005) mengusulkan dua pendekatan dasar: manajemen strategis, yang berpusat pada perusahaan, dan ekonomi politik, yang berpusat pada negara.



Gambar 1. Kerangka Indeks Daya Saing Global
Sumber: *World Economic Forum* (Dalam Sambodo, 2017)

Ini menunjukkan bahwa negara dan dunia usaha harus melakukan daya saing. Seperti yang dinyatakan oleh Griffiths *et al.* (2005), struktur tata kelola yang menggabungkan tata kelola perusahaan dan pemerintah akan memberikan kemampuan yang lebih besar untuk menyesuaikan diri dengan cepat dengan kondisi persaingan global yang berubah-ubah. Studi daya saing tidak dilakukan hanya oleh Forum Ekonomi Dunia (WEF). Harvard Institute for International Development (HIID), Heritage Foundation (HF), Fraser Institute of Vancouver (FI), dan International Institute for Management Development (IMD) juga melakukannya (Giap, 2004). Giap (2004) melihat empat komponen yang membentuk kemampuan suatu negara untuk bersaing: ekonomi, pemerintah, bisnis, dan masyarakat. Dia melakukan ini dengan menggunakan struktur yang dibuat oleh World Competitiveness Yearbook (WCY). Studi Giap (2004) menemukan bahwa Indonesia adalah salah satu negara PDR yang paling lemah.

C. Tata Kelola Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Di Indonesia, 99% pelaku usaha dan 97% angkatan kerja adalah UMKM. Namun, mereka hanya menghasilkan sekitar 65 persen dari PDB negara (Kementerian UMKM dan Koperasi Republik Indonesia, 2022). Pemerintah telah lama menyadari betapa pentingnya usaha kecil dan menengah (UMKM) dan harus mendukung mereka agar mereka dapat lebih banyak berkontribusi pada perekonomian nasional. Ada banyak undang-undang yang bertujuan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ini termasuk UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil; UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007 tentang Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah semuanya ada untuk mendorong UMKM.

Untuk melaksanakan pengembangan usaha diharapkan dukungan berdasarkan aneka macam aspek, misalnya bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM (Sumber Daya Manusia), teknologi dan sejenisnya (Afriansyah, Mukmin, Kurnianingsih, Ariwibowo, *et al.*, 2022). Namun realitanya pengusaha di bisnis mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia menghadapi tantangan di berbagai bidang, termasuk tidak terbatas pada pemasaran; modal dan pendanaan; inovasi dan teknologi informasi; bahan baku; peralatan produksi; penyerapan dan pemberdayaan tenaga kerja; rencana pengembangan usaha; dan kesiapan menghadapi tantangan lingkungan eksternal. Selain itu, di berbagai daerah/kota di Indonesia terdapat hambatan untuk mendorong produktivitas perdagangan dari hasil UMKM, seperti:

1. Kendala dari dalam negeri
 - a. Ketersediaan bahan baku yang tidak memadai menjadi penyebab utama produksi di bawah standar.
 - b. Jaringan distribusi masih perlu ditingkatkan.
 - c. Kualitas produk yang tinggi secara konsisten.

2. Kendala dari luar negeri
 - a. Lonjakan penyelundupan dan persaingan pasar ekspor yang semakin sengit sejak kuota dihapuskan.
 - b. Fasilitas yang tidak memadai untuk mengekspor barang, termasuk Zona Pemrosesan Ekspor (EPZ) dan Container Yard (CY) yang belum selesai di pelabuhan muat, bandara internasional, dan kawasan industri.
 - c. Usia sebagian besar mesin berarti *output*-nya tidak dapat bertahan di pasar internasional.
 - d. Kelembagaan untuk keamanan konsumen dan regulasi produk masih harus dalam kondisi terbaiknya.
 - e. Ketergantungan terhadap bahan baku/penolong impor masih cukup signifikan.
 - f. Masih diperlukan banyak bisnis kecil dan menengah (UKM) tertarik untuk mengekspor dan keterampilan untuk mengelola ekspor dan mempromosikan produk mereka secara internasional.
 - g. Perlu adanya sarana dan prasarana pendukung perdagangan dalam negeri yang lebih terpelihara dengan baik untuk memastikan distribusi barang dan jasa secara efisien.
 - h. Keunggulan komparatif yang mengandalkan kecerdikan, daya cipta, dan profesionalitas sumber daya manusia, masih menjadi tumpuan ekspor nonmigas.
 - i. Untuk kepentingan keamanan, lingkungan, dan produksi dalam negeri, fitur ekspor (hambatan perdagangan) semakin menjadi hal yang lumrah dari negara mitra tujuan ekspor.

Pemilik usaha kecil, mikro, dan menengah menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal saat mereka memperluas operasinya. Pelaku usaha menghadapi berbagai keterbatasan eksternal, antara lain:

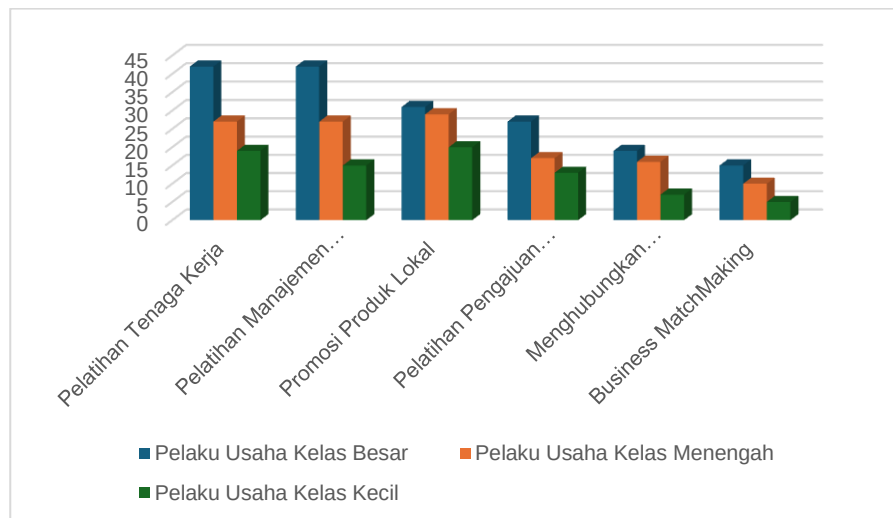
- a. Nilai tukar rupiah relatif terhadap mata uang asing
Harga ekspor yang tinggi secara langsung disebabkan oleh infrastruktur yang tidak memadai, seperti pelabuhan muat ekspor yang tidak memadai di banyak wilayah Indonesia, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), dan akses utilitas yang tidak memadai seperti telepon dan listrik.

- b. Keadaan ekonomi global tetap sama.
Perekonomian global diperkirakan akan tumbuh dengan kisaran yang sama antara 2-4% antara tahun 2020 dan 2023 seperti yang terjadi antara tahun 2011 dan 2019. Pandemi covid-19 berdampak pada pertumbuhan ekonomi di berbagai negara dan proses mengatasi krisis utang yang mengguncang Amerika Serikat dan Eropa adalah faktor utama. “*Lockdown*” di negara-negara Afrika, Australia, Asia, Amerika, dan Eropa ini menyebabkan menurunnya pesanan/pembelian dan jumlah barang/jasa yang diproduksi oleh negara importir dan eksportir.
- c. Diperlukan lebih banyak iklan.
- d. Tingkat persaingan produk yang tidak memadai.
Sebagian karena kenaikan harga minyak, eksportir menghadapi masalah daya saing yang semakin meningkat karena ketidakpastian yang meluas tentang biaya produksi mereka.
- e. Standar tenaga kerja yang tidak memadai.
Sebagian besar pelaku usaha UMKM di daerah masih tergolong kurang dalam penguasaan teknologi, kemampuan menangkap permintaan pasar (kurangnya jiwa wirausaha, cepat puas dengan apa yang dihasilkan saat ini, meskipun pasar sangat dinamis), dan sebagainya. Masih banyak pelaku usaha UMKM di berbagai sektor usaha (*cluster*) di beberapa kabupaten/kota di Indonesia dan secara umum kemampuan SDM mereka cukup tinggi.
- f. Infrastruktur dan fasilitas yang tidak memadai
Meskipun Indonesia memiliki beberapa pelabuhan laut dan bandara berstatus bandara internasional, namun pengoperasiannya belum optimal sebagai tempat pengapalan barang ekspor; khususnya frekuensi penerbangan ke luar negeri yang masih jauh di bawah ekspektasi sehingga tidak dapat melayani pengiriman barang ekspor yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan pengiriman. Selain itu, eksportir ragu untuk menggunakan pelabuhan laut dan bandara di banyak kabupaten/kota di Indonesia karena tidak ada jaminan untuk menghubungkan penerbangan ke negara tujuan ekspor.

g. Lingkungan tidak ramah untuk bisnis.

Kondisi ekonomi makro yang tidak pasti, regulasi pemerintah yang kurang efektif,

kepastian hukum yang kurang, prosedur perizinan yang panjang, masalah ketenagakerjaan, terbatasnya program pembiayaan riil, dan masih tingginya suku bunga pinjaman menjadi faktor penyebab kesulitan yang dialami dunia usaha. Tantangan kuno tentang pemasaran dan pendanaan yang tidak memadai untuk usaha mikro, kecil, dan menengah masih ada hingga saat ini. Ini karena mereka membutuhkan lebih banyak agunan, sehingga lebih mudah mendapatkan pembiayaan bank.



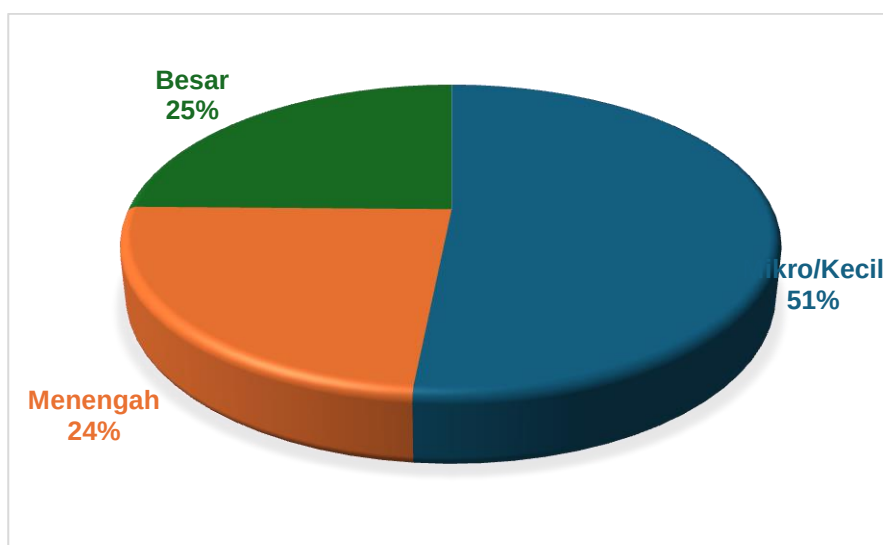
Gambar 2. Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Melalui Program PPUS Berdasarkan Skala Usaha (Dalam %)

Sumber: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), (2022)

Gambar 2 menunjukkan bahwa kemungkinan pelaku usaha untuk berinteraksi dengan pemerintah dan menerima layanan publik menurun dengan menurunnya ukuran bisnis, konsisten dengan studi LEG (Regional *et al.*) lainnya. Dalam hal berurusan dengan pemerintah daerah, misalnya, forum komunikasi berfungsi sebagai ajang pertemuan antara pejabat pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk membahas tantangan yang

dihadapi pejabat pemerintah daerah (pemda) dan mencari solusi bersama. Di 20 kabupaten/kota, hanya 22% pelaku usaha mikro/kecil yang mengetahui ketersediaan forum komunikasi (The Asia Foundation, 2022). Setengah dari pemilik usaha besar dan setengah dari pemilik usaha menengah menggunakan forum komunikasi ini. Tidak hanya daerah lain di empat provinsi yang disurvei memiliki kesadaran yang rendah terhadap operator perusahaan mikro/kecil, tetapi masalahnya tersebar luas (Panitia Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2012). Tulungagung, Bondowoso, Probolinggo, Kota Probolinggo, Barru, dan Luwu Utara diketahui memiliki pelaku usaha mikro/kecil yang relatif mengetahui tentang forum komunikasi (Panitia Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2022). Kajian kualitatif LEG di Barru (Panitia Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2022) menemukan bahwa kedekatan pemerintah daerah dan komunikasi informal lebih penting daripada saluran komunikasi formal untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi pelaku usaha.

Program Pengembangan Usaha Swasta (PPUS) menawarkan berbagai jenis pelatihan, seperti pengelolaan usaha, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan pengajuan kredit. Mereka juga menawarkan peluang untuk berkolaborasi dengan bisnis dari berbagai ukuran, dan memperkenalkan calon mitra usaha (perjudohan) dengan bisnis di lingkungan tersebut. Namun demikian, keakraban para pelaku usaha dengan PPUS yang bervariasi ini bisa lebih baik. Pengembangan tenaga kerja, pendidikan manajemen, dan memamerkan barang-barang daerah adalah tiga dari enam bentuk PPUS yang paling dikenal dunia usaha. Ketiga kategori PPUS telah didengar oleh 15% hingga 19% pelaku usaha mikro dan kecil di 20 kabupaten/kota. Sebagai perbandingan, antara 31% dan 42% karyawan di perusahaan besar mengetahuinya. Namun, 10% dan 27% dari mereka yang terlibat dalam bisnis skala menengah dan besar mengetahui ketiga bentuk PPUS lainnya (The Asia Foundation, 2022). Di antaranya pelatihan pengajuan kredit, penyambungan pelaku usaha, dan *business matchmaking*. Meskipun demikian, semakin banyak pelaku usaha skala besar yang berpartisipasi dalam berbagai inisiatif yang bertujuan untuk mendorong perkembangan UMKM tersebut.



Gambar 3. Tingkat Hambatan Usaha Perizinan Usaha terhadap Aktivitas Usaha Berdasarkan Skala Usaha

Sumber: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), (2022)

Persepsi tentang perizinan usaha mengungkapkan ketidakberdayaan relatif perusahaan mikro dan kecil dibandingkan dengan pemilik usaha menengah dan besar. Hampir 10% pelaku usaha mikro dan kecil menyebutkan kesulitan mendapatkan izin yang diperlukan sebagai tantangan utama. Namun hanya sekitar 4,5 persen dari peserta perusahaan skala menengah dan besar di kawasan ini yang setuju. Pelaku usaha di berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menganggap, selain infrastruktur, interaksi pemerintah daerah dengan pelaku usaha dan PPUS sebagai dua dari tiga kendala terbesar untuk pengembangan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha masih mengantisipasi interaksi, konsultasi, dan bantuan dari pemerintah dalam membangun perusahaan mereka, yang menunjukkan pentingnya peran pemerintah bagi dunia usaha. Namun, pemerintah daerah sering disalahkan karena tidak berbuat cukup untuk mengatasi masalah dalam komunitas bisnis. Pemerintah belum menghasilkan berbagai peraturan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ini terutama berlaku untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, karena kurangnya

pengetahuan mereka tentang forum komunikasi dan berbagai kegiatan PPUS. Pemerintah membutuhkan inovasi baru untuk berinteraksi dan membantu perkembangan dunia usaha agar lebih tepat sasaran. Bisnis yang lebih kecil cenderung kurang berhubungan dengan pemerintah kota mereka melalui saluran seperti papan pesan *online*. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaku usaha mikro/kecil daripada perusahaan besar, sehingga keputusan kebijakan tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengusaha mikro/kecil.

Hal yang sama berlaku untuk izin komersial dan PPUS, serta berbagai layanan pemerintah lainnya. Pemimpin bisnis yang lebih kecil kurang berkemungkinan untuk mengetahui inisiatif PPUS yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Selain itu, para pelaku usaha mikro dan kecil berpendapat bahwa izin usaha membebani operasi mereka lebih banyak daripada usaha menengah dan besar. PPUS adalah salah satu contoh program yang perlu diperbaiki oleh pemerintah daerah untuk menysasar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ini terjadi hampir di setiap kota di Indonesia. Oleh karena itu, setiap pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia harus menemukan cara baru untuk berinteraksi dengan bisnis mikro dan kecil sehingga mereka dapat memahami kesulitan mereka dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Sebagian besar usaha mikro dan kecil ini tidak memiliki izin perusahaan formal, yang berarti mereka tidak tergabung dalam organisasi perdagangan mana pun. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, jika perlu, untuk menemukan mitra untuk bisnis mikro dan kecil, seperti Forda UKM.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo, (2005). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afriansyah, A., Ristiyana, R., Pahlevi, R. W., Mukmin, M. N., Kurnianingsih, R., Kurniawati, I., Ariwibowo, Prasetyo & Utami, A. R., et al. (2022). *Dasar-Dasar Wawasan Kewirausahaan*. Edited by Suwandi. Purbalingga: Eureka Media Aksara. Url.: <https://repository.penerbiteuraka.com/id/publications/556755/dasar-dasar-wawasan-kewirausahaan#cite>
- Arsyad, Lincoln. (1999). *Introduction To Regional Economic Planning And Development*. First edition. BPFE-Yogyakarta.
- Giap, Tan Khee. (2004). The IPS-NTU ASEAN 9 +1 Economic Competitiveness Ranking Indices. *Asean Economic Bulletin*, 21(2), 234–38.
- Griffiths, Andrew dan Raymond F Zammuto. (2005). Institutional Governance System and Variation in National Competitiveness Advantage: An Integrative Framework. *The Academy of Management Review*, 30 (4), 823–42.
- Handayani, N. S., Bendesa, I., & Yuliarmi, N. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, dan PDRB Per Kapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(10), 3449-3474
- Kaho, Josef Riwu. (2000). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. (2012). *Tata Kelola Ekonomi Daerah di 20 Kabupaten / Kota Partisipan KINERJA*. Jakarta: The Asia Foundation. Url: <https://media.neliti.com/media/publications/215-ID-tata-kelola-ekonomi-daerah-di-20-kabupatenkota-partisipan-kinerja.pdf>.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. (2022). *Tata Kelola Ekonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta: The Asia Foundation.
- Maryam, Siti, Daeng, Akung, & Saputri, Dwi. (2020). The Waiting Time Analysis of Educated Workers in Sumbawa Regency. *AFEBI*

- Economic and Finance Review*, 5(1), 1-15. DOI: <https://doi.org/10.47312/aefr.v5i1.663>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Jakarta: Kementerian UMKM dan Koperasi Republik Indonesia.
- Rahardja, Prathama & Manurung, Mandala. (2008). *Teori Ekonomi Makro; Suatu Pengantar, Edisi Keempat*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Safitri, S. (2016). Sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(1). DOI: <https://doi.org/10.36706/jc.v5i1.4804>.
- Sambodo, Maxensius Tri. (2018). Tata Kelola Dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Nasional: Suatu Penelusuran Konsep. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 25(2), 33-46. <https://doi.org/10.14203/JEP.25.2.2017.33-46>.
- Sukirno, Sadono. (2013). *Pengantar Teori Ekonomi Makroekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi. Yogyakarta.

Manajemen Keuangan UMKM dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Ifah Masrifah

1. UMKM dalam Pemberdayaan Masyarakat

Revolusi industri di era globalisasi ini manajemen keuangan merupakan salah satu komponen utama dalam kegiatan ekonomi. Banyak faktor yang mempengaruhi UMKM di manajemen keuangan, yaitu UMKM itu sendiri belum memiliki pengetahuan di dalam manajemen keuangan, belum berpengalaman tentang keuangan juga. Pengalaman keuangan yaitu sebuah peristiwa tentang masalah yang berkaitan dengan dana seseorang yang telah mampu, dirasakan, bertahan dan lain-lain, baik dulu maupun nanti. Dalam mengelola keuangan seseorang, pengalaman keuangan itu sendiri bisa dijadikan modal. Pengalaman bisa didapat dari pengalaman individu, pengalaman mitra, keluarga atau lainnya yang akan membuat kita memikirkan bagaimana untuk lebih mengembangkan UMKM dalam mengawasi dana, cukup memutuskan dan pengelolaan uang yang efektif.

Dalam hal penting yang perlu dibenahi pada pemberdayaan masyarakat adalah adanya pemahaman tentang manajemen keuangan diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan yang memadai bagi pelaku usaha, selanjutnya ilmu ini diimplementasikan ke dalam usaha nyata yang ditekuni UMKM. Sehingga membantu pengembangan UMKM dalam peningkatan kemampuan ekonomi keluarga dan tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Elemen penting yang perlu ditingkatkan di UMKM dalam hal pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, adalah pemahaman manajemen keuangan yang diaplikasikannya

ke dalam usahanya. Tujuan bab ini adalah sumber daya UMKM sudah memahami dan mengaplikasikan manajemen keuangan dengan baik, untuk mengembangkan dan mencipta, serta meningkatkan usahanya dalam struktur pembangunan ekonomi kerakyatan.

2. Manajemen Keuangan UMKM

Apa itu Manajemen Keuangan?

Proses merencanakan, mengelola, menyimpan, dan mengendalikan dana dan aset perusahaan atau UMKM untuk mencegah terjadinya masalah di masa depan disebut manajemen keuangan. Pengelolaan uang yang efektif merupakan komponen penting untuk menyelesaikan masalah ekonomi individu, keluarga, dan perusahaan, manajemen keuangan pribadi seseorang, keluarga seseorang, dan keuangan bisnis seseorang adalah tiga kategori manajemen keuangan.

Dalam kewirausahaan, manajemen keuangan melayani tujuan berikut:

- a. Memaksimumkan laba
- b. Memaksimumkan kekayaan pemegang saham UMKM
- c. Menjaga kekayaan pihak-pihak yang berkepentingan
- d. Mengelola risiko secara efektif
- e. Mengelola hutang dan piutang.

Fungsi Manajemen Keuangan

1. Perencanaan Keuangan
2. Penganggaran Keuangan
3. Pengelolaan keuangan
4. Pencarian keuangan
5. Penyimpanan Keuangan
6. Pengendalian Keuangan
7. Pemeriksaan Keuangan
8. Pelaporan Keuangan

Mengapa UMKM Perlu Membuat Laporan Keuangan?

Aktivitas penggunaan dana, aktivitas perolehan dana, dan aktivitas pengelolaan aset ialah sebagai aktivitas yang berhubungan dengan manajemen keuangan. Ketiga aktivitas tersebut sudah tertuang ke dalam laporan keuangan yang telah dihasilkan.

Keuntungan menghasilkan laporan keuangan, khususnya:

- a. Dapat menjamin hasilnya
- b. Dapat menjamin harga pasarnya
- c. Sebagai siklus kehidupan bisnisnya
- d. Dapat mengelola dana selama kegiatan operasinya
- e. Dapat diarsipkan dengan lancar

Laporan Keuangan Mencakup Apa Saja?

1. Neraca

Sebagai pencatatan keuangan untuk mengilustrasikan keuangan UMKM baik arus masuk maupun arus keluar. Pos-pos yang ada di dalam neraca yaitu: Kas dan setara kas, Piutang, Persediaan, Aset tetap, Utang usaha, Utang bank, dan Ekuitas.

2. Laporan Laba Rugi

Bertujuan untuk menentukan jumlah keuntungan atau kerugian perusahaan. Laporan laba rugi adalah catatan keuangan yang berguna yang memberikan ikhtisar arus masuk dan keluarnya keuangan. Yang mencakup pos-pos sebagai berikut: Penghasilan/Pendapatan, Beban keuangan dan beban pajak.

3. Laporan Perubahan Modal

Merupakan catatan tentang gambaran informasi pada laporan perubahan modal dan naik atau turunnya laba atau rugi selama periode tertentu. Pos-pos yang ada di dalam Laporan Perubahan Modal yaitu: Penambahan modal, laba atau rugi bersih periode berjalan dan Prive-pengambilan modal/untung oleh pemilik (untuk UMKM).

4. Laporan Arus Kas

yaitu pencatatan arus uang/keuangan yang bermanfaat dalam menjelaskan transaksi dana masuk dan keluar. Pos-pos yang ada di dalam Laporan Arus Kas yaitu: aktivitas yang berasal dari pendanaan, aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas operasional dan aktivitas yang berasal dari investasi yang dilakukan dalam periode tertentu.

5. Catatan Laporan Keuangan
Merupakan penjelasan terinci yang disajikan dalam laporan keuangan dan memuat yaitu suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, Ikhtisar kebijakan akuntansi, serta informasi tambahan dan rinci pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Bagaimana Cara UMKM Dapat Membuat Laporan Keuangan yang Benar?

1. Siapkan buku catatan pembayaran dan pembelian
Buku ini tentang transaksi-transaksi pembayaran dan pembelian, yang merupakan sebagai bagian terpenting di dalam pembuatan laporan keuangan. Tujuannya yaitu agar dapat mencatat transaksi-transaksi pembayaran UMKM dalam usahanya, seperti: pembelian bahan baku untuk membuat kue brownis, dan sebagainya. Membiasakan tertib untuk mencatat sebagai langkah awalnya.
2. Siapkan buku catatan penerimaan
Tujuannya untuk mengetahui transaksi penerimaan keuangan selama beberapa hari terakhir. Di mana pencatatan ini akan sangat penting bagi UMKM karena berisi informasi tentang semua dana yang masuk.
3. Buat buku aset perusahaan
Tujuannya untuk membantu UMKM dalam mengetahui kondisi dan posisi asetnya UMKM, secara tepat waktu.
4. Buat pembukuan persediaan barang
persediaan barang ini harus tercatat sebagai gambaran dan patokan untuk produksi barang yang akan datang disesuaikan berdasarkan pesanan dan jumlah barang yang dibutuhkan. Serta untuk memudahkan mengetahui jumlah persediaan barang UMKM secara tepat waktu.

3. Perencanaan Pengelolaan Keuangan UMKM

Dalam menjalankan usahanya UMKM tentu tidak bisa lepas dari perencanaan pengelolaan keuangan. Melalui laporan manajemen keuangan, pemilik usaha dapat mengetahui kondisi usaha untuk dapat mengambil keputusan secara lebih akurat. Namun, beberapa dari UMKM mungkin berpikir, “**Memangnya sepenting itukah belajar keuangan?**” Untuk meyakinkan diri apakah UMKM perlu belajar lebih lanjut tentang perencanaan dan manajemen keuangan, yuk jawab terlebih dahulu beberapa pertanyaan di bawah ini:

1. Apakah pengeluaran UMUM melebihi pemasukan?
 - Ya
 - Ragu
 - Tidak
2. Apakah UMKM sudah memiliki dana darurat?
 - Ya
 - Ragu
 - Tidak
3. Apakah tabungan UMUM mengalami pertumbuhan positif?
 - Ya
 - Ragu
 - Tidak

Jika kebanyakan jawaban UMKM adalah **tidak atau ragu**, maka UMKM telah mengambil langkah yang tepat untuk belajar lebih lanjut soal perencanaan dan manajemen keuangan dari buku ini.

Mengapa Pemilik Usaha Harus Punya Perencanaan Keuangan?

Demi kelancaran bisnis dan keberlangsungan usaha yang lebih lama, tentu perencanaan keuangan perlu dipersiapkan secara matang. Selain bisa membantu mencegah membengkaknya pengeluaran, ada manfaat lain yang perlu UMKM ketahui.

5 Manfaat Merencanakan Keuangan bagi Pemilik Usaha

1. Mencapai tujuan keuangan.
2. Meminimalisir risiko keuangan.
3. Memproduksi aset.
4. Memberikan keyakinan terhadap keputusan keuangan serta perencanaan usaha.
5. Mencapai dan mempertahankan kesejahteraan hidup.

8 Tahap Memulai Perencanaan

1. Mengevaluasi kondisi keuangan saat ini

Perencanaan keuangan yang baik dapat berguna untuk mengevaluasi pengembangan usaha dan memudahkan UMKM memperoleh akses permodalan.

Selain perlu dicatat/direkap secara rutin, pencatatan arus keuangan usaha ini dapat memanfaatkan teknologi pembayaran digital/nontunai agar lebih mudah dimonitor. Dengan begitu UMKM bisa mengetahui kondisi keuangan usaha dari setiap bulannya. Seandainya, diketahui terdapat penurunan, UMKM pun bisa segera merancang strategi yang baru.

2. Mengontrol dan mengawasi arus kas

Tujuan dilakukan kontrol arus kas adalah untuk mengecek laba dan rugi dari bulan ke bulan serta menghindari adanya ketidaksesuaian pencatatan keuangan dan risiko keuangan lainnya (pengeluaran yang boros, penyelewengan dan atau penyalahgunaan dana). Supaya lebih efektif, susun dan terapkan **Standar Operasional Prosedur (SOP)** dan sesuai dengan kegiatan usaha yang UMKM miliki secara efisien.

3. Memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha

Jika UMKM mencampur keuangan usaha dan pribadi, dapat menyulitkan untuk mengecek dan menilai kondisi keuangan bisnis secara akurat. Alhasil, UMKM jadi sulit mengendalikan aktivitas keuangan usaha. Lantas, bagaimana cara memisahkan keuangan pribadi dan usaha?

UMKM bisa membuat satu rekening khusus, lalu membuat kantong pemasukan dan pengeluaran sesuai kebutuhan, agar baik keuangan pribadi maupun usaha tidak tercampur-campur.

4. Menyediakan dana cadangan

Sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi keadaan darurat, pemilik usaha diharuskan memiliki dana cadangan. Pemilik usaha dapat mengidentifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi untuk mempersiapkan jumlah dana yang akan dicadangkan. Sumber dana cadangan diperoleh melalui keuntungan usaha yang disisihkan.

5. Merencanakan proteksi diri dan usaha

Sebagus apa pun performa usaha UMKM, apabila tidak mempersiapkan dana proteksi pribadi dan usaha untuk risiko yang mungkin datang tiba-tiba, tentu akan berimbas pada keberlangsungan usaha. Contoh risiko yang bisa dialami, “Pemilik UMKM jatuh sakit dan butuh biaya rumah sakit, kecelakaan diri atau usaha (kebakaran, kemalingan, dll.). Risiko-risiko ini dapat dialihkan ke perusahaan asuransi dengan membayar premi sejumlah tertentu.

6. Buat target dan rencana pengeluaran

Berdasarkan hasil pencatatan keuangan bulanan yang telah dibuat, kini UMKM bisa tentukan target untuk langkah selanjutnya. Misalnya, laporan laba-rugi pada November 2022 menunjukkan peningkatan dari Oktober 2022, yang berasal dari larisnya penjualan kue brownies UMKM. Maka, UMKM dapat menentukan target laba lebih tinggi untuk Desember 2022. Sebagai ilustrasi, laba yang dihasilkan pada November 2022 mencapai Rp5 juta. UMKM dapat menaikkan target laba menjadi Rp7,5 juta pada Desember dengan melakukan peningkatan produksi kue brownies. “Perlu diingat, peningkatan produksi membutuhkan modal tambahan sehingga perlu perencanaan yang baik agar pengeluaran tidak membengkak”.

7. Buat rencana dan strategi untuk mencapai target

Jika sudah menentukan target untuk bulan atau periode selanjutnya, saatnya UMKM menyusun rencana dan strategis. Mari ambil contoh usaha produksi kue brownies seperti yang disebutkan sebelumnya, karena pada November 2022 penjualan kue brownies meningkat, maka UMKM berencana meningkatkan produksi menu tersebut dengan harapan penjualannya bisa lebih banyak selama bulan Desember 2022. “Namun, perlu diingat bahwa selera pasar bisa berubah sewaktu-waktu, karenanya UMKM butuh strategi agar peningkatan produksi dan biaya yang UMKM keluarkan tidak akan sia-sia”. Misalkan UMKM bisa menawarkan promosi *cashback* untuk menarik minat target pelanggan. Bisa juga dengan menyediakan promo *bundle* agar pelanggan bisa membeli lebih banyak kue brownies dengan harga lebih terjangkau.

8. Mengelola utang dengan bijak

Untuk mengembangkan usaha, perlu adanya tambahan modal usaha yang bisa diperoleh dari pinjaman perbankan, lembaga pembiayaan, bahkan keluarga dan teman.

Definisi UMKM Sebagaimana Diatur dalam UU RI No. 20 Tahun 2008 Pasal 1, Khususnya:

- **Usaha Mikro**, adalah usaha produktif yang memenuhi pengertian usaha mikro dan dijalankan oleh perorangan atau badan usaha kecil.
- **Usaha Kecil**, adalah usaha mandiri produktif yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha menengah atau usaha besar secara langsung atau tidak langsung yang memenuhi pengertian usaha kecil menurut undang-undang.
- **Usaha menengah**, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha kecil atau usaha besar, langsung atau tidak langsung, dengan jumlah aktiva bersih atau hasil penjualan tahunan.

Kriteria Usaha Mikro, Sesuai dengan UU No. 6 Republik Indonesia, 20 Tahun 2008, khususnya:

- Memiliki kekayaan maksimal Rp50.000.000,- tidak termasuk real estat dan bangunan komersial, dan
- Mencapai pendapatan tahunan maksimum Rp300.000.000

Ciri-Ciri Usaha Mikro:

- a. Sebagian besar berubah-ubah bentuk bisnisnya
- b. Senantiasa berpindah pindah pada lokasi
- c. Sebagian besar pencatatan keuangan dilakukan secara sederhana
- d. Jiwa Wirausaha belum memadai di sumber daya manusia dalam usaha yang didirikannya.

- e. Sebagian besar belum pernah menggunakan bank, namun ada juga yang pernah menggunakan lembaga non-bank.
- f. Persyaratan dalam perizinan yang sah misalnya NPWP sebagian besar belum mengetahuinya.

4. Kontribusi Nyata UMKM dalam Meningkatkan Perekonomian

UMKM sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia harus sangat serius dan siap berperan sebagai penyelamat pembangunan keuangan masyarakat. Sesudah memahami apa itu manajemen keuangan, bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan dan apa itu laporan keuangan diharapkan UMKM akan memaksimalkan potensinya untuk meningkatkan hasil dan kemajuan UMKM. Diharapkan dengan pemberdayaan UMKM, UMKM dapat meningkatkan taraf hidup dan kemajuannya dari tidak berdaya menjadi mampu. Simbol ekonomi kerakyatan yang memungkinkan UMKM mandiri di bidang keuangan.

Organisasi keuangan yang baik dapat membantu UMKM dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu sambil memperluas sumber daya dengan menambah kemajuan bisnis. Untuk hasil peningkatan, kesejahteraan merupakan faktor yang signifikan, terutama bagi pekerja bantuan pemerintah individu. Agar dapat mengelola keuangannya secara efektif, individu yang sehat akan lebih produktif, berpenghasilan lebih banyak, mendapatkan pelatihan yang lebih baik, dan menikmati berbagai manfaat. UMKM dapat berkontribusi dalam pencapaian salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, meningkatkan kesehatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan membantu pengenalan produk lokal.

Daftar Pustaka

- Afriany, A. N., Suhartini, Y., Ardiyanto, F., Basri, A. I., & Ningrum, N. R. (2019). Pelatihan dan Pembinaan Penerapan Ilmu Manajemen Keuangan, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Manajemen Pemasaran dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Klaten Selatan. *Abdimas Nusantara*, 1(1), 1–8. <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/abdimasnusantara/article/view/415>
- Alasan Pentingnya Manajemen Keuangan untuk Bisnis <https://inkumkm.id/news/detail/12962/4-alasan-pentingnya-manajemen-keuangan-untuk-bisnis>
- Angrayni, D., Sudi, P., Fakultas, M., Dan, E., & Bhayangkara, U. (2022). Analisis praktek manajemen keuangan pada umkm sektor perdagangan di kecamatan tandes kota surabaya. *KESEHATAN TAMBUSAI*, 1–10.
- Author. (2021). Buku Pintar Finansial : Pengelolaan Keuangan untuk UMKM. In *Otoritas Jasa Keuangan*. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/DetailMateri/546>
- Eva Nur Agustin¹, Rossa Shafira Nur Sabrina², Shifa Aulia Maghfiroh³, M. E. S. (2022). ANALISIS PENGARUH UMKM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN DAN DERAJAT KESEHATAN DI INDONESIA. *KESEHATAN TAMBUSAI*, 3, 628–637. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan_di_Indonesia#:~:text=Saat ini%2C penerapan kesehatan di Indonesia diatur dalam,orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis%22](https://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan_di_Indonesia#:~:text=Saat%20penerapan%20kesehatan%20di%20Indonesia%20diatur%20dalam%20orang%20untuk%20hidup%20produktif%20secara%20sosial%20dan%20ekonomis%20).
- Hedy Desire Rumambi, Revleen Mariana Kaparang, Jerry Sonny Lintong, J. Nu. T. (2019). *Penyusunan Laporan Keuangan UMKM* (J. N. Tangon (ed.); Cetakan Bu). Polimdo Press.
- Julita, J. (2020). Pemberdayaan masyarakat untuk umkm melalui pelatihan penyusunan proposal usaha dan analisis laporan keuangan UMKM di Kabupaten Kampar. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 2(2), 106–111. <https://doi.org/10.31258/unricsce.2.106-111>

- PHP2D, T. (2021). *Pembukuan Keuangan bagi UMKM*. <http://repository.unpkediri.ac.id/id/eprint/4365>
- Putri, D. A. (2020). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Manajemen Keuangan Pelaku UMKM. *Jurnal Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(4), 62–73. <https://ojs.sties.ac.id/index.php/prisma/article/view/655>
- Reni Fatwitawati S.E., M. A. (2018). Pengelolaan Keuangan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kelurahan Airputih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Sembadha: Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 01(01), 225–229. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/sembadha/article/view/376>

Fenomena *Ghost Kitchen* di Era Pandemi sebagai Upaya Pemberdayaan UMKM Kuliner

Fauzie Senoaji

Popularitas *Ghost Kitchen* di Tengah Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 telah mengubah tidak hanya perilaku kesehatan, tetapi juga pola konsumsi produk dan jasa di pasaran. Seiring dengan munculnya kebiasaan baru akibat Covid-19, masyarakat mulai beralih dari pembelian langsung atau tatap muka menjadi lebih sering melakukan pembelian secara *online* melalui aplikasi. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang mendorong bekerja dari rumah (*Work from Home*) untuk mengurangi interaksi sosial. Langkah-langkah pembatasan sosial seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga secara langsung mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Contohnya, pusat perbelanjaan dilarang beroperasi dan tempat makan hanya menerima layanan pengiriman atau *takeaway*.

Perubahan kebijakan pemerintah tersebut telah menciptakan kebiasaan baru dalam masyarakat, yang sering disebut sebagai era “*next normal*”. Di era ini, masyarakat lebih aktif menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Survei yang dilakukan oleh lembaga McKensey & Company pada tahun 2020 menunjukkan pergantian perilaku konsumen, tercantum kecenderungan buat melaksanakan transaksi jual- beli secara digital, kehabisan loyalitas terhadap merek unggulan, kecenderungan dalam memilah produk yang nampak higienis. Kecenderungan yang berbeda ini sudah mendesak timbulnya kebiasaan baru, paling utama dalam perihal penciptaan hidangan, dengan timbulnya *ghost kitchen* ataupun *cloud kitchen* selaku salah satu fenomena yang menjadi diketahui.

Dalam situasi pandemi yang berkelanjutan, banyak pengusaha UMKM khususnya dalam bidang kuliner mulai mempertanyakan apakah

bangunan restoran masih diperlukan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya orang yang lebih sering tinggal di rumah dan memesan makanan melalui aplikasi pesan-antar. Saat ini, komponen-komponen seperti area parkir, meja, konter, dan fasilitas restoran lainnya tidak lagi dianggap penting. Selain itu, memulai bisnis di bidang makanan dan minuman tanpa memiliki bangunan fisik restoran dapat menghemat modal yang signifikan bagi para pengusaha. Mereka hanya perlu menginvestasikan sekitar Rp35 juta untuk memulai dapur satelit, sedangkan memulai usaha F&B dengan bangunan fisik memerlukan modal hingga ratusan juta rupiah.

Perbedaan modal yang signifikan tersebut terjadi karena pengusaha tidak lagi perlu mengeluarkan biaya untuk pelayanan pelanggan (*Front of House*), sehingga dapat lebih fokus pada produk makanan itu sendiri. Beberapa perbedaan utama lainnya meliputi lokasi, biaya properti, biaya staf, biaya operasional, biaya pengaturan dapur, dan pemasaran. Karena alasan ini, konsep dapur *cloud kitchen* dan *ghost kitchen* semakin populer seiring berjalannya waktu. Konsep dapur ini memberikan risiko yang lebih rendah dan memungkinkan para pengusaha untuk menguji dan memvalidasi ide bisnis mereka.

Mengeksplorasi *Ghost Kitchen*

a. *Ghost kitchen*

Ghost kitchen, yang juga dikenal sebagai *dark kitchen*, dapur virtual, dapur bayangan, atau *kitchen commissary*, adalah fasilitas persiapan makanan yang mengkhususkan diri dalam menyiapkan hidangan untuk pengiriman pesanan. Secara sederhana, *ghost kitchen* dapat dianggap sebagai restoran tanpa area makan di tempat atau dapur komersial yang dioptimalkan untuk memenuhi pesanan pengiriman. Penggunaan *ghost kitchen* bisa untuk meluncurkan restoran yang sepenuhnya baru atau memperluas jangkauan restoran yang sudah ada dengan membuat “*etalase virtual*” baru di berbagai lokasi. Restoran dengan satu lokasi fisik biasanya hanya melayani pengiriman dalam radius 5 mil dari restoran. Namun, dengan mendirikan *ghost kitchen* di luar radius 5 mil tersebut, restoran dapat mulai mengirimkan pesanan kepada pelanggan baru. Lebih jauh lagi, banyak restoran mendirikan *ghost kitchen* di daerah dengan volume pesanan yang tinggi, karena permintaan pengiriman yang signifikan akan

menghasilkan peningkatan jangkauan, pesanan, dan penjualan (HUBSTER, 2022).



Berkaca pada data dari Hootsuite, pada tahun 2021, sebanyak 74, 4% pengguna internet berusia 16- 64 tahun di Indonesia memakai layanan pesan antar santapan juga minuman. Persentase pembelian makanan ini dapat dibandingkan dengan layanan lain seperti ojek *online*, pembelian konten digital, dan pembayaran seluler, dan terbukti bahwa pembelian

makanan mendominasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang Indonesia lebih memilih layanan *online* untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman mereka. Jumlah pengguna layanan penyedia makanan *online* mencapai 37,34 juta jiwa, dan valuasi pasar layanan makanan *online* diperkirakan mencapai \$1,95 miliar, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 35,2% (We Are Social, 2021).

Pasar *ghost kitchen* atau *cloud kitchen* mengalami perkembangan yang mengejutkan mengingat tren tersebut. Sistem ini memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memilih pesanan dengan melihat rating dari pelanggan lain. Selain itu, *ghost kitchen* atau *cloud kitchen* juga memberikan keuntungan bagi penyedia jasa karena tidak memerlukan bangunan fisik yang besar dan tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Namun, *ghost kitchen* atau *cloud kitchen* juga menghadapi kritik karena menghilangkan aspek autentisitas restoran (Snyder, 2020). Sebuah penelitian menunjukkan bahwa 72% pelanggan lebih memilih memesan makanan secara langsung, yang bertentangan dengan prinsip *ghost kitchen* (Anon, 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa ada masyarakat yang sulit menerima dan memahami konsep *cloud kitchen*.

Ghost kitchen atau *Cloud kitchen* berbeda dengan restoran konvensional. Keunikan *virtual kitchen* terletak pada menu khusus yang ditawarkan melalui aplikasi pengiriman. Perkembangan *ghost kitchen* didukung oleh perkembangan aplikasi transportasi *online* dan layanan pengiriman makanan. Adanya layanan pengiriman makanan ini memudahkan pengembangan *ghost kitchen*, karena bisnis ini pada dasarnya menjual produknya secara *online* atau melalui aplikasi penghantaran. Di Indonesia, banyak pebisnis *ghost kitchen* menghasilkan makanan dari dapur sendiri.

b. UMKM & Ghost Kitchen

UMKM merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah mempunyai peran utama dalam pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja yang tinggi (Suyanto & Kurniawan, 2019). Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Usaha Menengah, saat ini terdapat 64,2 juta UMKM dan 40% dari jumlah tersebut bergerak di sektor makanan dan minuman (Saturwa *et al.*, 2021). Total kontribusi UMKM terhadap produk

domestik bruto (PDB) adalah 61,07% atau sekitar Rp8.573,89 triliun (Bali Post, 2021), dan dapat menyerap 80% tenaga kerja. Secara keseluruhan, UMKM memiliki permasalahan mendasar seperti kurangnya modal, keterampilan pegawai yang sangat minim, dan kurangnya pengetahuan tentang teknologi (Maksum *et al.*, 2020).

Selama pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia memberikan bantuan untuk mendukung operasional UMKM agar tetap bertahan (Tambunan, 2020). Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia adalah salah satu sektor yang terkena dampak pandemi Covid-19. Selama periode Pembatasan Sosial Berskala Besar, banyak UMKM terpaksa harus menutup toko *offline* mereka. Kondisi ini juga yang membedakan krisis tahun ini dari krisis sebelumnya. Jika pada tahun 1998 dan 2008, krisis sebagian besar dialami oleh sektor keuangan dan perusahaan, kali ini krisis melanda semua sektor termasuk UMKM, yang mendukung sekitar 60% dari PDB Indonesia.

Sebuah survei yang dilakukan oleh perusahaan logistik Paxel dengan judul “*Paxel Buy & Send Insight II*” mengungkapkan bahwa selama periode Pembatasan Sosial Berskala Besar, 39,99% UKM mengurangi stok barang dagangan mereka dan 16,1% mengurangi jumlah karyawan akibat penutupan toko *offline* (Kolhekar, 2020). Selama pandemi COVID-19, UMKM harus melakukan penyesuaian dalam bisnis mereka, sehingga mereka masih dapat memenuhi kebutuhan konsumen tanpa melanggar regulasi pemerintah.

Strategi yang tepat diperlukan untuk memulihkan dan mengembalikan ekonomi masyarakat, terutama bisnis UMKM kuliner. Salah satunya adalah pengembangan sistem *ghost kitchen* atau *cloud kitchen*. Konsep dari *cloud kitchens* saat ini banyak diminati oleh para pelaku bisnis kuliner dunia dan sudah mulai merambah di Indonesia. Umumnya bisnis di bidang kuliner berupa restoran konvensional akan membutuhkan modal yang tidak sedikit bahan makanan, tetapi juga penyediaan toko fisik (Lapegna, P., & Lapegna, 2016).

Restoran dengan konsep konvensional akan membutuhkan berbagai tujuan. Contohnya adalah pelayan, gedung, meja dan kursi untuk di tempat bersantap, dilengkapi dengan dekorasi berkonsep untuk menarik

pelanggan. Selain itu, lokasi restoran juga harus diperhatikan strategis sehingga mudah menarik pelanggan (Oracle, 2022).

Konsep dapur kolektif atau *ghost kitchen* menawarkan faedah yang lumayan tinggi bagi UMKM. Konsep yang mulai dikembangkan oleh penyedia jasa pengiriman, seperti *GoFood* dan *Grabkitchen*, tidak hanya menambah kesempatan untuk memperluas jangkauan pembeli tetapi juga memperluas pasar kesempatan untuk memaksimalkan keuntungan. Konsep *ghost kitchen* sebenarnya mirip dengan *food court*, namun bedanya hanya melayani pesan antar makanan. Sebuah bisnis atau usaha berjalan sukses tanpa mementingkan kepentingan lokasi, suasana atau infrastruktur. Apalagi *ghost kitchen* hadir secara *online*, menerima pesanan makanan secara *online* dan menyampaikan makanan di depan pintu pelanggan.

Data yang dirilis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyebutkan, UMKM terkoneksi melalui sistem digital masih relatif kecil yaitu hanya 13 persen atau sekitar 8 juta pemilik UMKM. Sementara itu 87 persen UMKM masih mengandalkan *offline*. Beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut (Fridayani *et al.*, 2021):

- 1) Paparan melalui berbagai *platform* penjualan dan media sosial, UKM Kuliner disarankan untuk mendaftar berbagai platform penjualan di bidang *e-commerce*, jasa pengiriman, atau media sosial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran merek dan eksposur sebanyak mungkin.
- 2) Mengoptimalkan profil pada aplikasi jasa pengiriman, langkah ini dijamin akan meningkatkan *exposure* pada halaman utama setiap aplikasi jasa pengiriman. Sebaiknya gunakan diskon untuk 3-5 *best seller* menu dengan kualitas foto tinggi.
- 3) Menaikkan rating restoran pada aplikasi *delivery service*, untuk lebih meningkatkan konversi, restoran tersebut disarankan untuk memiliki rating di atas 4,5 bintang guna membangun kepercayaan konsumen terhadap kualitas makanan dan minuman tersedia.
- 4) Inisiatif untuk mengoptimalkan produktivitas dan efisiensi dapur, langkah ini juga merupakan peluang yang baik untuk kuliner pengusaha bisnis yang ingin mencoba ide atau konsep baru dengan risiko rendah.

- 5) Retensi pelanggan atau umpan balik pelanggan. Akhirnya, restoran harus memastikan kualitas produk mereka meninggalkan kesan yang baik ketika konsumen mencoba makanan dan minuman mereka. Ini termasuk rasa, porsi, dan kualitas dibandingkan dengan titik harga. Ingat, persiapan makanan untuk pesan antar berbeda dengan makan di tempat, memasak, dan durasi pengemasan harus disesuaikan dengan jasa pengiriman

c. Kelebihan *Ghost Kitchen*

Ghost kitchen memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan di antaranya adalah (Amandani, 2022):

- 1) Meminimalkan pengeluaran dan menyediakan fasilitas yang lengkap. Keuntungan utama ketika memilih *ghost kitchen* dalam bisnis kuliner. *ghost kitchen* juga dapat mengurangi biaya operasional. Hal ini karena banyak elemen yang tidak diperlukan dalam pengoperasian *ghost kitchen*, seperti dekorasi tempat makan, biaya listrik, pembelian tisu, dan biaya pelayan.
- 2) Kecil Risiko. Penggunaan *ghost kitchen*, penggunaan *ghost kitchen*, potensi kerugian dapat diminimalkan. Ini dikarenakan modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis *ghost kitchen* relatif kecil. Konsep ini sebagai kesempatan untuk belajar dan mencoba berbagai hal sebelum memutuskan untuk membuka restoran sendiri.
- 3) Memulai bisnis kuliner dengan konsep *ghost kitchen*, diperlukan dana yang relatif terjangkau. Keuntungan dari konsep ini adalah UMKM Kuliner tidak perlu membuka restoran atau toko fisik di banyak lokasi, melainkan hanya perlu memiliki satu dapur di setiap wilayah untuk melayani permintaan pelanggan. Kelebihannya adalah UMKM dapat dengan mudah melakukan ekspansi dengan membuka cabang baru.

d. Kekurangan *Ghost Kitchen*

- 1) *Tergantung Aplikasi*. Tidak dapat disangkal bahwa dalam menjalankan bisnis *ghost kitchen*, aplikasi pesan antar menjadi sarana utama untuk menjual produk kuliner UMKM. Oleh karena

itu, penting bagi UMKM untuk memahami bagaimana setiap *platform* bekerja agar dapat meningkatkan visibilitas merek Anda.

- 2) Salah satu kekurangan lain dalam bisnis *ghost kitchen* adalah persaingan dengan para pelaku bisnis kuliner lainnya di pasar digital, yang merupakan tantangan yang signifikan. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang efektif sangat diperlukan untuk dapat bersaing dan meraih pangsa pasar. Selain itu, Anda perlu mengembangkan ide-ide kreatif agar merek Anda muncul di posisi teratas dalam hasil pencarian.

Peluang Bisnis *Ghost Kitchen*

Model bisnis *ghost kitchen* saat ini menjanjikan, terutama mengingat karakteristik masyarakat saat ini di Indonesia. Masyarakat cenderung menyukai kemudahan dan praktis dalam segala hal. Banyak orang merasa tidak ingin repot mempersiapkan makanan sendiri atau pergi keluar rumah untuk membeli makanan. Oleh karena itu, mereka memilih untuk memesan makanan melalui layanan pesan antar santapan *online* sebab keterbatasan waktu atau alasan lainnya. Fenomena ini menciptakan peluang penciptaan pembelian baru bagi pengusaha makanan untuk memanfaatkan wilayah pemasaran yang lebih luas dengan memanfaatkan berbagai program yang ditawarkan oleh aplikasi pesan *online*, dengan tujuan untuk mengoptimalkan keuntungan.

Daftar Pustaka

- Amandani, S. (2022). *Bisnis Kuliner dengan Konsep Ghost Kitchen, Tinjau Kelebihan dan Kekurangannya!* Kawn.Co.Id. <https://kawn.co.id/bisnis-kuliner-dengan-konsep-ghost-kitchen-tinjau-kelebihan-dan-kekurangannya/>
- Anon. (2021). *National Restaurant Association releases 2021 State of the Restaurant Industry Report*. <https://restaurant.org/news/pressroom/press-releases/2021-state-of-the-restaurant-industry-report>
- Bali Post. (2021). *Kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61,07%. Diambil Kembali Dari Balipost*. <https://www.balipost.com/news/2021/05/05/190313/Kontribusi-UMKM-Terhadap-PDB-sebesar...html>
- Fridayani, H. D., Iqbal, M., & Atmojo, M. E. (2021). Cloud Kitchen: Strategy for Indonesian Culinary Business (SMEs) Growth During and Post Pandemic Era. *Management Research and Behavior Journal*, 1(2), 41–46.
- HUBSTER. (2022). *Ghost Kitchen: Pengertian, Jenis, dan Keuntungannya*. <https://www.hubster.co.id/blog/apa-itu-ghost-kitchen>
- Kolhekar, B. H. (2020). *New Business Model with the help of Blockchain for Food Delivery Apps*. May 2019.
- Lapegna, P., & Lapegna, P. (2016). *The Dark Side of the Boom (Dark kitchens, delivery and maximising restaurant profits)*. *Soybeans and Power*, 24–51. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190215132.003.0002%0D>
- Maksum, I. R., Sri Rahayu, A. Y., & Kusumawardhani, D. (2020). A social enterprise approach to empowering micro, small and medium enterprises (SMEs) in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(3). <https://doi.org/10.3390/JOITMC6030050>
- Oracle. (2022). *Essential Guide to Cloud Kitchens. Considerations for Restaurateurs*.

- Saturwa, H. N., Suharno, S., & Ahmad, A. A. (2021). The impact of Covid-19 pandemic on MSMEs. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 24(1), 65–82. <https://doi.org/10.24914/jeb.v24i1.3905>
- Snyder, B. G. (2020). *Rise of the ghost kitchens: How virtual restaurants are reshaping L.A.'s dining economy*. Latimes.Com. <https://www.latimes.com/food/story/2020-09-24/rise-of-the-ghost-kitchens>
- Suyanto, S., & Kurniawan, T. A. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Penggunaan FinTech pada UMKM Dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16(1). <https://doi.org/10.31316/akmenika.v16i1.166>
- Tambunan, T. (2020). MSMEs IN TIMES OF CRISIS. EVIDENCE FROM INDONESIA. *Journal of Developing Economies*, 5(2), 91. <https://doi.org/10.20473/jde.v5i2.20848>
- We Are Social. (2021). Digital 2021. In *Global Digital Insights*.

Peran BUMDES

dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan

Udin Saripudin

1. Mengenal BUMDes

a. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan kesepakatan bersama dalam musyawarah desa, dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Anom, 2015). BUMDes didirikan dan dibangun atas prakarsa dan peran serta masyarakat, dikelola secara mandiri dan profesional, dengan seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan aset desa (Karyaningtyas, 2018).

BUMDes merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, jadi BUMDes bukanlah model bisnis yang dikuasai oleh kelompok atau kepentingan tertentu di tingkat desa. Artinya, BUMDes diwujudkan melalui mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan melahirkan aturan yang mengikat semua anggota (*one for all*).

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan mengenai pendirian BUMDes mengandung beberapa pemahaman, antara lain (Anom, 2015):

- 1) BUMDes merupakan strategi pemerintah pusat untuk menghadirkan lembaga negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di tingkat desa.
- 2) BUMDes merupakan strategi untuk membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa bersama.
- 3) BUMDes merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia di pedesaan.

- 4) BUMDes adalah upaya mewujudkan kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha strategis desa secara kolektif.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 Ayat 1 menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Artinya pendirian BUMDes harus didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes dibangun atas prakarsa masyarakat berdasarkan prinsip gotong royong, partisipatif, transparan, emansipatoris, akuntabel, dan berkelanjutan dengan basis anggota dan mekanisme swadaya. Dari semua asas tersebut, yang terpenting adalah pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara transparan, profesional dan mandiri (Ridzal dan Hasan, 2020).

BUMDes merupakan pilar ekonomi desa yang dapat menjalankan peran sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berfokus pada kepentingan masyarakat desa melalui kontribusinya dengan memberikan berbagai bentuk pelayanan sosial bagi masyarakat desa. BUMDes sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menawarkan sumber daya dan potensi ekonomi lokal kepada pasar sehingga mendapatkan pendapatan yang besar dan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli desa (Wijaya, 2018).

b. Dasar Hukum BUMDes

Dasar hukum pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 87, 88, dan 90.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213. Undang-undang ini merupakan dasar hukum pertama yang mendasari lahirnya peraturan daerah tentang pedoman pendirian dan pengelolaan BUMDes.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan ini pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ketentuan mengenai BUMDes diatur dalam Pasal 14 Ayat (1), Pasal

78 Ayat (1), Pasal 79 Ayat (1, 2, dan 3), Pasal 80 Ayat (1 dan 2), dan Pasal 81 Ayat (1 dan 2).

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 6) Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Ridwan, 2013).

c. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDes

Desa menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya mendorong ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Maksud dan tujuan pembentukan BUMDes adalah sebagai berikut (Purnomo, 2004):

Maksud pembentukan BUMDes di antaranya:

- 1) Menumbuhkembangkan perekonomian desa.
- 2) Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa.
- 3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa.
- 4) Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.

Adapun tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain:

- 1) Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- 2) Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa.
- 3) Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.
- 4) Meningkatkan kreativitas berwirausaha Desa masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

2. BUMDes sebagai Penggerak Utama Perekonomian Desa

Tingginya ketidakpastian kondisi perekonomian global mendorong pemerintah untuk memaksimalkan potensi dan sumber-sumber pertumbuhan domestik. Salah satu potensi lokal yang dapat dimaksimalkan adalah desa. Namun demikian, diperlukan upaya yang serius untuk

memaksimalkan potensi dan peran desa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Beberapa hal kunci dapat ditempuh untuk mengoptimalkan peran desa, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, produktivitas, dan nilai tambah ekonomi pedesaan. Jika semua itu dilakukan dengan baik, tentunya akan berdampak pada peningkatan pendapatan, daya beli, dan konsumsi masyarakat. Meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan diharapkan dapat mengimbangi perlambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh faktor global.

Salah satu potensi besar desa yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa adalah adanya dana desa. Dengan menggunakan indikator alokasi dana desa pada 2019, setidaknya akan ada sekitar Rp72 triliun uang beredar di seluruh desa di Indonesia. Jumlah ini cukup untuk menggerakkan potensi ekonomi pedesaan. Dalam sebuah simulasi sederhana yang dilakukan Kementerian Desa dan PDTT, jika diasumsikan dari jumlah desa yang ada sebanyak 74.910 Desa, terbentuk 70.000 BUMDes, dan setiap BUMDes diasumsikan memperoleh keuntungan minimal Rp1 miliar/ tahun, maka nilai perputaran uang yang tercipta dari keuntungan tersebut mencapai Rp70 triliun/ tahun. Namun kenyataannya di lapangan masih membutuhkan kerja keras dari berbagai pihak untuk mewujudkannya. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Desa dan PDT, saat ini baru 45.944 BUMDes yang telah tervalidasi di *website* Kemendesa dan PDT, yang aktif hanya 36.607 BUMDes (LAN RI, 2019).

Dalam konteks ini, BUMDes memiliki peran yang sangat strategis dan penting sebagai instrumen penggerak perekonomian desa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan perannya, keempat kebijakan tersebut di atas perlu dijalankan. Dengan peningkatan keempat hal tersebut diharapkan BUMDes dapat menjadi unit usaha desa yang sehat (finansial), berdaya saing dan inovatif.



Gambar 1 Upaya Mewujudkan Peran BUMDes sebagai Penggerak Perekonomian Desa

Menerapkan keempat kebijakan tersebut bukanlah hal yang mudah, terdapat beberapa upaya yang harus dilakukan guna mengoptimalkan peran BUMDes sebagai penggerak roda perekonomian desa (LAN RI, 2019):

- 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola BUMDes
Masalah klasik di desa adalah terbatasnya kemampuan SDM untuk mengelola BUMDes secara akuntabel dan berkinerja baik. Kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan meliputi keterampilan berwirausaha serta keahlian untuk melakukan pencatatan dan administrasi usaha sesuai dengan standar akuntansi, misalnya dalam menyusun laporan keuangan dan laporan hasil usaha.
- 2) Peningkatan Tata Kelola BUMDes
Informasi tentang BUMDes jarang terekspos ke khalayak luas, informasinya masih terbatas pada kelompok masyarakat tertentu, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan perangkat desa. Bahkan lembaga lain di desa seperti LPMD dan BPD belum mendapatkan informasi yang memadai mengenai pengelolaan BUMDes.
Perencanaan keuangan, pengelolaan dan pelaporan kegiatan belum dilakukan secara optimal, masih ditemukan pencatatan dan

pelaporan keuangan secara manual, proyeksi dan analisis laporan keuangan yang belum dilakukan sesuai standar akuntansi keuangan. Demikian pula, analisis kelayakan usaha sebagai dasar penentuan bidang usaha tidak dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang berlaku umum.

3) **Meningkatkan Skala Usaha BUMDes dengan Model Bisnis Pengelolaan Produk Desa Berbasis Marketplace**

Diduga hampir sebagian besar BUMDes memiliki indikasi ketidaksesuaian jenis usaha yang dijalankan dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMDes umumnya pada bidang persewaan, sedangkan hasil survei kebutuhan masyarakat desa cenderung ke arah pembiayaan/akses permodalan dan perdagangan yang mudah dan murah. Di luar itu, untuk menggerakkan roda perekonomian desa, BUMDes harus mampu meningkatkan dan mengembangkan skala usahanya melalui berbagai inovasi.

4) **Penguatan Kelembagaan dan Kerja sama BUMDes dengan Pihak Ketiga**

Masalah lainnya adalah belum terjalinnya benang merah yang kuat antara RPJMN, RPJMD dan RPJM Desa dalam pengembangan BUMDes. Perencanaan pembangunan desa yang menonjolkan peran strategis BUMDes dalam menggerakkan perekonomian desa perlu lebih diselaraskan dengan pencapaian target serta indikator kinerja RPJMD dan RPJMN. Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak juga harus terus ditingkatkan guna mewujudkan BUMDes yang maju, kuat dan berdaya saing.

3. Peran BUMDes dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa

Desa memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional, kemandirian desa merupakan salah satu kekuatan dalam membangun desa untuk mendorong pembangunan ekonomi desa dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerah. Pertumbuhan ekonomi pedesaan diharapkan dapat meminimalisir ketergantungan desa

terhadap kota serta memperkuat peran desa sebagai sentra produksi dan kebutuhan sumber daya pembangunan.

Menjalin relasi antar desa dan kota merupakan salah satu upaya untuk membangun pedesaan, di mana peran desa diperkuat sebagai sentra produksi dan sumber daya. Relasi ini dapat meminimalisir ketergantungan pedesaan terhadap perkotaan dan meminimalisir laju urbanisasi penduduk dari desa ke kota. Pola ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi desa serta pemerataan ekonomi antara desa dan kota. Dalam hubungan yang lebih intensif, relasi desa dan kota dapat berupa interaksi spasial antar subsistem rantai agribisnis/agroindustri (Kusuma dan Ma'rif, 2015).

Beberapa pendekatan yang biasa digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi di pedesaan antara lain; pendapatan desa per kapita, pendapatan masyarakat dan diversifikasi ekonomi (Raharjo, 2013).



Gambar 2 Strategi untuk Mengukur Perkembangan Ekonomi Wilayah Pedesaan

Pendapatan per kapita desa merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat proporsi pendapatan desa terhadap jumlah penduduk desa tersebut. Pendapatan desa menggunakan prinsip produk domestik bruto yang dihitung dengan jumlah produksi. Total jumlah produksi dikonversikan ke dalam nilai rupiah total dan dibagi dengan total pendapatan.

Pendapatan masyarakat berkaitan dengan ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi

pedesaan harus diikuti dengan pemerataan pendapatan masyarakat. Dalam situasi ekstrem di mana pendapatan didistribusikan secara merata, 40 persen populasi terbawah akan menerima 40 persen pendapatan, dan 20 persen teratas akan menerima 40 persen dari total pendapatan.

Diversifikasi ekonomi atau perubahan struktur ekonomi pedesaan dilihat berdasarkan perubahan struktur ekonomi pedesaan. Dalam beberapa dekade terakhir, perluasan wilayah perkotaan dan terbukanya akses ke pedesaan telah mengubah struktur ekonomi pedesaan. Mereka tidak lagi menitikberatkan pada sektor pertanian. Hal ini terlihat pada daerah pedesaan yang bercirikan perkotaan, biasa disebut desa kota. Diversifikasi ekonomi dapat dilihat berdasarkan perubahan struktur mata pencaharian masyarakat (Chikmawati, 2019).

Upaya untuk meningkatkan perekonomian pedesaan dapat dilakukan dengan beberapa strategi pembangunan karakter yaitu (Azizah, 2017):

- 1) Memiliki kemampuan memecahkan berbagai masalah dalam perekonomian pedesaan
- 2) Memaksimalkan penyelesaian ekonomi tidak harus melakukan pinjaman kepada pihak eksternal untuk menyelesaikan masalah ekonomi
- 3) Memanfaatkan hasil sumber daya pembangunan yang ada dengan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pelaksanaannya
- 4) Membuat pembangunan berkelanjutan untuk masyarakat yang lebih baik di masa depan.

Semua peran tersebut dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes yang sehat dan kuat merupakan pilar pembangunan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai pusat perekonomian desa BUMDes diharapkan dapat berperan dalam pelaksanaan pembangunan desa yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat desa, serta peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Pangkal dari masalah kesejahteraan masyarakat desa adalah rendahnya tingkat ekonomi yang berdampak pada rendahnya pendapatan masyarakat desa. Karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang komprehensif dengan mengintegrasikan sejumlah potensi yang dimiliki oleh desa. Kualitas SDM desa juga harus terus ditingkatkan melalui

berbagai program peningkatan kapasitas dan pendampingan, supaya terciptanya masyarakat desa yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.

BUMDes merupakan instrumen penggerak perekonomian masyarakat desa. BUMDes harus dipahami dan dijalankan secara optimal. BUMDes merupakan pusat kegiatan ekonomi warga desa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Keberadaan BUMDes harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat desa (Nursetiawan, 2018).

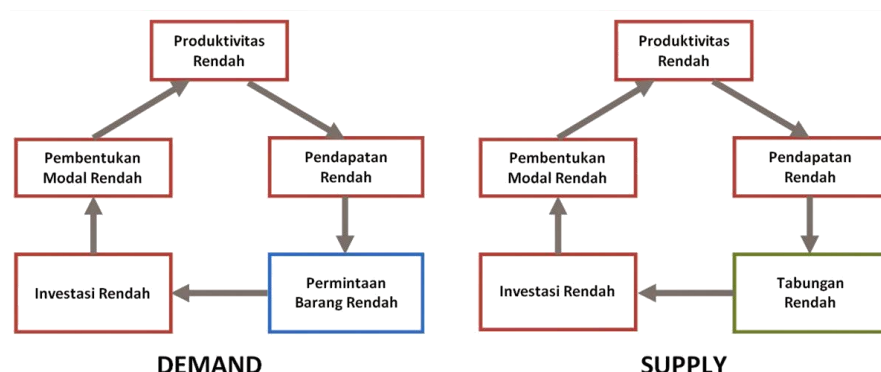
BUMDes diharapkan mampu menggerakkan perekonomian desa bagi masyarakat yang dikelola dengan baik dan profesional. Keberadaan BUMDes menjadi harapan masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan keuangan desa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

4. Peran BUMDes dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh banyak negara di belahan dunia, bukan hanya masalah bagi negara-negara berkembang tetapi juga merupakan masalah bagi negara-negara dengan perekonomian yang mapan (Priseptian dan Primandhana, 2022). Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah yang diperhatikan di tingkat dunia. Karena itu, pada tahun 1995 diselenggarakan Deklarasi dan Program Aksi Pembangunan Sosial (*World Summit in Social Development*) di Kopenhagen sebagai bentuk perhatian dari gerakan global terhadap kemiskinan.

Pada tahun 1952 Regnar Nurkse memperkenalkan teori lingkaran setan kemiskinan sebagai penyebab utama kemiskinan. Menurut Nurkse, “*a country is poor because it is poor*” (Nurkse, 1952), yang artinya “negara miskin itu terjadi karena benar-benar miskin”. Lingkaran setan kemiskinan menyiratkan serangkaian kekuatan saling berinteraksi membentuk sebuah siklus berbentuk lingkaran, serta menempatkan negara miskin dalam keadaan miskin. Lingkaran setan kemiskinan berawal dari rendahnya produktivitas di negara-negara terbelakang karena rendahnya kepemilikan modal, pasar yang tidak sempurna, serta keterbelakangan ekonomi (Sukarniati, Lubis, dan Zakiyyah, 2021). Rendahnya kepemilikan modal berdampak pada rendahnya produktivitas, sehingga berakibat pula

pada minimnya pendapatan yang diterima, rendahnya daya beli sehingga menyebabkan kemiskinan. Untuk mengurangi kemiskinan, kita harus mampu memotong lingkaran setan kemiskinan tersebut.



Gambar 3 Lingkaran Setan Kemiskinan (Nurkse, 1961)

Nurkse menyebutkan ada dua siklus perangkat kemiskinan yakni terkait penawaran dan permintaan. Sisi penawaran menjelaskan bahwa rendahnya tingkat pendapatan masyarakat disebabkan rendahnya tingkat produktivitas, akibatnya kemampuan masyarakat untuk menabung menjadi rendah. Rendahnya kemampuan menabung menyebabkan rendahnya tingkat pembentukan modal (investasi), yang mengakibatkan kekurangan modal dan berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas. Sementara dari sisi permintaan, stimulus untuk berinvestasi di negara miskin bisa lebih tinggi karena terbatasnya area pasar berbagai barang. Hal ini disebabkan pendapatan masyarakat yang sangat rendah sebagai akibat dari tingkat produktivitas yang rendah akibat terbatasnya tingkat pembentukan modal di masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan oleh kebutuhan akan lebih banyak insentif untuk berinvestasi (Nurkse, 1961).

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik pada September 2022 disebutkan persentase penduduk miskin Indonesia mencapai 9,57 persen atau sebanyak 26,36 juta jiwa. Di perkotaan, persentase penduduk miskin hanya 7,53 persen. Sedangkan di perdesaan mencapai 12,36 persen. Sedangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada Maret 2022 mencapai 2,04 persen atau mencakup 5,59 juta jiwa; dengan kata lain, sekitar 0,69

juta orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem tinggal di pedesaan (BPS, 2023).

Tingkat kemiskinan yang tinggi menentukan maju tidaknya perekonomian suatu daerah. Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika ada iklim ekonomi yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten tersebut memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan perekonomian suatu kabupaten dapat tercapai jika kabupaten tersebut memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi kabupaten dapat tercapai karena kontribusi ekonomi pedesaan yang kuat, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas. Ini akan memastikan tata pemerintahan yang baik dilaksanakan di semua tingkat dan keputusan pembangunan didasarkan pada kebutuhan nyata rakyat. Membangun perekonomian pedesaan merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.

BUMDes sebagai penggerak roda perekonomian desa memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat desa yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa. BUMDes bekerja dengan mewadahi seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dalam sebuah badan usaha yang dikelola secara profesional dengan tetap mengutamakan potensi desanya. Usaha yang dijalankan BUMDes bisa menjadi bisnis berbasis komunitas yang produktif, efektif, efisien dan berdaya saing. Ke depan BUMDes harus berfungsi sebagai lembaga yang mewadahi seluruh aktivitas ekonomi masyarakat, yang berkembang sesuai karakteristik desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa mempunyai peran yang sangat vital dalam upaya mengentaskan kemiskinan di tingkat desa. Contohnya apa yang dilakukan oleh beberapa BUMDes di Kabupaten Sumedang khususnya di Kecamatan Jatinangor, seperti di Desa Hegarmanah, Desa Cipacing dan Desa Sayang. BUMDes Desa Cipacing menjalin kerja sama dengan para pelaku industri rumahan; seperti senapan angin yang sudah terkenal hingga mancanegara, pemasarannya dilakukan sampai ke Pulau Bali. BUMDes berperan sebagai mediator pemasaran hasil kerajinan yang dihasilkan *home industry*.

Saat ini masyarakat di Kecamatan Jatinangor dapat memenuhi kebutuhan dasarnya bahkan dapat menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain Sumedang, terdapat sejumlah desa di Kabupaten Garut yang BUMDes-nya memiliki peran vital dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa, melalui beberapa program industri rumah tangga pengolahan makanan tradisional seperti dodol garut, cokodot, serta makanan tradisional lainnya seperti; kue balok dan burayot. Hal ini merupakan salah satu indikasi keberhasilan BUMDes dalam memberdayakan masyarakat desa.

Begitu pula dengan kesuksesan desa-desa lainnya dalam mengelola BUMDes. Seperti BUMDes Silatri Indah dari Desa Beran, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kegiatan usaha BUMDes tersebut di tahun 2019 menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp64 juta, sehingga BUMDes dapat menyumbang pendapatan asli desa (PADes) sebesar Rp32 juta. Contoh lain adalah BUMDes Sewon di Bantul, Yogyakarta yang pendapatannya di tahun 2019 mencapai 6,2 miliar, sehingga setiap tahunnya mampu menyumbang Rp1 miliar ke PADes. Berikutnya ada BUMDes Panggung Lestari yang memulai usahanya dari masalah sampah. Sekarang BUMDes Panggung Lestari sudah memiliki kegiatan usaha yang beragam antara lain minyak jelantah, pengelolaan minyak nyamplung, penjualan pupuk dan sayuran organik serta penjualan kerajinan dari PKK. Terakhir ada BUMDes Swadesa yang menjual kerajinan dari PKK di Desa Mataraman yang merupakan desa wisata dan telah menjual kuliner khas Jawa sejak tahun 2017, serta mengelola platform digital pasar desa.id, sebagai media berkomunikasi semua pedagang dan konsumen yang membutuhkan barang di pasar desa secara *online* (Mulianingsih, 2022).

5. BUMDes sebagai Pilar Pembangunan Desa

BUMDes merupakan salah satu pilar pembangunan desa yang dibentuk oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai roda utama penggerak perekonomian desa, BUMDes diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan mengentaskan kemiskinan. BUMDes sebagai roda penggerak perekonomian desa memiliki peran yang sangat strategis. Karenanya

upaya-upaya seperti; peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola BUMDes, peningkatan pengelolaan BUMDes, peningkatan skala usaha BUMDes, penguatan kelembagaan dan kerja sama BUMDes dengan *multi-stakeholder*, harus terus ditingkatkan. Dengan peningkatan keempat hal tersebut diharapkan BUMDes dapat menjadi unit usaha desa yang sehat (finansial), berdaya saing dan inovatif.

Perekonomian pedesaan mestinya dijalankan dengan mempertimbangkan potensi yang dimilikinya, mulai dari potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya infrastruktur, dan sumber daya struktural. Masalah kemiskinan pada masyarakat desa berawal dari tingkat ekonomi yang rendah. Hal itu harus diselesaikan dengan strategi pembangunan desa yang komprehensif dengan berbagai potensinya, juga didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang terus ditingkatkan dengan berbagai program pelatihan dan pendampingan. Tujuan yang diharapkan adalah terciptanya masyarakat desa yang mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berkualitas.

BUMDes sebagai penggerak roda perekonomian desa memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat desa yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa. BUMDes bekerja dengan mewadahi kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional namun tetap mengandalkan potensi asli desa. Ini bisa menjadi bisnis komunitas yang produktif dan efektif. Ke depan BUMDes harus berfungsi sebagai wadah seluruh aktivitas ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai dengan karakteristik desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Azizah, R. (2017). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Akses Usaha Masyarakat Di Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi Dan Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- BPS. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia September 2022. *Berita Resmi Statistik*, No. 07/01/Th.XXVI.
- Chikmawati, Z. (2019). Peran BUMDes dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui penguatan sumber daya manusia. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 101-113.
- Karyaningtyas, S. (2018). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Potensi Desa Dan Ekonomi Kreatif. *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, 1(1).
- Kusuma, A. M., & Ma'rif, S. (2015). Keterkaitan Antar Desa melalui Aktivitas Agribisnis dan Industri Perdesaan di Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 4(4), 440-456.
- LAN RI. (2019). Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. Policy Brief.
- Mulianingsih, S. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mendukung Pengentasan Kemiskinan Desa. *Jurnal Registratie*, 4(1), 10-21.
- Nurkse, R. (1952). Some International Aspects of the Problem of Economic Development. *The American economic review*, 42(2), 571-583.
- Nurkse, R. (1961). *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. Oxford: Oxford University Press.
- Nursetiawan, I. (2018). Strategi pengembangan desa mandiri melalui inovasi BUMDes. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 72-81.
- Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. In *Forum Ekonomi*, 24(1), 45-53.

- Purnomo. (2004). Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Makalah PMD Lombok Timur.
- Putra, A. S. (2015). Buku Saku 7 Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha. *Kolektif Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia*.
- Raharjo, A. (2013). Teori-teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah. *Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Ridlwani, Z. (2013). Payung hukum pembentukan BUMDes. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3).
- Ridzal, N. A., & Hasan, W. A. (2020). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 4(1), 98-106.
- Sukarniati, L., Lubis, F. R. A., & Zakiyyah, N. A. A. (2021). *Ekonomi Pembangunan (Teori dan Tantangan di Negara Berkembang)*. UAD PRESS.
- Wijaya, D. (2018). *Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. Penerbit Gava Media, Solusi Membangun Generasi Cerdas, Yogyakarta.
- Yustisia, T. V. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visimedia.

Implementasi Kebijakan Kemiskinan Struktural dan Ketidakadilan Gender dalam Feminisasi Kemiskinan

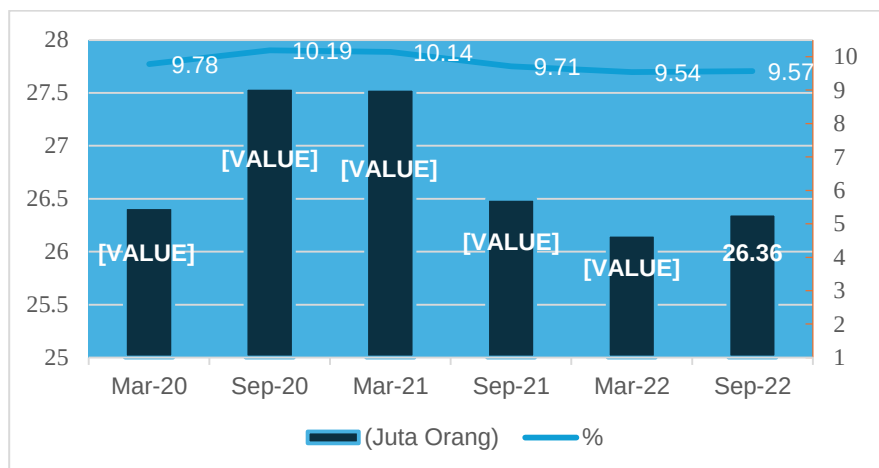
Heffi Christya Rahayu, Etty Puji Lestari, Tri Kurniawati Retnaningsih

1) Masalah Kemiskinan Struktural di Masyarakat

Semenjak kemunculan pandemi Covid-19, kondisi perekonomian Indonesia semakin diuji. Pada bulan September 2020, saat awal pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 10,19% atau sebanyak 27,55 juta orang dalam kategori penduduk miskin. Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding September 2019, tingkat penduduk miskin di Indonesia sebesar 9.22% atau 24.78 juta orang berada di garis kemiskinan.

Pada Maret 2021-2022 terjadi *trend* positif pada jumlah penduduk miskin di Indonesia yang menurun dengan persentase penduduk miskin pada saat itu masing-masing mencapai 10.14% dan 9.54%. Namun, *trend* positif itu dihentikan karena adanya kenaikan bahan bakar yang mendorong inflasi pada September 2022, sehingga kembali meningkatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia menjadi 9.57% atau sejumlah 26.36 juta orang (BPS, 2022).

Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2020-2022



Sumber: BPS, 2023

Sementara dilihat berdasarkan provinsi, terdapat beberapa provinsi yang menempati jumlah penduduk miskin tertinggi dengan persentase di atas 10%, seperti Provinsi Bengkulu 14.53%, Nusa Tenggara Barat 13.98%, Sumatera Selatan 11.37%, DI Yogyakarta 10.64%, Jambi 10.48%, Aceh 10.35%, dan Jawa Tengah 10.06% (BPS, 2022).

Seseorang dikatakan miskin apabila dirinya tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik dari segi kebutuhan pangan maupun kebutuhan non-pangan, seperti kebutuhan sandang, papan, kesehatan, dan Pendidikan (Ahmad *et al.*, 2015). Adanya kategori pendapatan yang cukup untuk terbebas dari kondisi kemiskinan, yakni apabila pendapatan yang diperoleh seseorang setiap bulannya berada di atas batas garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh bank dunia sebesar \$1.9 Dollar AS untuk setiap individu/bulan atau Rp855.000/bulan. Adapun garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS berdasarkan perkotaan dan perdesaan pada September 2022 masing-masing sebesar Rp552.349 dan Rp513.170 (BPS, 2022).

Kemiskinan menjadi salah satu beban permasalahan ekonomi yang dihadapi di setiap negara. Lemahnya kemampuan masyarakat untuk berusaha menghidupi keluarganya serta adanya keterbatasan masyarakat dalam menjangkau sarana dan prasarana mendorong masyarakat dalam

jurang kemiskinan (Zainy, 2010). Selain itu, keterbatasan modal juga dapat menghambat individu dalam memulai sebuah usaha untuk menikmati kehidupan yang layak. Sehingga, terjadi *gap* yang semakin jauh antara masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas dengan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Adapun 5 karakteristik yang identik dengan penduduk miskin sebagai berikut (Supriyatna, 1997).

1. Tidak memiliki sumber daya dalam rangka faktor produksi
2. Tidak memiliki modal untuk produksi
3. Rendahnya tingkat Pendidikan
4. Terbatasnya akses dalam menjangkau fasilitas
5. Kurangnya kemampuan dan keterampilan dalam berusaha

Menurut Harniati (2007), dimensi kemiskinan umumnya terbagi menjadi tiga, yaitu kemiskinan alami, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alami adalah kemiskinan yang disebabkan oleh sumber daya di sekitar tidak mendukung, sehingga kurangnya pemanfaatan sumber daya yang tersedia menghambat produktivitas individu.

Sementara itu, kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan karena adanya kebiasaan atau budaya masyarakat yang tetap berada di zona nyaman, artinya masyarakat tersebut tidak ada usaha untuk melakukan produktivitas walaupun kesempatan tersebut didukung oleh pihak lain yang ingin membantu meningkatkan kualitas hidupnya (Mashudi *et al.*, 2018). Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang dapat disebabkan oleh tatanan atau aturan sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat menyebabkan masyarakat tidak dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Yoserizal, 2018). Kondisi kemiskinan struktural yang berjalan secara vertikal menyebabkan kondisi kemiskinan berlangsung dalam jangka waktu panjang dan menurun ke generasi berikutnya. Struktur sosial yang berlangsung di masyarakat secara tidak baik dan adil selanjutnya dapat menimbulkan kekerasan yang terarah dan terstruktur pada korban, khususnya masyarakat miskin. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, budaya patriarki tidak dapat lepas dari permasalahan kemiskinan.

Jelasnya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dan yang lemah semakin lemah. Sifat lemah tersebut melekat pada identitas perempuan yang sering dianggap rendah dari kedudukan laki-laki.

Oleh karena itu, perlu adanya perubahan yang dapat memperbaiki kedudukan perempuan dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian perempuan, sehingga terdapat kesetaraan hak seperti kaum laki-laki.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tulisan ini akan menjelaskan tentang bagaimana ideologi patriarki yang timbul karena adanya masalah struktural pada masyarakat menciptakan feminisasi kemiskinan pada perempuan.

2) Fenomena Kemiskinan Struktural dan Feminisasi Kemiskinan

1. Kemiskinan Struktural

a. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimumnya dari sumber daya yang tersedia (Davis dan Sanchez, 2014). Lebih lanjutnya, kemiskinan mengindikasikan adanya kehilangan kesejahteraan yang terdiri dari banyak dimensi, seperti pendapatan yang rendah, ketidakmampuan memenuhi barang dan jasa dalam kebutuhan dasar, tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, sulitnya mendapatkan air bersih dan sanitasi yang baik, serta hilangnya kemampuan untuk mendapatkan kehidupan yang layak (Alex, 2019).

Menurut Friedman (1979), kemiskinan ialah ketidakseimbangan seseorang dalam menggabungkan basis kekuasaan sosial, yang mencakup modal produktivitas atas aset: tanah, rumah, peralatan, dan kesehatan. Kemudian sumber keuangan: pemasukan dan pengeluaran yang sesuai. Organisasi sosial politik yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama: koperasi. Informasi dan jaringan sosial untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, keterampilan yang berfungsi dalam memperluas kesempatan kerja.

b. Penyebab Kemiskinan

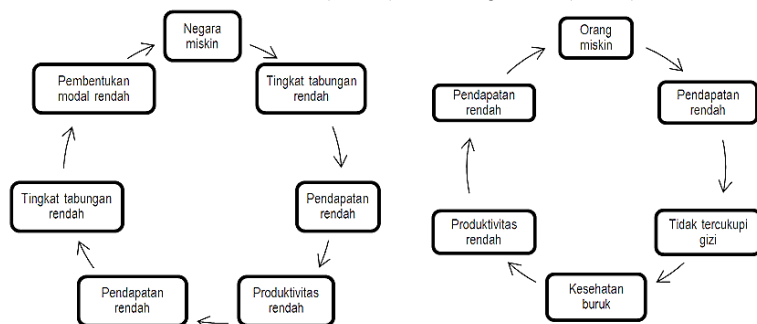
Menurut pendapat Blank (2010) sejalan dengan Jung dan Smith (2007), kemiskinan disebabkan oleh keteringgalan kondisi perekonomian seseorang, kurangnya peningkatan kualitas SDM, kapitalisme, kegagalan pasar, kekuatan sosial politik, pilihan dan

kebiasaan individu, ketergantungan ekonomi, dan jebakan kemiskinan.

Kemiskinan struktural dapat ditandai dengan adanya *gap* yang tinggi antara kaum borjuis yang hidup bermewahan dengan kaum proletar yang hidup dalam kemiskinan. Banyaknya kaum proletar yang mendominasi dalam suatu lingkungan tidak berarti banyak dalam memperbaiki taraf hidupnya. Sementara kaum borjuis yang menjadi minoritas pada umumnya dapat menguasai kehidupan bermasyarakat karena kemampuan yang dimiliki melebihi kaum proletar.

Menurut Nurkse dalam teori ekonom pembangunan klasik, dirinya menjelaskan bahwa suatu negara yang miskin akan berada di lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle poverty*) tanpa adanya peran tabungan dan pembentukan modal guna pembangunan ekonomi. Hal tersebut tidak hanya berlaku untuk kasus suatu negara, akan tetapi berlaku juga untuk kasus personal. Ketiadaan pembangunan di masa lampau akan menimbulkan hambatan pada pembangunan di masa depan sehingga menyebabkan kemiskinan (Nurkse (1953) dalam Damanhuri, 2010). Sementara, berdasarkan teori yang dikemukakan Myrdal (1970) dalam Damanhuri (2010), kemiskinan dapat diakibatkan karena tingkat pendidikan dan kesehatan khususnya gizi yang rendah, serta kebutuhan minimum sehari-hari tidak terpenuhi.

Lingkaran Setan Kemiskinan Menurut Nurkse (1953) dan Myrdal (1970)



Source: Damanhuri (2010) dalam Rizal, 2015

c. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural terjadi karena adanya keterbatasan individu dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, salah satunya disebabkan karena tempat tinggalnya berada di daerah terpencil, sehingga seseorang tidak dapat merasakan fasilitas ekonomi ataupun sarana prasarana umum. Dalam kata lain, adanya struktur sosial yang berlaku di masyarakat menyebabkan sebagian masyarakat tidak dapat menikmati sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan pendapatannya (Alfian *et al.*, 1980).

Adanya permasalahan struktural mengakibatkan ketidakmerataan akses sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat dalam hidup bersosial yang berhubungan dengan isu ras, etnis, dan gender. Adanya suatu kelompok masyarakat tertentu yang menguasai sumber daya ekonomi menjadikan relasi sosial dan ekonomi berakhir timpang (Santi, 2007). Dominansi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan berlanjut pada ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan esensialnya, mencakup berikut.

- 1) Kebutuhan subsistensi, yaitu kemiskinan dalam memenuhi kebutuhan dasar terkait sandang, pangan dan papan
- 2) Kebutuhan afeksi, yaitu kemiskinan yang terjadi akibat sikap atau pola yang terbentuk antara manusia dengan manusia atau manusia dengan alam yang tidak berkesinambungan
- 3) Kebutuhan keamanan, ketika tidak mendapatkan hak perlindungan yang cukup atas permasalahan kekerasan dan kebutuhan
- 4) Kebutuhan pemahaman, ketika seseorang tidak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pemahaman yang idealis
- 5) Kebutuhan partisipasi, ketika seseorang secara tidak aktif berpartisipasi dalam suatu pengambilan keputusan atau kebijakan akibat adanya diskriminasi sosial
- 6) Kebutuhan identitas yang mencakup nilai sosial budaya yang melekat dalam suatu daerah menjadi hilang karena masuknya budaya asing

Ciri kemiskinan struktural ditandai dengan adanya perubahan yang sangat lamban atau bahkan nihil. Apabila seseorang ingin mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya, hal itu harus didukung oleh struktur sosial untuk tidak menjadi hambatan dalam memperoleh kehidupan yang layak. Berdasarkan Soedjatmoko (1983), terdapat hal-hal yang dapat membatasi produktivitas hingga terjadi kemiskinan struktural, seperti.

- 1) Tingkat isolasi, yaitu jarak akses atau kondisi geografi untuk mengakses sumber daya ekonomi
- 2) Diferensiasi struktural, berkaitan dengan tingkat spesialisasi dan partisipasi organisasi atau lembaga. Semakin tinggi diferensiasi struktural, maka semakin menurun tingkat kemiskinan
- 3) Kekakuan bersosial, artinya semakin kaku struktur sosial, maka akan semakin sulit masyarakat untuk melewati batasan sosial dan tingkat kemiskinan akan semakin meningkat
- 4) Sentralitas, yaitu pusat daerah yang sering menjadi sektor pembangunan yang ditandai dengan adanya penanaman modal dan pengembangan infrastruktur. Semakin baik sentralitas, maka kemiskinan di daerah tersebut akan berkurang.

2. Feminisasi Kemiskinan

a. Kemiskinan dan Perempuan

Adanya tatanan sosial dan struktur sosial yang tidak baik di tingkat lokal ataupun global menyebabkan kekerasan terstruktur pada korbannya, seperti kemiskinan dan budaya patriarki. Dapat dirasakan, budaya patriarki masih mengakar sampai kehidupan saat ini. Masyarakat yang berpegang teguh pada kedudukan laki-laki yang bersifat superior, banyak menindas korbannya yang dianggap memiliki kedudukan yang lemah, yaitu perempuan.

Sebagaimana nilai yang muncul di masyarakat patriarki, perempuan sering kali mengalami diskriminasi dan marginalisasi, yaitu keadaan di mana pikiran dan status sosialnya dikesampingkan oleh masyarakat yang berakibat kemiskinan hanya karena perbedaan gender, serta subordinasi, yaitu adanya anggapan peran yang

dilakukan perempuan tidak sebanding atau lebih rendah dari peran laki-laki.

Pada dasarnya, salah satu hambatan struktural untuk terbebas dari masalah kemiskinan berasal dari ketidakadilan relasi gender yang membedakan hak perempuan dan laki-laki. Umumnya, budaya patriarki juga membatasi perempuan dalam kegiatan pengambilan keputusan, baik di lingkungan eksternal ataupun internal, sementara pengambilan keputusan dan jabatan masih didominasi oleh laki-laki. Terbukti dengan minimnya eksistensi perempuan untuk menduduki jabatan struktural di kalangan atas, baik dalam organisasi maupun institusi. Sehingga, adanya isu kemiskinan dalam perempuan akan dikaji dalam tulisan ini untuk mewakili perempuan yang berjuang mengalami kemiskinan akibat konstruksi sosial yang tidak adil. Ketidakadilan tersebut akan berdampak pada keteringgalan perempuan dalam segi pendidikan, ekonomi, partisipasi sosial dan politik.

b. Definisi Feminisasi Kemiskinan

Feminisasi kemiskinan merupakan hilangnya peluang dan kebebasan perempuan dalam menentukan pilihan hidup, sehingga menjadikan mereka tidak memperoleh fasilitas-fasilitas pendidikan, ekonomi dasar, pekerjaan, perlindungan keamanan, dan keterlibatan politik (Fauziah, 2020). Feminisasi kemiskinan mengacu pada dua unsur utama. Pertama, feminisasi kemiskinan datang pada saat perempuan menjadi kepala rumah tangga atau secara dominansi menjadi figur pencari nafkah dalam lingkup keluarga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kedua, feminisasi kemiskinan terjadi ketika perempuan terjebak dalam kondisi kekurangan dan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat dipicu karena dirinya bergantung pada pendapatan suami. Sehingga, pada saat suaminya tiada, sang istri tidak mendapatkan pemasukan yang cukup dan masuk dalam perangkat kemiskinan (Azwar *et al.*, 2018).

Berdasarkan data BPS (2022), masih banyak perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah perempuan yang hidup dalam lingkup

kemiskinan pada bulan Maret 2022 sebesar 9.68%, lebih tinggi 0.28% dibanding laki-laki yang mencapai 9.40%. Jumlah tersebut menunjukkan adanya penurunan terkait perempuan miskin dari jumlah sebelumnya sebesar 10.37%, sementara jumlah laki-laki miskin masih lebih rendah sebesar 0.45% pada Maret 2021. Fenomena tersebut dapat dipicu oleh kepemilikan dan kontrol laki-laki atas riil aset, seperti kendaraan, tanah, rumah dikuasai laki-laki. Sehingga, perempuan tidak memiliki akses yang cukup dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Tabel 1 Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional Menurut Jenis Kelamin 2021-2022

Jenis Kelamin	Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan (%)	
	Maret 2021	Maret 2022
Perempuan	9,92	9,4
Laki-Laki	10,37	9,68

Sumber: BPS, 2022

c. Penyebab Feminisasi Kemiskinan

Jauh dari sekadar permasalahan ekonomi dan kultur, feminisasi kemiskinan lahir karena adanya permasalahan struktural yang tidak bisa dihindari. Masalah struktur tersebut memicu Sebagian masyarakat mendominasi dan menguasai setiap unsur kehidupan, hingga menyebabkan masyarakat yang memiliki perekonomian yang kurang baik semakin menanggung keterbatasannya dari pemanfaatan fasilitas, sarana prasarana ataupun sumber daya ekonomi yang tersedia. Dari keterbatasan tersebut muncul sebuah hubungan yang timpang dan kebanyakan dialami pada perempuan. (Venny, 2005).

Adanya feminisasi kemiskinan disebabkan oleh keterbatasan perempuan dalam akses, mendapatkan informasi, dan aktif dalam partisipasi. Hal tersebut yang menyebabkan perempuan berada di posisi setelah laki-laki, termasuk dalam tingkat pendidikan maupun pekerjaan (Amiruddin dan Purnama, 2009). Sifat diskriminasi yang dialami perempuan saat bekerja, seperti tidak memperoleh tunjangan kesejahteraan dan rendahnya upah kerja yang didapatkan, terbentuk

karena adanya anggapan yang menyatakan kedudukan perempuan bukanlah sosok utama dalam pencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, sehingga resistensi perempuan dianggap lemah dan pada akhirnya menyebabkan feminisasi kemiskinan (Uli, 2005).

Penghasilan suami dari hasil pekerjaannya yang belum mampu menutupi kebutuhan dasar keluarganya, mendesak perempuan sebagai seorang istri harus memutar otak agar bisa meringankan beban suami dalam menghasilkan uang. Alhasil, perempuan yang tidak memiliki akses pendidikan yang baik akan membatasi keterampilan dan keahlian yang dimilikinya, sehingga berdampak pada sulitnya mengakses pekerjaan di sektor formal dan beralih di sektor informal dengan konsekuensi upah yang diterimanya jauh dari nominal cukup (Arjani, 2007).

Beban tersebut bertambah berat diikuti istilah domestikasi, yaitu bentuk kewajiban istri untuk mengurus segala urusan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, menyapu, hingga melayani anak dan suami di rumah yang dapat membatasi ruang geraknya (Wijayanti, 2010). Peran ganda yang dijalani perempuan sebagai istri yang juga pencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya, mendorong perempuan untuk menjadi tulang punggung keluarga. Hal itu disebut tindakan rasional instrumental di mana tindakan yang dilakukan oleh perempuan sebagai istri dan juga tulang punggung keluarga dipengaruhi karena adanya bentuk kekurangan yang dialami keluarganya secara finansial dan merupakan bentuk rasa sayangnya kepada keluarga (Laksono, 2017).

Karakteristik feminisasi kemiskinan yang ditandai dengan perannya menjadi kepala rumah tangga menjadikan keberadaan perempuan diabaikan dari lingkungan sosial dan politik. Karakteristik lainnya dapat dilihat dari rendahnya kemampuan untuk mendapatkan pemasukan, ketergantungan pada penghasilan suami, terbatasnya akses pendidikan dan pekerjaan di sektor formal, serta minimnya pemberian tunjangan sosial dan kesejahteraan. Adanya ketidakadilan tersebut menyebabkan perempuan tertinggal dalam upaya pembangunan.

3. Strategi Pengentasan Feminisasi Kemiskinan

Pembangunan berkelanjutan diperlukan untuk mengubah struktur sosial yang dapat mengatasi feminisasi kemiskinan. Contohnya seperti Program Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera) yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2017 dengan tujuan memaksimalkan pengentasan kemiskinan yang berfokus pada perempuan yang menjadi kepala rumah tangga (KRTP). Program Jalin Matra dijalankan melalui pemanfaatan peran Kader TP-PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) sebagai pelindung bagi KRTP, memperluas usaha produktif KRTP dengan pemberian modal dan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan keluarga, mendorong ketahanan sosial ekonomi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar (Utomo dan Haryati, 2019).

Penyebab feminisasi kemiskinan dapat diatasi secara struktural dengan pemerataan akses pendidikan dan menciptakan pasar tenaga kerja yang nondiskriminatif. Struktur sosial yang sudah mengakar di nilai sosial masyarakat harus diubah menuju kesetaraan gender yang tidak membatasi akses perempuan. Upaya pengentasan feminisasi kemiskinan yang diperlukan Indonesia tidak cukup dengan menyediakan sumber daya ekonomi saja, tetapi juga dengan menghilangkan ketimpangan gender agar perempuan dapat memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang ada (Fawziah, 2020).

Upaya pembangunan yang hanya memberikan bantuan-bantuan tunai dapat menyebabkan ketergantungan individu pada bantuan sosial yang ada. Hal tersebut tidak berdampak efektif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat jika dana yang diterima tidak dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang menghasilkan keuntungan. Contohnya, pada program *Women in Development* (WID) yang berupaya untuk mendukung peran perempuan dalam pembangunan. WID memenuhi kebutuhan perempuan secara praktis dalam jangka waktu pendek yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian perempuan agar tidak tertinggal dengan kemajuan yang ada.

Langkah berikutnya yakni dibentuk program yang dapat menggantikan program WID yang gagal. *Gender and Development* (GAD), yaitu strategi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gender

dengan menyatukan aspirasi, kepentingan, dan peran antara laki-laki dengan perempuan dalam proses pembangunan berkelanjutan. Strategi ini menghubungkan laki-laki dan perempuan untuk bekerja sama menjadi subjek dan objek pembangunan. GAD memanfaatkan analisis gender untuk berfokus pada ketimpangan struktural yang tumbuh di lingkungan masyarakat dan menyebabkan rencana dan kebijakan pembangunan menjadi bias gender, yaitu pandangan yang hanya menguntungkan salah satu laki-laki atau perempuan dan menyebabkan adanya ketimpangan gender. Ketimpangan gender dapat memicu perempuan untuk terjebak dalam ketidakadilan, kekerasan, marginalisasi, subordinasi, diskriminasi, dan domestikasi dalam menjalankan kehidupan sosialnya.

BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dalam program kerjanya menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP) untuk para pelaksana yang akan merancang strategi hingga kebijakan program, dan kegiatan pembangunan yang menghasilkan responsif gender. Suatu program dikategorikan responsif gender apabila perancangan strateginya melibatkan berbagai pengalaman, pendapat, permasalahan, dan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki.

Strategi GAP berlanjut hingga tumbuhnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender yang dijadikan salah satu program pembangunan nasional dan melahirkan *Gender Mainstreaming* (Pengarusutamaan Gender/PUG). *Gender mainstreaming* diciptakan untuk memperluas kebijakan dengan menambahkan unsur pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kebijakan, dan program dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan keamanan dan kemasyarakatan.

4. Implementasi Kebijakan

Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP)

Pemberian kesempatan pada kaum perempuan yang berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dapat mengarahkan kaum perempuan pada tataran perjuangan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender khususnya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga. Melalui peranan keberlanjutan hak ekonomi perempuan diharapkan pemasukan keluarga menjadi terus meningkat yang berimbas pada kecukupan pemenuhan

kebutuhan dasar dan sosial keluarga guna mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari *Millenium Development Goal* (MDG).

Berdasarkan program pengentasan kemiskinan, diterapkan kebijakan makro strategi yang mencakup perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas dan perlindungan sosial. Selain itu, terdapat kebijakan makro operasional yang diterapkan melalui (1) Penciptaan iklim yang kondusif dari segi fiskal, moneter, dan investasi; (2) Perdagangan; (3) Tenaga kerja (4) Pengelolaan SDA; (5) Pengadaan pangan; dan (6) Infrastruktur. Tidak hanya itu, dibutuhkan juga kebijakan dari segi mikro strategis dengan memperluas kesempatan dengan mengembangkan program, meningkatkan kapasitas produktivitas dan perlindungan sosial. Ketiga kebijakan di atas diterapkan untuk mendukung program-program sektoral melalui Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) yang dirumuskan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui.

a. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Pada kebijakan PPEP ini dilakukan pendekatan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui konsep Pengembangan Kelompok Perempuan Produktif (PKP2) dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat guna membebaskan diri dari jebakan kemiskinan dan ketertinggalan yang dialaminya hingga tercipta kegiatan ekonomi produktif. Langkah penerapan program ini mencakup

1. Penciptaan dan pemantapan dukungan politis dan operasional dari semua pemangku kepentingan (*stakeholders*)
2. Menciptakan kondisi lingkungan sosial yang lebih kondusif bagi kaum perempuan untuk dapat mengembangkan segenap potensi dan kemampuan dirinya serta menjamin kesamaan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi
3. Pengembangan kapasitas SDM perempuan dalam konteks wawasan, pengetahuan, keterampilan, etos/semangat kerja, hingga pola pikir dalam berusaha
4. Pemberdayaan aktivitas ekonomi, seperti kegiatan produksi dan distribusi, dimulai dari manajemen usaha, pengelolaan ekonomi

rumah tangga dan unit usaha. Kemudian, memperluas pangsa pasar dan kemitraan yang didukung kemudahan akses terhadap pasar dan persediaan terhadap kebutuhan modal sebagai sumber daya produksi

5. Pemberdayaan dalam pengelolaan lingkungan sumber daya alam (SDA) dengan memperhatikan kesinambungan proses usaha (produksi) dan keberlanjutan sumber daya ekonomi yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.

b. Peningkatan Produktivitas Perempuan Melalui Pembinaan UMKM

Pemberdayaan produktivitas ekonomi rakyat berskala kecil dapat dilakukan oleh pihak dari luar pemerintahan, dengan cara.

1. Mengembangkan sistem informasi yang digunakan Lembaga *Non-Government* sebagai langkah peningkatan produktivitas ekonomi perempuan
2. Mengembangkan sistem koordinasi dan kerja sama yang terpadu antar organisasi *Non-Government* dengan organisasi pemerintah, guna mengintensifkan dan memperluas kepedulian dalam upaya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan.
3. Mengawasi dan mengevaluasi Lembaga *Non-Government* dalam upaya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan
4. Memberikan sistem penghargaan bagi organisasi *Non-Government* yang telah melaksanakan dan mengembangkan program pemberdayaan ekonomi perempuan.

c. Pengembangan Kemitraan antara Masyarakat dengan Pemerintah

Selain kebutuhan program, dibutuhkan juga suatu model yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan dengan mengembangkan model sebagai berikut.

1. Memperluas kesempatan untuk berbagai pihak sebagai pengembangan model guna meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan di berbagai wilayah
2. Mengembangkan model dalam bentuk pendampingan dan pengembangan lembaga keuangan mikro untuk meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan

3. Memperkuat pengembangan model dalam produktivitas ekonomi perempuan untuk pengusaha UMKM yang memiliki nilai tambah ekonomis dan daya saing yang tinggi untuk kemandirian perempuan

d. Pengembangan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA)

Pengembangan model PRIMA ini ditujukan untuk mengurangi beban keluarga miskin, di antaranya melalui beberapa kebijakan berikut.

1. Meningkatkan kepedulian keluarga mampu terhadap pihak lain yang membutuhkan dan membangun kemandirian daerah melalui ketersediaan SDA di lingkungannya
2. Menyuarakan upaya pengurangan beban keluarga miskin di setiap perangkat masyarakat

Kebijakan lainnya dapat diterapkan berdasarkan faktor kondisi tertentu seperti.

a. Faktor Lingkungan Strategis

1. Demokratisasi dengan mendorong partisipasi perempuan dalam merumuskan kebijakan guna memberdayakan perempuan dalam proses pembangunan
2. Desentralisasi dengan menyediakan ruang bagi perempuan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan mempertimbangkan karakteristik sumber daya yang tersedia
3. Globalisasi dengan mendorong perempuan untuk dapat memanfaatkan kemajuan nilai sosial budaya asing dan diadopsi ke dalam nilai sosial lokal

b. Faktor Sumber Daya

1. Meningkatkan, menyediakan, dan mengarahkan beberapa sektor penting seperti LSM dan Perguruan Tinggi (PT) untuk pemberdayaan ekonomi perempuan di tingkat pusat atau daerah
2. Mendorong wawasan, kemampuan, dan langkah perempuan di bidang ekonomi sosial
3. Menciptakan dan memperluas jaringan kerja perempuan

3) Urgensi Pengentasan Masalah Feminisasi Kemiskinan

Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah dapat mengatasi permasalahan kemiskinan. Berbagai penyebab dapat mendorong masyarakat dalam jurang kemiskinan. Permasalahan kemiskinan tidak dapat diatasi oleh sebagai *householder* saja, karena kemiskinan adalah bentuk dari masalah yang bersifat multidimensi. Sehingga, membutuhkan banyak unsur dan lapisan kepentingan untuk mendukung upaya penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Permasalahan feminisasi kemiskinan yang didasarkan pada kemiskinan struktural mengharuskan masyarakat sadar untuk meninggalkan nilai-nilai sosial yang secara struktur dapat merugikan kedudukan perempuan. Dimulai dari pembatasan ruang gerak, ruang akses, partisipasi dalam pengambilan keputusan, pembagian kerja dan upah yang tidak sesuai. Penghapusan ideologi patriarki dalam kehidupan berumah tangga juga harus dilakukan oleh masyarakat agar tidak terjadinya ketimpangan gender, kekerasan yang dialami perempuan, dan masalah sosial lain yang dapat menindas hak-hak dasar dan kesejahteraan perempuan.

Daftar Pustaka

- Adawiyah, S. El. 2020. "Kemiskinan dan Faktor-Faktor Penyebabnya". *Journal of Social Work and Social Science*. Vol 1(1): 43-50.
- Ahmad, R. Nur, Kanto, S. dan Susilo, E. 2015. "Fenomena Kemiskinan Dari Perspektif Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin (Studi Fenomenologi tentang Makna dan Penyebab, Serta Strategi Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)". *Jurnal Wacana*. Vol 18(4): 221-230.
- Alex Addaer-Korrankye. 2019. "Theories of Poverty: A Critical Review". *Journal of Poverty, Investment and Development*. Vol 48(1): 55-62.
- Amiruddin, M dan Purnama, L. 2005. "Tragedi Kelaparan Nasional dan Feminisasi Kemiskinan". *Jurnal Perempuan*. No.42: 19- 31.
- Arjani, Ni Luh. 2007. "Feminisasi Kemiskinan dalam Kultur Patriarki". *Jurnal Studi Gender Srikandi*. Vol 6(1): 1-10.
- Azwar, Welhendri, Muliono, dan Permatasari, Yuli. 2018. "Feminisasi Kemiskinan: Studi tentang Pengemis Perempuan Pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia". *Jurnal Studi dan Gender Islam*. Vol 17(2): 16-182.
- Blank, M. Rebecca. 2010. "Selecting Among Anti-Poverty Measures, Can an Economist Be Both Critical and Caring?". *Review of Social Economy*. Vol 61(4): 447-469.
- Damanhuri, D. S. 2010. *Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang*. IPB Press dan STEI Tazkia
- Davis, E. Philip dan Sanchez, Martinez M. 2014. "A review of the economic theories of poverty". National Institute and Social Research. *Discussion Paper*, No. 435.
- Fauziah, Zahrawati B. 2020. "Pembebasan Jerat Feminisasi Kemiskinan". *Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*. Vol 2(1): 9-16.
- Harniati. 2007. "Tipologi Kemiskinan dan Kerentanan Berbasis Agroekosistem dan Implikasinya Pada Kebijakan Pengurangan Kemiskinan". Disertasi tidak diterbitkan. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

- Jung, S. Young dan Smith, Richard J. 2007. "The Economics of Poverty: Explanatory Theories to Inform Practice". *Journal of Human Behavior in the Social Environment*. Vol 16(1-2): 21-39.
- Laksono, Puji. 2017. "Feminisasi Kemiskinan (Studi Kualitatif pada Perempuan Miskin di Desa Kembang Belor Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto)". *Jurnal Pendidikan, Sosiologi, dan Antropologi*. Vol 1(1): 2-15.
- Mashudi, Fauziah, Luluk, dan Agustina Isna Fitria. 2018. "Analisis Kebijakan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Berbasis Participatory Rural Appraisal (Pra) Di Kabupaten Sidoarjo". *Jurnal Sosial dan Pembangunan*. Vol 34(1): 1-11
- Rizal, R. Nur. 2015. "Apakah Jenjang Pendidikan Dasar Tenaga Kerja Berperan dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia? Is Basic Education Level of Labor have a role in Reducing Poverty in Indonesia?". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Vol 16(1): 15-30
- Santi, Sarah. 2007. "Perempuan Dan Kemiskinan: Pembangunan, Kebijakan, dan Feminisasi Kemiskinan". *Jurnal Forum Ilmiah Indonesia*. Vol 4(1): 1-14
- Supriatna, Tjahya. 1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama.
- Uli, Sinta. 2005. "Pekerja Wanita di Perusahaan dalam Perspektif Hukum dan Gender". *Jurnal Equality*. Vol 10(2): 87-92.
- Utomo, K. Setio dan Haryati, T. Nur. 2019. "Mengurai Feminisasi Kemiskinan Kepala Rumah Tangga Perempuan (Kajian Pada Program Pfk Jalin Matra)". *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*. Vol 3(1): 15-23.
- Venny, Adriana. 2005 Dalam Titi Sumbung (Ed.). "NGO Report on The Implementation of Beijing Platform For Action 1995–2005: Country Indonesia". Indonesian NGO Forum on BPFA + 10, Jakarta, 2005.
- Wijayanti, D. Maulina. 2010. "Belenggu Kemiskinan Buruh Perempuan Pabrik Rokok". *Jurnal Komunitas*. Vol 2(2): 84-93
- Yoserizal, Y. 2018. "*Kemiskinan dan Permasalahannya*". Repository Universitas Riau. Hlm 15-40.

Kebijakan Moneter dan Fiskal untuk Mengurangi Kemiskinan

Ahmad Albar Tanjung

1. Kebijakan dalam Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan adalah fenomena multidimensi dan permasalahan utama yang harus diselesaikan bagi Pemerintah di seluruh dunia termasuk Pemerintah Indonesia. Kemiskinan bagaikan dua sisi mata uang bagi pemerintah. Satu sisi, Kemiskinan menjadi salah satu ancaman yang sangat menakutkan bagi pengelola negara. Karena kesalahan dalam mengurus kemiskinan dan menampilkan data kemiskinan akan menyebabkan kursi yang sedang diduduki akan hilang. Kemiskinan juga menjadi bahan jualan yang sangat laku jika sudah masanya pemilihan umum baik legeslatif maupun yudikatif. Biasanya angka-angka kemiskinan akan menjadi bahan untuk menunjukkan keberhasilan dalam perekonomian bagi penguasa dan kemiskinan akan menjadi senjata yang ampu bagi pihak oposisi untuk menjatuhkan pemerintah dan mendulang suara dari masyarakat. Di sisi lain, jika pemerintah berhasil mengurangi kemiskinan maka akan menjadi sebuah prestasi yang akan mendorong masyarakat memberikan dukungan untuk melanjutkan estafet pemerintahan bagi *incumbent* untuk periode berikutnya.

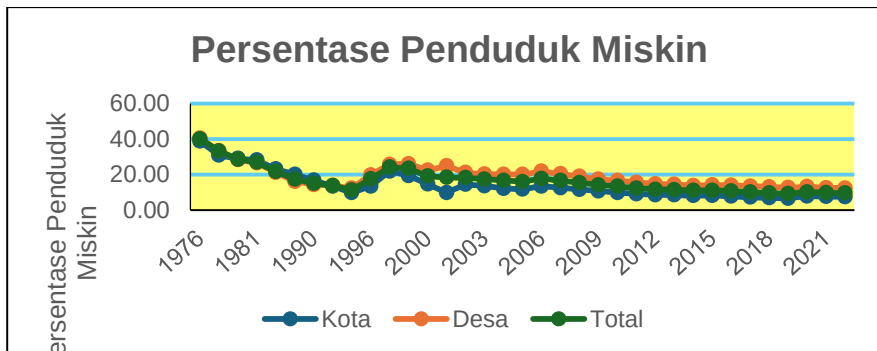
Perkembangan Kemiskinan di Negara-negara ASEAN seperti, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Philipna, Thailand dan Vietnam dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin di Beberapa Negara ASEAN

No.	Nama Negara	Persentase Penduduk Miskin	
		2015	2020
1	Indonesia	11.13	10.19
2	Kamboja	14	17.80
3	Laos	23.2	21.4
4	Malaysia	0.6	8.40
5	Myanmar	32.1	27.85
5	Philipina	22	19.7
6	Thailand	7.2	6.8
7	Vietnam	7	4.8

Sumber: <https://data.worldbank.org/> & <https://www.aseanstats.org/>

Di Indonesia sendiri, kemiskinan juga masih fenomena yang dapat dilihat di lingkungan masyarakat sehari-hari, baik di kota maupun di desa. Pada tahun 1976, persentase penduduk miskin sebesar 40,10 persen dan pada tahun 1996 tingkat kemiskinan turun hingga 11,30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Namun dengan adanya krisis Ekonomi tahun 1997/1998 mengakibatkan terjadinya kenaikan tingkat kemiskinan kembali. Pada Gambar 1 ditunjukkan persentase perkembangan penduduk miskin di Indonesia dari tahun 1976-2022.



Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 1976-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/indicator/23/183/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-wilayah.html>

Dilihat dari *trend* penurunan persentase penduduk miskin pada gambar 1 dari tahun ke tahun tentunya menjadi berita yang sangat menggembirakan dan membahagiakan. Namun masih ada beberapa masalah penting yang perlu dipertanyakan yaitu: apakah penurunan kemiskinan tersebut sudah merata di antara pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, dan apakah penurunan kemiskinan tersebut menandakan bahwa pembangunan ekonomi sudah dinikmati oleh penduduk miskin di seluruh wilayah Indonesia?

Penanggulangan kemiskinan sebenarnya bukan hanya tugas pemerintah namun perlu sinergi dan sistematis dari seluruh elemen masyarakat. Namun umumnya penggerak utamanya adalah pemerintah, karena pemerintah diamanatkan dalam undang-undang untuk menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengurangi kemiskinan serta permasalahan lain seperti akses kesempatan yang sama bagi semua, investasi, lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia dan lainnya maka pemerintah menggunakan berbagai kebijakan. Kebijakan yang digunakan Pemerintah tersebut meliputi kebijakan Moneter, kebijakan Fiskal, Kebijakan makroekonomi dan lainnya. Namun sayangnya permasalahannya adalah:

1. banyak kebijakan ini yang dampak signifikannya membutuhkan waktu yang sangat panjang;
2. Banyak program penanggulangan kemiskinan yang belum mampu menurunkan target kemiskinan.

2. Definisi, Jenis dan Faktor Penyebab Kemiskinan

Perkembangan pengetahuan tentang kemiskinan serta faktor-faktor penyebabnya menyebabkan adanya pergeseran definisi Kemiskinan. Sebagian ahli menyebutkan bahwa kemiskinan adalah sebagai akibat dari pendapatan yang tidak mencukupi untuk mendapatkan barang dan jasa dasar (Ajakaiye & Adeyeye, 2001). World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai adanya ketimpangan dalam kesejahteraan, di mana Orang miskin adalah mereka yang tidak mempunyai pendapatan atau konsumsi yang cukup untuk menempatkan mereka di atas ambang batas minimum yang memadai. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik Indonesia Kemiskinan adalah ketidakberdayaan untuk memenuhi batas

minimum kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan pangan maupun non-pangan. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan.

Di beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kemiskinan adalah keadaan atau kondisi di mana individu atau sebagian orang tidak punya cukup pendapatan atau hal-hal dasar yang mereka butuhkan untuk hidup. Kemiskinan berarti seseorang tidak menghasilkan cukup uang dari pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Orang dan keluarga yang miskin mungkin tidak memiliki tempat tinggal yang baik, air bersih, makanan sehat, atau perawatan medis. Setiap negara dapat menggunakan seperangkat aturannya sendiri untuk menghitung jumlah penduduk miskin.

Pertanyaan yang sering muncul terutama dalam kajian-kajian akademis adalah: Apa faktor yang menjadi penyebab kemiskinan? Jawaban pertanyaan ini tidak semudah apa yang dipikirkan. Ada banyak faktor penyebab kemiskinan, dan tidak ada satu kajian pun yang mampu menjawab pertanyaan tersebut sekaligus. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya hasil kajian yang muncul tentang faktor penyebab kemiskinan sesuai dengan letak geografi, waktu, dimensi sosial, ekonomi budaya dan lainnya. Menurut Peneliti Semeru Institute (2001) beberapa faktor penyebab kemiskinan adalah:

- a. Tidak mempunyai modal dan tanah;
- b. ketersediaan bahan pokok, fasilitas yang terbatas;
- c. Kebijakan pembangunan pro perkotaan dan sektor tertentu
- d. Adanya diskriminasi dalam masyarakat untuk mendapatkan kesempatan yang sama;
- e. Adanya disparitas sumber daya manusia di wilayah yang dekat pemerintahan dengan yang jauh serta disparitas pada sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern);
- f. Produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat yang rendah;
- g. Budaya tentang dengan kemampuan seseorang dalam mengendalikan sumber daya alam dan lingkungan;
- h. Tata pemerintahan yang jauh dari bersih dan baik (*good governance*);

- i. Berlebihannya Pengelolaan sumber daya alam dan tidak berkelanjutan dan merugikan lingkungan.

Sedangkan menurut (Sianturi, *et al.*, 2021) bahwa penyebab kemiskinan adalah:

- a. Pertumbuhan penduduk, peningkatan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat akan sangat berpengaruh negatif terhadap kecukupan ketersediaan pangan dan akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga pangan, jika terjadi kenaikan harga pangan maka daya beli masyarakat akan turun sehingga akan menyebabkan mereka jatuh pada garis kemiskinan.
- b. Tingginya ketimpangan dalam kepemilikan sumber daya yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan
- c. Tingginya ketimpangan Kualitas sumber daya manusia
- d. Peningkatan Produk Domestik Bruto yang menyebabkan meningkatkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan yang nantinya dapat menurunkan kemiskinan.

Sedangkan menurut (Fadil *et al.*, 2021) telah juga telah melakukan identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di berbagai negara adalah: Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah Uang Beredar, Pertumbuhan Kredit ke sector swasta, Pertumbuhan tingkat pendidikan, Pertumbuhan Industri manufaktur, Pajak, Pertumbuhan tingkat pengangguran, dan Pertumbuhan Penduduk perkotaan.

3. Peran Kebijakan Moneter dalam Mengurangi Kemiskinan

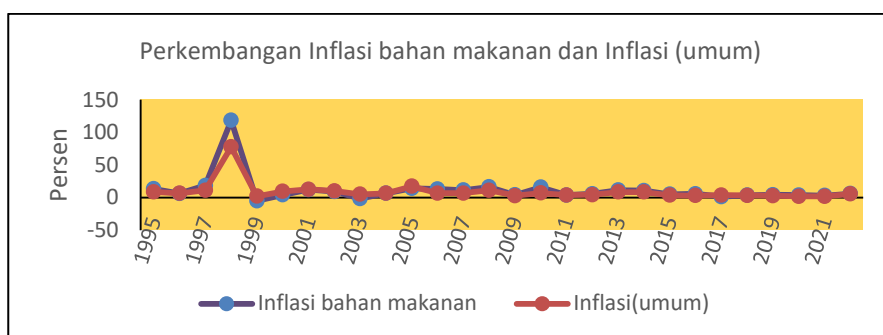
Kebijakan moneter adalah seperangkat alat yang digunakan oleh bank sentral suatu negara untuk mengendalikan jumlah uang beredar secara keseluruhan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas inflasi. Dalam menjalankan peran menjaga inflasi ini kebijakan moneter tidak dapat berjalan sendiri namun ada hubungan saling ketergantungan dengan kebijakan ekonomi lainnya (interdependensi) seperti dengan kebijakan fiskal, kebijakan sektoral dan kebijakan ekonomi makro lainnya. Harmonisasi dan perpaduan keseluruhan kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk mencapai sasaran akhir dari pengelolaan perekonomian suatu negara yaitu menyejahterakan masyarakat. Jika

kebijakan-kebijakan yang diterapkan secara bersama-sama mengutamakan ego *sectoral* masing-masing maka terjadi benturan kebijakan (*policy conflict*) yang saling melemahkan sehingga terjadi pelemahan perekonomian dan yang paling menderita adalah masyarakat (Pohan, 2008).

Target akhir yang ingin dicapai dengan penerapan kebijakan moneter adalah stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi jangka panjang, kesempatan kerja penuh, dan keseimbangan neraca pembayaran. Untuk mencapai target akhir ini maka perlu mengontrol variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi keseimbangan pasar uang yaitu, tingkat suku bunga (*interest rate*) dan jumlah uang beredar (*monetary aggregate*). Perangkat variabel yang dimiliki oleh otoritas moneter untuk mengontrol tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar dikenal dengan instrumen moneter yang terdiri dari: operasi pasar terbuka, cadangan wajib minimum, Fasilitas diskonto dan himbauan.

Kebijakan moneter dapat digunakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan kebijakan moneter ekspansif, kondisi masyarakat miskin dalam jangka pendek dapat membaik dalam jangka pendek tetapi tidak dalam jangka panjang. Moneter ekspansif membawa lebih banyak uang beredar dalam perekonomian, yang menyebabkan inflasi. Jika inflasi menjadi rendah dan pertumbuhan permintaan agregat menjadi stabil melalui kebijakan moneter maka kesejahteraan masyarakat miskin dapat lebih sehat dalam jangka panjang (Romer & Romer, 1998).

Pengendalian inflasi khususnya dalam hal pengamanan stok dan distribusi bahan pangan merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk orang miskin agar peningkatan pendapatan makin efektif, langkah ini juga perlu didukung dengan program revitalisasi pertanian, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung distribusi bahan pangan dari produsen hingga ke konsumen akhir. Kebijakan mengurangi tingkat kemiskinan bukan hanya sekadar mendorong kelompok miskin keluar dari garis kemiskinan, tetapi juga perlu mempertahankan kelompok masyarakat hampir miskin tidak terjerumus menjadi kelompok miskin. Pada Gambar 2 ditunjukkan perkembangan inflasi bahan makanan dan inflasi (umum) di Indonesia tahun 1995-2022.



Gambar 2. Perkembangan Inflasi Bahan Makanan dan Inflasi (UMUM) di Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik:

<https://www.bps.go.id/subject/3/inflasi.html#subjekViewTab3>

Pada gambar 2 terlihat bahwa inflasi bahan makanan lebih tinggi dari inflasi (umum) seperti pada tahun 2005-2010, 2012-2015 dan 2020. Tingginya inflasi bahan makanan tentu akan berdampak pada kelompok penduduk “hampir miskin” karena akan berkurangnya daya beli mereka akibat inflasi bahan makanan yang tinggi. Oleh karena itu perlu kiranya kebijakan moneter yang berupaya untuk menekan laju inflasi khususnya inflasi bahan makanan agar daya beli masyarakat yang hampir miskin tersebut terjaga. Dengan menjaga inflasi, maka penduduk hampir miskin diharapkan tidak terjatuh menjadi miskin. Oleh karena itu strategi “*keep buying strategy*” diharapkan menjadi katalisator pengurangan kemiskinan.

Selain mempengaruhi jumlah uang beredar, kebijakan moneter untuk penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui kebijakan tingkat suku bunga, kendala yang selama ini terjadi adalah ketika otoritas moneter menurunkan tingkat suku bunga acuan, maka tingkat suku Bunga pinjaman tidak serta-merta turun mengikuti penurunan suku Bunga acuan. Sejatinya, dengan menurunkan suku bunga pinjaman akan merangsang para pelaku usaha khusus UMKM untuk meningkatkan modalnya. Pelaku UMKM perlu diprioritaskan dalam akses mendapatkan modal melalui pinjaman karena UMKM memiliki jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan pelaku usaha besar dan hampir setiap sector usaha terdapat pelaku UMKM. Karena jumlah yang sangat besar dan penyebarannya yang sangat luas maka UMKM menjadi penyedia lapangan

kerja yang sangat besar pula. Sehingga dengan kemampuan menyerap tenaga kerja maka pengembangan UMKM ini dapat menjadi salah satu solusi dalam menanggulangi kemiskinan. Kondisi saat ini di Indonesia, Pemerintah sudah memiliki program khusus berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR yang memiliki tingkat bunga pinjaman yang sangat rendah ini menjadi primadona bagi pelaku UMKM, namun kendala yang masih dihadapi adalah soal pemerataan penyaluran. Contohnya Indonesia yang memiliki kondisi geografis yang luas sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola program KUR menyalurkan kepada masyarakat di pedalaman.

4. Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengurangi Kemiskinan

Kebijakan fiskal adalah kegiatan pemerintah dalam bentuk kebijakan dalam pengelola pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang dipergunakan mengintervensi beberapa variabel makro ekonomi seperti permintaan agregat, distribusi pendapatan, dan alokasi sumber daya dalam perekonomian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal. Dengan demikian semakin besar aktivitas pemerintah maka akan semakin besar pula pengeluaran pemerintah. Menurut teori makro tentang pengeluaran pemerintah, pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu: pengeluaran pemerintah untuk belanja modal, pengeluaran pemerintah untuk belanja rutin dan pengeluaran pemerintah untuk pembayaran transfer. Beberapa teori yang menganut teori makro ini adalah: teori Rostow dan Musgrave, teori Adolf Wagner, teori Peacock dan Wiseman serta Teori batas kritis Colin Clark.

Teori Rostow dan Musgrave menyatakan bahwa tahapan pembangunan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan pengeluaran pemerintah, tahap awal adalah ketika proses perkembangan ekonomi baru dimulai sehingga persentase pengeluaran pemerintah dalam bentuk investasi sangat besar hal ini dikarenakan pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan. Tahap kedua adalah ketika terjadinya pembangunan ekonomi, pada saat ini investasi swasta sudah mulai masuk sehingga pengeluaran pemerintah sudah berkurang namun masih diperlukan. Tahap ketiga adalah ketika aktivitas ekonomi sudah ditopang

oleh investasi swasta sehingga pengeluaran pemerintah beralih ke aktivitas sosial seperti pemberian jaminan sosial dan kesehatan kepada masyarakat.

Teori Wagner mengatakan bahwa semakin lama pengeluaran dan peranan pemerintah akan semakin meningkat. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian yang pendapatan per kapitanya meningkat maka akan meningkatkan pengeluaran pemerintah.

Teori Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa jika terjadi peningkatan pendapatan nasional maka akan menyebabkan naiknya penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak, jika penerimaan naik maka akan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Namun pemerintah tidak bisa sembarangan menaikkan pajak karena masyarakat memiliki tingkat toleransi pajak, yaitu tingkat di mana masyarakat masih mau menerima besarnya pungutan pajak yang harus mereka bayar. Oleh karena itu menurut teori Peacock dan Wiseman kenaikan pengeluaran pemerintah dibatasi oleh toleransi pajak.

Teori batas kritis Colin Clark menguatkan teori Peacock dan Wiseman, di mana dinyatakan bahwa batas kritis toleransi pajak oleh masyarakat adalah 25 persen dari pendapatan nasional. Jika terjadi kenaikan pajak yang tinggi akan menyebabkan menurunnya motivasi bekerja. Karena masyarakat merasakan bahwa bekerja hanya akan memperkaya pemerintah saja. Menurunnya motivasi kerja akan menyebabkan menurunnya produktivitas kerja yang pada ujungnya akan menyebabkan menurunnya penawaran agregat. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah yang tinggi akan menyebabkan meningkatnya permintaan agregat. Kesenjangan antara penawaran agregat dan permintaan agregat akan menimbulkan inflasi yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Secara khusus, penyelenggaraan kebijakan fiskal melalui mekanisme pengeluaran pemerintah berperan penting dalam pengentasan kemiskinan. Dengan adanya pengeluaran pemerintah akan menimbulkan *multiplier effect* untuk sektor ekonomi yang lainnya sehingga terjadi peningkatan pendapatan per kapita dan pada akhirnya berujung pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Farayibi & Owuru, 2017). Pengeluaran Pemerintah untuk pembelian barang dan jasa dari perusahaan swasta akan berdampak pada berputarnya roda perekonomian di berbagai

sector termasuk mempekerjakan tenaga kerja akan menyebabkan peningkatan pendapatan di masyarakat. Pengeluaran Pemerintah berupa belanja transfer seperti bantuan untuk pengangguran, subsidi pembayaran jaminan sosial kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu, atau bantuan kepada pelaku usaha, akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mampu mengurangi kemiskinan. Gambaran 3 menunjukkan pengeluaran pemerintah di Indonesia dari tahun 1980-2022.



Gambar 3. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Indonesia 1980-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik:

<https://www.bps.go.id/indikator/13/1085/1/realisasi-pengeluaran-negara-keuangan-.html>

Pada gambar 3 terlihat bahwa pengeluaran pemerintah Indonesia sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun mulai 1980 hingga 2022. Pada tahun 1998-1999 terlihat bahwa pengeluaran pemerintah terjadi penurunan, hal ini diakibatkan karena terjadinya krisis ekonomi tahun 1997-1998 sehingga pemerintah menerapkan kebijakan fiskal yang sangat hati-hati yaitu dengan mengurangi ekspansi pengeluaran pemerintah (Joseph *et al.*, 2003). Kondisi yang berbeda terjadi pada krisis tahun 2020 yang disebabkan oleh penyebaran Covid-19, di Indonesia, pengeluaran pemerintah menjadi instrumen kebijakan fiskal yang sangat ampuh untuk menopang perekonomian nasional tetap berdiri. Kebijakan fiskal yang dilakukan

Pemerintah mengacu pada inpres no.4/2020, yaitu mempercepat *refocusing* belanja kegiatan, realokasi penganggaran pengadaan barang dan jasa yang semuanya ditujukan untuk penanganan Covid-19. Pengeluaran Pemerintah kala itu difokuskan pada pengadaan fasilitas, obat-obatan, alat Pelindung diri (APD), jaring keamanan sosial (*social safety net*) diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program keluarga harapan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako dan beras sejahtera. Selain itu, diberikan bantuan kepada pelaku Usaha Mikro dan kecil berupa uang tunai (Nainggolan, 2020).

5. Kajian Empiris Dampak Kebijakan Moneter dan Fiskal terhadap Kemiskinan

Fielding (2004) menguji apakah kebijakan moneter berdampak pada kemiskinan di Timor Timur dari 1994:4 hingga 2002:7. Analisisnya menggunakan teknik estimasi *Full Information Maximum Likelihood* (FIML). Kajian ini secara empiris mengamati bahwa dampak salah satu instrumen moneter, yaitu jumlah uang beredar atau suku bunga, akan menimbulkan kemungkinan terjadinya kemiskinan. Selanjutnya, Mehmood dan Sadiq, (2010) melakukan kajian tentang hubungan antara pengeluaran pemerintah untuk penduduk miskin dari tahun 1976 hingga 2010. Analisis menggunakan teknik estimasi model ECM dan *Johnson Cointegration Test*. Studi ini secara empiris mengamati bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan signifikan negatif dengan kemiskinan. Kajian empiris serupa dilakukan oleh Chani *et al.*, (2011) yang menguji hubungan antara kemiskinan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Pakistan dari tahun 1972 hingga 2008. Analisis menggunakan teknik estimasi ARDL. Studi ini secara empiris mengamati bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi berdampak negatif terhadap kemiskinan, sedangkan inflasi berdampak positif terhadap kemiskinan dan perdagangan tidak berdampak signifikan terhadap kemiskinan.

Kajian Empiris peran kebijakan fiskal dengan menguji dampak pengeluaran pemerintah terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Sistan dan Baluchestan, Iran dari tahun 1978 hingga 2008 dengan teknik estimasi ARDL menunjukkan hasil bahwa pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap penurunan kemiskinan (Dahmardeh & Tabar, 2013).

Bertolak belakang dengan hasil di atas, hasil studi tentang dampak ekonomi makro terhadap kemiskinan di Iran dari tahun 1985 hingga 2007 dengan teknik estimasi Bootstrap menunjukkan bahwa kebijakan fiskal melalui pengeluaran jaminan sosial tidak berdampak terhadap kemiskinan (Kashi, F.K. & Tash, 2014). Hasil ini sejalan dengan temuan (Teweldemedhin, 2014), yang menguji dampak ekonomi makro terhadap kemiskinan di Negara Sub Sahara, Afrika pada tahun 2009. Analisis menggunakan teknik *Weighted Least Square* (WLS). Studi tersebut menunjukkan bahwa rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDB, rasio pertanian terhadap PDB, rasio investasi asing langsung, dan koefisien GINI tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Afrika Sub-Sahara. Sementara itu, stok utang luar negeri, Pertumbuhan PDB, dan Pertumbuhan Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka kemiskinan. Namun, tabungan Domestik Bruto, kredit Domestik ke sektor swasta, pengeluaran militer, dan pengeluaran kesehatan berdampak negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Afrika Sub-Sahara. Kajian ini merekomendasikan untuk memfokuskan pada kebijakan modal manusia yang efektif melalui investasi pendidikan dan kesehatan pada basis masyarakat miskin, pembangunan infrastruktur untuk membuat orang miskin memiliki kesempatan dan kemungkinan untuk liberalisasi perdagangan serta implementasi pemerintah yang baik dengan fokus pada institusi dan faktor lain yang mengarah ke orang miskin. Hasil serupa juga diperoleh oleh (Khatibu & Cheyo, 2014) yang menguji dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan strategis dan penurunan kemiskinan di Tanzania dari tahun 2005 hingga 2013. Studi tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan tidak membantu mengurangi kemiskinan karena pengeluaran tersebut untuk investasi sosial dan karena itu responsnya pengentasan kemiskinan membutuhkan waktu untuk berlangsung.

Nwosa (2016) menguji dampak ekonomi makro terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran di Nigeria serta implikasinya terhadap pertumbuhan inklusif dari tahun 1980 hingga 2013. Analisis menggunakan teknik estimasi *Ordinary Least Square* (OSL). Studi ini merekomendasikan bahwa kebijakan fiskal dan tingkat inflasi secara signifikan berdampak pada tingkat kemiskinan di Nigeria, sedangkan

kebijakan moneter perlu direvisi karena suku bunga untuk meningkatkan pertumbuhan non-bahan bakar dengan memberikan pinjaman berbunga rendah kepada investor.

Akhtar *et al.*, (2017) menguji beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Pakistan dari tahun 1974 hingga 2014. Analisis menggunakan teknik estimasi *Co-integration Analysis* untuk jangka panjang dan ECM untuk jangka pendek. Variabel independen yang digunakan adalah rasio pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), rasio Penanaman Modal Asing Langsung (FDI) terhadap PDB, rasio pendidikan dasar, rasio kredit domestik terhadap sektor swasta dan persentase belanja militer terhadap PDB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Dalam kasus rasio pertanian terhadap PDB, pertumbuhan *output* pertanian menghasilkan penurunan kemiskinan. Registrasi pendidikan juga berdampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan jangka panjang. Ini membantu untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan status sosial ekonomi baik individu maupun masyarakat. Kredit domestik juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan tetapi pengeluaran militer berdampak positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Pakistan.

Afandi *et al.*, (2017) menguji kebijakan yang meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia dari tahun 1981 hingga 2013. Analisis yang digunakan adalah teknik estimasi *Error Correction Model* (ECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan, inflasi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, *Foreign Direct Investment* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, Gini ratio sebagai proksi ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil studi juga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan tergantung pada ketidakstabilan ekonomi makro seperti tingkat harga. Kajian empiris yang dilakukan oleh Tanjung *et al.*, (2019) juga menunjukkan bahwa dari sisi moneter maka inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan instrumen tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan dari sisi fiskal, penggunaan instrumen pengeluaran pemerintah selama

periode penelitian berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Hasil beberapa hasil kajian di atas maka tidak ada satu kebijakan pun yang bisa berjalan sendiri untuk menurunkan tingkat kemiskinan, perlu koordinasi dan harmonisasi berbagai pihak yang berkepentingan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

6. Efektivitas Kebijakan Fiskal dalam Mengurangi Kemiskinan

Kebijakan Moneter dapat mendukung Kebijakan Fiskal dalam mengurangi kemiskinan melalui yaitu: penggunaan instrumen suku bunga untuk investasi bagi UMKM. Dengan menjaga suku bunga rendah maka akan meningkatkan atau memperluas kredit bagi UMKM. Dengan adanya modal maka UMKM akan mampu bertahan dan tumbuh dalam kondisi perekonomian yang kondusif sehingga UMKM ini akan mampu menyerap tenaga kerja baru. Dengan adanya penerapan tenaga kerja maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan menaikkan pendapatan masyarakat. Jika pendapatan masyarakat meningkat maka akan menaikkan daya beli masyarakat dan menjauhkan mereka dari garis kemiskinan. Selain itu, otoritas kebijakan moneter perlu juga menjaga stabilitas inflasi.

Kebijakan fiskal yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu didorong dari sektor investasi. Agar kebijakan fiskal tersebut mampu menanggulangi kemiskinan maka perlu diperhatikan beberapa hal, seperti: kebijakan fiskal harus bersifat berkelanjutan, artinya bahwa pemerintah harus mampu mengelola pengeluaran sebaik mungkin sehingga defisit yang terjadi dapat dikelola dengan baik. Kebijakan fiskal harus mendukung investasi sektor swasta dan penekanan pada sektor publik sehingga realisasi investasi masuk ke sektor riil dan mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat.

Perlu dilakukan konsolidasi dan koordinasi implementasi kebijakan moneter dan fiskal dalam program penurunan kemiskinan agar saling menguatkan sehingga tujuan pengelolaan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Daftar Pustaka

- Afandi, A., Wahyuni, D., & Sriyana, J. (2017). Policies to Eliminate Poverty Rate in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(1), 435–441.
- Ajakaiye, D. O., & Adeyeye, V. A. (2001). Concept, Measurement and Causes of Poverty. *CBN Economic and Financial Review*, 39(4), 13–17.
- Akhtar, R., Liu, H., & Ali, A. (2017). International Journal of Economics and Financial Issues Influencing Factors of Poverty in Pakistan: Time Series Analysis. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(2), 215–222. <http://www.econjournals.com>
- Chani, Muhammad Irfan and Pervaiz, Zahid and Jan, Sajjad Ahmad and Ali, Amjad and Chaudhary, A. R. (2011). Poverty, Inflation and Economic Growth: Empirical Evidence from Pakistan. *World Applied Sciences Journal*, 14(7), 1058–1063. [ssrn: https://ssrn.com/abstract=1951510](https://ssrn.com/abstract=1951510)
- Dahmardeh, N., & Tabar, M. H. (2013). Government Expenditures and Its Impact on Poverty Reduction (Empirical From Sistan and Baluchestan Province of Iran. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 2(1), 251–60.
- Fadil, W., Rana, F., Khuzam, Q., Saudi, J., Fadil, W., & Money, B. (2021). Determinants of poverty in different countries. *PJAE*, 18(13), 184–193.
- Farayibi, A. O., & Owuru, J. E. (2017). Linkage between Fiscal Policy and Poverty Reduction in Nigeria. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2856545>
- Fielding, D. (2004). How does monetary policy affect the poor? Evidence from the West African Economic and Monetary Union. *Journal of African Economies*, 13(4), 563–593. <https://doi.org/10.1093/jae/ejh036>
- Joseph, C. P., Hartawan, A., & Mochtar, F. (2003). Kondisi Dan Respon Kebijakan Ekonomi Makro Selama Krisis Ekonomi Tahun 1997-98. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 2(2), 97–130. <https://doi.org/10.21098/bemp.v2i2.198>

- Kashi, F.K., & Tash, M. N. (2014). Effects of Macroeconomic Variables on Poverty in Iran (Application of Bootstrap Technique. *Theoretical and Applied Economics*, XXI(5), 85–96.
- Khatibu, G. M., & Cheyo, M. B. (2014). Government Expenditure on Growth Strategies and Poverty Reduction in Tanzania. What Have We Learned? *African Journal of Economic Review*, 2(1), 38–47.
- Mehmood, R., & Sadiq, S. (2010). The Relationship between Government Expenditure and Poverty: A Cointegration Analysis. *Romanian Journal of Fiscal Policy*, 1(1), 29–37.
- Nainggolan, E. U. (2020). *Kebijakan Fiskal dan Moneter Mengadapi Dampak Covid-19*. DJKN. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13017/Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter-Mengadapi-Dampak-Covid-19.html>
- Nwosa, P. (2016). Financial Institutions and Services Impact of Macroeconomic Policies on Poverty and Unemployment Rates in Nigeria, Implications for Attaining Inclusive Growth. *Acta Universitatis Danubius*, 12(2), 114–126.
- Pohan, A. (2008). *Kerangka Kebijakan Moneter & Implementasinya di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Romer, C., & Romer, D. (1998). *Monetary Policy and Well-Being of The Poor*.
- Sianturi, V. G., Syafii, M., & Tanjung, A. A. (2021). Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus (2016-2019). *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(2), 125–133. <https://doi.org/10.33059/jse.v5i2.4270>
- Tanjung, A. A., Daulay, M., Irsad, I., & Ruslan, D. (2019). The impact of monetary and fiscal policy on poverty in Indonesia. *Journal of Applied Economic Sciences*, XIV(4(66)), 1068–1073. [https://doi.org/10.14505/jaes.v14.4\(66\).12](https://doi.org/10.14505/jaes.v14.4(66).12)
- Teweldemedhin, M. (2014). Impact of Macroeconomic Policies on Poverty Alleviation in Sub-Saharan African Countries. *Journal of Development and Agricultural Economics*, 6(8), 63–75.

Strategi Implementasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Kaki Gunung Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

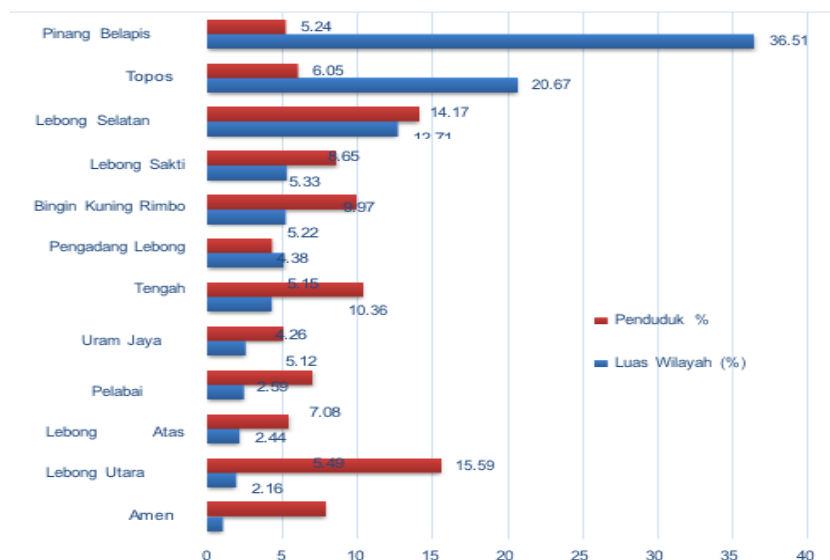
Dewi Aprida, Ida Ariyani, Susianti, Retno Febriyastuti Widyawati

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Ekowisata

Kabupaten Lebong adalah salah satu kabupaten yang terletak di sebelah utara Provinsi Bengkulu dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong. Pembentukan Kabupaten Lebong berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Ibukota Kabupaten Lebong adalah Tubei yang memiliki jarak sekitar 120 km dari Ibukota Provinsi Bengkulu dari tempat kabupaten ini berada (BPS, 2021). Jika dilihat dari batas administratif Kabupaten Lebong dengan daerah sekitar maka adapun batas administratifnya berada pada: 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi; 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong; 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara; 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan luas wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Lebong memiliki luas 1.921,8 km² atau 9.65 persen dari total luas wilayah Provinsi Bengkulu secara keseluruhan. Dengan luas ini, Kabupaten Lebong menempati urutan ke lima dari 10 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Lebong terdiri atas 12 kecamatan, 11 kelurahan dan 93 desa. Sebagian besar wilayah Kabupaten Lebong memiliki topografi bergunung-gunung yang membentang dari utara ke selatan. Berdasarkan gambar 1.1. dijelaskan bahwa kecamatan Pinang Belapis memiliki wilayah terluas atau sekitar 36.51 persen dari total luas wilayah Kabupaten Lebong secara keseluruhan. Kemudian disusul oleh

kecamatan Topos dengan luas wilayah sebesar 20.67 persen. Adapun kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil yaitu kecamatan Amen yang memiliki luas wilayah hanya 1.04 persen. Sementara untuk jumlah penduduk, Kabupaten Lebong Utara dan Lebong Selatan tercatat memiliki jumlah penduduk yang paling tinggi, yaitu masing-masing sebesar 15.59 persen dan 14.17 persen.



Gambar 1.1. Distribusi Luas Wilayah dan Penduduk Tahun 2020

Sebagian besar wilayah Kabupaten Lebong memiliki topografi hamparan yang bervariasi, mulai dari bukit-bukit sampai pegunungan dan didominasi oleh pegunungan yang terbentang dari utara ke selatan serta terklasifikasi sebagai daerah bukit pada ketinggian 500-1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sebesar 58,80 persen wilayah Kabupaten Lebong berada pada ketinggian 500-1000 mdpl, 33,44 persen berada pada ketinggian 1000-1500 mdpl, dan sisanya 7,76 pada ketinggian 0-500 mdpl.

Berdasarkan aspek Geografi dan Demografi tersebut di atas maka Kabupaten Lebong memiliki potensi yang sangat besar untuk pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu permasalahan

pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan/ *poverty*. Untuk itu diperlukan strategi atau pendekatan yang berdaya guna untuk mendukung dan memasarkan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lebong.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Lebong. Penyebaran objek wisata di Kabupaten Lebong memiliki beragam potensi destinasi wisata yang menampilkan keindahan alam, keragaman, dan keunikan budaya. Semua potensi tersebut menjadi salah satu modal besar dalam mengembangkan industri pariwisata. Secara khusus, beberapa wisata tersebut terdiri atas Wisata Alam (*Natural Tourism*) sebanyak 19 destinasi, Wisata Budaya (*Culture Tourism*) sebanyak 7 destinasi dan Wisata Buatan (*Artificial Tourism*) sebanyak 4 destinasi.

Tabel 1.1. Jumlah Destinasi Wisata yang Dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Wisata Alam <i>Natural Tourism</i>	Wisata Budaya <i>Culture Tourism</i>	Wisata Buatan <i>Artificial Tourism</i>	Wisata Sejarah <i>Historical Tourism</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bengkulu Selatan	14	-	6	8
2.	Rejang Lebong	15	1	4	-
3.	Bengkulu Utara	25	-	5	-
4.	Kaur	23	-	-	2
5.	Seluma	17	-	3	3
6.	Mukomuko	26	-	3	3
7.	Lebong	19	7	4	-
8.	Kepahiang	5	-	2	-
9.	Bengkulu Tengah	21	-	4	-
10.	Kota Bengkulu	8	1	5	10
	Provinsi Bengkulu	173	9	36	26

Sumber: BPS, Provinsi Bengkulu Dalam Angka, 2021.

Selain dari pariwisata yang memang sudah ada, pemberdayaan masyarakat Kabupaten Lebong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat diprioritaskan pada bidang pertanian dan perkebunan sesuai dengan geografi dan demografi wilayahnya yang kesemuanya ini sekaligus dapat dijadikan sebagai kegiatan ekowisata daerah. Ekowisata

sendiri dapat diartikan sebagai perjalanan wisata ke suatu lingkungan baik alam alami maupun buatan serta budaya yang ada yang bersifat informatif dan partisipatif. Tujuannya adalah untuk menjamin kelestarian alam, kesejahteraan masyarakat setempat, dan sosial budaya. Selain itu kegiatan ekowisata secara langsung memberikan akses kepada semua orang untuk melihat, mengetahui, dan menikmati alam, intelektual, dan budaya dari masyarakat lokal.

Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekowisata maka diperlukan strategi yang matang. Menurut Tjiptono (2000:17) strategi adalah pendekatan secara langsung terhadap ide, perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, dan temanya untuk menentukan faktor-faktor pendukung berdasarkan prinsip-prinsip implementasi ide yang rasional, efisiensi pembiayaan dan strategi untuk mencapai tujuan secara efektif.

Pemetaan Sektor Potensi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun masyarakat itu sendiri untuk memperkuat daya kelompok lemah dalam masyarakat. Sementara pemberdayaan sebagai tujuan dilakukan untuk mewujudkan perubahan sosial yaitu membuat masyarakat atau kelompok serta individu menjadi cukup kuat dalam berpartisipasi dan memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial.

Pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lebong diawali dengan dilakukannya pemetaan sektor prioritas yang tercermin pada sebaran komoditas investasi. Pemetaan sektor prioritas dilakukan melalui analisis data sekunder dan kompilasi dari berbagai laporan studi sebelumnya yang telah dilakukan dalam mengidentifikasi berbagai sektor prioritas investasi. Beberapa dokumen yang dimaksud antara lain: 1) BKPM, 2019. *Strengthening the Regional Potential Map and Investment Opportunity in* 2019; 2) DPMTSP Prov. Bengkulu, 2017. *Masterplan Pengembangan Penanaman*; 3) Modal (Peta Investasi dan *Grand Strategy*) Provinsi Bengkulu; 4) RPJMD Kabupaten Lebong, 2021-2026; 5) LDA, Kabupaten

Lebong Dalam Angka 2021. Pemetaan sektor prioritas pemberdayaan diterangkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Pemetaan Sektor Prioritas Pemberdayaan Masyarakat

No	Sektor	Sektor Investasi	Dokumen Rujukan			
			BKPM	DPMTSP Prov. Bengkulu	RPJMD Kab. Lebong	LDA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pertanian dan	Padi Sawah	-	√	√	√
2.	Hortikultura	Jeruk Gerga	√	√	√	√
3.	Perkebunan	Kopi	√	√	√	√

Sumber: Kompilasi berbagai dokumen.

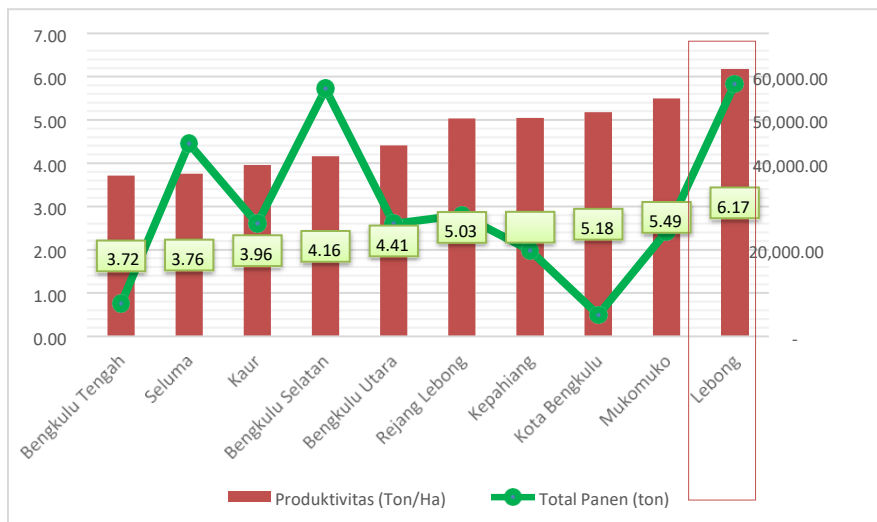
Berdasarkan tabel 2.1. diperlihatkan bahwa secara garis besar ada 3 sektor prioritas pemberdayaan masyarakat yang ada di Kabupaten Lebong di mana pemetaan sektor prioritas mengidentifikasi 3 potensi unggulan Kabupaten Lebong yaitu padi sawah, jeruk gerga dan kopi. Pemilihan 3 sektor prioritas pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi dan peluang investasi daerah ini yang melalui lima kriteria yaitu kebutuhan investasi, ketersediaan infrastruktur, keberlanjutan usaha, dampak ekonomi daerah dan nilai ekonomis investasi.

Pengembangan Sektor Prioritas Pemberdayaan Masyarakat

1. Padi Sawah

Padi sawah selain sebagai pemasok bahan makanan pokok juga dapat dikembangkan menjadi ekowisata sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat Kabupaten Lebong. Areal sawah bisa dibuat menjadi tempat ekowisata di mana tempat ini akan menonjolkan pemandangan alami perdesaan yang akan menjadi daya tarik wisatawan lokal khususnya wisatawan yang tinggal di daerah perkotaan dan juga wisatawan asing. Areal sawah jika dikemas dengan konsep ekowisata yaitu dengan cara menjadikannya sebagai tempat wisata di mana wisatawan bisa membeli langsung hasil sawah berupa beras dan juga mencicipi langsung beras tersebut, hal ini merupakan potensi besar dalam meningkatkan ekowisata di Kabupaten Lebong.

Jika melihat produksi padi berdasarkan data luas lahan dan tingkat produksi padi dari berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, terlihat bahwa tahun 2019, Kabupaten Lebong memiliki tingkat produktivitas yang paling tinggi, yaitu sebesar 6.17 ton per hektare dengan total produksi GKG mencapai 58.243 ton. Hasil produksi yang dihasilkan merupakan yang tertinggi di Provinsi Bengkulu pada tahun tersebut.



Gambar 2.1. Tingkat Produktivitas Padi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019
Sumber: BPS, Provinsi Bengkulu Dalam Angka, 2021, data diolah.

Komoditas padi sawah saat di Kabupaten Lebong sebagian besar masih diusahakan satu kali dalam satu tahun (IP100). Mengacu pada data tahun 2018, sebanyak 68.29 persen dari luas lahan produksi padi, masih memiliki Indeks Panen 100 (IP100) atau satu kali panen dalam setahun dan 30.67 persen dengan masa panen 2 kali setahun (IP200). Kecamatan Lebong Selatan merupakan daerah dengan IP200 terbanyak, yang mencapai 1200 Ha, diikuti kecamatan Pinang Belapis, Topos dan Rimbo Pengadang. Berdasarkan data tahun 2018, terdapat juga 100 Ha lahan padi yang telah mencapai IP300 atau masa panen 3 kali dalam setahun seperti yang terdapat di Kecamatan Lebong Atas.

Tabel 2.2. Luas Baku Sawah dan Sebaran IP Padi Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas Baku Sawah	Luas Sawah Berdasarkan IP		
			IP100	IP200	IP300
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Rimbo Pengadang	311	6	305	-
2.	Topos	459	23	436	-
3.	Lebong Selatan	1.498	242	1.256	-
4.	Bingin Kuning	1.311	1.311	-	-
5.	Lebong Tengah	944	932	12	-
6.	Lebong Sakti	1.147	1.141	6	-
7.	Lebong Atas	380	97	177	100
8.	Pelabai	603	301	281	-
9.	Lebong Utara	379	379	-	-
10.	Amen	915	915	-	-
11.	Uram Jaya	668	668	-	-
12.	Pinang Belapis	990	523	467	-
	Jumlah	9.605	6.538	2.936	100

Sumber: BPS, Kabupaten Lebong Dalam Angka, 2021, data diolah.

Dari komposisi Indeks Panen tersebut, terlihat bahwa Kabupaten Lebong masih sangat berpotensi untuk meningkatkan produksi padi dengan peningkatan IP padi menjadi dua kali tanam sehingga semakin meningkatkan produksi padi di Kabupaten Lebong dan mewujudkan Lebong sebagai Lumbung Pangan Provinsi Bengkulu.

2. Jeruk Gerga

Jeruk RGL (Rimau Gerga Lebong) merupakan hasil persilangan jeruk manis (*Citrus Sinensis* Osbeck) dan jeruk keprok (*Citrus Reticulata* Blanco). Tanaman ini beradaptasi dengan baik di dataran tinggi dengan ketinggian 900-1.200 mdpl. Ciri utama ukuran daun besar dan kaku serta kulit buah yang tebal. Karakteristik fisik jeruk RGL di antaranya berat per buah 173-347 gram, ketebalan kulit 0,4-0,5 cm. Warna kulit buah kuning oranye dan warna daging buah oranye. Sedangkan karakteristik kimia dari jeruk RGL di antaranya kadar gula 10,51% (12- 16 Brix), kadar asam 0,92% dan kandungan vitamin C 18,34 mg/100 g.

Jeruk gerga memiliki kandungan air yang tinggi, warnanya kuning oranye dengan rasa yang manis segar, menjadikan jeruk gerga makin diminati konsumen dan sangat potensial untuk dikembangkan. Hal ini dibuktikan dengan semakin tingginya produksi nasional jeruk siam atau

keprok berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi nasional jeruk siam atau keprok di Indonesia pada 2017 sebanyak 2.165.183,8 ton dan pada 2018 sebesar 2.176.596,9 ton yang mengindikasikan betapa potensialnya komoditas ini untuk dikembangkan.

Keunggulan dari jeruk varietas RGL adalah dapat berbuah sepanjang tahun dengan waktu pemanenan dua kali dalam satu tahun pada Mei, Juni, Juli atau pun Oktober, November, Desember. Produksi jeruk gerga tiap tahun di Kabupaten Lebong rata-rata mencapai 2.130 ton per tahun. Kabupaten Lebong merupakan produsen terbesar jeruk gerga di Provinsi Bengkulu. Adapun luas areal perkebunan jeruk gerga itu seluas 142 Ha. Di mana petani menghasilkan rata-rata per satu hektare sebesar 15 ton per tahun. Tapi jeruk gerga ini jikalau dirawat sesuai teknis yang benar maka produksinya bisa mencapai 40 ton per satu hektare.

Jeruk RGL merupakan salah satu produk hortikultura potensial di Provinsi Bengkulu di mana jeruk RGL saat ini sudah dipasarkan ke Bengkulu, Lampung, Jakarta, Sumatera Selatan, Jambi dan Riau. Jeruk yang sebelumnya hanya mengisi ruang pasar tradisional, kini jeruk berkulit tebal ini telah mengisi dan merambah outlet buah dan juga pasar modern. Selain itu jeruk gerga memiliki prospek sebagai ekowisata yang menjanjikan untuk Kabupaten Lebong sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Perkebunan jeruk gerga dapat dijadikan ekowisata di mana wisatawan dapat disuguhkan indahnya pemandangan hijau perkebunan jeruk gerga dan wisatawan dapat pula membeli jeruk tersebut di tempat. Daya tarik ekowisata dari perkebunan jeruk gerga adalah wisatawan selain disuguhkan pemandangan indah perkebunan, juga dapat menikmati langsung segarnya jeruk gerga yang di konsumsi langsung di kebunnya.

Produksi jeruk gerga mayoritas berasal dari Kecamatan Rimbo Pengadang di mana produksinya untuk tahun 2019 dan 2020 secara berturut-turut sebesar 63.053 kuintal dan 52.703 kuintal. Kini sejumlah wilayah di Kabupaten Lebong turut juga mulai menanam jeruk gerga, beberapa kecamatan di Kabupaten Lebong seperti Topos, Lebong Selatan, Bingin Kuning, Lebong Tengah, Lebong Sakti, Lebong Atas, Pelabai dan Pinang Belapis mulai memproduksi jeruk ini.

Tabel 2.3. Produksi Buah Jeruk Siam/KeproK Menurut Kecamatan (Kuintal) Tahun 2019-2020

No.	Kecamatan Subdistrict	Jeruk Siam/Kepron Orange/Tangerine	
		2019	2020*
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rimbo Pengadang	63053	52703
2.	Topos	2.366	1.460
3.	Lebong Selatan	778	349
4.	Bingin Kuning	429	119
5.	Lebong Tengah	173	1.577
6.	Lebong Sakti	36	34
7.	Lebong Atas	356	459
8.	Pelabai	36	680
9.	Lebong Utara	-	-
10.	Amen	-	-
11.	Uram Jaya	-	-
12.	Pinang Belapis	671	304
	Lebong	67.898	57.685

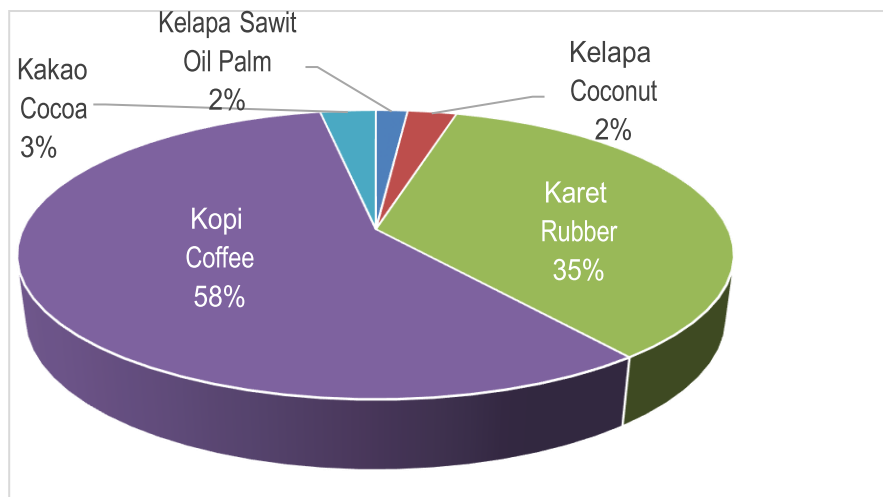
Sumber: BPS, Kabupaten Lebong Dalam Angka, 2021, data diolah.

3. Kopi

Kopi merupakan salah satu komoditas utama perkebunan di Kabupaten Lebong. Tanaman ini umumnya dapat tumbuh baik pada ketinggian tempat 700 meter di atas permukaan laut yang sesuai dengan sebagian besar karakteristik wilayah Kabupaten Lebong. Jenis kopi yang ditanam antara lain kopi robusta dan kopi arabika. Secara keseluruhan, luas perkebunan kopi mencapai 58 persen dari total luas areal perkebunan Kabupaten Lebong, di atas perkebunan karet (35 persen), Kakao (3 persen), Kelapa dan Kelapa Sawit masing-masing hanya persen. hal ini menunjukkan bahwa komoditas kopi merupakan komoditas investasi unggulan yang ada di Kabupaten Lebong.

Kopi selain sebagai komoditas unggulan dapat juga dikembangkan menjadi ekowisata yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Lebong. Ekowisata pada perkebunan kopi akan menyuguhkan pemandangan perkebunan kopi yang indah dan juga penjualan biji kopi yang sudah jadi kepada wisatawan sekaligus dengan menikmati minuman kopi langsung di perkebunan. Ekowisata perkebunan kopi memiliki peluang yang besar mengingat komoditas kopi masih memegang peranan sebagai minuman yang dikonsumsi secara berkesinambungan. Kopi merupakan salah satu jenis minuman yang paling banyak di konsumsi di dunia dan digemari oleh semua kalangan usia sehingga menjadikan kopi

sebagai minuman yang konsumsinya terus meningkat setiap tahunnya. Kopi juga digunakan sebagai minuman yang digunakan dalam melakukan interaksi sosial sehingga dengan pengembangan ekowisata kopi, meminum kopi tidak hanya dilakukan di kedai atau kafe kopi namun bisa langsung di perkebunan kopi. Ekowisata perkebunan kopi akan mampu mendorong perekonomian masyarakat setempat, mengingat 58 persen total areal perkebunan yang ada di Kabupaten Lebong adalah perkebunan kopi.



Gambar 2.2. Persentase Luas Perkebunan Tahun 2020
Sumber: BPS, Kabupaten Lebong Dalam Angka, 2021.

Berdasarkan daerah penghasilnya, kecamatan yang memiliki produksi perkebunan jenis kopi tinggi berada pada Kecamatan Topos dan Lebong Tengah di mana produksinya masing-masing pada tahun 2019 sebesar 5.414,22 kg dan 1.206 kg sedangkan pada tahun 2020 produksi kopi untuk Kecamatan Topos mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 2.045 kg dan Kecamatan Lebong Tengah mengalami peningkatan produksi sebesar 1.558 kg. Sedangkan untuk kecamatan yang masih memiliki tingkat produksi kopi relatif paling rendah pada tahun 2019 yaitu Kecamatan Amen dengan tingkat produksi sebesar 113 kg sedangkan pada tahun 2020 Kecamatan Lebong Utara memiliki tingkat produksi kopi terendah yaitu sebesar 110 kg.

Tabel 2.4. Produksi Jenis Tanaman Kopi Menurut Kecamatan (kg)
Tahun 2019-2020

No.	Kecamatan Subdistrict	Kopi/Coffee	
		2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rimbo Pengadang	930,00	940
2.	Topos	5.414,22	2045
3.	Lebong Selatan	578,50	573
4.	Bingin Kuning	382,60	222
5.	Lebong Tengah	1.206,00	1.558
6.	Lebong Sakti	314,84	177
7.	Lebong Atas	500,00	505
8.	Pelabai	664,14	371
9.	Lebong Utara	201,23	110
10.	Amen	113,00	484
11.	Uram Jaya	916,81	528
12.	Pinang Belapis	642,00	645
	Lebong	11.863,34	8.158

Sumber: BPS, Kabupaten Lebong Dalam Angka, 2021, data diolah.

Strategi untuk Pengembangan Sektor Potensi Pemberdayaan Masyarakat

1. Pemberdayaan pada bidang Sumber Daya Manusia
Seperti membantu masyarakat sekitar untuk mendorong bagi yang mempunyai keinginan mengelola ekowisata padi sawah, jeruk gerga dan kopi. Harus ada pendampingan dari pemerintah dalam pengelolaan ekowisata dalam hal pengembangan SDM sehingga membuka lapangan pekerjaan baru dan hal tersebut dapat membantu peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lebong.
2. Pemberdayaan pada bidang Sumber Daya Alam
Melakukan budidaya penanaman padi sawah, jeruk gerga dan kopi dengan menggunakan bibit unggul serta menata kembali ketiga sektor tersebut melalui pemeliharaan dan pengembangan lahan agar SDAny terus terjaga.
3. Adanya program bimbingan serta pelatihan tentang wisata dan pemandu wisata
Program ini harapannya yaitu bisa menjadi modal guna memperkaya pengetahuan tentang kepariwisataan untuk pihak-pihak pengelola ekowisata padi sawah, jeruk gerga dan kopi. Tujuannya mereka

disiapkan untuk membantu para wisatawan saat berada di objek wisata, agar para wisatawan mengetahui tentang apa itu ekowisata dan juga tidak kebingungan ketika berada di lokasi wisata.

4. Pembangunan infrastruktur

Dukungan pemerintah dalam meningkatkan potensi ekowisata yang ada di Kabupaten Lebong yaitu dengan membangun infrastruktur seperti jalan yang mulus tidak rusak ke tempat-tempat ekowisata padi sawah, jeruk gerga dan kopi.

5. Membangun sarana dan prasarana objek wisata

Guna menarik wisatawan untuk datang ke objek ekowisata padi sawah, jeruk gerga dan kopi maka perlu disiapkan sarana dan prasaran seperti spot-spot foto *selfie* yang sedang tren saat ini yang tentu saja akan dijadikan sebagai momen kenangan pada saat mereka melakukan wisata di kawasan ekowisata tersebut. Dengan dibangunnya sarana dan prasarana yang baik maka hal tersebut diharapkan dapat memicu daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung ke kawasan ekowisata.

Solusi Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lebong guna meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan/ *poverty* yang ada maka ekowisata merupakan sebuah solusi yang mampu mengatasi permasalahan tersebut. Ekowisata sektor prioritas di Kabupaten Lebong yaitu pada sektor pertanian berupa padi sawah dan jeruk gerga sedangkan pada sektor perkebunan berupa kopi. Strategi dalam mengembangkan ekowisata padi sawah, jeruk gerga dan kopi tersebut dengan cara mengembangkan sumber daya manusianya terlebih dahulu lalu mengajak masyarakat sekitar yang ingin bergabung dalam mengembangkan sumber daya alam, pembuatan program bimbingan serta pelatihan tentang wisata dan pemandu wisata serta pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana objek wisata.

Daftar Pustaka

- BKPM. (2020). *Rencana Strategis (Renstra) BKPM Tahun 2020-2024*. (Jakarta: BKPM).
- BKPM. (2021). *Realisasi Investasi PMA & PMDN Triwulan III (Juli-September) 2021*. https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaraan_pers/Paparan_Press_Release_Realisasi_Investasi_Triwulan_III_2021_Bahasa_Indonesia.pdf, diakses pada tanggal 4 November 2021.
- BPS. (2021). *Provinsi Bengkulu Dalam Angka (Bengkulu Province in Figures 2021)*. (Provinsi Bengkulu: Badan Pusat statistik).
- BPS. (2021). *Kabupaten Lebong Dalam Angka (Lebong Regency in Figures 2021)*. (Kabupaten Lebong: Badan Pusat Statistik).
- Budiman, Arif. (2000). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hal.19.
- DPMPTSP. (2017). *Masterplan Pengembangan Penanaman Modal (Peta Investasi dan Grand Strategi)*. (Bengkulu: DPMPTSP).
- Fatchan, H. Ach. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. (Surabaya: Jenggala Pustaka Utama), hal. 78-82.
- Gunawan, Imam. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara), hal. 210.
- Hilmar, Aminuddin. (2004). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media), hal. 88.
- H. Sidik, Salim dan Budi, Sutrisno. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers), hal.129.
- Imron, Ali dan Handayani, Tri. (2016). *Strategi Pemasaran Potensi Investasi Pertanian Di Kabupaten Pemalang*. (Pemalang: STIE Assholeh).
- Kotler, Philip, and Gary Armstrong. (2002). *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Jilid 1, Edisi Kedelapan. (Jakarta: Erlangga).
- Panjaitan, Hulman dan Anner, M Sianipar. (2008). *Hukum Penanaman Modal Asing*. (Jakarta: CV Ind-Hill Co), hal. 47.
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman. (2009). *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 33.

- RPJMD. (2021). *RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Lebong 2021-2026*. (Kabupaten Lebong: Bappeda).
- Sudarmanto. (2009). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 7.
- Sunariyah. (2006). *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), hal. 32.
- Supriatna. (2012). *Meningkatkan Indeks Pertanaman Padi Sawah Menuju IP Padi 400*. Agrin, Vol. 16 No. 1, April 2012. (Jawa Tengah: Universitas Jenderal Soedirman).
- Tjiptono, Fandi. (2000). *Strategi Pemasaran*. Cet. Ke-II (Yogyakarta: Andi), hal: 1.

Peran Sektor Pertanian sebagai Lokomotif Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19

Dudi Septiadi

Pertanian dan Pemulihan Ekonomi Pascapandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang mendalam terhadap seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan global, tetapi juga mengejutkan perekonomian negara-negara di seluruh dunia. Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi, sektor pertanian memegang peran yang sangat penting dan strategis. Bab ini berjudul “Peran Sektor Pertanian Sebagai Lokomotif Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19.” Dalam bab ini, akan menjelajahi peran sektor pertanian sebagai pendorong utama dalam memulihkan perekonomian Indonesia yang terdampak pandemi.

Sektor pertanian memiliki keunggulan khusus dalam menghadapi krisis global seperti pandemi Covid-19. Pertanian adalah sektor yang vital dalam menyediakan kebutuhan pangan bagi penduduk dan memastikan ketahanan pangan suatu negara. Selama periode sulit ini, sektor pertanian terbukti menjadi penyokong utama ketahanan pangan nasional, menjaga pasokan pangan dan mencegah krisis kelaparan.

Namun, peran sektor pertanian tidak terbatas hanya pada ketahanan pangan. Sektor ini juga memiliki potensi yang besar untuk mendorong pemulihan ekonomi secara luas. Melalui kegiatan produksi pertanian, peningkatan nilai tambah dalam rantai pasok pertanian, serta pengembangan industri hilir terkait, sektor pertanian dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan petani, dan menghidupkan kembali perekonomian lokal.

Bab ini akan membahas berbagai aspek peran sektor pertanian dalam pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, dalam bab ini juga akan melibatkan penelitian dan data terkini untuk mendukung argumen yang disajikan. Dengan demikian, pembaca akan mendapatkan wawasan mendalam tentang potensi dan peluang yang ada dalam sektor pertanian untuk membangkitkan ekonomi nasional.

Bab ini ditujukan untuk pembaca yang tertarik dalam memahami peran sektor pertanian dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Kami berharap bab ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif, serta memberikan inspirasi bagi para pembuat kebijakan, praktisi pertanian, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mengambil tindakan yang tepat dalam mengoptimalkan potensi sektor pertanian dan mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam pembahasan selanjutnya, bab ini akan menjelajahi berbagai aspek yang terkait dengan peran sektor pertanian dalam pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19, memberikan wawasan tentang tantangan potensi yang ada. Melalui bab ini, penulis berharap dapat mendorong pembaca untuk melihat sektor pertanian sebagai lokomotif utama dalam memulihkan ekonomi nasional dan membangun masa depan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Peran Sektor Pertanian sebagai Lokomotif Pemulihan Ekonomi

Pandemi Covid-19 telah mengguncang perekonomian global secara mendalam (Czech *et al.*, 2020). Negara-negara di seluruh dunia terpaksa menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan akibat terhentinya aktivitas bisnis, penurunan permintaan, dan gangguan dalam rantai pasok global (Yu *et al.*, 2021). Hal serupa juga berdampak ke Indonesia. Di mana menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2020), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,7%. Ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mengalami deflasi atau penurunan drastis pada tahun tersebut karena pergerakan ekonomi yang tidak stabil. Pandemi juga menyebabkan beberapa aspek kehidupan menjadi sangat terganggu. Disebabkan penurunan biaya operasional dan penurunan permintaan untuk barang dan jasa, perusahaan telah memutuskan hubungan kerja, menyebabkan banyak pengangguran (Gani,

2021). Selain itu pada bulan Agustus 2020, upah gaji pekerja telah turun 5,2 persen dari rata-rata sebesar Rp2,89 juta ke Rp2,76 juta. Ini merupakan konsekuensi ekonomi dari serangan pandemi Covid-19.

Namun, dalam situasi ini, sektor pertanian muncul sebagai penyokong yang kuat dalam upaya pemulihan ekonomi. Salah satunya melalui konsep ekonomi hijau yang erat kaitannya dengan konsep pembangunan berkelanjutan (Suriyankietkaew & Nimsai, 2021). Potensi yang dimiliki sektor pertanian sebagai penyokong pemulihan ekonomi sangat besar, dan dalam bahasan ini akan menjelajahi beberapa alasan mengapa sektor ini berperan penting dalam membangkitkan perekonomian. Beberapa alasan mengapa sektor pertanian memainkan peran strategis dalam pemulihan perekonomian di antaranya adalah;

1. Ketahanan Pangan dan Keamanan Pangan

Salah satu peran kunci sektor pertanian adalah menyediakan ketahanan pangan bagi suatu negara. Pandemi Covid-19 telah mengungkap kerentanan sistem pangan global, dengan terhentinya impor dan ekspor, serta gangguan dalam distribusi makanan. Dalam situasi ini, sektor pertanian menjadi penopang utama dalam menjaga pasokan pangan domestik. Dengan meningkatkan produksi pertanian dan diversifikasi usaha pertanian, negara dapat mencapai ketahanan pangan yang lebih tinggi, mengurangi ketergantungan pada impor pangan, dan memastikan pasokan pangan yang stabil untuk penduduk. Indeks ketahanan pangan Indonesia pada 2022 berada di level 60,2, meningkat dari periode 2020-2021, menurut Global Food Security Index (Katadata, 2022). Namun, ketahanan pangan Indonesia tahun ini masih di bawah rata-rata global yang nilai indeksnya 62,2 dan di bawah rata-rata Asia Pasifik yang indeksnya 63,4. Empat indikator digunakan untuk menghitung indeks ketahanan pangan GFSI 2022: keterjangkauan harga pangan (*affordability*), ketersediaan pasokan (*availability*), kualitas nutrisi (*quality and safety*), dan keberlanjutan dan adaptasi (*sustainability and adaptation*). Sektor pertanian memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan dan keamanan pangan. Di bawah ini adalah penjelasan komprehensif mengenai peran sektor pertanian dalam hal ini:

a) Produksi Pangan.

Sektor pertanian bertanggung jawab untuk memproduksi berbagai jenis makanan yang dibutuhkan oleh populasi. Petani dan produsen pertanian menghasilkan sumber daya pangan seperti tanaman pangan (gandum, beras, jagung, dan lain-lain), buah-buahan, sayuran, daging, susu, dan produk-produk pertanian lainnya. Dengan meningkatkan produksi pangan, sektor pertanian dapat memastikan ketersediaan pangan yang memadai untuk masyarakat.

b) Keamanan Pangan.

Sektor pertanian memainkan peran kunci dalam menjaga keamanan pangan. Ini mencakup tindakan untuk mencegah terjadinya keracunan makanan dan penyakit yang terkait dengan makanan. Petani dan produsen pertanian harus memastikan bahwa metode produksi mereka aman dan mematuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan. Selain itu, sektor pertanian juga terlibat dalam pengendalian hama, penggunaan pupuk yang tepat, dan pengelolaan air yang berkelanjutan untuk memastikan keamanan pangan dari segi kualitas dan kebersihan.

c) Akses Pangan.

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam memastikan akses pangan yang memadai bagi semua orang (Wicaksana, 2022). Melalui distribusi yang efisien dan sistem rantai pasokan yang baik, sektor pertanian memungkinkan makanan sampai ke tangan konsumen. Hal ini melibatkan infrastruktur yang mendukung seperti jaringan transportasi, gudang penyimpanan, dan pasar yang memadai untuk memfasilitasi distribusi dan akses pangan yang mudah. Tantangannya adalah memastikan alur distribusi bisa dikendalikan pemerintah selaku regulator sekaligus operator kebijakan logistik nasional.

d) Pemulihan dan Stabilitas Ekonomi.

Sektor pertanian juga berkontribusi terhadap pemulihan dan stabilitas ekonomi suatu negara. Pertanian menyediakan mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk di negara-negara berkembang, yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan dan mengurangi kemiskinan (Hidayah *et al.*, 2022). Selain

itu, pertanian juga menjadi sumber devisa melalui ekspor produk pertanian (Septiadi & Nursan, 2020). Dengan demikian, sektor pertanian berperan penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi suatu negara.

e) Konservasi Sumber Daya Alam.

Sektor pertanian yang menerapkan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan dapat berkontribusi dalam konservasi sumber daya alam (*Pertanian Terpadu*, 2022). Pengelolaan lahan yang baik, praktik irigasi yang efisien, konservasi tanah, dan penggunaan pupuk organik dapat membantu mengurangi degradasi lingkungan dan mempertahankan keberlanjutan ekosistem (Septiadi *et al.*, 2022). Dengan demikian, sektor pertanian berperan dalam menjaga ketahanan lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem.

f) Inovasi dan Teknologi.

Sektor pertanian terus mendorong inovasi dan pengembangan teknologi dalam produksi pangan. Penerapan teknologi modern seperti irigasi tetes, penggunaan pestisida yang bijaksana, pengolahan pangan, dan penggunaan varietas tanaman unggul dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi. Inovasi juga melibatkan pengembangan metode pertanian yang lebih berkelanjutan, seperti pertanian organik dan pertanian berbasis agroekologi, yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan kimia dan meningkatkan kesehatan tanah (Prihandarini, 2023).

Dengan demikian, sektor pertanian memainkan peran yang penting dalam mendukung ketahanan pangan dan keamanan pangan melalui produksi pangan yang memadai, menjaga keamanan dan kualitas pangan, memastikan akses pangan yang memadai, mendukung pertumbuhan ekonomi, konservasi sumber daya alam, mendorong inovasi dan teknologi, serta menjaga ketahanan lingkungan. Upaya terus-menerus dalam pengembangan dan peningkatan sektor pertanian sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan ketahanan pangan di masa depan.

2. Peran Sektor Pertanian dalam Membentuk Produk Domestik Bruto

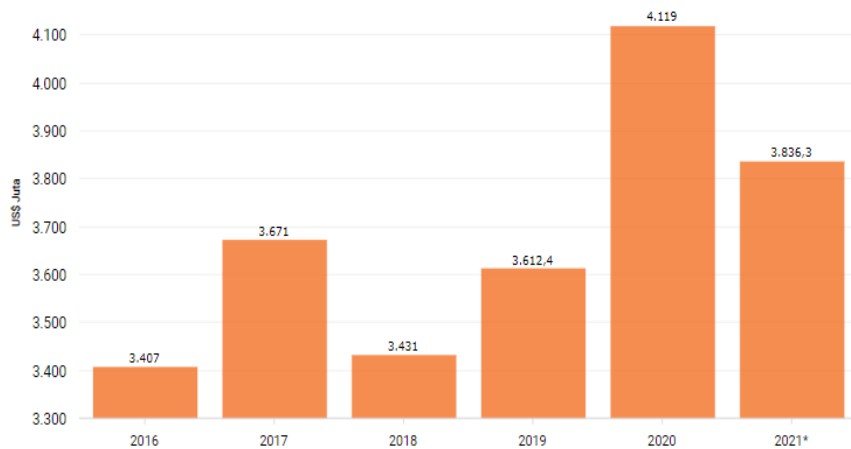
Sektor pertanian memiliki peran yang signifikan dalam membentuk Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB merupakan ukuran nilai ekonomi total dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam batas wilayah suatu negara dalam satu periode waktu tertentu. Berikut adalah beberapa cara di mana sektor pertanian berkontribusi dalam membentuk PDB:

a) Kontribusi langsung melalui nilai produksi

Sektor pertanian berkontribusi secara langsung dalam PDB melalui nilai produksi hasil pertanian. Dari sisi makro ekonomi, Pasca Pandemi Covid-19 sektor pertanian berkontribusi 13,7 persen terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto Indonesia (BPS, 2021). Nilai ini merupakan tertinggi kedua setelah sektor industri. Sektor ini melibatkan produksi berbagai jenis produk pertanian seperti tanaman pangan (seperti padi, gandum, jagung), sayuran, buah-buahan, makanan ternak, daging, produk susu, dan produk pertanian lainnya. Nilai produksi dari sektor pertanian ini dihitung sebagai kontribusi langsungnya terhadap PDB negara.

b) Kontribusi ekspor

Sektor pertanian sering kali menjadi sumber utama ekspor bagi banyak negara. Ekspor produk pertanian seperti biji-bijian, sayuran, buah-buahan, dan produk olahan pertanian dapat memberikan pendapatan devisa yang signifikan bagi negara.



Gambar 1. Nilai Ekspor Pertanian Republik Indonesia Tahun 2016-2021
Sumber: Kemendag, 2021.

Berdasarkan laporan dari Kementerian Perdagangan (2021), tren ekspor produk pertanian Indonesia sejak 2016 nilainya cenderung berubah-ubah. Seperti yang kita ketahui, tahun 2020 adalah tahun awal pandemi COVID-19 di Indonesia, dan ekspor justru mencapai nilai tertinggi yaitu US\$ 4,1 miliar dengan pertumbuhan 14,02% (Gambar 1). Peningkatan ekspor ini dapat menjadi inspirasi untuk mendorong sektor pertanian mencapai kemandirian pangan dan menjadi pemasok makanan global, dengan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Diharapkan sektor pertanian dapat menjadi andalan ekonomi ke depan, bukan hanya selama pandemi.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mendukung pertumbuhan sektor pertanian melalui kebijakan yang mendukung investasi, peningkatan produktivitas, pengembangan pasar, dan akses terhadap teknologi pertanian yang modern. Dengan demikian, sektor pertanian dapat berperan aktif dalam membentuk PDB dan pertumbuhan ekonomi negara.

c) Kontribusi melalui rantai pasokan

Sektor pertanian juga berkontribusi dalam PDB melalui rantai pasokan dan kegiatan terkait yang melibatkan sektor pertanian. Misalnya, industri pengolahan pangan yang menggunakan bahan

baku pertanian akan memberikan kontribusi dalam PDB. Proses pengolahan, pengemasan, distribusi, dan pemasaran produk pertanian juga melibatkan sektor-sektor lain seperti industri makanan, transportasi, perdagangan, dan jasa. Kontribusi ekonomi dari sektor-sektor tersebut akan tercermin dalam PDB negara.

d) **Pertumbuhan sektor pertanian mendorong pertumbuhan ekonomi lainnya**

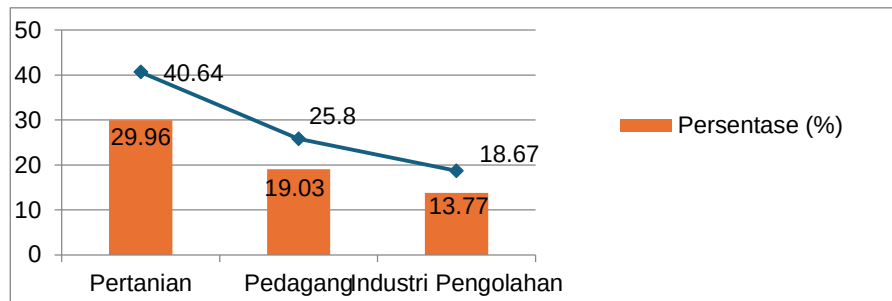
Pertumbuhan sektor pertanian yang kuat dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Sanjaya, 2019). Ketersediaan pangan yang cukup dan stabil dari sektor pertanian membantu menciptakan kestabilan harga dan meningkatkan daya beli konsumen. Hal ini mendorong pertumbuhan sektor lain seperti industri makanan, restoran, perhotelan, dan sektor jasa lainnya yang terkait dengan konsumsi pangan. Pertumbuhan sektor-sektor ini juga akan berkontribusi dalam peningkatan PDB.

3. Penciptaan Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan

Sektor pertanian memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan. Pertanian adalah sektor yang padat karya, dan dengan meningkatnya investasi dan modernisasi dalam pertanian, peluang kerja dapat diperluas baik di sektor primer maupun sektor sekunder yang terkait, seperti pengolahan makanan dan agribisnis (Udayana, 2011). Peningkatan lapangan kerja di sektor pertanian akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, termasuk pendapatan yang lebih tinggi bagi petani dan pengusaha pertanian, serta mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan di berbagai negara. Berikut adalah beberapa cara di mana sektor pertanian berkontribusi dalam hal ini:

a) **Penciptaan Lapangan Kerja.**

Pertanian adalah sektor yang tenaga kerjanya intensif, yang menciptakan peluang kerja bagi jutaan orang, terutama di daerah pedesaan.



Gambar 2. Nilai Perkembangan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Republik Indonesia

Sumber: BPS, 2022.

Pada Februari 2022, total tenaga kerja Indonesia mencapai 135,61 juta jiwa, di mana terdapat 40,64 juta orang di antaranya yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, nilai ini merupakan kontribusi paling tinggi (29,96 persen) dibanding sektor lain dalam menyerap tenaga kerja. Pedagang/perdagangan (besar dan eceran) adalah sektor terbesar kedua dengan nilai 25,8 juta pekerja (19,03%), diikuti oleh industri pengolahan dengan 18,67 juta pekerja (13,77%).

Uniknya dari sektor pertanian adalah sektor ini memiliki keterkaitan dengan sektor lain, sehingga petani, pekerja pertanian, dan pekerja di sektor terkait seperti perdagangan, transportasi, dan industri pengolahan pangan semuanya memberikan lapangan kerja yang signifikan. Dengan mendorong pertumbuhan sektor pertanian, lebih banyak lapangan kerja dapat diciptakan, mengurangi tingkat pengangguran dan memperkuat ekonomi lokal.

b) Peningkatan Pendapatan Petani.

Sektor pertanian dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan petani. Dengan memperbaiki akses petani ke sumber daya produktif, seperti lahan, air, benih, dan input pertanian lainnya, mereka dapat meningkatkan produksi dan produktivitas (Yusuf, Septiadi, Nursan, & Fadli, 2023). Hal ini memungkinkan petani untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik dari hasil panen mereka. Pendapatan yang lebih tinggi dapat

membantu mengangkat petani dari garis kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka serta komunitas pedesaan secara keseluruhan.

c) Pengembangan Usaha Pertanian Kecil dan Mikro.

Sektor pertanian juga berkontribusi pada pengembangan usaha pertanian kecil dan mikro. Banyak petani yang memiliki lahan yang terbatas dan sumber daya terbatas lainnya. Namun, dengan pendekatan yang tepat, seperti penyediaan pelatihan, akses ke pasar, pembiayaan, dan teknologi pertanian yang sesuai, petani kecil dapat mengembangkan usaha mereka (Yunaz *et al.*, 2022). Ini dapat meningkatkan pendapatan mereka, menciptakan lapangan kerja bagi anggota keluarga atau orang lain dalam komunitas, dan mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan.

d) Ketahanan Ekonomi Pedesaan.

Pertumbuhan sektor pertanian yang berkelanjutan dan inklusif berkontribusi pada ketahanan ekonomi pedesaan. Dalam banyak negara, pedesaan seringkali menghadapi tantangan seperti ketidakstabilan harga pangan, fluktuasi iklim, dan ketidakteraturan pasar. Melalui diversifikasi produksi, pelatihan, akses ke pasar, dan pengembangan infrastruktur pedesaan, sektor pertanian dapat membantu meningkatkan ketahanan ekonomi pedesaan. Ini membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan serta mengurangi kemiskinan yang terkait dengan ketergantungan pada sektor pertanian.

Secara keseluruhan, sektor pertanian memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Namun, untuk memaksimalkan kontribusinya, perlu adanya dukungan kebijakan yang tepat, investasi dalam infrastruktur pedesaan, akses ke pasar, pelatihan petani, dan perlindungan sosial yang memadai bagi masyarakat pedesaan.

4. Diversifikasi Ekonomi dan Nilai Tambah Melalui Sektor Pertanian

Sektor pertanian tidak hanya mencakup produksi tanaman dan peternakan, tetapi juga mencakup sektor agroindustri dan pariwisata pedesaan. Diversifikasi ekonomi di pedesaan melalui pengembangan sektor-sektor ini dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian. Agroindustri, misalnya, dapat menghasilkan produk olahan pertanian dengan nilai tambah tinggi, menciptakan kesempatan ekspor, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah (Elizabeth dan Anugrah, 2020). Sementara itu, pariwisata pedesaan memanfaatkan potensi alam, kebudayaan, dan agrikultur di suatu daerah untuk menarik wisatawan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Kebijakan diversifikasi ekonomi dan peningkatan nilai tambah dalam sektor pertanian memiliki urgensi yang tinggi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kebijakan tersebut penting:

a) Ketergantungan pada Sektor Pertanian

Banyak negara masih sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama dan mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk di pedesaan. Ketergantungan yang terlalu tinggi pada sektor pertanian dapat menyebabkan kerentanan ekonomi terhadap fluktuasi harga komoditas pertanian, perubahan iklim, dan risiko bencana alam. Diversifikasi ekonomi dapat membantu mengurangi ketergantungan ini dan menciptakan peluang bisnis baru di sektor non-pertanian.

b) Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan

Diversifikasi ekonomi dan peningkatan nilai tambah dalam sektor pertanian dapat meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat pedesaan secara keseluruhan. Dengan mengembangkan usaha agribisnis, pengolahan pangan, pengemasan, distribusi, dan pemasaran, nilai tambah pada produk pertanian dapat meningkat. Hal ini akan memberikan peluang bagi petani dan produsen pertanian untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

c) Penciptaan Lapangan Kerja

Diversifikasi ekonomi dalam sektor pertanian dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor non-pertanian. Dengan mengembangkan industri pengolahan pangan dan agribisnis, akan ada permintaan tenaga kerja yang lebih besar di bidang-bidang seperti pemrosesan makanan, pengepakan, distribusi, pemasaran, dan layanan terkait lainnya. Ini dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di daerah pedesaan dan meningkatkan kesempatan kerja bagi penduduk setempat.

d) Ketahanan Ekonomi dan Keberlanjutan

Diversifikasi ekonomi dalam sektor pertanian juga berperan penting dalam mencapai ketahanan ekonomi dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas pertanian, negara dapat mengurangi risiko fluktuasi harga dan ketidakstabilan pasar. Selain itu, dengan mengembangkan industri yang lebih beragam, dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan melalui pengelolaan yang lebih baik terhadap sumber daya alam.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan diversifikasi ekonomi dan peningkatan nilai tambah dalam sektor pertanian, diperlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan para pemangku kepentingan terkait. Kebijakan yang mendukung investasi, pelatihan, akses ke pasar, dan perbaikan infrastruktur pedesaan akan menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan ini.

5. Peran Sektor Pertanian sebagai Input Sektor Industri Pengolahan

Sektor pertanian memiliki peran penting sebagai penyedia input utama bagi sektor industri pengolahan. Hubungan yang erat antara sektor pertanian dan industri pengolahan menciptakan sinergi yang saling menguntungkan dan berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Dalam pembahasan ini, akan mengeksplorasi peran sektor pertanian sebagai input kunci dalam sektor industri

pengolahan, termasuk dampaknya terhadap pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan nilai tambah bagi produk olahan.

- a) Pengadaan Bahan Baku Pertanian Sektor pertanian menyediakan bahan baku mentah yang menjadi input penting dalam sektor industri pengolahan.

Bahan-bahan seperti biji-bijian, sayuran, buah-buahan, daging, susu, dan hasil perikanan digunakan dalam berbagai industri pengolahan makanan, minuman, tekstil, obat-obatan, kosmetik, dan lain sebagainya. Sektor pertanian memainkan peran krusial dalam memastikan ketersediaan dan kualitas bahan baku yang diperlukan oleh industri pengolahan.

- b) Nilai Tambah dan Peningkatan Kualitas Proses pengolahan bahan baku pertanian oleh sektor industri menciptakan nilai tambah yang signifikan.

Melalui pengolahan, bahan baku dapat diubah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Misalnya, jagung dapat diolah menjadi tepung maizena, susu dapat diubah menjadi produk susu olahan, dan kulit hewan dapat digunakan dalam industri kulit dan barang-barang kulit. Proses ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan nilai produk dan memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam, sehingga jangkauan pasar produk pertanian semakin luas dan berpotensi meningkatkan pendapatan petani. Selain itu, melalui pengembangan industri pengolahan pangan juga membuka peluang ekspor dan meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar global.

- c) Peningkatan Keberlanjutan dan Inovasi Sektor pertanian juga berperan dalam mendorong keberlanjutan dan inovasi di sektor industri pengolahan.

Permintaan akan produk pertanian yang ramah lingkungan, organik, dan berkelanjutan semakin meningkat. Oleh karena itu, sektor pertanian berperan dalam mengembangkan praktik pertanian yang berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk organik, pengendalian hama yang ramah lingkungan, dan pengurangan limbah pertanian. Selain itu, sektor pertanian juga mendorong inovasi teknologi dalam

proses pengolahan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saing produk industri pengolahan (Yusuf & Septiadi, 2023).

- d) Peran sektor pertanian sebagai input sektor industri pengolahan memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian dan penciptaan lapangan kerja.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan yang didukung oleh pasokan bahan baku pertanian menciptakan peluang lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, pertumbuhan industri pengolahan juga berkontribusi pada peningkatan nilai ekspor dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dengan demikian sektor pertanian memiliki peran penting sebagai input utama bagi sektor industri pengolahan. Dalam hubungan simbiosis antara kedua sektor ini, sektor pertanian menyediakan bahan baku yang vital untuk proses pengolahan, sementara sektor industri pengolahan menciptakan nilai tambah, meningkatkan kualitas produk, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penting bagi pemerintah, pelaku bisnis, dan *stakeholder* terkait untuk memperkuat kerja sama antara sektor pertanian dan industri pengolahan guna meningkatkan daya saing, keberlanjutan, dan kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

6. Inovasi dan Pengembangan Teknologi

Pemulihan ekonomi juga ditopang oleh inovasi dan pengembangan teknologi. Sektor pertanian dapat berperan sebagai motor penggerak dalam mendorong inovasi dan peningkatan teknologi di berbagai bidang, seperti pertanian berkelanjutan (*Eco-Farming*), manajemen sumber daya alam, pemantauan cuaca, penggunaan teknologi informasi, dan digitalisasi pertanian. Penggunaan teknologi canggih dalam sektor pertanian dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing, serta membuka peluang baru untuk ekspansi pasar dan diversifikasi produk. Berikut dijabarkan beberapa konsep inovasi dan pengembangan teknologi dalam sektor pertanian yang mendukung pemulihan ekonomi.

a) Urgensi Penerapan *Eco-Farming* menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu krusial dalam konteks global saat ini. Di tengah perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan pertumbuhan populasi yang terus meningkat, keberlanjutan produksi pangan menjadi prioritas utama. Dalam bahasan ini, akan mengeksplorasi urgensi penerapan *eco-farming* atau pertanian berkelanjutan sebagai upaya untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan.

Ketahanan pangan berkelanjutan mengacu pada kemampuan suatu negara atau wilayah untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka (Sihombing *et al.*, 2021). Hal ini melibatkan produksi pangan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan ekologis. Ketahanan pangan berkelanjutan menjadi penting karena dapat mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan melindungi lingkungan alam.

Eco-farming atau pertanian berkelanjutan adalah pendekatan pertanian yang berfokus pada penggunaan sumber daya alam dengan bijak, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pengurangan penggunaan bahan kimia sintetis. Pendekatan ini mempromosikan praktik-praktik seperti penggunaan pupuk organik, pengendalian hama alami, rotasi tanaman, pengolahan tanah yang berkelanjutan, dan pengurangan limbah pertanian. *Eco-farming* menciptakan sistem pertanian yang lebih seimbang dengan alam, memperkuat ketahanan lingkungan, dan menghasilkan pangan yang lebih sehat dan bernutrisi. Penerapan *eco-farming* memiliki berbagai keuntungan yang signifikan. Pertama, penggunaan pupuk dan pestisida organik mengurangi risiko polusi lingkungan dan kesehatan manusia. Selain itu, *eco-farming* juga mempromosikan keanekaragaman hayati dengan menjaga keseimbangan ekosistem dan habitat alami. Praktik-praktik *eco-farming* seperti rotasi tanaman dan pengendalian hama alami juga dapat meningkatkan kualitas tanah dan mengurangi erosi tanah. Dalam jangka panjang,

eco-farming dapat meningkatkan produktivitas lahan, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan pendapatan petani. Implementasi *eco-farming* membutuhkan dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, pendanaan, dan pelatihan petani. Pemerintah dapat memberikan insentif dan bantuan teknis kepada petani yang menerapkan praktik-praktik *eco-farming*. Selain itu, kampanye penyuluhan dan edukasi juga penting untuk meningkatkan kesadaran petani dan masyarakat akan manfaat dan praktik-praktik *eco-farming*.

Urgensi penerapan *eco-farming* sebagai upaya menuju ketahanan pangan berkelanjutan tidak dapat diabaikan. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya alam, pertanian berkelanjutan menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan menerapkan praktik-praktik *eco-farming*, dapat menjaga keberlanjutan produksi pangan, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dukungan pemerintah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya *eco-farming* akan menjadi kunci kesuksesan dalam mencapai ketahanan pangan berkelanjutan yang diharapkan.

b) Optimalisasi Potensi Pertanian Terpadu menuju Pertanian Berkelanjutan

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan pada sektor pertanian di seluruh dunia. Namun, krisis ini juga memberikan peluang untuk merefleksikan kembali sistem pertanian yang ada dan mengoptimalkan potensi pertanian terpadu menuju pertanian yang lebih berkelanjutan. Dalam bahasan ini, akan menjelajahi pentingnya optimalisasi potensi pertanian terpadu dalam membangun pertanian berkelanjutan melalui integrasi sistem pertanian, penerapan prinsip pertanian berkelanjutan, peningkatan teknologi informasi, serta peningkatan akses dan kapasitas petani.

Salah satu langkah kunci dalam optimalisasi potensi pertanian terpadu adalah integrasi sistem pertanian. Ini melibatkan pendekatan yang holistik, di mana sektor pertanian tidak hanya melibatkan produksi tanaman dan peternakan, tetapi juga melibatkan interaksi dengan sektor lain seperti industri pangan, energi terbarukan, limbah

organik, dan lingkungan (Elizabeth, 2021). Integrasi ini dapat menciptakan sinergi di antara sektor-sektor ini dan mendorong efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam, pengolahan limbah, serta memperkuat keseimbangan ekosistem pertanian.

Pertanian berkelanjutan adalah pendekatan yang menyelaraskan produksi pertanian dengan keberlanjutan ekologis, sosial, dan ekonomi. Dalam pemulihan pasca pandemi, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan sebagai landasan dalam mengoptimalkan potensi pertanian terpadu. Ini termasuk penggunaan metode pertanian ramah lingkungan yang mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, mempromosikan pola tanam yang berkelanjutan, menjaga keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kualitas tanah dan air. Dengan menerapkan pendekatan berkelanjutan, bisa dipastikan bahwa sektor pertanian tidak hanya bertahan dalam jangka panjang, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Pengembangan teknologi dan inovasi di sektor pertanian menjadi sangat penting dalam mengoptimalkan potensi pertanian terpadu. Penggunaan teknologi modern seperti *Internet of Things* (IoT), kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), dan robotika dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi pertanian. Misalnya, penggunaan sensor tanah yang terhubung dengan IoT dapat memberikan informasi real-time tentang kondisi tanah dan kebutuhan air, sehingga petani dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selain itu, inovasi juga diperlukan dalam pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim, pengolahan limbah pertanian menjadi energi terbarukan, dan pengembangan sistem pertanian vertikal yang efisien (Aqil *et al.*, 2013). Contoh kasus berikutnya adalah penerapan inovasi teknologi deteksi suhu dan rekayasa suhu ruangan untuk budidaya ayam potong dan ayam petelur (Nurdiansyah dan Rahman, 2019). Dalam optimalisasi potensi pertanian terpadu, penting untuk meningkatkan akses dan kapasitas petani. Dukungan kebijakan yang melibatkan investasi dalam infrastruktur pertanian, akses ke pasar yang adil,

pendidikan dan pelatihan pertanian, serta keuangan mikro untuk petani kecil sangat penting. Dengan memberikan akses yang lebih baik dan peningkatan kapasitas, petani dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi mereka, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat ketahanan ekonomi mereka.

Dengan demikian optimalisasi potensi pertanian terpadu menuju pertanian berkelanjutan merupakan langkah penting dalam membangun masa depan pertanian yang kuat pasca pandemi Covid-19. Melalui integrasi sistem pertanian, penerapan prinsip pertanian berkelanjutan, pengembangan teknologi dan inovasi, serta peningkatan akses dan kapasitas petani, kita dapat mencapai pertanian yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dalam upaya pemulihan ekonomi, pertanian memiliki peran yang vital dalam menyediakan pangan yang aman dan menjaga ketahanan pangan, sambil juga membuka peluang lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Dengan melihat potensi pertanian secara holistik dan mengambil tindakan yang tepat, sehingga dapat membangun pertanian yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, ekonomi, dan kebutuhan pangan secara global.

Potensi Sektor Pertanian sebagai Penyokong Ekonomi

Sektor pertanian memiliki potensi besar sebagai penyokong pemulihan ekonomi pasca pandemi. Melalui ketahanan pangan, peran sektor pertanian dalam membentuk Produk Domestik Bruto, penciptaan lapangan kerja, diversifikasi ekonomi, sektor pertanian sebagai input sektor industri pengolahan dan inovasi, sektor pertanian dapat memainkan peran penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penting bagi pemerintah, pembuat kebijakan, dan para pemangku kepentingan untuk mengakui potensi ini dan memberikan dukungan yang tepat, termasuk kebijakan yang mendukung investasi, akses ke pasar, pendidikan dan pelatihan, serta infrastruktur pertanian yang memadai. Dengan memanfaatkan potensi sektor pertanian secara optimal, sehingga dapat membangun ekonomi yang kuat, inklusif, dan tahan terhadap krisis di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqil, M., Bunyamin, Z., & Andayani, N. N. (2013). Inovasi teknologi adaptasi tanaman jagung terhadap perubahan iklim. In *Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian* (pp. 39-48).
- Badan Pusat Statistik (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. BPS: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Produk Domestik Bruto Indonesia Berdasarkan Lapangan Usaha*. BPS: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Perkembangan Tenaga Kerja Republik Indonesia*. BPS: Jakarta.
- Czech, K., Wielechowski, M., Kotyza, P., Benešová, I., & Laputková, A. (2020). Shaking stability: COVID-19 impact on the Visegrad Group countries' financial markets. *Sustainability*, 12(15), 6282.
- Elizabeth, R., & Anugrah, I. S. (2020). Akselerasi hilirisasi produk agroindustri berdayasaing mendongkrak kesejahteraan petani dan ekonomi pedesaan. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*. Juli, 6(2), 890-918.
- Elizabeth, R. (2021). Pemakaian Biogas: Hemat Biaya Bahan Bakar dan Tambahan Pendapatan Rumahtangga Mendukung Ketahanan Energi. Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan. *Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan*, 8(3), 151-175.
- Gani, I. "Dampak pandemi covid 19 terhadap sektor usaha di kalimantan timur." *INOVASI* 17.1 (2021): 1-9.
- Hidayah, I., Yulhendri, Y., & Susanti, N. (2022). Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian Negara Maju dan Negara Berkembang: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Salingka Nagari*, 1(1), 28-37.
- Hidayat, A. (2023). *Diversifikasi Usaha Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Dan Ketahanan Pangan Lokal*. Universitas Medan Area.
- Katadata. (2022). Ketahanan Pangan Indonesia Menguat Pada Tahun 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/02/ketahanan-pangan-indonesia-menguat-pada-2022>
- Nurdiansyah, F., & Rahman, A. Y. (2019). Penerapan Teknologi Untuk Mengontrol Suhu Dan Kelembaban Pada Budidaya Ayam Jenis

- Petelor. *JURNAL APLIKASI DAN INOVASI IPTEKS" SOLIDITAS"*(J-SOLID), 2(2), 43-49.
- Prihandarini, R. (2023). *Kapita Selekta Pertanian Organik dan Pertanian Ramah Lingkungan*. Penerbit A-Empat.
- Sanjaya, P. U. (2019). Peran Sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Magetan. *Agrista*, 7(3).
- Septiadi, D., Usman, A., Tanaya, I. G. L. P., & Hidayati, A. (2022). Peningkatan Kapasitas Petani Melalui Aplikasi Inovasi Teknologi Pupuk Organik Cair Berbasis Limbah Pertanian Di Desa Otak Rarangan Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5(3), 350-356.
- Sihombing, E. N., Andryan, A., & Astuti, M. (2021). Analisis Kebijakan Insentif Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jatiswara*, 36(1), 1-10.
- Suriyankietkaew, S., & Nimsai, S. (2021). COVID-19 impacts and sustainability strategies for regional recovery in Southeast Asia: Challenges and opportunities. *Sustainability*, 13(16), 8907.
- Udayana, I. G. B. U. (2011). Peran agroindustri dalam pembangunan pertanian. *Singhadwala*, 44, 3-8.
- Wicaksana, A. Z. (2022). Analisis Peran Sektor Pertanian Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Batu. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 269-276.
- Yunaz, H., Bachri, S., Oktaviani, N. F., Nugroho, L., Septiadi, D., Rachmat, Z., & Tribudhi, D. A. (2022). *Ekonomi Kreatif*. Get Press.
- Yu, Z., Razzaq, A., Rehman, A., Shah, A., Jameel, K., & Mor, R. S. (2021). Disruption in global supply chain and socio-economic shocks: a lesson from COVID-19 for sustainable production and consumption. *Operations Management Research*, 1-16.
- Azmi, Y., Yulistiyono, A., Karyasa, T. B., Putra, R. P., Salama, S. H., Thamrin, N. T., Septiadi, D., Dinata, G.F., Jumiyati, S., dan Rizki, F. H. (2022). *Pertanian Terpadu*. Retrieved from www.globaleksekuatifteknologi.co.id
- Septiadi, D., & Nursan, M. (2020). Optimasi Produksi Usaha Tani Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan. *JURNAL Agrifo*, 5(2).

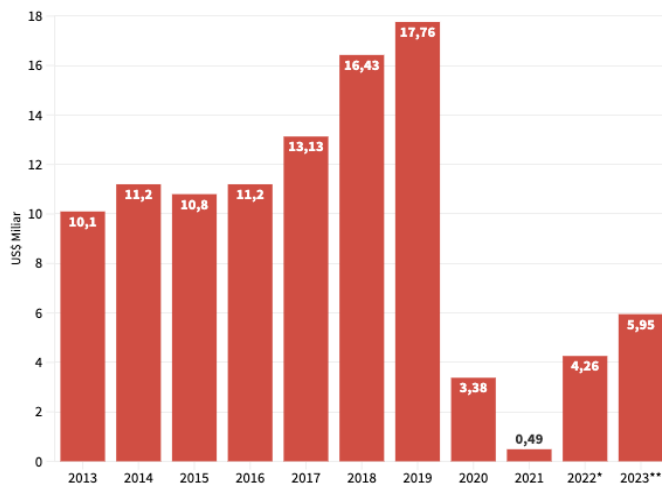
- Yusuf, M., & Septiadi, D. (2023). Investigasi nilai tambah agroindustri kopi robusta di kecamatan batukliang utara, kabupaten lombok tengah. *EDUFORTECH*, 8(1), 17–24.
- Yusuf, M., Septiadi, D., Nursan, M., & Fadli, F. (2023). Analisis Ekonomi Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah tangga Petani Peserta Program Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Kecamatan Sambalia, Kabupaten. *Ganec Swara*, 401–411.

Strategi Desa Wisata Eduwisata Garam dalam Perkembangan Ekonomi Masyarakat

Moh. Zaki Kurniawan, Miftahul Jannah

Destinasi Eduwisata Garam

Pariwisata menjadi tulang punggung Indonesia dalam meningkatkan pendapatan devisa negara. Tercatat menurut DataIndonesia.id di tahun 2022 pendapatan devisa Indonesia melalui pariwisata melejit pada tahun 2022 menjadi US\$ 4.26 Miliar dari nilai sebelumnya yang melonjak hingga 769.39% jika dibandingkan tahun 2021. Hal ini terjadi juga dikarenakan melandainya pandemi Covid-19 sehingga wisatawan melonjak untuk mengunjungi Indonesia. Berikut ini merupakan data pendapatan devisa sejak tahun 2013-2023 (DataIndonesia.id, 2023).



Keterangan: *Data Sementara; **Data sangat Sementara

Gambar 1. Pendapatan Devisa Pariwisata 2013-2023

Adanya peningkatan devisa ini menjadi angin segar bagi Indonesia khususnya yang bergerak dalam bidang pariwisata, pasalnya sejak awal 2020 Indonesia mengalami pengurangan wisatawan baik dari dalam dan luar negeri. Diketahui sebelum pandemi Covid-19 melanda, di tahun 2019 Kementerian Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (KEMENPAREKRAF) mulai menstimulus pemulihan sektor pariwisata, dengan membentuk Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dikatakan bahwa pemerintah menginginkan adanya ‘Bali Baru’ sebagai bentuk menggeliatkan kembali minat wisatawan lokal ataupun mancanegara. Adapun hal tersebut dikenal sebagai ‘10 Bali Baru’ yang terdiri dari: Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika-Lombok (Nusa Tenggara Barat), Bromo- Tengger-Semeru (Jawa Timur), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Tanjung Lesung (Banten), dan Morotai (Maluku Utara) (BPIW, 2020). Lebih lanjut dari daftar destinasi ‘10 Bali Baru’ tersebut, KEMENPAREKRAF membuat daftar lebih minim lagi menjadi 5 destinasi wisata prioritas yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata Super Prioritas, di antaranya: Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang.

Destinasi yang disebutkan dalam 10 Bali baru menyebutkan Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur) sebagai salah satu destinasinya. Hal ini berhubungan dengan aglomerasi megapolitan dari Surabaya Raya yang membentuk GERBANGKERTOSUSILA (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan) sebagai kawasan strategis untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. lebih lanjut, Madura yang diwakili Kabupaten Bangkalan menjadi salah satu daerah yang tergabung dalam integral perencanaan pembangunan Nasional, di mana Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu bagian dari Pulau Madura tidak dapat memisahkan diri dari 3 pilar Kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Sumenep dalam hal peningkatan perekonomian.

Pulau Madura terbagi atas dua pesisir, di antaranya pesisir selatan dan pesisir utara. Pembagian tersebut menegaskan bahwa ke-empat Kabupaten berpotensi memiliki destinasi wisata yang cukup menjanjikan

dari segi pantai yang tersebar sepanjang dua pesisir tersebut. Sebuah kebaruan ditemukan pada tahun 2021 sejak munculnya desa wisata melalui BUMDes Mutiara Saghara yang berlokasi di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan mengadakan *soft launching* Eduwisata Garam Madura. *Soft launching* tersebut bertolak belakang dengan keadaan sektor pariwisata Indonesia yang mengalami penurunan karena Pandemi Covid-19.

Eduwisata Garam Madura bergerak sebagai Destinasi wisata bidang pendidikan, yang dikenal dengan sebutan eduwisata. Laksono (2020) menyatakan eduwisata merupakan konsep perpaduan pariwisata dengan pendidikan. Sementara itu, Richard (2011) menyatakan bahwa eduwisata sebagai salah satu konsekuensi fragmentasi pariwisata budaya yang dibedakan dengan wisata sukarela dan wisata kreatif.

Eduwisata Garam Madura merupakan destinasi wisata baru sehingga membutuhkan strategi untuk keberlanjutan. Terlebih lagi, Eduwisata Garam diluncurkan pada masa pandemi Covid-19 sehingga berkembang menjadi langkah awal dari destinasi tersebut. Fareell & Twining-Ward (2005) menyatakan penelitian berkaitan dengan wisata penting dilakukan untuk membantu dalam memajukan keberlangsungan industri pariwisata. Jelas, keberlangsungan Eduwisata Garam Madura ini bukan hanya berfungsi mendapatkan keuntungan secara spesifik namun berkaitan dengan upaya peningkatan ekonomi masyarakat Desa Bunder, Kabupaten Pamekasan Madura.

Kristiani (2018) berpendapat mengenai pengembangan destinasi wisata oleh BUMDes diklasifikasikan pada usaha kecil dan menengah. Namun, Harms *et al.*, (2009) menemukan bahwa cukup banyak permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi UMKM, khususnya destinasi wisata tersebut. Kurangnya inovasi sebagai pusat permasalahan tersebut. Lebih lanjut, Harms *et al.*, (2009) menemukan solusi bahwa permasalahan UMKM ampuh dihadapi dengan pendekatan sebuah teori yaitu *Entrepreneurial marketing/* pemasaran kewirausahaan.

Penggunaan *entrepreneurial marketing* pada Desa wisata dikarenakan pemasaran tradisional memiliki keterbatasan, yaitu: berfokus pada konsumen dan promosi dalam bauran pemasaran (Morris *et al.*, 2002). Sementara itu, kewirausahaan tidak hanya berfokus pada ilmu

pemasaran tradisional, melainkan dari segi budaya, strategi, dan taktik (Martin, 2009). Diketahui, *entrepneurial marketing* dan pemasaran tradisional memiliki banyak perbedaan di antaranya: (1) budaya: dikenal bahwa pemasaran menciptakan produk berdasar keinginan dan kebutuhan konsumen, sedangkan kewirausahaan berkaitan dengan inovasi pemilik ide dan ukuran reaksi konsumen setelah pengembang produk baru; (2) pengetahuan UMKM memiliki kekurangan pada kompetensi pengembangan pemasaran yaitu teknik dan kemampuan profesional. Sementara itu, pengetahuan pemasaran tradisional cenderung bersifat *expert* atau dikhususkan bagi perusahaan dengan skala yang lebih besar dan paham akan hal tersebut. Oleh karena itu, pembahasan *entrepreneurial marketing* dianggap *fit* sebagai strategi desa wisata Eduwisata Garam Madura dalam perkembangan ekonomi masyarakat Desa Bunder Kab. Pamekasan dengan cara menganalisis potensi dan permasalahan yang dihadapi desa wisata tersebut.

Pemasaran, Pariwisata, dan Eduwisata

2.1 Pemasaran

Manajemen pemasaran adalah salah satu kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya, untuk berkembang, dan untuk mendapatkan laba (Fauzi, 2015). Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan (yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarah, mengkoordinir) serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif (Muadi, 2017). Beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa manajemen pemasaran berfungsi menganalisis untuk mengetahui lingkungan pasar sehingga dapat memperoleh peluang dan mengetahui ancaman yang ada serta dapat memantau rencana, harga yang ditetapkan, promosi untuk mencapai tujuan pemasaran dari perusahaan.

Pemasaran sangat penting untuk bisnis baik bisnis besar maupun kecil. Melakukan pemasaran yang baik perlu untuk memperkenalkan produk kepada pelanggan dan memungkinkan banyak konsumen menjadi tertarik terlebih bisnis memiliki inovatif dan keunikan. Oleh karena itu pemasaran perlu untuk mengenal, memahami pelanggan dan memahami

pokok permasalahan dan dapat membentuk strategi untuk mencapai tujuan perusahaan sehingga produk tersebut dapat terjual dengan sendirinya. Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial (Gunawan 2017). Pemasaran juga mencakup usaha-usaha yang dimiliki perusahaan, mengidentifikasi kebutuhan konsumen agar merasa puas dan menentukan produk yang di produksi juga harga yang akan ditetapkan dan menentukan promosi.

Menurut (Kotler& Keller, 2016) pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan suatu bentuk kegiatan usaha menciptakan produk lalu menawarkan melalui promosi, menentukan atau menetapkan harga dan mendistribusikan produk untuk memenuhi kebutuhannya dan muncul pertukaran nilai dalam bentuk barang, jasa dan ide.

Tujuan pemasaran adalah menarik konsumen untuk meningkatkan penjualan agar produk atau jasa yang diciptakan bisa dikenal oleh pelanggan dan bisa terjual di pasaran. Harus mengenal agar bisa memahami pelanggan sehingga produk yang ditawarkan sesuai dengan keinginan pelanggan dan produk tersebut dapat terjual dengan sendirinya. Prinsip pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan dan tumbuh menjadi keinginan manusia dengan adanya produk (barang, jasa, gagasan), nilai, biaya dan kepuasan, komunikasi dan transaksi, hubungan dan jaringan, pemasaran, pemasar dan calon pembeli.

2.2 Pariwisata

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pariwisata memiliki hubungan dengan sebuah perjalanan rekreasi; pelancongan; turisme. *American Heritage Dictionary* menunjukkan bahwa pariwisata adalah sebuah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Lebih lanjut, pariwisata merupakan sebuah kegiatan bersifat melintasi sektor

konvensional dan membutuhkan masukan dari berbagai aspek yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan alam (Lickorish & Jenkins, 1997).

2.2.1 Ciri-ciri Produk Pariwisata

Terdapat beberapa ciri sebuah produk dikatakan sebagai pariwisata, di antaranya:

- a. Tidak dapat dipindahkan; untuk menikmati tempat wisata, maka wisatawan diharuskan untuk datang dan menikmati tempat wisata tersebut.
- b. Produk dikonsumsi dan dirasakan dalam waktu yang bersamaan;
- c. Pariwisata mempunyai beragam bentuk sehingga tidak memiliki standar
- d. Bersifat mengandung risiko besar dan bersifat dinamis.

2.2.2 Bentuk Pariwisata

Bentuk pariwisata menurut Pendit (1986) terbagi menjadi lima bagian berdasarkan:

- a. Asal wisatawan

Asal wisatawan dibedakan menjadi dua yaitu dalam negeri atau luar negeri. Jika wisatawan berasal dari dalam negeri maka disebut pariwisata domestik. Namun, ketika wisatawan berasal dari luar negeri maka disebut dengan pariwisata internasional.

- b. Neraca Pembayaran

Ketika wisatawan datang dari luar negeri, maka akan terjadi pemasukan valuta asing terhadap negara tujuan wisata. Sehingga, akan memberikan pengaruh positif pada neraca pembayaran negara tujuan, sehingga disebut pariwisata aktif. Sebaliknya, negara asal dari wisatawan tersebut mengalami dampak negatif dari kepergian wisatawan sehingga disebut pariwisata pasif.

- c. Menurut jangka waktu

Perbedaan periode ketika berwisata diperhitungkan sebagai lamanya wisatawan tinggal di suatu tempat. Hal tersebut menyimpulkan pariwisata terbagi menjadi 2 yaitu jangka pendek dan jangka panjang.

- d. Jumlah Wisatawan
Jumlah wisatawan yang berbeda memberikan perbedaan untuk bentuk pariwisata. Ketika wisatawan datang sendiri, maka disebut pariwisata tunggal. Sedangkan wisatawan yang datang dalam jumlah yang besar maka disebut wisatawan rombongan.
- e. Alat angkut yang digunakan
berdasarkan alat angkutnya, maka pariwisata terbagi atas pariwisata udara, pariwisata laut, pariwisata kereta api, ataupun pariwisata mobil pribadi. Semuanya tergantung pada alat angkut yang dipergunakan ketika berwisata.

2.2.3 Jenis Pariwisata

Petit (1986) juga membagi wisata menjadi beberapa macam jenis, di antaranya:

- a. Wisata Budaya
Wisatawan yang menikmati kesenian dan kebudayaan sebagai tujuan wisatanya maka disebut dengan wisata budaya.
- b. Wisata Kesehatan
Tidak sedikit wisatawan memilih untuk berpindah tempat untuk istirahat baik jasmani dan rohani sebagai tujuan wisatanya.
- c. Wisata Olahraga
Perjalanan wisatawan dengan tujuan berolahraga disebut dengan wisata olahraga. Misalnya: seseorang memutuskan pergi ke Bali untuk melakukan *surfing*.
- d. Wisata komersial
Wisata ini dilakukan untuk tujuan yang bersifat komersial misalnya: mengunjungi pameran-pameran seperti pameran industri.
- e. Wisata Industri
Wisata ini dipilih dengan tujuan untuk mengunjungi kompleks perindustrian, misalnya: pabrik
- f. Wisata Politik
Jenis wisata ini dipilih untuk berperan aktif dalam kegiatan politik.

- g. **Wisata Konveksi**
Wisata konveksi mirip dengan wisata politik, hanya saja yang membedakan yaitu terdapat pelayanan penyediaan ruangan untuk kalangan peserta.
- h. **Wisata Sosial**
Jenis wisata ini bersifat sebagai pengorganisasian untuk memberikan kesempatan berwisata bagi kalangan ekonomi rendah.
- i. **Wisata Pertanian**
Wisata ini bertujuan untuk berwisata ke lokasi pertanian, perkebunan, dan ladang.
- j. **Wisata Bahari**
Tujuan dari wisata ini berhubungan dengan kegiatan di air ataupun laut.
- k. **Wisata Cagar alam**
Wisata ini berkaitan dengan cagar alam dan taman lindung sebagai tujuan berwisata.
- l. **Wisata Buru**
Dilakukan di hutan yang diperbolehkan untuk tujuan berwisata.
- m. **Wisata *Pilgrim***
Banyak wisatawan yang bertujuan untuk datang ke tempat yang dianggap suci, sejarah agama, ataupun kepercayaan.
- n. **Wisata Bulan Madu**
Jenis wisata ini dilakukan oleh sepasang pengantin baru yang dianggap sebagai hadiah dalam pernikahan keduanya.

2.2.4 Wisatawan

Mengenai wisatawan, banyak sekali ditemukan definisi mengenai hal tersebut, namun yang mendasari definisinya yaitu berasal dari kata *'tour'* atau wisata yang mengerucut pada perjalanan sebagai maknanya. Menurut *The Oxford English Dictionary* wisatawan merupakan seseorang yang sedang mengadakan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, khususnya rekreasi, perjalanan pada tempat yang menyenangkan atau budaya, mengunjungi tempat yang menarik atau yang disukai. Lainnya, menyatakan bahwa wisatawan merupakan seseorang yang melakukan perjalanan untuk bersenang-senang. Ogilvie dalam Cohen (1974)

menyatakan bahwa pada saat ini wisatawan menggunakan ilmu sosialnya ketika berwisata, seorang wisatawan akan melakukan perjalanan untuk rekreasi atau kesenangan, dalam dunia ekonomi wisatawan adalah seorang konsumen bukan produsen. Cohen (1974) mengelompokkan wisatawan menjadi 6 ciri wisatawan, di antaranya:

- a. *Permanency*, untuk membedakan perjalanan wisatanya dilakukan secara berpetualang (*tramp*) atau pengembara (*nomad*).
- b. *Voluntariness*, yaitu seseorang yang melakukan perjalanan dengan sifat sukarela atas kemauan sendiri, serta keinginannya secara bebas. Lebih lanjut dia bisa menghentikan perjalanannya kapan pun wisatawan tersebut mau.
- c. *Direction (Round trip)*, merupakan perjalanan pulang pergi yang dilakukan wisatawan yaitu melalui satu arah pindah ke negara lain.
- d. *Distance (Relatively Long Journey)*, yaitu perjalanan wisata yang relatif panjang dan bukan dalam waktu yang singkat ketika bertamasya. Keadaan inilah yang membedakan dengan wisatawan yang berjelajah sehari atau wisata biasa. Ketentuan waktu perjalanan wisata tidak dapat ditentukan seperti perjalanan pada umumnya, tergantung keadaan, karakteristik lain dari wisatawan serta alam atau lingkungan dalam perjalanannya.
- e. *Recurrency*, perjalanan wisatanya tidak dilakukan secara berulang, dan bukan merupakan sebuah perjalanan wisata yang dilakukan secara teratur dan biasa dilakukan.
- f. *General dan Specific Purpose*, Wisata memiliki tujuan yang berbeda dengan perjalanan dalam rangka bisnis, atau perjalanan yang dilakukan oleh pedagang, bersifat politikal, dan tujuan untuk agama/ziarah.

2.2.5 Eduwisata

Pendidikan atau edukasi merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi seseorang, kelompok, atau komunitas sehingga mereka melakukan sesuatu yang diharapkan praktisi pendidikan (Notoadmojo dalam Sofia *et al.*, 2022). Pendidikan merupakan kebutuhan semua orang. Bahkan dalam pembukaan UUD 1945 Indonesia menekankan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi cita-cita

negara Indonesia. Mengenai pendidikan memang dibutuhkan sebuah metode yang menarik sehingga ilmu dapat terserap dengan optimal.

Pada dasarnya pendidikan juga dapat disandingkan dengan wisata yang kemudian dikenal dengan sebutan eduwisata. Eduwisata merupakan sebuah konsep yang memadukan kegiatan pariwisata dengan kegiatan belajar (Laksono, 2020). Pendidikan yang dimaksud dalam wisata kali ini merupakan program yang dapat diikuti oleh wisatawan dengan mendapatkan pengalaman serta pembelajaran secara langsung dari tempat wisata yang dikunjungi (Setyawan dalam Sofia *et al.*, 2022).

Berbagai definisi dan literatur muncul untuk mendefinisikan eduwisata, Richard dalam Sofia *et al.*, (2022) menyatakan bahwa eduwisata merupakan konsekuensi fragmentasi pariwisata budaya dan berbeda dengan wisata sukarela dan wisata kreatif. *The City of Cape Town* dalam McGladdery & Lubbe dalam Sofia *et al.*, (2022) menyatakan bahwa yang termasuk eduwisata di antaranya ekowisata, wisata warisan, wisata pedesaan/pertanian, dan pertukaran pelajar pada institusi pendidikan.

Menurut Pitman dalam Sofia *et al.*, (2022) eduwisata menggambarkan adanya pembelajaran yang disengaja dan pengalaman yang bersifat eksplisit. Lebih lanjut, Pitman juga mengidentifikasi terdapat tiga fitur dalam pengalaman eduwisata, di antaranya:

1. Pariwisata difokuskan pada pendidikan;
2. Pengalaman merupakan metode pembelajaran dalam eduwisata;
3. Perjalanan pariwisata disusun berdasarkan program pendidikan.

Berdasarkan definisi di atas maka, dapat disimpulkan bahwa eduwisata adalah pariwisata yang digabungkan dengan pendidikan sebagai konsepnya. Dalam pariwisata tersebut terdapat program yang sudah disusun agar menghasilkan pengalaman bagi penikmat wisata sebagai *output*-nya.

2.2.6 Strategi *Entrepreneurial Marketing*/Pemasaran Kewirausahaan

Wirausaha bukanlah seseorang yang ahli dalam bidang dan teori pemasaran (Stokes, 2000). Menurut Martin (2009) Strategi Pemasaran kewirausahaan memiliki 4 faktor sebagai pembentuknya, di antaranya:

1. **Praktik**, teori *Entrepreneurial Marketing* dilihat dari segi praktik menjelaskan bahwa pemilik usaha diwajibkan memiliki inovasi dalam pemanfaatan Sumber daya keuangan yang terbatas.
2. **Tujuan**, Teori *Entrepreneurial Marketing* menekankan adanya tujuan berdirinya sebuah Usaha Kecil dan Menengah (UKM), termasuk destinasi wisata.
3. **Orang**, teori *Entrepreneurial Marketing* berdasarkan individu tau kelompok yang berada di balik sebuah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).
4. **Proses**, Faktor ini membicarakan mengenai pemahaman untuk analisis pengembangan pasar.

Eksplorasi Eduwisata Garam

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan *fishbone diagram* sebagai alat analisis untuk mengetahui potensi dan permasalahan yang dialami oleh Eduwisata Garam Madura. Informan yang dipilih yaitu informan bersyarat atau sampel bersasaran dengan kriteria yaitu informan yang menjawab merupakan informan dengan usia minimal 17 tahun.

Tabel 3.1 Gambaran Kriteria Informan

No.	Informan	Kriteria Informan
1	Pengelola Wisata	- Mengelola sejak destinasi dibangun
2.	Petani Garam	- Bertani garam sejak sebelum dan sesudah destinasi ada
3.	Kuli Garam	- Bekerja sejak sebelum dan sesudah destinasi ada

Berdasarkan kriteria informan tersebut, maka diperoleh informan dengan jumlah 7 informan yang terdiri dari: 3 informan dari pengelola wisata, 2 informan dari petani garam, 2 dan 2 informan dari kuli garam. Strategi yang akan digunakan untuk pemecahan permasalahan yaitu dengan menggunakan analisis *fishbone diagram*. Alat tersebut digunakan untuk menganalisis informasi dari informan sehingga ditemukan permasalahan yang dihadapi Eduwisata Garam Madura.

Tahapan penelitian kualitatif yang digunakan juga didasari dengan menggunakan model Miles dan Huberman (1984) dengan penyajian data

berupa diagram sebagai ilustrasi di lapangan. Model tersebut disebut dengan matriks tata peran. Dari hasil matriks tata peran tersebut, kemudian akan dikelompokkan menjadi faktor-faktor permasalahan dengan analisis *fishbone diagram*.

Gambaran Strategi Desa Wisata Dalam Perkembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Strategi *Entrepreneurial Marketing*

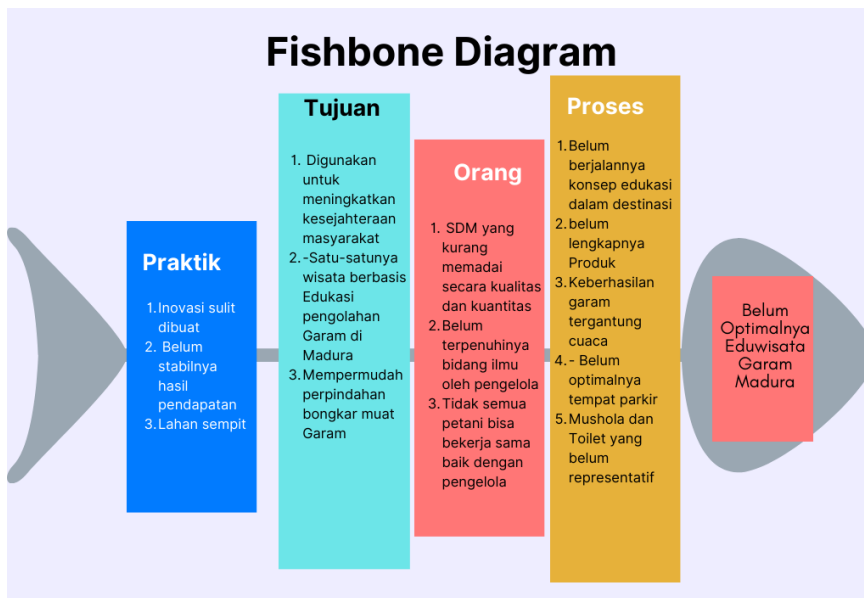
Berikut ini merupakan hasil Matriks Tata peran yang akan disajikan dalam Tabel 4.1 untuk mempermudah penjelasan dari hasil wawancara dengan informan. Lebih lanjut, Matriks tata peran ini berisi permasalahan yang dihadapi pihak informan sejak berdirinya Eduwisata Garam Madura.

Tabel 4.1 Matriks Tata Peran

No.	Informan	Potensi	Permasalahan
1	Pengelola	- Digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat - Meningkatkan harga garam krosok - Satu-satunya wisata berbasis Edukasi pengolahan Garam di Madura	- SDM yang kurang memadai secara kualitas dan kuantitas - Inovasi sulit dibuat - Belum terpenuhinya bidang ilmu oleh pengelola - Belum berjalannya konsep edukasi dalam destinasi - belum lengkapnya Produk - Belum stabilnya hasil pendapatan - Lahan sempit - Keberhasilan garam tergantung cuaca - Belum optimalnya tempat parkir - Musala dan Toilet yang belum representatif
2.	Petani Garam	- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat - Mempermudah perpindahan bongkar muat Garam	- Tidak semua petani bisa bekerja sama baik dengan pengelola - Stigma perebutan lahan
3.	Kuli Garam		- Kualitas SDM yang belum mumpuni - Belum dapat bekerja sama dengan baik

Hasil matriks tata peran berisi mengenai potensi dan permasalahan yang dialami pihak pengelola, petani garam, dan kuli garam terhadap Eduwisata Garam Madura. Selain itu, matriks tersebut mengemukakan

potensi yang dimiliki Eduwisata jika dilihat dari sisi ketiga informan tersebut. Matriks tata peran diolah melalui *fishbone diagram* yang dapat dilihat melalui Gambar 4.1 berikut untuk mempermudah melihat hasil.



Gambar 4.1 Fishbone Diagram

Berdasarkan Gambar 4.1 maka ditemukan potensi dan permasalahan yang dihadapi Eduwisata Garam Madura yang dipetakan melalui *Fishbone Diagram*. Segala keterbatasan yang dimiliki oleh Eduwisata ini maka diperlukan cara agar memiliki keberlanjutan usahanya. Penggunaan teori pemasaran tradisional dianggap tidak cocok digunakan dalam desa wisata, sehingga perlu ada teori lain yang dianggap cocok yaitu dengan *Entrepreneurial Marketing*. Gambar 4.1 menjelaskan 4 dimensi pada *Entrepreneurial Marketing* (Martin, 2009).

- a. **Praktik**, merupakan persepsi terhadap inovasi yang dilakukan dalam pemanfaatan Sumber daya keuangan yang terbatas. Jika ditelaah lebih dalam, Eduwisata Garam Madura merupakan Destinasi wisata dengan usia muda. Hal ini menjadi pokok permasalahan karena pengelola destinasi harus beradaptasi dengan

lingkungan bisnis yang tidaklah mudah. Sumber daya keuangan yang dimiliki oleh pengelola bisa saja cukup untuk pengelolaan destinasi. Namun, pengelola tidak dapat bergantung sepenuhnya dengan dana tersebut karena sering ditemukan keterlambatan pencairan dana (ekbis.sindonews.com). Relatif mudanya usia Eduwisata Garam Madura menyebabkan belum stabilnya hasil pendapatan. Lebih lanjut, diketahui bahwa pada saat kegiatan *soft launching* Eduwisata Garam Madura diketahui pengunjung membludak hingga ribuan yang datang mengunjungi Eduwisata Garam Madura. Namun, keadaan tersebut hanya berlangsung tak lama. Setelahnya, Eduwisata Garam Madura mulai sepi pengunjung hingga menyebabkan tidak stabilnya pendapatan. Padahal, cukup banyak biaya yang dibutuhkan untuk tindak lanjut destinasi wisata. Sepinya pengunjung membuat pengelola kewalahan sehingga rencana tindakan inovasi sangat sulit dilakukan. Lebih lanjut, lahan yang dimiliki Eduwisata Garam Madura bukan dimiliki oleh pihak Desa, melainkan perseorangan yang kemudian digunakan untuk sistem sewa. Biaya yang cukup banyak mengharuskan pengelola Eduwisata Garam Madura merencanakan inovasi sehingga mampu menarik investor bergabung dengan destinasi tersebut. Hal ini bertujuan agar keberlanjutan destinasi Eduwisata Garam Madura tetap berlangsung sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bunder, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan Madura.

- b. **Tujuan**, merupakan persepsi terhadap tujuan berdirinya sebuah Usaha Kecil dan Menengah (UKM), termasuk destinasi wisata. Tujuan terlihat sebagai potensi dari Eduwisata Garam Madura. Tak sedikit yang setuju bahwa adanya Eduwisata Garam Madura berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar. Munculnya tempat makan dan perekrutan karyawan dari masyarakat sekitar menjadi salah satu contoh nyata manfaat dari Eduwisata Garam Madura.

- c. **Orang**, merupakan persepsi terhadap individu tau kelompok yang berada di balik sebuah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Karyawan dan pengelola yang direkrut dengan *basic* masyarakat sekitar tidak cukup menjanjikan jika dilihat dari kuantitas sumber daya manusianya. Berdasarkan hasil wawancara, pengelola mengiyakan kejadian tersebut. Petani garam pun juga bersinggungan dengan Eduwisata Garam Madura. Pemikiran yang belum terbuka akan adanya destinasi wisata hingga ketidak setujuan dibukanya destinasi tersebut cukup menjadi polemik lain dari sisi pihak-pihak yang bersangkutan. Kerja keras diperlukan kembali sehingga penting jika diadakan pelatihan-pelatihan untuk karyawan sehingga dapat meng-*update* ilmu mereka. Lebih lanjut, pemahaman bagi petani garam sekitar juga penting dilakukan guna membuka pemikiran mereka dengan dibukanya destinasi wisata.
- d. **Proses**, merupakan persepsi terhadap analisis pengembangan pasar. Eduwisata Garam Madura merupakan destinasi dengan tujuan sebagai bagian dari edukasi. Namun, jika terbatas pada edukasi saja maka destinasi tersebut hanya memberikan sekat sendiri sehingga tidak mampu berkembang. Perlu adanya pengembangan pasar dengan menambah fasilitas sehingga mampu menarik perhatian pengunjung lain, misal Generasi milenial dengan menambah fasilitas spot *instagramable* sehingga mereka tertarik ke lokasi tersebut. Lebih lanjut, cukup banyak fasilitas-fasilitas yang wajib dibenahi seperti toilet dan musala yang representatif. Ide untuk buka malam hari sehingga membuat penginapan *camp* di bulan Purnama juga menjadi ide yang bisa dicoba untuk menarik perhatian pelancong yang menyukai alam, misal: fotografer.

Urgensi Pembenahan Permasalahan Berdasarkan *Entrepreneurial Marketing*

Berdasarkan hasil yang sudah dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa cukup banyak permasalahan yang masih harus dibenahi jika dilihat berdasarkan *Entrepreneurial Marketing*. Teori ini yang terbagi atas 4 dimensi, di antaranya: Praktik, Tujuan, Orang, dan Proses yang didapatkan dari pemetaan hasil matriks tata peran dan *fishbone diagram* diharapkan

mampu menghasilkan strategi yang dapat digunakan untuk keberlanjutan destinasi sehingga mampu meningkatkan perkembangan masyarakat Desa Bunder, Kec. Pademawu, Kabupaten Pamekasan baik dari sisi pendapatan ataupun kualitas yang dimiliki.

Daftar Pustaka

- Cohen, E. (1974). Who is a Tourist?: A Conceptual Clarification. *The sociological Review*, 1, 527-555.
- Farrell, B., & Twining-Ward, L. (2005). Seven Steps Towards Sustainability: Tourism in the Context of New Knowledge. *Journal of Sustainable Tourism*. 13(2):109–122.
- Kristiani, N. (2018). Entrepreneurial Marketing sebagai Salah Satu Solusi Pengembangan Desa Wisata di Yogyakarta. *Equilibrium Jurnal Bisnis & Akuntansi*. 12 (2): 18-30.
- Hakim, L. (2010). Industri Pariwisata dan Pembangunan Nasional. *Among Makarti*, 3 (5), 70-78.
- Harms, R., Kraus, S., Schulz, A, & Fink, M. (2009). The Conceptualisation of ‘Opportunity’ in Strategic Management Research - A Literature Analysis. *International Journal Of Entrepreneurial Venturing*, 1(1): 5771. DOI: 10.1504/IJEV.2009.023820.
- Kotler, Philip & Kevin Lane Keller., 2016., Marketing Management, 15e Global Edition. Pearson Education Limited, New York.
- Laksono, S. S. M. (2020). Design of Educational Tourism Management (Eduwisata) Model of Kampung Inggris. *International Confrence of Interdisciplinary Science*, 3: 65-78.
- Lickorish, L.J., & Jenkins, C.L. (1997). Introduction to Tourism (1st ed.). Routledge.
- Martin, D. M. (2009). The Entrepreneurial Marketing Mix. *Qualitative Market Research: An International Journal*. 12 (4): 391–403.
- Miles, M.B, & Huberman, A.M, (1984) *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh: Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Morris, M., Schindehutte, M. and LaForge, R. (2002). “The Emergence of Entrepreneurial Marketing: Nature and Meaning”. *Journal Of Marketing Theory And Practice*. 10 (4): 1-19.
- Pendit, S. N. (1980). Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta: Pradnya Paramitha.

- Richards, G. (2011). Cultural Tourism Trends in Europe: A Context for the Development of Cultural Route”S. in: Khovanova-Rubicondo, K. (Ed.) Impact Of European Cultural Routes On Smes’ Innovation And Competitiveness. *Council Of Europe Publishing*, Strasbourg: 21-39.
- Sofia, H., Jannah, M., & Hadyarti, V. (2022). Analisis SWOT sebagai Strategi Peningkatan Pengunjung Eduwisata Garam Madura. *Jurnal Kajian Ilmu Manajemen* 2(2). 171-176.
- Stokes, D. (2000), “Entrepreneurial marketing: a conceptualization from qualitative research”, *Qualitative Market Research*, Vol. 3 No. 1, pp. 47-54.
- <https://dataindonesia.id/pariwisata/detail/pendapatan-devisa-pariwisata-indonesia-melejit-pada-2022>

BIODATA PENULIS



Dr. Doni Sahat Tua Manalu, S.E., M.Si. lahir di Tapan Nauli, Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 03 Oktober 1986 adalah Dosen Tetap pada Program Studi Manajemen Agribisnis Sekolah Vokasi IPB University. Menempuh pendidikan tinggi mulai dari Program Diploma Tiga (D3) Program Keahlian Teknologi Industri Benih, Program Diploma IPB, tahun 2008-2009 terpilih mengikuti *Internship Program* pada perusahaan agribisnis di Ibaraki-Jepang melalui skema kerja sama IPB-Jepang. Setelah kembali ke tanah air pada tahun 2009 melanjutkan studi ke jenjang S-1 Program Studi Agribisnis, FEM IPB University lulus tahun 2011. Pendidikan S-2 dan S-3 diselesaikan pada Fakultas Ekonomi Manajemen Sekolah Pascasarjana, IPB University.



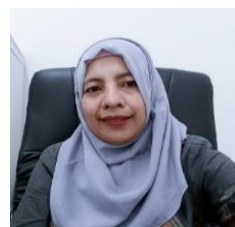
Tazkiyah Ainul Qolbi, M.E. adalah seorang dosen yang saat ini mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis, lahir di Ciamis pada tanggal 20 September 1993. Ia melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Kawali selesai pada tahun 2012. Ia melanjutkan pendidikan S-1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2012-2016, serta melanjutkan pendidikan magister di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta konsentrasi Ekonomi Islam pada tahun 2016-2018.



Tatang Rois, S.E., M.Si. lahir di Kuningan tanggal 3 Oktober 1979. Penulis adalah dosen pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kuningan. Menyelesaikan pendidikan S-1 pada Jurusan Manajemen Universitas Kuningan dan melanjutkan S-2 pada Jurusan Manajemen Universitas Jenderal Soedirman. Saat ini sedang menempuh studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Jenderal Soedirman. Penulis menekuni bidang penelitian ilmu manajemen pemasaran dan manajemen operasional. Bidang pengabdian yang ditekuni oleh penulis terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi.



Syarah Siti Supriyanti, S.P., M.S.E. adalah peneliti di Direktorat Bidang Kebijakan Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Pengembangan Regional-BRIN, Jakarta, Indonesia. Penelitian yang dilakukan berfokus pada ilmu ekonomi, *regional economic development*, dan *community empowerment*. Beberapa karya yang telah dipublikasikan di antaranya adalah “Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Volatilitas Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia”; “Kajian Strategi Pembangunan Hutan Desa”; “Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Potensi Daerah”, dll. Syarah Siti Supriyanti, S.P., M.S.E., mendapatkan gelar *Magister Sains of Economic* dari Universitas Indonesia.



Dr. Binti Nur Asiyah, S.Pd.I., M.Si. Dosen tetap Program Studi Ekonomi Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur, lahir di Tulungagung tanggal 11 Agustus 1980, menempuh pendidikan dasar dan menengah di Tulungagung pada MI Al Ghozali, MTS Negeri Aryojeding dan SMUN 1 Ngunut. Jenjang S-1 Program Matematika STAIN Tulungagung, S-2 pada Program Magister Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Indonesia Jakarta, dan Program Doktor Ekonomi Islam UINSA Surabaya.

Buku yang pernah ditulis: Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Pendekatan Praktis Pengelolaan Pembiayaan Bank Syariah.



Dr. Arif Rahman Hakim, M.S.E. menamatkan pendidikan S-1 pada jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Sebelas Maret (2007), kemudian menyelesaikan studi jenjang S-2 (2010) dan S-3 (2022) pada Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI). Beberapa publikasi dapat dilihat dan diunduh pada tautan researchgate, Google Scholar, dan academia.



Prof. Dr. Dra Sri Subanti, M.Si. adalah dosen di Prodi Statistika dan Program Magister Pendidikan Matematika di Universitas Sebelas Maret. Beliau menyelesaikan studi S-1 bidang Matematika di Universitas Diponegoro (1983), S-2 bidang Matematika dengan spesialisasi Statistika di Universitas Gadjah Mada (2001), dan S-3 bidang Ilmu Ekonomi di Universitas Diponegoro (2011). Pada tahun 2022 memperoleh SK Guru Besar di Bidang Ilmu Statistika Ekonomi.



Dr. Etty Puji Lestari, S.E., M.Si. adalah dosen Prodi Ekonomi Pembangunan FE Universitas Terbuka. Beliau menamatkan pendidikan S-1 Ekonomi Pembangunan di Universitas Islam Indonesia (1997), S-2 Ilmu Ekonomi di Universitas Gadjah Mada (2002), dan S-3 Ilmu Ekonomi di Universitas Diponegoro (2011). Beliau saat ini diamanahi sebagai Kepala Pusat Penelitian Keilmuan LPPM UT, setelah sebelumnya Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan FE UT. Beberapa paper telah dipublikasikan pada prosiding konferensi dan jurnal nasional dan internasional.



Dr. Inaki Maulida Hakim, S.T., M.T. adalah dosen Departemen Teknik Industri Universitas Indonesia. Beliau menamatkan pendidikan S-1 pada jurusan Teknik Industri di Universitas Sebelas Maret (2008), kemudian menyelesaikan studi jenjang S-2 Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (2011) dan sedang menempuh S-3 Teknik Industri di Institut Teknologi Surabaya. Beberapa paper telah dipublikasikan pada prosiding konferensi dan jurnal nasional dan internasional.



Junaidi, S.E., M.Ak., Ph.D. mendapatkan gelar akademik Sarjana Ekonomi (SE) jurusan Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo (sekarang Universitas Muhammadiyah Palopo) dan gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) serta profesi Akuntan (Ak.) di Universitas Islam Indonesia (UII) dengan konsentrasi ilmu Akuntansi Syariah serta menyelesaikan S-3 (PhD) pada departemen administrasi bisnis National Dong Hwa University (Taiwan). Penulis juga telah melakukan penelitian dengan menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) dan *software* AMOS serta berhasil dimuat pada jurnal internasional bereputasi.



Dr. E. Ahmad Soleh, S.E., M.Si. merupakan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu sejak Tahun 2012 hingga saat ini. Lahir di Sidodadi, 1 Desember 1981. Gelar Sarjana Ekonomi diperoleh di Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu tahun 2004. Gelar Magister Perencanaan Pembangunan diperoleh di Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu tahun 2012. Gelar Doktor Ekonomi diperoleh di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu tahun 2020. Saat ini mengemban amanah sebagai Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu. Wakil Ketua Dewan Pengurus

Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia Komisariat Universitas Dehasen Bengkulu. Sekretaris Inkubator Bisnis Universitas Dehasen Bengkulu (IBD). Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Bengkulu. Pembina Sekolah Manajemen BUMDes (SMB) Bengkulu. Pada bidang Kemahasiswaan sebagai Pembina Teknis Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kerohanian Islam Universitas Dehasen Bengkulu. Aktif dalam forum pertemuan ilmiah tingkat nasional dan internasional baik sebagai narasumber maupun pemakalah.



Elva Dona, S.E., M.Si. Penulis sudah tekuni bidang ekonomi sejak 1997 dengan mengikuti jenjang strata satu di Prodi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Bung Hatta dan menamatkan pada tahun 2001. Penulis melanjutkan ke Magister Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang pada tahun 2010 dan selesai pada 2012. Penulis memiliki kepakaran dalam perencanaan ekonomi dan isu ekonomi makro, dengan hal tersebut penulis aktif meneliti dan

menerbitkan karya tulis seputar ekonomi.



Retno Febriyastuti Widyawati, S.E., M.Sc. lahir di Blora, 23 Februari 1991. Pada tahun 2009 menyelesaikan studi S-1 di bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Diponegoro. Pada tahun 2016 meraih gelar Magister Sains dari Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Saat ini, bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Universitas

Terbuka menjadi Tutor Tutorial *Online* pada berbagai mata kuliah, menjadi korektor THE, korektor TMK, penulis THE, dan penulis THE.



Dr. Made Ika Prastyadewi, S.E., M.E. adalah Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati. Lahir di Denpasar, 22 April 1988. Menyelesaikan Pendidikan S-1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, S-2 pada Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dan S-3 pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Aktif sebagai dosen dan peneliti yang fokus pada bidang ekonomi pembangunan khususnya pada ekonomi sumber daya alam dan kesetaraan gender.



Dr. Putu Yusi Pramandari, S.E., M.E. adalah Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati. Lahir di Denpasar, 16 April 1988. Menyelesaikan Pendidikan S-1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, S-2 pada Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dan S-3 pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Aktif sebagai dosen dan peneliti yang fokus pada bidang ekonomi pembangunan khususnya pada ketimpangan dan ketenagakerjaan.



Prasetio Ariwibowo, S.M.B., M.M., Ph.D. Penulis lahir di Riau–Pekanbaru, Saat ini penulis bekerja sebagai tenaga pengajar dengan jabatan akademik Asisten Ahli di Universitas Indraprasta PGRI, Universitas Terbuka dan konsultan ekonomi dan manajemen (bidang Pendidikan dan bisnis/usaha). Penulis memiliki pengalaman bekerja sejak tahun 2009-2010 di Salah satu perusahaan Telekomunikasi ternama di Indonesia dan pada tahun 2010-2013, bekerja di berbagai Perbankan nasional dan swasta nasional di Indonesia dalam berbagai jabatan *Bottom* hingga *Middle Management* dan berpengalaman bekerja

sebagai *Marketing & Production Manager Assistant* di Perusahaan Kontraktor dan perusahaan manufaktur (aluminium) multinasional di Indonesia pada tahun 2013-2015. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Manajemen Bisnis Universitas Telekomunikasi (U-Tel. Bandung) di tahun 2009 dan kemudian menyelesaikan pendidikan Magister dengan gelar Magister Manajemen (MM) di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang pada tahun 2014. Di tahun 2023, Penulis telah menyelesaikan Pendidikan jenjang S-3 (Ph.D.) di bidang ilmu Ekonomi (*Philosophy Business Administration*) di Asia University Malaysia.



Ifah Masrifah, S.E., M.M. saat ini saya sebagai dosen tetap Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Panca Sakti Bekasi. Mata kuliah yang diampu yaitu manajemen keuangan. Penulis juga pernah bekerja sebagai Senior auditor dan *accounting service* di Kantor Akuntan Publik.



Fauzie Senoaji, S.E., M.El., CHRA. lahir di Surabaya. Gelar sarjana bidang Manajemen diperolehnya di Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2007. Jenjang kariernya dimulai di berbagai perusahaan perbankan dan manufaktur sebelum akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya. Penulis juga aktif sebagai pengajar bagi mahasiswa BIPA (Bahasa Indonesia Penutur Asing) dan Bahasa Asing (Inggris, Belanda, dan Jerman). Gelar *Master Sains of Economic Islam* (MSEI) diperolehnya di Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2017. Setelah menyelesaikan studinya, Penulis menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah (UMSurabaya) Sejak tahun 2019 sampai sekarang. Penulis menjadi dosen di Jurusan Manajemen. Beberapa buku yang pernah ditulis yaitu berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkelanjutan: di Lengkapi dengan Analisis SWOT, Manajemen Kompensasi, Akuntansi Perbankan Syariah, Keuangan Syariah (Konsep, Prinsip dan Implementasi), Buku Pedoman

Pelatihan Pendamping PPH (Proses Produk Halal) Kegiatan penelitian yang pernah dilakukan antara lain tentang CSR, SDM, Pemasaran, Keuangan Syariah dan Perbankan.



Dr. Udin Saripudin, S.H.I., M.A. lahir di Bandung pada tanggal 6 April 1982. Lahir dan dibesarkan oleh keluarga petani yang kental dengan budaya agraris membuatnya *concern* terhadap masalah-masalah desa, kemiskinan, dan pertanian. Selepas menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Ibum dan Majalaya kemudian melanjutkan studi S-1 pada Prodi Muamalah STAI Al-Jawami Bandung yang diselesaikan pada tahun 2005. Tahun 2008 mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi S-2 pada Prodi Agama dan Lintas Budaya dengan minat/konsentrasi Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta melalui beasiswa dari Kemenag RI dan selesai pada tahun 2010. Pada tahun 2014 melanjutkan studi S-3 pada Prodi Pengkajian Islam Konsentrasi Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan beasiswa penyelesaian studi dari Kemenag RI serta beasiswa disertasi dari LPDP beliau dapat menyelesaikan studi doktoralnya pada tahun 2017.



Dr. Heffi Christya Rahayu, S.E., M.Si. menyelesaikan Pendidikan doktor ekonomi Pembangunan di Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2020. Saat ini, Penulis merupakan dosen Universitas Pasir Pangaraian. Penulis juga aktif dalam Lembaga Penelitian bernama Mindset Institute. Sepanjang karier sebagai dosen, Penulis telah menerbitkan dalam bentuk buku dengan judul Studi Kelayakan Bisnis Perumda Rokan Hulu Jaya dan Monograf Paradoks Kemiskinan dan Peta Potensi Peluang dan Investasi Kabupaten Rokan Hulu 2022. Penulis juga melakukan riset seperti: Studi Pemetaan Sosial Ekonomi Masyarakat dengan Pendekatan Sistem Informasi Geografis PT. SPR Langgak, Pemetaan Data Makro Ekonomi KUMKM,

Peta Kajian Potensi Investasi Kabupaten Rokan Hulu, Profil Penyusunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Penyusunan *Database* Perekonomian dan Kajian Penyusunan Dokumen Rencana Induk Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu.



Ir. Tri Kurniawati Retnaningsih, M.Si. adalah dosen pada Program Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka, Penulis menamatkan S-1 dari IPB dan S-2 bidang ketahanan nasional dari Universitas Indonesia. Keahlian penelitiannya adalah di bidang ekonomi sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat. Penulis juga aktif dalam pengabdian masyarakat.



Dr. Ahmad Albar Tanjung, M.Si. lahir di Medan pada tahun 1981. Menamatkan Pendidikan S-1 di Universitas Negeri Medan tahun 2005 dan meneruskan ke Program Master Ilmu Ekonomi di Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan dan mendapatkan gelar M.Si. pada tahun 2009. Melanjutkan Studi ke Program Doktor Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara dan mendapatkan gelar Dr. pada tahun 2017. Kajian dalam bidang Metodologi Penelitian, Ekonomi Makro, Ekonomi Industri, Ekonomi Moneter dan Ekonomi Sektor Publik serta Ekonometrika. Buku yang telah ditulis dan diterbitkan adalah Ekonomi Industri dan Metodologi Penelitian.



Dewi Aprida, S.E., M.Si. lahir pada tanggal 9 April 1981 di Palembang, Sumatera Selatan. Memulai studi pada pendidikan tinggi S-1 di bidang Ekonomi Pembangunan pada tahun 1999 dan melanjutkan studi S-2 pada Magister Ilmu Ekonomi di mana baik pendidikan S-1 dan S-2 di tempuh pada Universitas Sriwijaya. Setelah menyelesaikan studi S-2, sejak tahun 2010 telah menjadi dosen tetap serta Tutor TTM Universitas Terbuka, selanjutnya

tahun 2020 menjadi Tutor Tutor Universitas Terbuka dan saat ini sebagai dosen tetap pada Program Studi Diploma 3 Akuntansi di Akademi Akuntansi dan Manajemen Pembangunan (AAMP) Bengkulu.



Dr. Ida Ariyani, S.S., M.M. lahir di Bogor, 28 Januari 1970. Lulus Sekolah Menengah Analis (SMAK) Ditkesad Jakarta tahun 1988, kemudian menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (D3) di ABA “Indonesia” LPI jurusan Bahasa Inggris pada tahun 1995 dan melanjutkan Program S-1 Bahasa Inggris di STIBA “Indonesia” LPI sampai memperoleh gelar Sarjana Sastra tahun 2007. Tahun 2009 memperoleh gelar M.M. dari Program Pascasarjana (S2) STIE Tri Dharma Widya Jakarta.

Memperoleh gelar Doktor Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia dari Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (FEUNHAS) Makassar pada Oktober 2016. Sejak tahun 2007 sampai sekarang, penulis menjadi Dosen Tetap di Program Studi S-1 Manajemen dan Akuntansi, dan Program Studi S-2 Magister Manajemen STIE Tri Dharma Widya Jakarta.



Susianti, S.E., M.Sc. lahir di Tanjung Pandan, 19 September 1974. Pada tahun 2000 menyelesaikan studi S-1 di bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di STIE Kerja sama Yogyakarta. Pada tahun 2015 meraih gelar Magister Sains dari Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Saat ini, bekerja sebagai Dosen Tetap di Program Sarjana Terapan Prodi Pengelolaan Perhotelan Politeknik API Yogyakarta. Pada tahun 2015–2021 sebagai Dosen

Luar Biasa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dosen Luar biasa UPN Veteran Yogyakarta sejak tahun 2017, kemudian sejak tahun 2017 juga sebagai dosen Luar Biasa di Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.



Dudi Septiadi, S.Pd., M.Si. Penulis lahir di Indramayu, Jawa Barat pada tanggal 13 September 1991. Penulis telah menyelesaikan pendidikan sarjana di Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Kota Bandung. Kemudian penulis menyelesaikan Program Pascasarjana (Strata-2) di Magister Ilmu Ekonomi

Pertanian di Institut Pertanian Bogor (IPB University). Sejak 2019 hingga saat ini, penulis bekerja sebagai Dosen Tetap pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram serta penulis sudah menerbitkan beberapa buku dalam 5 tahun terakhir. Buku Ajar yang pernah diterbitkan, di antaranya adalah 1) Perbankan dan Perkreditan; 2) Ekonomi Makro



Moh. Zaki Kurniawan, S.E., M.M., CFRM.

Adalah dosen tetap pada Program Studi S-1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Pendidikan sarjana diraih pada tahun 2010 di Jurusan Manajemen Universitas Brawijaya Malang dengan konsentrasi manajemen keuangan. Gelar Magister Manajemen diraih tahun 2013 di Program Studi Magister Manajemen Universitas Brawijaya Malang dengan

kajian penelitian manajemen keuangan. Pada tahun 2022 penulis berhasil memperoleh sertifikasi *financial & risk management* internasional bergelar *Certified Finance Risk Management (CFRM)* dari *American Academy of Financial Management (AAFM) chapter* Indonesia. Penulis memiliki ID sinta dengan nomor 6100918. Penulis memiliki NIDN sejak awal tahun 2014 hingga saat ini dan aktif menulis serta menjadi narasumber beberapa pelatihan yang dilaksanakan di lingkungan internal dan juga dinas terkait. Penulis menekuni bidang keuangan sejak 2010.



Miftahul Jannah, S.E., M.Sc., CMA. adalah dosen tetap pada Program Studi S-1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Pendidikan sarjana diraih pada tahun 2014 di Jurusan Manajemen Universitas Trunojoyo Madura dengan konsentrasi manajemen Pemasaran. Gelar Magister Manajemen diraih tahun 2016 di Program Studi Magister Sains Manajemen Universitas Gadjah Mada dengan kajian penelitian manajemen pemasaran. Pada tahun 2022 penulis berhasil memperoleh sertifikasi *marketing* internasional bergelar *Certified Marketing Analys (CMA)* dari *American Academy of Financial Management (AAFM) chapter* Indonesia. Penulis memiliki ID sinta dengan nomor 6760602.

Buku ***Kemiskinan dan Pemberdayaan: Perspektif, Trend dan Kebijakan*** ini tersusun atas tiga tema utama, dengan pokok pembahasan pada Tema 1 meliputi pemberdayaan masyarakat agribisnis dalam rangka pengentasan kemiskinan, ekonomi sirkular sebagai solusi pemberdayaan dan peningkatan perekonomian masyarakat, pemberdayaan masyarakat melalui potensi desa, perencanaan kolaboratif antarsektor melalui pemberdayaan masyarakat desa, serta BUMDesa dan pengentasan kemiskinan desa. Tema 2 meliputi *amenities* dan aspek ekonomi (pengaruhnya pada migrasi), kontribusi pertumbuhan bank dan jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi serta tingkat kemiskinan di Indonesia, *inclusive growth* (diagnosis penurunan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi), individualitas perempuan terhadap akses keuangan, serta remitansi dan efeknya terhadap pengurangan kemiskinan. Terakhir, Tema 3 meliputi potret ketimpangan rumah tangga, tata kelola pertumbuhan ekonomi (otonomi) daerah melalui sektor UMKM, manajemen keuangan UMKM dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, fenomena *ghost kitchen* di era pandemi sebagai upaya pemberdayaan UMKM kuliner, peran BUMDes dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, implementasi kebijakan kemiskinan struktural dan ketidakadilan gender dalam feminisasi kemiskinan, kebijakan moneter dan fiskal untuk mengurangi kemiskinan, strategi implementasi kebijakan pembangunan kawasan kaki gunung berbasis pemberdayaan masyarakat, peran sektor pertanian sebagai lokomotif pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19, serta strategi desa wisata eduwisata garam dalam perkembangan ekonomi masyarakat.

Semoga buku ini bermanfaat bagi segenap pembaca yang ingin memperluas wawasan mengenai topik kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Selamat membaca!

